



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

2025



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG B LANTAI 2 KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN
TELEPON/FAX (021) 7800220, 7804856 PESAWAT: 3204, 3206, 3219, 3112
WEBSITE : <https://itjen.pertanian.go.id> e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 06 Februari 2026
Inspektur III



Vivi Susilawati, SE, M.Ak
NIP 197102041999032001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya pada subsektor perkebunan yang diamanatkan selama periode tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Perkebunan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Good Governance*) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun perdana dari periode Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029 yang digunakan sebagai salah satu media untuk menyampaikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan selama periode pelaporan yang disusun secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini juga sekaligus menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan pada periode selanjutnya dan upaya memastikan terpenuhinya sasaran kinerja secara optimal sesuai dengan arah dan target pembangunan nasional yang diamanatkan.

Selama penyelenggaraan tata kelola manajemen organisasinya, Direktorat Jenderal Perkebunan secara berkelanjutan telah melakukan langkah-langkah penguatan integritas dan akuntabilitas yang diwujudkan melalui pelaksanaan evaluasi, baik secara internal maupun eksternal. Kegiatan ini didukung oleh peningkatan komitmen pimpinan unit kerja pada seluruh tingkatan, penguatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal guna meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh unsur yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam penyediaan informasi kinerja serta mendukung proses evaluasi, pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan secara menyeluruh.

Jakarta, Januari 2026

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan



Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Pertanian, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas perkebunan, hilirisasi hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perkebunan Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, yang memuat sasaran, indikator kinerja, target, serta alokasi anggaran.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, Ditjen Perkebunan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. LAKIN Tahun 2025 merupakan laporan kinerja perdana pada periode Renstra 2025–2029 dan disusun untuk menyajikan capaian kinerja Ditjen Perkebunan secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada periode selanjutnya.

Pada Tahun 2025, Ditjen Perkebunan mengampu dua program utama Kementerian Pertanian, yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mendukung visi “Perkebunan Bernilai Tambah, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”, Ditjen Perkebunan menetapkan sasaran program yang sejalan dengan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya terkait swasembada pangan dan energi (PN 2) serta hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam (PN 5). Sasaran tersebut mencakup terpenuhinya produksi komoditas perkebunan, tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bioenergi, meningkatnya indeks harga yang diterima pekebun, terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan, meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan, meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang

telah menerapkan hilirisasi, serta terwujudnya tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Capaian kinerja Tahun 2025 diukur melalui indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Perkebunan. Secara umum, hasil pengukuran menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada sasaran terpenuhinya produksi komoditas perkebunan strategis (sagu, kopi, tebu, tanaman palma lainnya), tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi, meningkatnya indeks harga yang diterima pekebun, meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi, serta terwujudnya tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, kinerja pada indikator produksi (kelapa sawit, kelapa, lada, pala, cengkeh, vanili, karet, kakao, teh, jambu mete, tanaman semusim dan tahunan lainnya), indeks mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan, serta volume ekspor komoditas perkebunan masih harus ditingkatkan lagi capaiannya pada periode berikutnya.

Dalam mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha perkebunan rakyat, Ditjen Perkebunan pada Tahun 2025 telah menyalurkan bantuan pemerintah berupa benih unggul dan sarana produksi perkebunan untuk berbagai komoditas strategis, dengan fokus pada peremajaan tanaman tua, rusak, atau tidak produktif, serta perluasan areal tanam di wilayah potensial. Kebijakan ini diarahkan untuk menjawab isu strategis rendahnya produksi dan produktivitas, keterbatasan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP), serta keterbatasan akses petani terhadap teknologi, pembiayaan, dan pendampingan teknis.

Dari sisi pengelolaan anggaran, selama tahun 2025 Ditjen Perkebunan menghadapi beragam tantangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan pagu anggaran Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. Pelaksanaan kegiatan menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan waktu akibat masuknya anggaran tambahan pada triwulan III tahun 2025 dan sisa waktu anggaran yang sempit, sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan serta kesesuaian antara capaian fisik dan penyerapan anggaran. Proses pengadaan yang terlambat, jumlah penyedia yang terbatas, menyebabkan sebagian penyaluran fisik tertunda hingga tahun berikutnya. Dari sisi tata kelola, perubahan aturan, koordinasi yang belum optimal antara pusat dan daerah, serta pergantian pejabat turut memperlambat penetapan

pengelola kegiatan dan pelaksanaan di lapangan. Di tingkat pelaksana, minat petani yang menurun, keterbatasan SDM daerah, rendahnya kesiapan calon penerima, serta keterbatasan benih dan proses sertifikasi menghambat realisasi kegiatan. Selain itu, bencana alam di beberapa wilayah juga ikut menghambat penyerahan dan penyaluran bantuan.

Selain capaian kinerja utama, Ditjen Perkebunan juga mencatat berbagai kinerja lainnya sepanjang Tahun 2025, termasuk inisiatif penguatan hilirisasi perkebunan, pengembangan kawasan perkebunan berkelanjutan, penguatan data dan informasi perkebunan, serta peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola birokrasi. Upaya reformasi birokrasi terus didorong melalui penguatan integritas organisasi, penerapan manajemen risiko, penjaminan mutu pengendalian, serta penguatan sistem pengendalian internal pada seluruh satuan kerja.

Ke depan, Ditjen Perkebunan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas melalui penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi, khususnya terhadap indikator kinerja yang belum optimal. Kendala dan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2025, baik yang bersifat teknis, kelembagaan, maupun eksternal, akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Penguatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya akan terus diintensifkan untuk mewujudkan subsektor perkebunan yang berdaya saing, inklusif, berkelanjutan, dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia.....	12
D. Isu Strategis	15
E. Sistematika Laporan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis.....	22
B. Rencana Kerja dan Anggaran	37
C. Perjanjian Kinerja	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	60
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	60
B. Akuntabilitas Kinerja Anggaran	300
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	322
D. Kinerja Lainnya	323
BAB IV PENUTUP	332
LAMPIRAN.....	338

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Pegawai Ditjen Perkebunan per 31 Desember 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Tabel 2. Sebaran Pegawai Ditjen Perkebunan per 31 Desember 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Tabel 3. Matriks Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 - 2029	32
Tabel 4. Sasaran Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan	38
Tabel 5. Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025	40
Tabel 6. Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 Berdasarkan Rincian Output	43
Tabel 7. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	53
Tabel 8. Perubahan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	57
Tabel 9. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja	61
Tabel 10. Capaian Sasaran Terwujudnya Produksi Komoditas Perkebunan	64
Tabel 11. Capaian Produksi Kelapa Sawit	66
Tabel 12. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit (CPO)	67
Tabel 13. Realisasi PSR Tahun 2017-2025	68
Tabel 14. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	70
Tabel 15. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Kelapa Sawit di Pasar Domestik Tahun 2020 - 2025	74
Tabel 16. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Kelapa Sawit (CPO dan KPO)	75
Tabel 17. Capaian Produksi Kelapa	80
Tabel 18. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa	81
Tabel 19. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	83
Tabel 20. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Kelapa di Pasar Domestik Tahun 2020 - 2025	86
Tabel 21. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Kelapa	87

Tabel 22. Capaian Produksi Sagu.....	91
Tabel 23. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Sagu	92
Tabel 24. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Sagu Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	94
Tabel 25. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Sagu di Pasar Domestik Tahun 2020 - 2025.....	96
Tabel 26. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Sagu	98
Tabel 27. Capaian Produksi Lada	102
Tabel 28. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Lada	103
Tabel 29. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Lada Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	104
Tabel 30. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Lada di Pasar Domestik Tahun 2020 - 2025.....	108
Tabel 31. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Lada	109
Tabel 32. Capaian Produksi Pala	114
Tabel 33. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Pala	115
Tabel 34. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Pala Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	116
Tabel 35. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Pala di Pasar Domestik Tahun 2020-2025.....	119
Tabel 36. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Pala	120
Tabel 37. Capaian Produksi Cengkeh.....	127
Tabel 38. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Cengkeh	128
Tabel 39. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Cengkeh Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	129
Tabel 40. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Cengkeh di Pasar Domestik Tahun 2020-2025.....	132
Tabel 41. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Cengkeh	133
Tabel 42. Capaian Produksi Vanili	138
Tabel 43. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Vanili.....	139
Tabel 44. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Vanili Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	141
Tabel 45. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Vanili di Pasar Domestik Tahun 2020-2025.....	143
Tabel 46. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Vanili	144

Tabel 47. Capaian Produksi Kopi	151
Tabel 48. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kopi	152
Tabel 49. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kopi Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	153
Tabel 50. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Kopi di Pasar Domestik Tahun 2020-2025	155
Tabel 51. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Kopi	157
Tabel 52. Capaian Produksi Tebu	164
Tabel 53. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Rendemen, Produksi, dan Produktivitas Tebu, dan Produksi, dan Produktivitas GKP	164
Tabel 54. Perkembangan Harga Rata-rata Gula Pasir Tebu di Pasar Domestik Tahun 2020-2025	166
Tabel 55. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor – Impor Tetes Tebu	168
Tabel 56. Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tebu, Produksi, dan Produktivitas GKP Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	169
Tabel 57. Capaian Produksi Karet.....	179
Tabel 58. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet	180
Tabel 59. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	181
Tabel 60. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Karet di Pasar Domestik Tahun 2020-2025	183
Tabel 61. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Karet.....	184
Tabel 62. Capaian Produksi Kakao	192
Tabel 63. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao	193
Tabel 64. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	194
Tabel 65. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Kakao di Pasar Domestik Tahun 2020-2025	196
Tabel 66. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Kakao	198
Tabel 67. Capaian Produksi Teh	205
Tabel 68. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Teh	206
Tabel 69. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Teh Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	207
Tabel 70. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Teh di Pasar Domestik Tahun 2020-2025	209

Tabel 71. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Teh	210
Tabel 72. Capaian Produksi Jambu Mete.....	217
Tabel 73. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Jambu Mete	218
Tabel 74. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Jambu Mete Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	219
Tabel 75. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Jambu Mete di Pasar Domestik Tahun 2020-2025	221
Tabel 76. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Jambu Mete.....	222
Tabel 77. Capaian Produksi Tanaman Palma Lainnya.....	230
Tabel 78. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Palma Lainnya	231
Tabel 79. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Aren di Pasar Domestik Tahun 2020-2025.....	232
Tabel 80. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Pinang di Pasar Domestik Tahun 2020-2025.....	233
Tabel 81. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Pinang	234
Tabel 82. Capaian Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	240
Tabel 83. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kapas	241
Tabel 84. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Tembakau.....	241
Tabel 85. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Nilam	242
Tabel 86. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sereh Wangi	242
Tabel 87. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kayu Manis.....	242
Tabel 88. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kapas Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*).....	243
Tabel 89. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tembakau Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*).....	245
Tabel 90. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Nilam Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*).....	246
Tabel 91. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sereh Wangi Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*).....	248
Tabel 92. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kayu Manis Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)	249
Tabel 93. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Tembakau di Pasar Domestik Tahun 2020-2025.....	252

Tabel 94. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Nilam di Pasar Domestik Tahun 2020-2025.....	252
Tabel 95. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Sereh Wangi di Pasar Domestik Tahun 2020-2025	252
Tabel 96. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Kayu Manis di Pasar Domestik Tahun 2020-2025.....	253
Tabel 97. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Kapas	254
Tabel 98. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Tembakau	254
Tabel 99. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Nilam	255
Tabel 100. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Kayu Manis.....	255
Tabel 101. Capaian Sasaran Tersedianya Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi.....	262
Tabel 102. Capaian Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi	263
Tabel 103. Capaian Sasaran Meningkatnya Indeks Harga Yang Diterima Pekebun	266
Tabel 104. Capaian Indeks Harga yang Diterima Pekebun	268
Tabel 105. Capaian Sasaran Terjaminnya Mutu Dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan	272
Tabel 106. Capaian Indeks Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan	273
Tabel 107. Capaian Sasaran Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Perkebunan	277
Tabel 108. Capaian Volume Ekspor Komoditas Perkebunan	278
Tabel 109. Volume Ekspor Komoditas Perkebunan Tahun 2025	279
Tabel 110. Capaian Sasaran Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Perkebunan Unggulan yang Telah Menerapkan Hilirisasi	283
Tabel 111. Capaian Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan	285
Tabel 112. Capaian Sasaran Meningkatnya Indeks Harga Yang Diterima Pekebun	291
Tabel 113. Capaian Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Perkebunan.....	293
Tabel 114. Perhitungan Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Perkebunan	294
Tabel 115. Rekapitulasi RPATA Ditjen Perkebunan	307
Tabel 116. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program.....	309
Tabel 117. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan	310

Tabel 118. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana.....	311
Tabel 119. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	312
Tabel 120. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan.....	314
Tabel 121. Nilai Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK	322
Tabel 122. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 - 2025.....	326

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Kerja Bidang Perbenihan UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan	11
Gambar 2. Wilayah Kerja Bidang Pelindungan UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan	11
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan Berdasarkan Permentan No. 02 Tahun 2025	12
Gambar 4. Visi dan Asta Cita dalam RPJMN	23
Gambar 5. Kerangka Strategis Ditjen Perkebunan Tahun 2025-2029	26
Gambar 6. Realisasi Anggaran Ditjen Perkebunan Tahun 2021-2025	306

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan	338
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025.....	342
Lampiran 3. Surat Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025.....	355
Lampiran 4. Surat Permintaan Data Realisasi Biodiesel Tahun 2025.....	358
Lampiran 5. Surat Penyampaian Data Produksi dan Realisasi Sementara Penyaluran Biodiesel Tahun 2025 dari Direktur Bioenergi Kementerian ESDM	359
Lampiran 6. Realisasi Berdasarkan Rincian Output Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025.....	361
Lampiran 7. Data Volume Ekspor Komoditas Perkebunan sampai dengan November Tahun 2025.....	369
Lampiran 8. Monitoring Efisiensi SBK	370
Lampiran 9. Monitoring Penggunaan SBK	380
Lampiran 10. Indeks Mutu Dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan	385
Lampiran 11. Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan.....	386
Lampiran 12. Indeks harga yang diterima Pekebun	387
Lampiran 13. Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perkebunan	388
Lampiran 14. Matrik Kinerja Dan Pendanaan Ditjen. Perkebunan 2025-2029	398

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perkebunan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas perkebunan, dan hilirisasi hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan. Melalui Peraturan Menteri Pertanian ini, subsektor perkebunan diharapkan memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian nasional, baik sebagai penggerak perekonomian masyarakat melalui peningkatan produktivitas, efisiensi usaha dan nilai tambah komoditas perkebunan serta penyedia lapangan kerja. Subsektor perkebunan juga berperan penting dalam peningkatan ekspor dan perolehan devisa negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan sampai dengan November 2025, kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap total penerimaan devisa negara. Nilai ekspor kelapa sawit tercatat sebesar USD 25,32 Miliar dengan volume mencapai 32,45 juta ton, yang terdiri atas *Crude Palm Oil (CPO)*, *Kernel Palm Oil (KPO)*, serta produk kelapa sawit selain minyak yang mencakup berbagai produk turunan hasil pengolahan kelapa sawit.

Nilai ekspor komoditas unggulan lainnya seperti kopi, kelapa, kakao, tebu, jambu mete, lada, dan pala pada tahun 2024 tercatat sebesar USD 190,85 juta dengan volume total 3,13 juta ton. Melihat besarnya potensi ekspor komoditas perkebunan tersebut, diperlukan langkah strategis melalui penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas diversifikasi produk olahan, serta memperkuat daya saing produk perkebunan nasional di pasar global. Upaya hilirisasi juga diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta keberlanjutan kontribusi subsektor perkebunan terhadap perekonomian nasional.

Pembangunan perkebunan bertujuan untuk mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan dan energi nasional,

khususnya melalui pengembangan komoditas perkebunan sebagai sumber bahan baku pangan dan industri, serta bioenergi nasional. Seluruh arah pembangunan subsektor perkebunan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 dan RKP tahun 2025, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan diperlukan tata kelola pemerintah yang baik melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LAKIN merupakan salah satu langkah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diukur, dipertanggungjawabkan, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang. Selain sebagai pemenuhan prinsip akuntabilitas kinerja, penyusunan LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didukung oleh pedoman evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kementerian Pertanian telah melaksanakan penataan organisasi dan tata kerja yang sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pertanian. Berdasarkan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang mengatur secara menyeluruh, termasuk susunan struktur organisasi, tugas, dan fungsi unit-unit Eselon I lingkup Kementerian pertanian.

Sebagai salah satu Unit Eselon I dibawah Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas perkebunan, dan hilirisasi hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang perkebunan;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
3. Koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
4. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
5. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
6. Koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi di atas serta untuk mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien, Direktorat Jenderal Perkebunan kemudian melakukan pembentukan unit Eselon II. Pembentukan unit Eselon II ini bertujuan untuk memfokuskan pembagian tugas dan fungsi serta memperkuat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan. Struktur organisasi yang lebih terfokus diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pada tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang semula terdiri dari Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menjadi Direktorat Pelindungan Perkebunan serta Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang perkebunan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
- c. Koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
- f. Koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas Bagian Umum serta Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

2. Direktorat Perbenihan Perkebunan

Direktorat Perbenihan Perkebunan memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada bidang perbenihan perkebunan. Fungsi Direktorat Perbenihan Perkebunan meliputi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perbenihan Perkebunan.

Direktorat Perbenihan Perkebunan terdiri atas Subbagian Tata Usaha serta Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

3. Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma

Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman kelapa sawit dan aneka palma. Fungsi Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma meliputi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman kelapa sawit dan aneka palma;

- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman kelapa sawit dan aneka palma; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma.

Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma terdiri atas Subbagian Tata Usaha serta Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

4. Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan

Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman semusim dan tahunan. Fungsi Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan meliputi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman semusim dan tahunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman semusim dan tahunan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman semusim dan tahunan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman semusim dan tahunan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman semusim dan tahunan; dan

- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan.

Direktorat Tanaman Tanaman Semusim dan Tahunan terdiri atas Subbagian Tata Usaha serta Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

5. Direktorat Pelindungan Perkebunan

Direktorat Pelindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan perkebunan.

Fungsi Direktorat Pelindungan Perkebunan meliputi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
- d. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi pelindungan perkebunan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
- f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pelindungan Perkebunan.

Direktorat Pelindungan Perkebunan terdiri atas Subbagian Tata Usaha serta Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

6. Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan

Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil perkebunan. Fungsi Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan meliputi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran hasil perkebunan, pengembangan usaha perkebunan, dan pembinaan usaha berkelanjutan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran hasil perkebunan, pengembangan usaha perkebunan, dan pembinaan usaha berkelanjutan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran hasil perkebunan, pengembangan usaha perkebunan, dan pembinaan usaha berkelanjutan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran hasil perkebunan, pengembangan usaha perkebunan, dan pembinaan usaha berkelanjutan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran hasil perkebunan, pengembangan usaha perkebunan, dan pembinaan usaha berkelanjutan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.

Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan terdiri atas Subbagian Tata Usaha serta Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Direktorat Jenderal Perkebunan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya juga membentuk Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan telah dilakukan penyesuaian nomenklatur yang sebelumnya terdiri dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan menjadi Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan serta Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan. Unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan meliputi :

1. Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Surabaya;
2. Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Medan;
3. Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon; dan
4. Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak.

Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan penyiapan kebun perbanyakan dan penyediaan benih;
3. Pelaksanaan pengujian mutu dan fasilitasi sertifikasi benih;
4. Pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih;
5. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
6. Pelaksanaan identifikasi dan klon/varietas tanaman perkebunan;
7. Inventarisasi pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
8. Pelaksanaan pengembangan kawasan organik;
9. Pelaksanaan pengelolaan hama terpadu;
10. Pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim;
11. Pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
12. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
13. Pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan;
14. Pelaksanaan eksplorasi, perbanyakan, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati;
15. Pelaksanaan pengujian dan analisa mutu dan residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
16. Pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan;
17. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan;

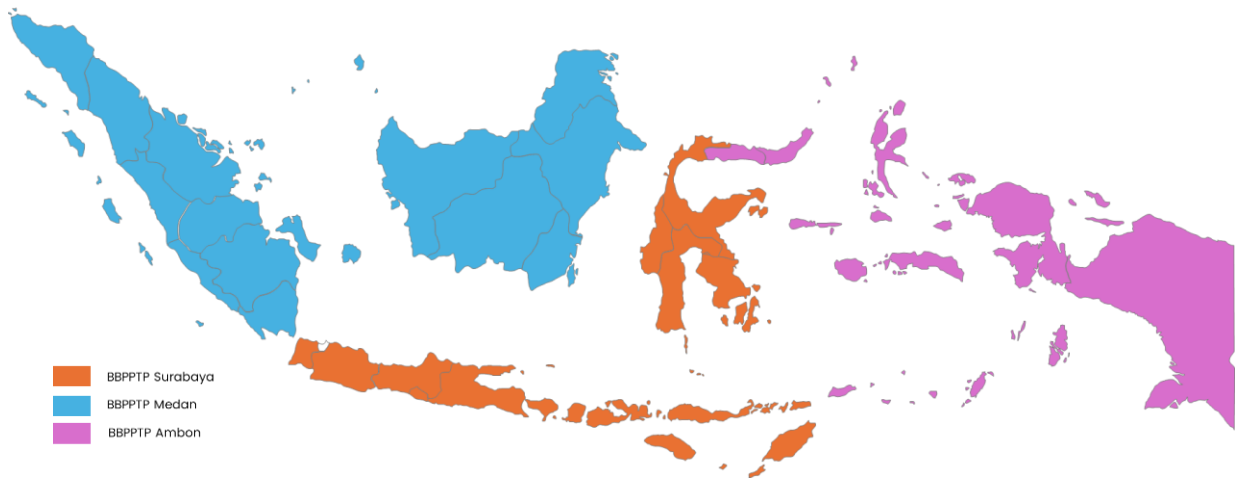
18. Penguatan jejaring kerja sama laboratorium perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;

19. Pelaksanaan pencegahan kebakaran di lahan perkebunan; dan

20. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPPTP.

Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak mempunyai tugas dalam melaksanakan perlindungan tanaman perkebunan serta menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan;
3. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan;
4. Pelaksanaan analisis data dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
5. Pelaksanaan eksplorasi, perbanyakan, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati;
6. Pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
7. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
8. Pelaksanaan pengelolaan hama terpadu;
9. Pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi perlindungan tanaman perkebunan, serta pemberian rekomendasi teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
10. Penguatan jejaring kerja sama laboratorium perlindungan tanaman perkebunan; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTP.

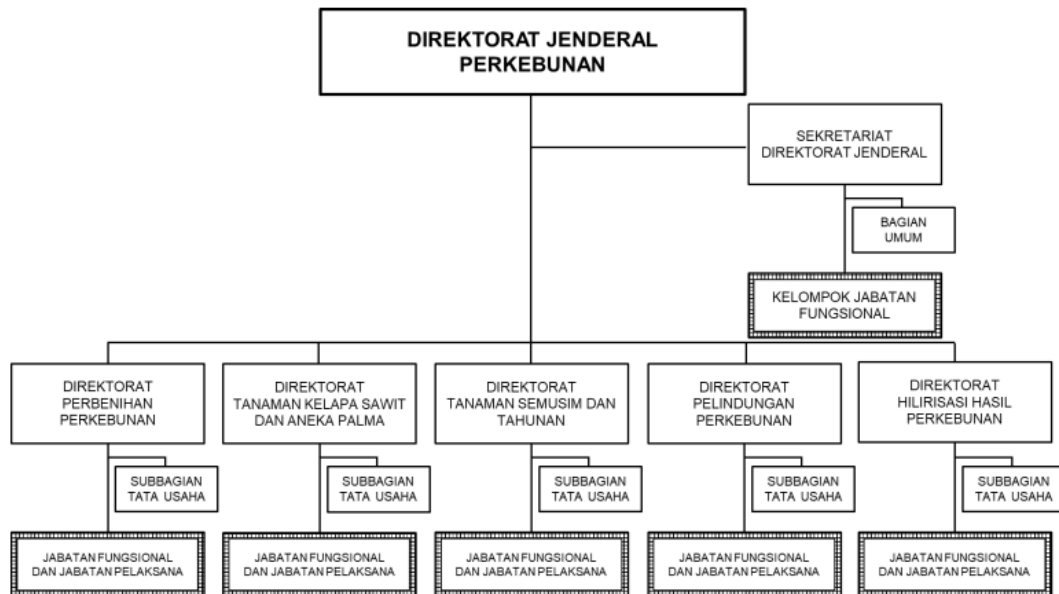


Gambar 1. Wilayah Kerja Bidang Perbenihan UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025



Gambar 2. Wilayah Kerja Bidang Pelindungan UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Struktur Organisasi Ditjen Perkebunan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025



Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan Berdasarkan Permentan No. 02 Tahun 2025

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

C. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan. Keberhasilan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan perkebunan sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang tinggi. SDM yang berintegritas menjamin setiap pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi etika, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, profesionalisme aparatur tercermin dari kemampuan teknis, sikap adaptif terhadap perubahan, serta komitmen dalam memberikan pelayanan yang efektif dan responsif. Sampai dengan 31 Desember 2025, Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki 937 orang ASN yang tersebar baik di pusat maupun daerah dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 765 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 172 orang.

Distribusi pegawai tersebut tersebar di 1 (satu) unit satuan kerja (satker) kantor pusat dan 4 (empat) unit kerja kantor daerah, dengan pembagian sebanyak 474

pegawai di satker pusat yang tersebar dalam 6 (enam) unit kerja Eselon II dan 463 orang pegawai di unit kerja kantor daerah dengan sebaran sebagai berikut.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Ditjen Perkebunan per 31 Desember 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	98	85	183
2.	DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN	26	32	58
3.	DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN TAHUNAN	35	30	65
4.	DIREKTORAT TANAMAN KELAPA SAWIT DAN ANEKA PALMA	30	29	59
5.	DIREKTORAT PELINDUNGAN PERKEBUNAN	21	28	49
6.	DIREKTORAT HILIRISASI HASIL PERKEBUNAN	30	29	59
7.	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN	71	84	155
8.	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	73	67	140
9.	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN AMBON	57	44	101
10.	BALAI PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	42	26	68
JUMLAH		483	454	937

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Komposisi ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 52% atau sebanyak 483 orang, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 48% atau 454 orang. Proporsi pegawai laki-laki terbesar terdapat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, yaitu sebesar 20% atau sebanyak 98 orang dan proporsi perempuan sebesar 19% atau 85 orang. Sementara proporsi laki-laki paling sedikit berada pada Direktorat Pelindungan Perkebunan yaitu 4% atau sebanyak 21 orang dan

proporsi perempuan paling sedikit berada pada Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak dengan 6% atau sebanyak 26 orang pegawai.

Tabel 2. Sebaran Pegawai Ditjen Perkebunan per 31 Desember 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	S3	S2	S1	DIPLOMA	SD-SMA	JUMLAH
1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	0	32	96	20	35	183
2.	DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN	0	24	25	2	7	58
3.	DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN TAHUNAN	1	17	34	5	8	65
4.	DIREKTORAT TANAMAN KELAPA SAWIT DAN ANEKA PALMA	0	14	36	3	6	59
5.	DIREKTORAT PELINDUNGAN PERKEBUNAN	0	12	26	2	9	49
6.	DIREKTORAT HILIRISASI HASIL PERKEBUNAN	2	23	23	5	6	59
7.	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN	0	33	82	10	30	155
8.	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	1	38	62	12	27	140
9.	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN AMBON	1	4	43	15	38	101
10.	BALAI PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	0	2	42	10	14	68
JUMLAH		5	199	469	84	180	937

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1), yakni sebesar 50% atau 469 orang, disusul oleh lulusan Strata 2 (S2) sebesar 21% atau 199 orang. Sementara itu, pegawai dengan kualifikasi Strata 3 (S3) memiliki jumlah paling sedikit, yaitu sebesar 0,53% atau hanya 5 orang. Tingkat pendidikan S3 terdapat pada Direktorat Hilirisasi Hasil

Perkebunan sebanyak 2 orang serta Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan, Direktorat Pelindungan Perkebunan, dan Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon masing-masing sebanyak 1 orang. Selanjutnya, tingkat pendidikan S2 terbanyak terdapat pada Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan yaitu 38 orang dan paling sedikit terdapat pada Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak sebanyak 2 orang. Diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai secara berkesinambungan, melalui pengembangan skema tugas belajar, peningkatan akses pendidikan lanjutan, serta penguatan manajemen talenta. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mendukung pencapaian sasaran strategis instansi secara lebih efektif.

D. Isu Strategis

Subsektor perkebunan merupakan salah satu pilar utama pembangunan pertanian nasional yang berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri, serta kontribusi terhadap devisa negara. Namun demikian, kinerja subsektor perkebunan nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan sistemik yang memerlukan penanganan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Salah satu tantangan tersebut antara lain struktur produksi perkebunan nasional yang hingga saat ini didominasi oleh perkebunan rakyat dengan jumlah penguasaan lahan mencapai 18,68 juta Ha, namun kondisi ini tidak diiringi dengan produktivitas yang masih belum optimal. Berdasarkan data statistik angka sementara Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 tingkat produktivitas tanaman perkebunan saat ini tergolong rendah, diantaranya produktivitas kakao hanya 0,71 ton/ha dari potensi protas 2,5 ton/ha; kopi 0,85 ton/ha dari 1,5 ton/ha, kelapa sawit 3,61 ton/ha dari potensi 6 ton/ha dan karet 0,95 ton/ha dari 1,6 ton/ha. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain masih terbatasnya penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) pada kegiatan budidaya serta *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada pengolahan hasil. Selain itu, penggunaan benih tidak bersertifikat, kondisi tanaman yang telah melewati umur produktif dan/atau rusak seluas 1,67 juta Ha atau 8,94% dari total luas perkebunan rakyat nasional, serta keterbatasan kapasitas teknis petani turut memperlambat peningkatan produktivitas dan mutu hasil perkebunan.

Dalam rangka mendukung kegiatan peremajaan dan/atau rehabilitasi tanaman perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan telah menyalurkan bantuan sarana produksi perkebunan, khususnya bantuan benih unggul dan dukungan teknis lainnya kepada petani. Pada tahun 2025, Ditjen Perkebunan menyalurkan bantuan pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 717.705.294.326 untuk berbagai komoditas perkebunan strategis, seperti tebu, kakao, kopi, kelapa, sagu, lada, pala, dan jambu mete. Penyaluran benih dilakukan dengan sasaran utama peremajaan tanaman tua, rusak atau tidak produktif serta perluasan areal tanam pada wilayah-wilayah potensial. Pelaksanaan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman, memperbaiki kualitas hasil, serta memperkuat keberlanjutan usaha perkebunan rakyat.

Dalam pelaksanaannya, penyediaan benih perkebunan masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya keterbatasan ketersediaan benih unggul sesuai dengan kebutuhan waktu tanam, keterbatasan jumlah penangkar dan kebun sumber benih, serta distribusi benih yang belum merata antar wilayah. Proses produksi dan sertifikasi benih juga memerlukan waktu yang relatif panjang, sehingga berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyaluran. Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi permasalahan, antara lain dengan mengembangkan dan memelihara kebun sumber benih atau *nursery*, penyempurnaan regulasi teknis perbenihan guna menjamin kualitas benih yang disalurkan, dan melakukan pengawasan terhadap proses distribusi serta mendorong pemanfaatan sistem data dan pelaporan untuk mendukung pengendalian program secara lebih efektif.

Permasalahan lainnya seperti adanya keterbatasan akses petani terhadap teknologi modern, pembiayaan, dan pendampingan teknis yang menyebabkan adopsi inovasi berjalan lambat. Tingginya biaya investasi teknologi pertanian, seperti mekanisasi, irigasi, dan sistem pertanian berbasis digital, masih menjadi kendala utama bagi perkebunan rakyat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efisiensi usaha tani, tingginya biaya produksi, serta lemahnya daya saing produk perkebunan di pasar domestik maupun internasional.

Tantangan tersebut semakin diperberat oleh dampak perubahan iklim global dan degradasi lingkungan telah meningkatkan risiko gangguan produksi perkebunan. Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu udara, meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, serta munculnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang

sulit diprediksi telah memberikan pengaruh terhadap proses produksi dan keberlanjutan perkebunan. Degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat praktik budidaya yang belum sepenuhnya berkelanjutan juga berpotensi menurunkan produktivitas jangka panjang serta meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam.

Kinerja pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan juga masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana pascapanen, pengolahan, serta belum optimalnya pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan sesuai ketentuan pasar global. Akibatnya, sebagian besar komoditas perkebunan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi dengan nilai tambah yang rendah dan sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar.

Hilirisasi perkebunan menjadi salah satu strategi utama Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendorong transformasi sektor perkebunan nasional. Hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan melalui pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala, penguatan rantai pasok yang efisien, serta peningkatan keterkaitan antara petani dan pelaku industri. Melalui upaya hilirisasi, diharapkan produk perkebunan tidak hanya berorientasi pada kuantitas produksi, tetapi juga pada kualitas, diversifikasi produk, dan keberlanjutan usaha.

Pelaksanaan hilirisasi perkebunan juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan serta menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, pengembangan industri hilir yang terintegrasi dengan penerapan GAP dan GMP akan mendukung peningkatan daya saing produk perkebunan Indonesia di pasar internasional, sekaligus mengurangi risiko penolakan produk akibat tidak terpenuhinya standar mutu dan keamanan pangan ke negara tujuan ekspor.

Komoditas perkebunan saat ini masih menjadi penopang utama kinerja perdagangan sektor pertanian dan sumber devisa negara, mengingat subsektor perkebunan secara konsisten menjadi penyumbang terbesar nilai ekspor pertanian nasional. Dalam perkembangannya, ekspor perkebunan masih didominasi oleh komoditas strategis seperti kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, serta sejumlah komoditas rempah, sehingga kontribusinya sangat menentukan daya saing Indonesia di pasar global. Kondisi ekspor perkebunan juga menghadapi isu strategis berupa tingginya ketergantungan pada kelapa sawit sebagai kontributor

utama nilai ekspor, yang sekaligus menimbulkan risiko apabila terjadi tekanan kebijakan dagang maupun tuntutan standar dari negara tujuan ekspor. Sampai dengan November 2025, ekspor kelapa sawit tercatat berkontribusi sekitar 60% terhadap total nilai ekspor subsektor perkebunan. Selain itu, dinamika pasar global yang dipengaruhi perlambatan ekonomi turut menjadi faktor yang perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi stabilitas ekspor nasional.

Salah satu langkah untuk memperkuat penyerapan pasar domestik dan mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor yang rentan terhadap hambatan dagang maupun tuntutan standar seperti yang dijelaskan diatas adalah dengan kebijakan pengembangan bioenergi nasional, khususnya mandatori biodiesel B35 menuju B40 hingga arah B50. Kebijakan ini memiliki keterkaitan langsung dengan posisi kelapa sawit sebagai sumber bahan baku utama biodiesel di Indonesia, mengingat komoditas ini memiliki produktivitas minyak yang tinggi, ketersediaan pasokan yang relatif stabil, serta didukung ekosistem industri pengolahan yang telah terbentuk dari hulu hingga hilir. Peningkatan kadar campuran biodiesel tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan impor solar dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memperluas penyerapan CPO dalam negeri sebagai instrumen penguatan pasar domestik dan mitigasi risiko akibat fluktuasi ekspor. Namun, peningkatan konsumsi domestik untuk biodiesel ini berpotensi mempengaruhi volume ekspor dan ketersediaan pasokan ekspor, yang dapat berdampak pada dinamika harga dan daya saing Indonesia di pasar global. Dengan demikian, keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan bioenergi nasional dan pemeliharaan daya saing ekspor menjadi isu strategis yang memerlukan penguatan produktivitas kebun, efisiensi rantai pasok, serta tata kelola keberlanjutan agar manfaat energi dan ekonomi dapat dicapai secara bersamaan.

Dari aspek sumber daya manusia, usaha perkebunan rakyat masih didominasi oleh petani yang berusia lanjut dengan tingkat kemampuan penggunaan teknologi yang masih relatif rendah. Hal ini disebabkan karena minat generasi muda terhadap sektor perkebunan masih terbatas, sehingga regenerasi pelaku usaha perkebunan berjalan lambat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas SDM, pengembangan petani milenial, serta peningkatan kelembagaan petani untuk memastikan keberlanjutan subsektor perkebunan. Selanjutnya, permasalahan kelembagaan dan tata kelola usaha perkebunan juga masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki. Kelembagaan petani perkebunan belum sepenuhnya

berfungsi sebagai kelompok ekonomi yang kuat dan berdaya saing karena keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar.

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan terus mendorong kebijakan dan program pembangunan perkebunan yang terarah pada peningkatan produktivitas hulu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta percepatan hilirisasi perkebunan secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia industri, akademisi, dan petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan subsektor perkebunan yang berdaya saing, inklusif, dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan nasional.

Keberhasilan program pembangunan perkebunan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis budidaya dan dukungan sumber daya di lapangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas birokrasi dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, serta memastikan akuntabilitas kinerja secara terukur. Tantangan tata kelola birokrasi saat ini masih terlihat dari kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, konsistensi penerapan budaya kerja yang profesional, serta perbaikan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan kebijakan lebih terintegrasi. Selain itu, tuntutan publik terhadap layanan yang cepat, mudah, dan responsif semakin mendorong birokrasi untuk memperkuat inovasi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan integritas agar pelayanan dan tata kelola pemerintahan semakin baik. Dengan demikian, arah perbaikan birokrasi tidak hanya pada kepatuhan secara administratif, tetapi juga memastikan birokrasi dapat berkontribusi dalam pembangunan perkebunan melalui pelayanan prima, proses yang efisien, serta akuntabilitas kinerja yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

E. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan selama Tahun 2025. Melalui laporan ini, disajikan informasi mengenai capaian kinerja yang

meliputi tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian kinerja tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan, serta tingkat pencapaiannya selama tahun 2025, disajikan gambaran kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan secara menyeluruh dan ringkas, yang meliputi capaian kinerja utama selama tahun 2025, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Pada bagian ini juga diuraikan langkah-langkah perbaikan dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut, serta strategi dan langkah antisipatif guna meningkatkan kinerja dan menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada periode mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, serta gambaran umum Direktorat Jenderal Perkebunan. Uraian tersebut difokuskan pada aspek strategis organisasi, termasuk isu-isu strategis utama yang dihadapi oleh organisasi. Selain itu, dijelaskan pula peran, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam menjawab dan menangani permasalahan strategis tersebut. Pada bagian akhir bab ini disajikan sistematika penyusunan laporan sebagai pedoman dalam memahami struktur penyajian Laporan Kinerja.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025-2029 yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program. Selain itu, pada bab ini juga memuat penjelasan mengenai perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 sebagai komitmen kinerja antara pimpinan dan unit kerja dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini disusun ke dalam 3 (tiga) subbab yang meliputi :

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja untuk setiap sasaran organisasi. Capaian tersebut diuraikan berdasarkan hasil pengukuran indikator dan target kinerja, baik secara kuantitatif melalui perbandingan capaian dengan target yang telah ditetapkan, maupun secara kualitatif melalui uraian deskriptif yang didukung hasil analisis kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Subbab kedua menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Pada bagian ini disajikan informasi mengenai tingkat penyerapan anggaran serta keterkaitannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

c. Kinerja Lain-lain

Pada subbab ini memuat kinerja lainnya yang mencakup berbagai inisiatif, terobosan, atau inovasi yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan memberikan dampak secara nasional. Selain itu, pada subbab ini juga disajikan penghargaan yang diraih serta capaian lain yang tidak secara langsung tercantum dalam Perjanjian Kinerja, namun memiliki kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan selama periode pelaporan. Pada bab ini juga diuraikan berbagai permasalahan dan kendala utama yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis organisasi. Selain itu, disampaikan pula strategi dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan.

6. Lampiran

Lampiran LAKIN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 meliputi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025, serta data dukung dan informasi lainnya yang relevan dan diperlukan untuk memperkuat pemahaman atas capaian kinerja yang dilaporkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Kementerian Pertanian dalam menyusun Renstra 2025-2029, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I Kementerian Pertanian. RPJMN 2025-2029 memuat tentang Visi yang dicapai melalui 8 (delapan) Misi yang dituangkan dalam Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada Gambar 4.



- | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|
| ASTA CITA
1 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | ASTA CITA
5 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| ASTA CITA
2 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. | ASTA CITA
6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. |
| ASTA CITA
3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | ASTA CITA
7 | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. |
| ASTA CITA
4 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | ASTA CITA
8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. |



Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

- | | |
|--|--|
| <p>PRIORITAS NASIONAL 1</p> <p>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).</p> | <p>PRIORITAS NASIONAL 5</p> <p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</p> |
| <p>PRIORITAS NASIONAL 2</p> <p>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p> | <p>PRIORITAS NASIONAL 6</p> <p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p> |
| <p>PRIORITAS NASIONAL 3</p> <p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p> | <p>PRIORITAS NASIONAL 7</p> <p>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</p> |
| <p>PRIORITAS NASIONAL 4</p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</p> | <p>PRIORITAS NASIONAL 8</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p> |

Gambar 4. Visi dan Asta Cita dalam RPJMN
Sumber : RPJMN Tahun 2025 -2029

Dalam pelaksanaan Asta Cita yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian Pertanian berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan tiga Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru. PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi serta PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perkebunan terlibat dalam pelaksanaan PN 2 terkait dengan pencapaian Swasembada Pangan maupun berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bio energi dalam mewujudkan Swasembada Energi, dan pelaksanaan PN 5 melalui hilirisasi komoditas pertanian.

Sebagai salah satu Kementerian Negara, yang berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden, maka visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029:

“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dengan berpedoman pada rumusan visi dan Asta Cita serta dalam rangka mendukung visi Kementerian Pertanian, maka dirumuskan visi Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut.

“Perkebunan bernilai tambah, berdaya saing, berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia”

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan di atas pada dasarnya adalah mewujudkan perkebunan Indonesia yang memenuhi 4 (empat) kondisi utama, yaitu bernilai tambah, berdaya saing, berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Makna keempat kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bernilai tambah bermakna bahwa produk hasil perkebunan berbasis hilirisasi sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi pekebun, dalam hal ini adalah harga jual yang lebih tinggi. Pola pikir hilirisasi ini harus dapat dibangun dari on farm, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan dapat dijaga secara konsisten.
2. Berdaya saing bermakna bahwa produk hasil perkebunan dalam negeri dapat bersaing dan menjadi pilihan konsumen, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Berkelanjutan bermakna bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas perkebunan guna memenuhi kebutuhan manusia dilakukan secara lebih baik, ramah lingkungan, dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai amanat Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Selain itu, “Berkelanjutan” juga mengandung makna bahwa sumber daya perkebunan yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya.
4. Bermanfaat bagi rakyat Indonesia bermakna bahwa Pembangunan Perkebunan juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan Perkebunan tersebut, maka rakyat akan mendapatkan manfaat, diantaranya adalah:
 - a. Komoditas Perkebunan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pangan asal perkebunan dalam negeri. Sehingga rakyat dapat menikmati hasil produksi dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- b. Komoditas perkebunan juga bermanfaat untuk menjadi bahan baku industri dan bio energi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri dalam negeri serta mendukung terwujudnya ketahanan energi.
- c. Produk hasil perkebunan dapat berkontribusi dalam meningkatkan ekspor, sehingga berkontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).
- d. Budidaya, hilirisasi dan pemasaran komoditas perkebunan harus dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup pekebun menjadi lebih baik.

Untuk melaksanakan Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Pertanian memastikan kontribusi dalam Asta Cita melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani
2. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian
3. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia
4. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia
5. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat

Sejalan dengan misi tersebut, telah dirumuskan misi Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mengantisipasi dampak krisis pangan dunia.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil perkebunan berbasis hilirisasi
3. Optimalisasi Tata kelola pemerintahan Ditjen Perkebunan yang baik (good and clean government).

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan dan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian, ditetapkan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan asal perkebunan dari produksi dalam negeri
2. Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan
3. Terwujudnya tata kelola birokrasi Ditjen Perkebunan yang transparan, akuntabel dan professional.

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan, digambarkan melalui kerangka strategis pada Gambar 5.



Gambar 5. Kerangka Strategis Ditjen Perkebunan Tahun 2025-2029

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029

Berdasarkan kerangka strategis Ditjen Perkebunan tahun 2025-2029 di atas, dapat dilihat bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai Ditjen Perkebunan pada akhir Renstra Ditjen Perkebunan tahun 2025-2029 adalah "Perkebunan bernilai tambah, berdaya saing, berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia". Tujuan akhir tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) tujuan antara, yaitu:

1. Pertumbuhan volume usaha perkebunan
2. Kemandirian pangan asal perkebunan
3. Ketersediaan bahan baku bio energi
4. Nilai tambah dan daya saing produk perkebunan

Untuk mewujudkan tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pilar strategis 1: Ketersediaan akses pasar perkebunan

Pilar ini merupakan upaya dalam menyediakan dan/atau memperluas akses pasar perkebunan, sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan produk perkebunan nasional. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam pilar strategis 1 ini adalah:

Arah kebijakan 1: Pengolahan dan Pemasaran produk perkebunan bernilai tambah dan berdaya saing.

- a. Kegiatan 1.1: Pengembangan dan perluasan akses pasar domestik bagi pelaku usaha perkebunan.

Akses pasar domestik bagi pelaku usaha perkebunan, khususnya pelaku usaha perkebunan rakyat, sangat penting dalam meningkatkan produk perkebunan di dalam negeri. Ketersediaan akses pasar yang dapat dimanfaatkan oleh pekebun ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pekebun atas penjualan komoditas perkebunan.

- b. Kegiatan 1.2: Perluasan pasar ekspor perkebunan dalam memperluas market share produk perkebunan Indonesia.

Selain akses pasar domestik, pemerintah juga perlu memberikan fasilitasi akses pasar ekspor produk perkebunan melalui berbagai event dan kerja sama, baik nasional maupun internasional, dengan negara tujuan ekspor. Perluasan pasar ekspor ini diharapkan dapat memperluas pangsa pasar ekspor produk perkebunan nasional di luar negeri, sehingga tidak hanya volume ekspor yang bertambah, namun juga diikuti negara tujuan ekspor yang tersebar di beberapa negara di dunia.

2. Pilar strategis 2: Budidaya tanaman perkebunan yang modern dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan industri nasional.

Pilar ini merupakan upaya dalam pelaksanaan budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) maupun peraturan perundang-undangan terkait perkebunan akan dilaksanakan pada pilar strategis 2 ini. Selain itu dalam rangka mendukung keberhasilan program swasembada pangan, Kementerian Pertanian ditugaskan untuk segera meningkatkan produksi dan hilirisasi komoditas perkebunan. Kebijakan dan kegiatan pada pilar strategis 2 ini adalah: Arah kebijakan 2: Produksi perkebunan produktif berkelanjutan menuju swasembada pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan asal perkebunan serta kebutuhan industri nasional

- a. Kegiatan 2.1: Meningkatkan ketersediaan dan kemandirian benih tanaman perkebunan bermutu

Kegiatan ini fokus dalam penyediaan benih sesuai kebutuhan penanaman tanaman perkebunan. Kegiatan ini juga mendorong terwujudnya kemandirian benih secara bertahap melalui peningkatan wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah mandiri benih hingga produksi benih. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong petani dalam pemanfaatan varietas unggul tanaman

perkebunan. Sehingga, ketersediaan dan kemandirian benih tanaman perkebunan diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan produksi tanaman perkebunan dan mewujudkan swasembada pada komoditas perkebunan.

- b. Kegiatan 2.2: Budidaya komoditas perkebunan secara optimal dan berkelanjutan

Kegiatan ini fokus pada penerapan budidaya komoditas perkebunan sesuai dengan prinsip Good Agricultural Practices (GAP) serta peraturan perundang-undangan terkait sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Sehingga, selain optimalisasi hasil budidaya, kegiatan ini juga memastikan agar budidaya yang dilakukan dapat berkelanjutan sehingga dapat dinikmati hingga generasi berikutnya.

- c. Kegiatan 2.3: Perlindungan tanaman perkebunan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan antisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI).

Kegiatan ini fokus pada perlindungan tanaman perkebunan dari OPT agar luas panen dapat meningkat dan kehilangan potensi produksi dapat diminimalisir. Selain itu, kegiatan ini juga akan fokus pada antisipasi dampak perubahan iklim yang dapat berdampak terhadap luas panen tanaman perkebunan.

- d. Kegiatan 2.4 : Penjaminan Mutu dan Keamanan Komoditas Perkebunan.

Kegiatan ini fokus dalam menjamin kualitas mutu dan keamanan komoditas perkebunan yang dihasilkan. Mutu komoditas perkebunan perlu dijaga agar produk perkebunan nasional menjadi pilihan konsumen dibanding produk dari luar negeri. Sedangkan keamanan komoditas perkebunan perlu dipastikan untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam mengonsumsi komoditas pangan asal perkebunan dalam negeri.

3. Pilar strategis 3: Budidaya Komoditas Perkebunan dalam Memenuhi Kebutuhan Bahan Baku Bio energi

Pilar budidaya komoditas perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi diarahkan untuk menjamin kesinambungan pasokan bahan baku bioenergi yang bersumber dari komoditas perkebunan dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional serta transisi menuju energi baru dan terbarukan. Arah kebijakan dan kegiatan pada pilar strategis 3 ini adalah:

Arah Kebijakan 3: Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi

- a. Kegiatan 3.1: Budidaya komoditas perkebunan untuk bahan baku bioenergi
Kegiatan dilakukan melalui peningkatan produktivitas tanaman perkebunan penghasil bioenergi, optimalisasi pemanfaatan lahan eksisting, penerapan praktik budidaya berkelanjutan, penyediaan benih unggul, serta dukungan sarana dan prasarana budidaya yang sesuai dengan standar teknis dan prinsip keberlanjutan. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan dalam budidaya kelapa sawit untuk mendukung bio energi.

4. Pilar Strategis 4: Hilirisasi produk hasil perkebunan

Pilar ini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan melalui hilirisasi produk hasil perkebunan terintegrasi berdasarkan potensi produk dan potensi pasar yang dimiliki. Pemerintah akan mendorong pelaku usaha perkebunan dalam melakukan hilirisasi produk perkebunan yang dijual, sehingga akan meningkatkan harga jual dan berdampak terhadap pertumbuhan usaha perkebunan. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan adalah:

Arah Kebijakan 1: Pengolahan dan Pemasaran produk perkebunan bernilai tambah dan berdaya saing.

- a. Kegiatan 4.1 : Pengolahan Produk Perkebunan Berbasis Hilirisasi.

Kegiatan ini akan fokus pada pengolahan dan hilirisasi produk perkebunan nasional sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada pekebun. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendorong hilirisasi pertanian yang berkontribusi terhadap program hilirisasi nasional.

- b. Kegiatan 4.2 : Meningkatkan Kualitas Produk Ekspor Perkebunan Dalam Memenuhi Permintaan Potensi Pasar Ekspor dan Negara Tujuan Ekspor
Kegiatan ini fokus dalam meningkatkan kualitas produk ekspor perkebunan dalam memenuhi permintaan potensi pasar maupun negara tujuan ekspor produk perkebunan. Pemenuhan permintaan potensi pasar maupun pasar ekspor produk perkebunan ini penting dilakukan dalam meningkatkan nilai tambah maupun daya saing produk ekspor perkebunan.

5. Fondasi strategis: SDM, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Ditjen Perkebunan

Fondasi strategi merupakan dasar yang menopang berdirinya seluruh pilar strategis. Dalam konteks strategi, fondasi strategis merupakan strategic assets atau aset strategis yang harus dimiliki organisasi. Pilar strategis dalam kerangka strategi Ditjen Perkebunan ini terdiri atas Sumber Daya Manusia, organisasi dan kelembagaan maupun tata kelola birokrasi Ditjen Perkebunan. Arah Kebijakan dan Kegiatan yang dilakukan pada Fondasi Strategis ini adalah:

Arah Kebijakan 5: Birokrasi Ditjen Perkebunan yang transparan dan akuntabel

a. Kegiatan 5.1: Mengembangkan modal manusia (human capital) SDM ASN Ditjen Perkebunan yang produktif.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, pengembangan SDM sebagai modal manusia menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan Ditjen Perkebunan. Kegiatan ini fokus pada pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen Perkebunan, meliputi Perencanaan SDM ASN, rekrutmen dan seleksi (talent acquisition), pengelolaan kinerja SDM ASN (SKP dan perilaku kerja), pembelajaran dan pengembangan SDM, manajemen karier, kesejahteraan SDM ASN, kepuasan kerja SDM ASN, hingga program purna bhakti.

b. Kegiatan 5.2: Mengembangkan tata kelola organisasi Ditjen Perkebunan yang tepat fungsi dan ukuran.

Kegiatan ini fokus pada penerapan organisasi yang tepat fungsi dan ukuran (organization right sizing) sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara cerdas (smart work), efektif dan efisien dengan produktivitas yang tinggi. Tata kelola organisasi yang dimaksud tidak hanya struktural, namun juga pemetaan jabatan fungsional sehingga dapat mewujudkan kesesuaian antara pekerjaan dengan SDM ASN yang mengerjakan (job-person fit).

c. Kegiatan 5.3: Mendukung pelaksanaan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Ditjen Perkebunan

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu amanat pembangunan nasional yang harus dilakukan seluruh K/L/D, termasuk Kementerian Pertanian. Ditjen Perkebunan sebagai salah satu unsur pelaksana utama Kementerian Pertanian harus berkontribusi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Ditjen Perkebunan.

Kegiatan ini fokus dalam pelaksanaan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Ditjen Perkebunan yang selaras dengan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian.

- d. Kegiatan 5.4: Memberikan layanan internal lingkup Ditjen Perkebunan yang berkualitas dan berbasis digital.

Kegiatan ini fokus dalam pelaksanaan dukungan manajemen internal dalam mendukung seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkebunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Perkebunan.

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program yang dilaksanakan bersinergi dengan unit eselon I lainnya.

Sesuai arsitektur kinerja, berikut sasaran program, indikator dan target kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029 (*cascading*) untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kementerian Pertanian, serta Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan yang dinilai tepat untuk dilakukan pencapaian kinerja.

Tabel 3. Matriks Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 - 2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit	Ton	239.646.870	243.241.575	245.432.325	253.040.740	257.074.690
				Produksi Kelapa	Ton	2.880.690	2.890.917	2.901.144	2.911.371	2.936.021
				Produksi Sagu	Ton	393.623	413.304	433.969	455.667	478.451
				Produksi Lada	Ton	64.408	64.408	64.537	64.601	64.666
				Produksi Pala	Ton	41.527	41.568	41.610	41.652	41.693
				Produksi Cengkeh	Ton	133.570	133.703	133.837	133.971	134.105
				Produksi Vanili	Ton	1.582	1.585	1.585	1.587	1.588
				Produksi Kopi	Ton	780.957	786.119	791.434	796.776	802.210
				Produksi Tebu	Ton	36.813.539	39.555.979	42.478.762	60.450.243	84.714.460
				Produksi Karet	Ton	2.496.364	2.470.676	2.756.865	2.917.026	3.080.114
				Produksi Kakao	Ton	632.787	633.290	633.792	634.294	634.796
				Produksi Teh	Ton	116.555	116.579	116.602	116.624	116.648
Produksi Jambu Mete	Ton	136.642	136.915	137.257	137.600	138.013				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				Produksi Tanaman Palma Lainnya	Ton	188.236	189.899	192.427	194.173	195.953
				Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	Ton	317.790	383.719	400.831	417.946	435.065
Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi		Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	Juta Ton	66,37	87,35	89,97	93,67	98,78
Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)		Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun	Indeks harga yang diterima Pekebun	Nilai	154,8	160,1	165,7	171,4	177,3
Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	Persentase komoditas pertanian yang mencapai		Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian	Nilai	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
	swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas		tanaman Perkebunan	tanaman Perkebunan						
Meningkatnya pangsa pasar (<i>market share</i>) produk ekspor pertanian	<i>Market share</i> produk ekspor pertanian		Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan	Volume ekspor komoditas perkebunan	ribu ton	38.224	38.415	38.607	38.800	38.994
Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan		Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan	Nilai	1,3	1,5	1,8	2	2,2
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan	Indeks	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi			yang baik, transparan dan akuntabel							

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2025-2029

Berdasarkan sasaran strategis (SS) Kementerian Pertanian 2025-2029 tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan mendukung ketercapaian sasaran strategis Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan, Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian, Meningkatnya pendapatan petani, Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian, Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan, dan sasaran strategis Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai 6 (enam) SS yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan, pelaksanaannya dilakukan melalui 2 (dua) Program. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan, Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian, Meningkatnya pendapatan petani, Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian, Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan, dan Program Dukungan Manajemen untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi. Setiap indikator kinerja sasaran program memiliki target tahunan yang harus dicapai. Capaian dari target indikator kinerja sasaran program tersebut merupakan cerminan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan pada tiap tahun pengukuran.

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana kerja Ditjen Perkebunan mengacu pada Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Sebagai RKP tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, RKP 2025 mengusung tema " Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan fokus pada penguatan fondasi transformasi. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada 2025 meliputi Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dalam RKP Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkebunan berperan dalam mendukung 2 (dua) dari 3 (tiga) Prioritas Nasional yang diampu oleh Kementerian Pertanian, yaitu PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; dan PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, peran Direktorat Jenderal Perkebunan dalam prioritas nasional ditunjukkan sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (ProP)
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Pangan	Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah	Input dan pendukung Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah
			<i>On Farm</i> Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah
			<i>Off Farm</i> Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah
		Pengembangan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Peningkatan Implementasi Praktik Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (OPT dan DPI)

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (ProP)
			Pengembangan Nilai Tambah dan Ketertelusuran Produk Pertanian Berkelanjutan
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit dan kualitas bahan baku
			<i>Sustainability dan traceability</i>
		Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Peningkatan Produksi dan Penyebaran benih unggul
			Peningkatan produksi kelapa
		Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong	Jaminan Kepastian bahan baku sagu dan singkong
			Pengembangan industri hilir sagu dan singkong

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Dalam pencapaian target indikator kinerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan telah menyusun Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program serta target yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5. Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit	Ton	239.646.870
		Produksi Kelapa	Ton	2.880.690
		Produksi Sagu	Ton	393.623
		Produksi Lada	Ton	64.408
		Produksi Pala	Ton	41.527
		Produksi Cengkeh	Ton	133.570
		Produksi Vanili	Ton	1.582
		Produksi Kopi	Ton	780.957
		Produksi Tebu	Ton	36.813.539
		Produksi Karet	Ton	2.496.364
		Produksi Kakao	Ton	632.787
		Produksi Teh	Ton	116.555
		Produksi Jambu Mete	Ton	136.642
		Produksi Tanaman Palma Lainnya	Ton	188.236
		Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	Ton	317.790
	Tersedianya komoditas pertanian	Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk	Juta Ton	66,37

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target
	perkebunan untuk bahan baku bio energi	bahan baku bio energi		
	Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun	Indeks harga yang diterima Pekebun	Nilai	154,8
	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Nilai	0,65
	Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan	Volume ekspor komoditas perkebunan	ribu ton	38.224
	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan	Nilai	1,3
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan	Indeks	0,83

Sumber: Renja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan pagu

anggaran K/L. RKP berisi arah kebijakan pemerintah dan program prioritas yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L. Rencana kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah, Renja Kementerian Pertanian, Renja Direktorat Jenderal Perkebunan, serta alokasi pagu anggaran tahun 2025. Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.064.312.995.000, secara lebih rinci dilihat dari Rincian Output (RO) yang dilaksanakan pada tabel 6.

Tabel 6. Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 Berdasarkan Rincian Output

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	Blokir
018.05	Ditjen. Perkebunan	-	-	3.064.312.995.000	785.700.000
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			2.955.313.598.000	-
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	-	-	90.509.020.000	-
1777.AEA	Koordinasi			2.107.938.000	-
1777.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman kelapa Sawit dan Aneka Palma	8	Kegiatan	2.107.938.000	-
1777.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			318.032.000	-
1777.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	5	NSPK	318.032.000	-
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			88.083.050.000	-
1777.RAI.001	Kawasan Kelapa	11.515	Ha	82.136.748.000	-

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	Blokir
1777.RAI.002	Kawasan Sagu	1.700	Ha	5.946.302.000	
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	-	-	10.541.168.000	-
1779.AEA	Koordinasi			2.636.605.000	-
1779.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan	5	Kegiatan	2.636.605.000	
1779.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			449.825.000	-
1779.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	7	NSPK	449.825.000	
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			5.120.432.000	-
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	62	Unit	4.310.432.000	
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	6	Paket Teknologi	810.000.000	-
1779.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			2.334.306.000	-

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	Blokir
1779.QDD.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	23	Kelompok Masyarakat	2.334.306.000	
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	-	-	1.811.291.962.000	-
5888.AEA	Koordinasi			3.198.610.000	-
5888.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Tahunan	33	Kegiatan	3.198.610.000	
5888.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			678.330.000	-
5888.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan	16	NSPK	678.330.000	
5888.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			1.807.415.022.000	-
5888.RAI.001	Kawasan Lada	1.200	Ha	15.630.211.000	-
5888.RAI.002	Kawasan Pala	8.000	Ha	41.394.600.000	

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	Blokir
5888.RAI.004	Kawasan Tebu	100.453	Ha	1.446.411.651.000	
5888.RAI.006	Kawasan Kopi	17.900	Ha	181.696.490.000	
5888.RAI.007	Kawasan Kakao	8.716	Ha	113.310.510.000	
5888.RAI.009	Kawasan Jambu Mete	1.800	Ha	8.971.560.000	
5889	Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	-	-	16.431.616.000	-
5889.AEA	Koordinasi			8.370.968.000	-
5889.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	17	Kegiatan	8.370.968.000	
5889.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			996.375.000	-
5889.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi), dan Pemasaran Hasil Perkebunan	14	NSPK	996.375.000	
5889.PDA	Standarisasi Produk			3.046.723.000	-

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	Blokir
5889.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	13.000	Standar	3.046.723.000	
5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			2.660.500.000	-
5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	41	Unit	1.455.400.000	
5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	15	Unit	1.205.100.000	-
5889.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			1.357.050.000	-
5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	5	Unit	1.357.050.000	
5890	Penguatan Perbenihan Perkebunan			1.026.539.832.000	-
5890.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			783.880.000	-
5890.ABR.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	17	Rekomendasi	783.880.000	
5889.AEA	Koordinasi			2.780.053.000	-

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	Blokir
5890.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan	7	Kegiatan	2.780.053.000	
5890.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			306.450.000	-
5890.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	6	NSPK	306.450.000	
5890.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk			4.905.120.000	-
5890.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	61.409.600	Batang	3.192.978.000	
5890.BJA.002	Pengujian Mutu Benih	12.589.740	Batang	1.712.142.000	
5890.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			74.695.694.000	-
5890.RBK.002	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam komoditi Perkebunan	1.580	Unit (Ha)	74.695.694.000	
5890.RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			943.068.635.000	-

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	Blokir
5890.RDK.001	Operasional Nursery	78	Unit	927.165.071.000	
5890.RDK.002	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Tanam komoditi Perkebunan	635	Unit (Ha)	15.903.564.000	
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen			108.999.397.000	785.700.000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan			108.999.397.000	785.700.000
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			102.433.352.000	785.700.000
1780.EBA.956	Layanan BMN	5	Layanan	338.790.000	
1780.EBA.957	Layanan Hukum	2	Layanan	1.015.520.000	
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	357.230.000	
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	423.604.000	
1780.EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan	16.589.178.000	785.700.000
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.281.100.000	

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	Blokir
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	5	Layanan	82.427.930.000	
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			350.000.000	-
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit	350.000.000	
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			810.230.000	-
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	759	Orang	810.230.000	
1789.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			5.405.815.000	-
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11	Dokumen	2.035.000.000	
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	12	Dokumen	1.379.380.000	
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	13	Dokumen	1.832.235.000	
1780.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen	159.200.000	

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2025

C. Perjanjian Kinerja

Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai dinamika politik dan organisasi seperti pemerintahan baru, reorganisasi Kementerian Pertanian, dan periode penyusunan Renstra 2025-2029. Kementerian Pertanian melalui Permentan No 2 Tahun 2025 telah menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dimana terdapat unit eselon I baru yaitu Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, perubahan nomenklatur Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, serta penyesuaian tugas dan fungsi selaras dengan perubahan nomenklatur Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil di masing-masing Ditjen teknis menjadi Direktorat Hilirisasi Hasil.

Periode penyusunan Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029 memakan waktu yang cukup lama, sampai akhirnya ditetapkan dengan Permentan No 40 Tahun 2025 pada tanggal 30 Desember 2025. Sepanjang tahun 2025 sebelum Renstra ditetapkan, perwujudan kinerja ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang masih mengacu pada Renstra periode sebelumnya. Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani digunakan sebagai komitmen organisasi yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Setelah Renstra 2025-2029 ditetapkan, dilakukan revisi Perjanjian Kinerja (PK) dengan mengacu pada Renstra 2025-2029.

Perjanjian Kinerja mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juli, September, dan Desember 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan pagu anggaran, perubahan pimpinan eselon I, serta perubahan indikator dan

target kinerja sesuai Renstra 2025-2029. Perubahan perjanjian kinerja tahun 2025, sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Desember 2024			Juli 2025 (pergantian pejabat)				September 2025 (penambahan anggaran)				Desember 2025 (indikator sesuai renstra 2025-2029)			
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Perubahan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Perubahan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Perubahan
Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	82%	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	82%	tetap	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	82%	tetap	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit	239.646.870 Ton	indikator baru
	Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	47%		Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	47%	tetap		Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	47%	tetap		Produksi Kelapa	2.880.690 Ton	indikator baru
	Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40%		Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40%	tetap		Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40%	tetap		Produksi Sagu	401.991 Ton	indikator baru
Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Nilai ekspor produk perkebunan	31 miliar USD	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Nilai ekspor produk perkebunan	31 miliar USD	tetap	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Nilai ekspor produk perkebunan	31 miliar USD	tetap		Produksi Lada	64.408 Ton	indikator baru

Desember 2024			Juli 2025 (pergantian pejabat)				September 2025 (penambahan anggaran)				Desember 2025 (indikator sesuai renstra 2025-2029)			
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Perubahan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Perubahan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Perubahan
Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Persentase capaian nilai reformasi birokrasi yang menjadi tanggungjawab Ditjen Perkebunan	76,91%	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Persentase capaian nilai reformasi birokrasi yang menjadi tanggungjawab Ditjen Perkebunan	76,91%	terjadi	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Persentase capaian nilai reformasi birokrasi yang menjadi tanggungjawab Ditjen Perkebunan	76,91%	terjadi		Produksi Pala	41.527 Ton	indikator baru
Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai 85	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai 85,87	perubahan target kinerja	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai 85,87	terjadi		Produksi Cengkeh	157.321 Ton	indikator baru
												Produksi Vanili	1.582 Ton	indikator baru
												Produksi Kopi	813.346 Ton	indikator baru
												Produksi Tebu	36.813.539 Ton	indikator baru
												Produksi Karet	2.496.364 Ton	indikator baru
												Produksi Kakao	632.787 Ton	indikator baru
												Produksi Teh	116.555 Ton	indikator baru
												Produksi Jambu Mete	136.642 Ton	indikator baru

Desember 2024			Juli 2025 (pergantian pejabat)				September 2025 (penambahan anggaran)				Desember 2025 (indikator sesuai renstra 2025-2029)			
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Perubahan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Perubahan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Perubahan
												Produksi Tanaman Palma Lainnya	188.236 Ton	indikator baru
												Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	414.496 Ton	indikator baru
											Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	66,37 Juta Ton	indikator baru
											Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun	Indeks harga yang diterima Pekebun	Nilai 154,8	indikator baru
											Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Nilai 0,65	indikator baru

Desember 2024			Juli 2025 (pergantian pejabat)				September 2025 (penambahan anggaran)				Desember 2025 (indikator sesuai renstra 2025-2029)			
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Perubahan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Perubahan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Perubahan
											Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan	Volume ekspor komoditas perkebunan	38.224 Ribu Ton	indikator baru
											Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan	Nilai 1,3	indikator baru
											Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan	Indeks 0,83	indikator baru

Pada Perjanjian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2025, dilakukan penyempurnaan beberapa indikator kinerja melalui penyesuaian target dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis, serta dinamika ke depan, dan dalam rangka menindaklanjuti surta rekomendasi KemenPANRB atas SAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2024, yaitu mendorong seluruh unit kerja dalam penetapan target kinerja yang tertuang dalam PK tahun berjalan agar disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya. Indikator yang mengalami perubahan target antara lain produksi sagu, cengkeh, kopi, serta tanaman semusim dan tahunan lainnya dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun 2024.

Penetapan kinerja Ditjen Perkebunan tahun 2025 dalam wujud Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian, dijabarkan dalam 7 (tujuh) sasaran program dan dirinci kembali ke dalam 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Perubahan target perjanjian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target pada Renstra 2025-2029, sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Perubahan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	%	Target 2025 (Renstra)	Target 2025 (PK)
Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit	Ton	-	227.180.985	-	239.646.870	239.646.870
	Produksi Kelapa	Ton	2.916.935	2.792.228	95,72	2.880.690	2.880.690
	Produksi Sagu	Ton	412.611	401.991	97,43	393.623	401.991
	Produksi Lada	Ton	70.450	58.897	83,60	64.408	64.408
	Produksi Pala	Ton	43.834	39.558	90,25	41.527	41.527

Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	%	Target 2025 (Renstra)	Target 2025 (PK)
	Produksi Cengkeh	Ton	135.313	157.321	116,26	133.570	157.321
	Produksi Vanili	Ton	1.509	1.212	80,32	1.582	1.582
	Produksi Kopi	Ton	771.595	813.346	105,41	780.957	813.346
	Produksi Tebu	Ton	34.325.968	33.216.613	96,77	36.813.539	36.813.539
	Produksi Karet	Ton	2.701.611	2.132.088	78,92	2.496.364	2.496.364
	Produksi Kakao	Ton	659.068	617.112	93,63	632.787	632.787
	Produksi Teh	Ton	122.375	116.030	94,82	116.555	116.555
	Produksi Jambu Mete	Ton	151.437	136.505	90,14	136.642	136.642
	Produksi Tanaman Palma Lainnya	Ton	185.340	186.765	100,77	188.236	188.236
	Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	Ton	-	414.496	-	317.790	414.496
Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	Juta Ton	-	-	-	66,37	66,37
Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun	Indeks harga yang diterima Pekebun	Nilai	-	-	-	154,8	154,8
Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Nilai	-	-	-	0,65	0,65
Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan	Volume ekspor komoditas perkebunan	ribu ton	-	-	-	38.224	38.224
Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan	Nilai	-	-	-	1,3	1,3

Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	%	Target 2025 (Renstra)	Target 2025 (PK)
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan	Indeks	-	-	-	0,83	0,83

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program atau kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang dilaksanakan tahun 2025 dihitung berdasarkan capaian pada setiap Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 5 April 2023, klasifikasi capaian kinerja ditentukan melalui mekanisme penilaian berbasis skor (*scoring*) yang membagi tingkat capaian ke dalam empat kategori, diantaranya :

1. Sangat Berhasil (capaian > 100%)
2. Berhasil (capaian 80-100%)
3. Cukup Berhasil (capaian 60-79%)
4. Kurang Berhasil (capaian < 100%)

Keberhasilan pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan ditopang oleh 21 (dua puluh satu) IKSP. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit	239.646.870 Ton	232.774.480 Ton*)	97,13	Berhasil
		Produksi Kelapa	2.880.690 Ton	2.766.260 Ton*)	96,03	Berhasil
		Produksi Sagu	401.991 Ton	402.887 Ton*)	100,22	Sangat Berhasil
		Produksi Lada	64.408 Ton	52.943 Ton*)	82,20	Berhasil
		Produksi Pala	41.527 Ton	39.573 Ton*)	95,29	Berhasil
		Produksi Cengkeh	157.321 Ton	144.704 Ton*)	91,98	Berhasil
		Produksi Vanili	1.582 Ton	1.286 Ton*)	81,29	Berhasil
		Produksi Kopi	813.346 Ton	832.675 Ton*)	102,38	Sangat Berhasil
		Produksi Tebu	36.813.539 Ton	39.069.968 Ton*)	106,13	Sangat Berhasil
		Produksi Karet	2.496.364 Ton	2.116.097 Ton*)	84,77	Berhasil
		Produksi Kakao	632.787 Ton	616.103 Ton*)	97,36	Berhasil
		Produksi Teh	116.555 Ton	116.418 Ton*)	99,88	Berhasil
Produksi Jambu Mete	136.642 Ton	135.764 Ton*)	99,36	Berhasil		

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
		Produksi Tanaman Palma Lainnya	188.236 Ton	190.646 Ton*)	101,28	Sangat Berhasil
		Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	414.496 Ton	397.782 Ton*)	95,97	Berhasil
2.	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	66,37 Juta Ton	70,43 Juta Ton	106,12	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun	Indeks harga yang diterima Pekebun	Nilai 154,8	Nilai 198,71	128,37	Sangat Berhasil
4.	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Nilai 0,65	Nilai 0,65	100	Berhasil
5.	Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan	Volume ekspor komoditas perkebunan	38.224 ribu ton	37.610 ribu ton	98,39	Berhasil
6.	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan	Nilai 1,3	Nilai 1,43	110,00	Sangat Berhasil

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
7.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan	Indeks 0,83	Indeks 0,89	107,23	Sangat Berhasil

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan Tabel 9 capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 relatif baik dengan 8 (delapan) indikator kinerja telah mencapai atau melampaui target tahun 2025 dan termasuk kategori **Sangat Berhasil**, dan 13 (tiga belas) indikator kinerja hampir mencapai target dengan kategori **berhasil**. IKSP Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 merupakan indikator yang baru sehingga untuk perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya (periode 2020-2024) tidak dilakukan, hanya dilakukan perbandingan dengan capaian jangka menengah (Renstra 2025-2029). Penjelasan capaian indikator kinerja untuk setiap sasaran program adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan

Sasaran program Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan menggambarkan upaya Direktorat Jenderal Perkebunan dalam memastikan produksi komoditas perkebunan strategis tetap tersedia sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Sasaran ini menjadi penting karena produksi perkebunan menjadi dasar dalam mendukung kebutuhan konsumsi, bahan baku industri,

peningkatan ekspor, serta menjaga kontribusi subsektor perkebunan terhadap perekonomian nasional. Target dan realisasi indikator pada sasaran program Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan tahun 2025 beserta capainnya dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Capaian Sasaran Terwujudnya Produksi Komoditas Perkebunan

Terwujudnya Produksi Komoditas Perkebunan				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1-1	Produksi Kelapa Sawit	239.646.870 Ton	232.774.480 Ton*)	97,13
1-2	Produksi Kelapa	2.880.690 Ton	2.766.260 Ton*)	96,03
1-3	Produksi Sagu	401.991 Ton	402.887 Ton*)	100,22
1-4	Produksi Lada	64.408 Ton	52.943 Ton*)	82,20
1-5	Produksi Pala	41.527 Ton	39.573 Ton*)	95,29
1-6	Produksi Cengkeh	157.321 Ton	144.704 Ton*)	91,98
1-7	Produksi Vanili	1.582 Ton	1.286 Ton*)	81,29
1-8	Produksi Kopi	813.346 Ton	832.675 Ton*)	102,38
1-9	Produksi Tebu	36.813.539 Ton	39.069.968 Ton*)	106,13
1-10	Produksi Karet	2.496.364 Ton	2.116.097 Ton*)	84,77
1-11	Produksi Kakao	632.787 Ton	616.103 Ton*)	97,36
1-12	Produksi Teh	116.555 Ton	116.418 Ton*)	99,88
1-13	Produksi Jambu Mete	136.642 Ton	135.764 Ton*)	99,36

Terwujudnya Produksi Komoditas Perkebunan				
1-14	Produksi Tanaman Palma Lainnya	188.236 Ton	190.646 Ton*)	101,28
1-15	Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	414.496 Ton	397.782 Ton*)	95,97

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

a. Produksi Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan subsektor perkebunan yang berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, penguatan industri hilir, serta kontribusi devisa melalui ekspor. Sebagai penghasil minyak nabati utama, kelapa sawit memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan nonpangan, baik untuk pasar domestik maupun internasional, karena produk turunannya digunakan pada industri minyak goreng, kosmetik, hingga energi terbarukan. Dalam beberapa tahun terakhir, arah pembangunan kelapa sawit menekankan pada aspek keberlanjutan dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi.

Indikator produksi kelapa sawit digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja subsektor perkebunan dalam menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku industri, menjaga stabilitas produksi nasional, serta mendukung kontribusi ekonomi melalui aktivitas hulu sampai dengan hilir kelapa sawit. Capaian indikator

produksi tidak hanya mencerminkan kuantitas hasil, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola budidaya, efektivitas pembinaan teknis, serta kemampuan sistem dalam menghadapi dinamika lapangan seperti perubahan iklim, kondisi tanaman, hingga gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Produksi kelapa sawit yang diukur dalam indikator ini dalam wujud Tandan Buah Segar (TBS).

Tabel 11. Capaian Produksi Kelapa Sawit

IK 1-1		Produksi Kelapa Sawit		
Tahun 2025		Renstra		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
239.646.870 Ton	232.774.480 Ton*)	97,13	257.074.690 Ton	90,55

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan Tabel 11, indikator Produksi Kelapa Sawit dengan target sebesar 239.646.870 ton dan realisasi sebesar 232.774.480 ton, sehingga capaian sebesar 97,13%. Capaian ini menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit pada tahun 2025 berada pada kategori **berhasil** dan mendekati target yang telah ditetapkan. Namun demikian, diperlukan penguatan pada aspek-aspek produksi agar kinerja produksi kelapa sawit pada periode berikutnya dapat lebih optimal. Apabila capaian produksi tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir renstra, maka telah mencapai 90,55% dari total target

257.074.690 ton. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja produksi kelapa sawit pada tahun 2025 telah berada pada tingkat yang relatif tinggi dan mencerminkan progres yang signifikan menuju tercapainya sasaran jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam renstra.

Tabel 12. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit (CPO)

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	2.160.629	11.991.914	434.054	14.586.597	45.741.846	3.814
2021	1.911.980	12.047.386	662.324	16.833.985	45.121.480	3.745
2022	2.030.846	12.712.058	595.652	16.833.985	46.819.673	3.683
2023	2.374.673	12.969.951	584.087	16.833.985	47.084.299	3.630
2024	2.483.443	12.876.487	653.109	16.833.985	45.436.197	3.529
2025*)	2.362.350	12.909.119	665.112	16.833.985	46.554.896	3.606

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Selama kurun waktu 5 tahun (2020 - 2025), perkembangan komoditas kelapa sawit menunjukkan bahwa luas areal nasional mengalami peningkatan pada 2021 dari 14.586.597 ha menjadi 16.833.985 ha dan kemudian cenderung stabil sampai dengan 2025. Peningkatan kapasitas lahan produktif terlihat dari bertambahnya luas Tanaman Menghasilkan (TM) dari 11.991.914 ha menjadi 12.909.119 ha, yang menunjukkan potensi produksi sebagai penopang pasokan bahan baku kelapa sawit nasional. Namun

demikian, peningkatan luas areal TM tersebut juga diiringi oleh kenaikan Tanaman Tidak Menghasilkan/Rusak (TTM/TR) dari 434.054 ha menjadi 665.112 ha hal ini menunjukkan masih terdapat areal yang belum optimal dan memerlukan langkah rehabilitasi maupun peremajaan agar tidak menjadi faktor penghambat kinerja produksi ke depan.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kinerja hulu kelapa sawit, khususnya pada perkebunan rakyat, melalui pembaruan tanaman dan perbaikan tata kelola budidaya. Data realisasi PSR serta uraian pelaksanaannya disajikan sebagai berikut.

Tabel 13. Realisasi PSR Tahun 2017-2025

No	Provinsi	Rekomtek (ha)	Tumbang Chipping	Tanam
1.	Aceh	75.266	42.399	37.336
2.	Banten	2.184	1.949	1.822
3.	Bengkulu	16.649	13.029	12.358
4.	Jambi	39.528	25.851	25.190
5.	Kalimantan Barat	25.737	19.095	18.541
6.	Kalimantan Selatan	7.657	5.880	5.692
7.	Kalimantan Tengah	19.254	15.466	14.514
8.	Kalimantan Timur	7.880	7.796	7.796
9.	Kalimantan Utara	655	650	650
10.	Kepulauan Bangka Belitung	2.647	306	1.564
11.	Lampung	5.490	4.339	3.821
12.	Papua	664	-	-
13.	Papua Barat	2.772	2.553	2.388
14.	Riau	48.181	35.085	32.571

No	Provinsi	Rekomtek (ha)	Tumbang Chipping	Tanam
15.	Sulawesi Barat	15.348	13.809	9.195
16.	Sulawesi Selatan	8.984	8.305	8.263
17.	Sulawesi Tengah	4.586	2.939	2.432
18.	Sulawesi Tenggara	3.798	2.807	2.667
19.	Sumatera Barat	15.146	12.863	12.436
20.	Sumatera Selatan	75.017	67.258	65.281
21.	Sumatera Utara	35.920	22.457	21.270
	Total	413.365	304.837	285.786

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Realisasi Program PSR tahun 2017–2025 menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan total Rekomendasi Teknis (Rekomtek) sebesar 413.365 ha, realisasi Tumbang *Chipping* 304.837 ha, dan realisasi Tanam 285.786 ha. Realisasi PSR terbesar berasal dari sentra sawit rakyat, yaitu Sumatera Selatan (rekomtek 75.017 ha, tanam 65.281 ha), Aceh (rekomtek 75.266 ha, tanam 37.336 ha), dan Riau (rekomtek 48.181 ha, tanam 32.571 ha), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan PSR terkonsentrasi di wilayah dengan perkebunan sawit rakyat yang besar.

Capaian produksi kelapa sawit nasional selama periode 2020–2025 bersifat fluktuatif. Produksi tercatat sebesar 45.741.846 ton pada tahun 2020, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 45.121.480 ton, dan meningkat hingga mencapai yang terbesar pada tahun 2023 yaitu sebesar 47.084.299 ton. Pada tahun 2024 produksi

kembali turun menjadi 45.436.197 ton, dan meningkat pada 2025 sebesar 46.554.896 ton. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun luas areal dan TM relatif terjaga, peningkatan produksi belum berlangsung stabil dari tahun ke tahun. Hal tersebut sejalan dengan tren produktivitas yang cenderung menurun dari 3.814 kg/ha pada tahun 2020 menjadi 3.606 kg/ha pada tahun 2025, atau turun sekitar 5,5% dalam lima tahun. Penurunan produktivitas ini menunjukkan bahwa tantangan utama kelapa sawit adalah pada aspek intensifikasi dan perbaikan kinerja lahan eksisting, termasuk percepatan peremajaan tanaman tua atau tidak produktif, penguatan penerapan praktik budidaya yang baik, serta pengendalian faktor risiko seperti iklim dan gangguan OPT, agar produksi lebih stabil dan berkelanjutan.

Tabel 14. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Akan Dikonfirmasi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kg/Ha)
Aceh	104.296	347.706	34.069	79.065	565.135	1.153.004	3.316
Sumatera Utara	166.251	1.136.046	29.261	687.169	2.018.727	5.186.849	4.566
Sumatera Barat	55.566	364.535	23.555	111.421	555.076	1.460.963	4.008
Riau	593.959	2.648.478	142.002	110.143	3.494.583	9.467.531	3.575
Kepulauan Riau	1.141	6.693	82	(1.260)	6.655	25.824	3.858
Jambi	163.412	693.864	103.791	229.746	1.190.813	2.106.566	3.036
Sumatera Selatan	182.056	1.024.272	32.889	168.327	1.407.544	3.974.021	3.880
Kep. Bangka Belitung	46.235	212.720	2.160	19.490	280.605	804.299	3.781
Bengkulu	53.772	369.848	7.345	(4.883)	426.083	1.314.501	3.554

Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Akan Dikonfirmasi (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kg/Ha)
Lampung	21.769	165.016	9.702	59.950	256.437	390.057	2.364
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	66	15.393	3	(1.972)	13.489	52.188	3.390
Banten	1.213	13.952	2.734	632	18.531	37.612	2.696
Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
Bali	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	280.721	1.746.295	142.259	(339.742)	1.829.533	4.946.645	2.833
Kalimantan Tengah	213.000	1.844.653	70.171	(90.119)	2.037.705	7.591.136	4.115
Kalimantan Selatan	86.974	407.079	4.491	17.489	516.033	1.361.475	3.344
Kalimantan Timur	252.420	1.168.559	22.325	(121.613)	1.321.692	4.292.467	3.673
Kalimantan Utara	19.094	203.508	2.982	52.020	277.605	689.900	3.390
Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	1.548	18.514	51	(9.722)	10.390	22.608	1.221
Sulawesi Tengah	23.136	108.201	3.225	(9.931)	124.631	376.585	3.480
Sulawesi Selatan	18.903	35.138	3.185	(16.543)	40.683	135.332	3.851
Sulawesi Barat	30.137	109.180	7.369	4.247	150.934	379.098	3.472
Sulawesi Tenggara	15.698	58.022	1.014	(11.364)	63.370	79.035	1.362
Maluku	8	9.870	466	3.454	13.799	26.835	2.719
Maluku Utara	-	5.555	-	92	5.647	20.670	3.721
Papua	3.632	31.047	9.479	(1.611)	42.547	156.518	5.041
Papua Barat	18.169	36.834	3.045	(24.913)	33.134	42.328	1.149

Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Akan Dikonfirmasi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kg/Ha)
Papua Selatan	1.646	96.370	-	(13.441)	84.574	374.059	3.882
Papua Tengah	-	10.092	-	9.909	20.002	47.129	4.670
Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-
Papua Barat Daya	7.527	21.680	7.456	(8.636)	28.027	39.662	1.829
INDONESIA	2.362.350	12.909.119	665.112	897.404	16.833.985	46.554.896	3.606

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Produksi kelapa sawit nasional tahun 2025 terkonsentrasi pada sentra utama di Sumatera dan Kalimantan, sehingga kontribusi kedua kawasan ini menjadi penentu utama capaian indikator produksi nasional. Provinsi Riau menjadi kontributor terbesar dengan produksi sebesar 9.467.531 ton yang didukung oleh luas areal mencapai 3.494.583 ha, diikuti Kalimantan Tengah dengan produksi 7.591.136 ton dari luas areal 2.037.705 ha, serta Sumatera Utara yang menghasilkan 5.186.849 ton dengan produktivitas relatif tinggi sekitar 4.566 kg/ha. Kondisi ini menegaskan bahwa wilayah sentra sawit tidak hanya unggul dari sisi luasan, tetapi juga memiliki ekosistem produksi yang kuat sehingga mampu menopang volume produksi nasional secara signifikan.

Kontribusi produksi di wilayah lainnya seperti sebagian provinsi di Sulawesi, Maluku, Papua, dan Jawa cenderung lebih kecil, meskipun terdapat beberapa wilayah dengan luas areal terbatas namun produktivitas

tinggi, misalnya Papua yang mencatat produktivitas sekitar 5.041 kg/ha dan Papua Tengah sekitar 4.670 kg/ha. Selain itu, terdapat provinsi dengan produktivitas relatif rendah yang perlu menjadi perhatian, seperti Papua Barat sebesar 1.149 kg/ha, Gorontalo sebesar 1.221 kg/ha, dan Sulawesi Tenggara sebesar 1.362 kg/ha, yang mengindikasikan perlunya penguatan budidaya, perbaikan kualitas tanaman, serta pembinaan teknis agar produksi lebih optimal.

Dari sisi teknis budidaya, adanya OPT masih menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi kelapa sawit nasional. Tahun 2025 luas lahan terdampak OPT sebesar 195.189 ha yang tersebar di seluruh sentra produksi kelapa sawit nasional. Dari luas areal terdampak tersebut, terdapat 130.323 ha yang telah dilakukan pengendalian atau sebesar 67%. Jenis OPT yang ditemukan di lapangan antara lain kumbang nyiur (*Oryctes rhinoceros*), busuk pangkal batang (*Ganoderma boninense*), dan adanya gulma. Kumbang nyiur dan *Ganoderma boninense* banyak ditemukan di provinsi Sumatera Utara dengan total luas yang terdampak sebesar 38.995 ha, gangguan adanya gulma terbesar berada di Provinsi Riau dengan luas 53.465 ha.

Kondisi harga rata-rata pasar dan kinerja ekspor impor kelapa sawit diuraikan sebagai berikut.

Tabel 15. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Kelapa Sawit di Pasar Domestik Tahun 2020 - 2025

Tahun	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	1.280
2021	1.934
2022	1.929
2023	1.783
2024	2.748
2025	3.267

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Berdasarkan data tahun 2020–2025, rata-rata harga kelapa sawit domestik yang diperdagangkan dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS) menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun disertai fluktuasi pada beberapa periode. Harga rata-rata TBS meningkat dari Rp1.280/kg pada tahun 2020 menjadi Rp1.934/kg pada tahun 2021, kemudian relatif stabil pada tahun 2022 sebesar Rp1.929/kg dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp1.783/kg. Pada tahun 2024, harga kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp2.748/kg, yang mencerminkan mulai membaiknya kondisi pasar domestik. Tren kenaikan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan lonjakan harga yang cukup signifikan hingga mencapai Rp3.267/kg. Peningkatan harga pada akhir periode ini menunjukkan adanya penguatan permintaan terhadap TBS, baik dari industri pengolahan dalam negeri maupun seiring membaiknya harga sawit di pasar global. Kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan

pendapatan petani dan pelaku usaha perkebunan. Namun demikian, fluktuasi harga yang terjadi sepanjang periode 2020 - 2025 menunjukkan bahwa harga TBS masih sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar, termasuk kebijakan hilirisasi, permintaan industri, serta perkembangan harga minyak sawit mentah di tingkat internasional.

Tabel 16. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Kelapa Sawit (CPO dan KPO)

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	36.423.571	20.007.455	2.921	2.977
2021	36.657.964	30.293.083	1.393	2.165
2022	36.421.003	31.296.738	2.578	3.406
2023	38.123.209	25.481.053	6.656	3.481
2024	32.338.524	22.849.468	10.590	8.477
2025*)	32.449.738	25.322.371	9.604	4.743

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor–impor kelapa sawit (CPO dan KPO) periode 2020–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Volume ekspor relatif stabil pada kisaran 36–38 juta ton selama 2020–2023, dengan puncak pada 2023 sebesar 38,12 juta ton, kemudian menurun pada 2024 menjadi 32,34 juta ton dan relatif stagnan pada 2025 (s.d. November) sebesar 32,45 juta ton. Nilai ekspor mengalami lonjakan signifikan pada 2021–2022 seiring kenaikan harga internasional, mencapai puncak pada 2022 sebesar USD 31,30 miliar, lalu menurun pada 2023–2024 sebelum kembali meningkat pada 2025 menjadi USD 25,32 miliar. Di sisi lain, volume dan nilai impor cenderung meningkat,

terutama sejak 2023, dengan volume impor tertinggi pada 2024 sebesar 10.590 ton dan nilai impor USD 8,48 juta, meskipun pada 2025 terjadi penurunan impor baik dari sisi volume maupun nilai. Secara umum, kinerja ekspor kelapa sawit masih menunjukkan surplus yang kuat, meskipun dipengaruhi oleh volatilitas harga global dan dinamika kebutuhan domestik.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Kelapa Sawit

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja produksi kelapa sawit tahun 2025 termasuk dalam kategori berhasil menunjukkan bahwa secara umum kinerja komoditas kelapa sawit berada pada pertumbuhan yang positif, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target. Faktor-faktor pendukung capaian produksi kelapa sawit antara lain

- 1) Kinerja produksi kelapa sawit didukung oleh ketersediaan areal yang luas dan konsentrasi sentra produksi di wilayah utama, sehingga kapasitas produksi nasional relatif stabil dan mampu menjaga kesinambungan pasokan bahan baku industri hilir.
- 2) Stabilitas iklim pada periode tertentu dapat memperkuat produktivitas kebun sawit, sehingga realisasi produksi di wilayah sentra meningkat dan kontribusi terhadap capaian indikator produksi menjadi lebih optimal.
- 3) Mandatori biodiesel memperkuat serapan pasar domestik, meningkatkan kepastian permintaan, serta mendukung keberlanjutan industri sawit yang pada

akhirnya berkontribusi pada terjaganya kinerja produksi nasional.

- 4) Penerapan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) sebagai standar wajib mendorong perbaikan pengelolaan kebun dan kepatuhan praktik berkelanjutan, sehingga produktivitas dan daya saing komoditas lebih terjaga dalam jangka panjang.
- 5) Pemulihan harga kelapa sawit yang memotivasi petani untuk meningkatkan hasil panen.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Produksi Kelapa Sawit

Dalam pelaksanaannya, capaian indikator produksi kelapa sawit belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sejumlah permasalahan yang mempengaruhi stabilitas produksi dan produktivitas kelapa sawit, diantaranya :

- 1) Luas areal TBM masih sangat besar, yaitu sebesar 2.362.350 ha yang menunjukkan terdapat areal yang masih berada pada fase belum produktif dan belum memberikan kontribusi terhadap produksi.
- 2) Kondisi tanaman tua dan keterbatasan kemampuan pekebun dalam melakukan peremajaan menjadi faktor yang menekan produktivitas kebun, sehingga berdampak pada kemampuan pencapaian indikator produksi.
- 3) Serangan OPT seperti *Ganoderma boninense* yang menyebabkan busuk pangkal batang, dan *Oryctes rhinoceros*. Meningkatkan luas tanaman rusak (± 64

- ribu ha) dan menurunkan produktivitas, kehilangan potensi hasil panen, serta menurunkan kontribusi kebun berdampak terhadap capaian produksi nasional.
- 4) Ketidakstabilan iklim memperbesar risiko penurunan produktivitas pada waktu tertentu, sehingga realisasi produksi tidak selalu konsisten meskipun basis areal produksi tetap.
 - 5) Kebutuhan domestik yang meningkat untuk biodiesel harus diimbangi pengelolaan pasokan dan produktivitas agar tidak menimbulkan tekanan pada rantai pasok industri serta menjaga stabilitas produksi dan distribusi.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator Produksi Kelapa Sawit

- 1) Penguatan pembinaan teknis dan pendampingan budidaya TBM secara terarah melalui penerapan praktik budidaya yang baik, perbaikan pemeliharaan kebun, dan peningkatan kualitas bahan tanam.
- 2) Percepatan peremajaan kelapa sawit secara berkelanjutan, khususnya pada kebun rakyat, melalui penguatan fasilitasi kelembagaan pekebun, pendampingan pelaksanaan *replanting* sesuai standar teknis, serta pengembangan kemitraan usaha agar peremajaan berjalan efektif, produktivitas naik, dan produksi dapat meningkat.
- 3) Pengendalian OPT terpadu melalui deteksi dini dan pemetaan serangan, penerapan sanitasi kebun dan tindakan pengendalian sesuai standar teknis,

peningkatan kapasitas pekebun dan petugas lapangan dalam identifikasi serta pengendalian OPT, serta dukungan sarana pengendalian agar penurunan produktivitas dan kehilangan hasil panen dapat ditekan.

- 4) Penguatan adaptasi budidaya terhadap ketidakpastian iklim melalui perbaikan tata kelola air dan konservasi lahan, penyesuaian teknik pemeliharaan kebun berbasis kondisi cuaca, penguatan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), serta pemanfaatan informasi iklim untuk mendukung langkah antisipasi agar produktivitas dan stabilitas produksi tetap terjaga.
- 5) Pengelolaan produksi dan rantai pasok kelapa sawit melalui peningkatan produktivitas kebun, penguatan koordinasi hulu-hilir serta menjaga keseimbangan pasokan bagi kebutuhan domestik dan keberlanjutan kinerja produksi nasional.

b. Produksi Kelapa

Kelapa merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama melalui penguatan aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain menjadi sumber pendapatan bagi petani, komoditas kelapa juga berperan sebagai penyedia bahan baku bagi berbagai industri pengolahan, sehingga turut mendorong peningkatan nilai tambah dan

pengembangan peluang usaha pada sektor hilir. Untuk memastikan kontribusi tersebut berlangsung secara berkelanjutan, diperlukan jaminan ketersediaan pasokan bahan baku yang memadai, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi kelapa nasional dari tahun ke tahun. Capaian produksi kelapa menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan kinerja subsektor perkebunan, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan langkah strategis untuk penguatan budidaya serta peningkatan produktivitas. Data produksi kelapa nasional tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 17. Capaian Produksi Kelapa

IK 1-2			Produksi Kelapa	
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
2.880.690 Ton	2.766.260 Ton*)	96,03	2.936.021 Ton	94,22

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Indikator Produksi Kelapa pada tahun 2025 menunjukkan capaian dengan kategori **Berhasil**, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data kinerja, target produksi kelapa tahun 2025 sebesar 2.880.690 ton, dengan realisasi mencapai 2.766.260 ton, sehingga capaian kinerja sebesar 96,03%. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 2.936.021 ton, maka realisasi produksi kelapa tahun 2025

telah mencapai 94,22% terhadap target akhir renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi kelapa nasional masih berada pada jalur pencapaian target, namun tetap memerlukan penguatan langkah-langkah peningkatan produksi agar gap target tahunan dan target renstra dapat dipenuhi secara optimal.

Tabel 18. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	439.714	2.554.744	397.535	3.391.993	2.858.010	1.119
2021	422.983	2.546.631	385.921	3.355.535	2.877.504	1.130
2022	408.252	2.554.397	378.191	3.340.840	2.867.054	1.122
2023	410.782	2.529.937	375.039	3.315.758	2.836.201	1.121
2024	406.043	2.502.062	382.650	3.290.755	2.792.228	1.116
2025*)	405.680	2.491.381	374.987	3.272.048	2.766.260	1.110

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan tabel 18 Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa tahun 2020–2025, secara umum kinerja komoditas kelapa menunjukkan tren penurunan bertahap baik dari sisi luas areal maupun produksi, yang pada akhirnya turut menekan capaian produktivitas. Dari sisi luas areal, total areal kelapa menurun dari 3.391.993 ha pada 2020 menjadi 3.272.048 ha pada tahun 2025 atau turun sekitar 3,5%. Luas TM dari 2.554.744 ha menjadi 2.491.381 ha pada tahun 2025,

menunjukkan berkurangnya kapasitas areal produktif sebagai penopang produksi nasional. Sementara itu, luas TBM juga mengalami penurunan dari 439.714 ha menjadi 405.680 ha menunjukkan bahwa penguatan tanaman muda sebagai penopang produksi di masa mendatang masih perlu ditingkatkan. Luas TTM/TR cenderung fluktuatif, namun menurun dari 397.535 ha menjadi 374.987 ha, yang menunjukkan adanya perubahan pada kondisi areal rusak/tidak menghasilkan, meskipun belum sepenuhnya diikuti peningkatan kinerja produksi.

Produksi kelapa mengalami penurunan dari 2.858.010 ton pada tahun 2020 menjadi 2.766.260 ton pada 2025 atau turun sekitar 3,2%. Penurunan produksi ini mencerminkan bahwa kapasitas produksi nasional belum sepenuhnya stabil, terutama karena berkurangnya areal TM serta belum optimalnya kontribusi TBM sebagai penunjang produksi. Selain itu, produktivitas kelapa juga mengalami penurunan dari 1.119 kg/ha menjadi 1.110 kg/ha. Kondisi ini berarti bahwa penurunan produksi tidak hanya dipengaruhi oleh penyusutan areal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan tanaman menghasilkan output per satuan luas yang cenderung menurun, yang dapat berkaitan dengan faktor umur tanaman, pemeliharaan kebun, dan efektivitas budidaya di tingkat pekebun.

Tabel 19. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	10.725	74.347	15.441	100.513	64.089	862
2.	Sumatera Utara	8.702	91.693	9.659	110.054	100.698	1.098
3.	Sumatera Barat	6.973	66.224	10.791	83.988	84.669	1.279
4.	Riau	34.899	333.425	76.175	444.500	397.194	1.191
5.	Kepulauan Riau	3.189	20.011	9.413	32.613	12.164	608
6.	Jambi	4.699	94.290	15.873	114.862	115.345	1.223
7.	Sumatera Selatan	5.955	53.022	9.102	68.078	61.716	1.164
8.	Kep. Bangka Belitung	1.023	4.148	820	5.990	3.493	842
9.	Bengkulu	1.093	7.048	231	8.371	7.248	1.028
10.	Lampung	6.006	75.989	9.119	91.115	84.080	1.106
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	15.184	101.611	26.753	143.548	79.806	785
13.	Banten	9.098	59.702	5.788	74.588	45.833	768
14.	Jawa Tengah	38.575	142.975	12.753	194.303	139.431	975
15.	D.I. Yogyakarta	4.058	32.218	1.559	37.836	50.050	1.553
16.	Jawa Timur	22.929	138.903	42.494	204.326	186.285	1.341
17.	Bali	2.318	64.487	2.839	69.645	68.342	1.060
18.	Nusa Tenggara Barat	7.823	44.930	4.450	57.202	48.434	1.078
19.	Nusa Tenggara Timur	31.491	79.787	7.695	118.972	62.595	785
20.	Kalimantan Barat	5.131	71.582	14.801	91.514	75.992	1.062
21.	Kalimantan Tengah	8.235	27.540	1.418	37.194	16.990	617
22.	Kalimantan Selatan	5.691	26.699	3.597	35.987	23.949	897
23.	Kalimantan Timur	1.674	14.648	1.801	18.123	8.908	608
24.	Kalimantan Utara	369	919	84	1.373	660	718
25.	Sulawesi Utara	31.835	216.244	22.031	270.109	270.037	1.249
26.	Gorontalo	20.860	47.494	3.722	72.076	66.596	1.402
27.	Sulawesi Tengah	22.797	172.316	23.699	218.812	193.724	1.124
28.	Sulawesi Selatan	6.631	68.347	16.857	91.835	67.709	991
29.	Sulawesi Barat	3.594	32.912	6.216	42.721	35.829	1.089

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
30.	Sulawesi Tenggara	12.773	46.971	3.354	63.098	42.870	913
31.	Maluku	22.122	87.946	4.286	114.353	107.685	1.224
32.	Maluku Utara	37.975	158.977	7.533	204.485	212.094	1.334
33.	Papua	3.993	10.616	1.781	16.390	9.776	921
34.	Papua Barat	1.858	3.485	203	5.546	2.020	580
35.	Papua Selatan	1.121	4.772	179	6.072	4.358	913
36.	Papua Tengah	2.367	1.390	159	3.916	1.207	868
37.	Papua Pegunungan	41	48	10	99	24	499
38.	Papua Barat Daya	1.875	13.664	2.304	17.842	14.360	1.051
	INDONESIA	405.680	2.491.381	374.987	3.272.048	2.766.260	1.110

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan tabel 19 sebaran provinsi, produksi kelapa nasional didominasi oleh beberapa wilayah sentra yang memiliki luas TM besar. Provinsi dengan kontribusi terbesar antara lain Provinsi Riau dengan produksi 397.194 ton dan luas areal 444.500 ha dengan produktivitas 1.191 kg/ha, Sulawesi Utara 270.037 ton dengan produktivitas 1.249 kg/ha, Maluku Utara 212.094 ton dengan produktivitas 1.334 kg/ha, serta Sulawesi Tengah 193.724 ton dengan produktivitas 1.124 kg/ha. Selain itu, wilayah Jawa juga berperan penting, terutama Jawa Timur dengan produksi 186.285 ton dan produktivitas relatif tinggi 1.341 kg/ha, serta Jawa Tengah 139.431 ton dengan produktivitas 975 kg/ha.

Dari sisi produktivitas, terdapat provinsi yang mendominasi meskipun luas arealnya tidak besar, seperti D.I. Yogyakarta dengan produktivitas tertinggi 1.553 kg/ha serta Gorontalo 1.402 kg/ha. Namun, masih

terdapat wilayah dengan produktivitas rendah seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur sebesar 608 kg/ha, Kalimantan Tengah sebesar 617 kg/ha, serta Papua Barat sebesar 580 kg/ha sehingga berdampak pada produksi yang masih relatif kecil. Kondisi variasi produktivitas antar provinsi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi kelapa nasional tidak hanya ditentukan oleh luas areal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor teknis di lapangan yang berpengaruh langsung terhadap hasil per hektare. Salah satu faktor penting yang dapat menjadi penghambat produktivitas adalah adanya gangguan OPT, baik hama maupun penyakit, yang berpotensi mengurangi potensi hasil panen.

Total luas areal kelapa yang terdampak OPT mencapai 190.039 ha. Jenis OPT yang paling banyak muncul meliputi kumbang nyiur (*Oryctes rhinoceros*) seluas 49.083 ha, kumbang janur (*Brontispa sp.*) seluas 18.376 ha, serta adanya gangguan tupai/bajing (*Callosciurus sp.*) seluas 9.282 ha. Dilihat berdasarkan sebarannya, kumbang nyiur paling banyak terdapat di provinsi Jawa Barat seluas 10.000 ha, kumbang janur di provinsi Sulawesi Tengah, dan gangguan tupai/bajing paling banyak terdapat pada provinsi Aceh seluas 4.375 ha. Dengan memperhatikan sebaran serangan tersebut, diperlukan penguatan langkah pengendalian OPT secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, terutama pada wilayah dengan tingkat serangan tertinggi, guna

menekan perluasan serangan serta menjaga produktivitas dan keberlanjutan produksi kelapa nasional. Perkembangan harga rata-rata domestik dan kinerja ekspor impor kelapa adalah sebagai berikut.

Tabel 20. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Kelapa di Pasar Domestik Tahun 2020 - 2025

Tahun	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	5.258
2021	8.095
2022	8.000
2023	6.409
2024	8.098
2025	13.882

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Berdasarkan Tabel Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Kelapa di Pasar Domestik Tahun 2020–2025, harga kelapa domestik menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2020 harga rata-rata kelapa sebesar Rp5.258/kg, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp8.095/kg dan relatif stabil pada tahun 2022 sebesar Rp8.000/kg, sebelum mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp6.409/kg yang mengindikasikan adanya peningkatan pasokan dan/atau pelemahan permintaan. Selanjutnya, pada tahun 2024 harga kembali meningkat menjadi Rp8.098/kg, dan pada tahun 2025 mengalami lonjakan yang sangat signifikan hingga mencapai Rp13.882/kg,

menunjukkan meningkatnya permintaan yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan pasokan. Secara keseluruhan, perkembangan harga tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan pasar kelapa domestik semakin dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan permintaan, khususnya terkait kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan, sehingga diperlukan penguatan pengelolaan produksi, stabilisasi pasokan, serta pengendalian harga secara berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan usaha pekebun dan stabilitas pasar domestik.

Tabel 21. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Kelapa

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	2.104.745	1.171.840	48.305	47.635
2021	2.028.338	1.650.422	76.206	112.152
2022	1.781.342	1.253.737	47.277	49.195
2023	2.174.712	1.314.430	11.467	12.358
2024	2.314.561	1.642.025	11.230	10.730
2025*)	2.280.561	2.284.051	28.869	52.147

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor–impor kelapa periode 2020–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Volume ekspor kelapa cenderung menurun dari 2,10 juta ton pada 2020 menjadi 1,78 juta ton pada 2022, kemudian meningkat signifikan pada 2023–2024 hingga mencapai 2,31 juta ton, sebelum sedikit menurun pada 2025 (s.d. November) menjadi 2,28

juta ton. Nilai ekspor juga berfluktuasi, dengan lonjakan pada 2021 sebesar USD 1,65 miliar, menurun pada 2022–2023, lalu kembali meningkat pada 2024 dan melonjak tajam pada 2025 hingga mencapai USD 2,28 miliar, yang mengindikasikan penguatan harga atau peningkatan nilai tambah produk kelapa. Sementara itu, volume dan nilai impor relatif tinggi pada 2020–2021, kemudian menurun drastis pada 2023–2024, sebelum kembali meningkat pada 2025. Secara keseluruhan, neraca perdagangan kelapa tetap menunjukkan surplus yang kuat, dengan kinerja ekspor yang lebih dominan dibandingkan impor meskipun dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan harga pasar global.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Kelapa

- 1) Kapasitas areal produktif (TM) masih besar sehingga pasokan produksi tetap terjaga. Meskipun luas TM kelapa turun dari 2.554.744 ha (2020) menjadi 2.491.381 ha (2025), areal menghasilkan masih mendominasi.
- 2) Keberhasilan produksi kelapa juga ditopang oleh konsistensi sentra utama, seperti Riau (397.194 ton), Sulawesi Utara (270.037 ton), Maluku Utara (212.094 ton), dan Sulawesi Tengah (193.724 ton), yang menjaga stabilitas pasokan nasional meskipun terjadi fluktuasi produksi di wilayah lain.
- 3) Capaian produksi nasional turut dipengaruhi oleh beberapa provinsi yang memiliki produktivitas relatif

tinggi, seperti D.I. Yogyakarta (1.553 kg/ha), Gorontalo (1.402 kg/ha), Jawa Timur (1.341 kg/ha), dan Maluku Utara (1.334 kg/ha).

- 4) Kinerja impor kelapa yang relatif kecil dan menurun menjadi indikasi bahwa pasokan kelapa nasional masih mampu menopang kebutuhan domestik. Kondisi ini mendukung keberhasilan capaian produksi karena pasar domestik tetap dapat disuplai oleh produksi nasional.
- 5) Ekspor kelapa menunjukkan penguatan sehingga pasar tetap menyerap produksi dan memberikan insentif ekonomi bagi keberlanjutan usaha tani dan produksi.
- 6) Luas TTM/TR secara umum menurun dari 397.535 ha (2020) menjadi 374.987 ha (2025). Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan atau pergeseran kondisi areal rusak yang berkontribusi menjaga kapasitas lahan produktif agar tetap berfungsi untuk menunjang produksi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Produksi Kelapa

Salah satu tantangan utama yang memengaruhi capaian indikator produksi komoditas kelapa antara lain

- 1) Produktivitas kelapa nasional masih rendah dan cenderung menurun yang dipengaruhi oleh dominasi tanaman tua atau tidak produktif, sehingga memengaruhi capaian indikator produksi.

- 2) Penerapan GAP belum optimal dan belum merata, khususnya pada perkebunan rakyat.
- 3) Penurunan luas TM dari 2.502.062 ha pada tahun 2024 menjadi 2.491.381 ha pada 2025, menyebabkan menurunnya kapasitas areal produktif yang dapat dipanen, sehingga total produksi berpotensi tidak optimal jika tidak diimbangi peningkatan produktivitas.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator Produksi Kelapa

- 1) Peningkatan produktivitas kelapa melalui intensifikasi budidaya pada kebun eksisting, khususnya pada areal tanaman tua/tidak produktif, agar potensi hasil per hektar meningkat
- 2) Penguatan penerapan GAP secara lebih konsisten dan merata melalui pembinaan, pendampingan teknis, dan sosialisasi kepada petani, mencakup pemeliharaan kebun, pemupukan berimbang, pengendalian OPT, serta panen dan pascapanen yang tepat.
- 3) Penguatan kapasitas areal produktif (TM) melalui dukungan program pemerintah yang terintegrasi, termasuk penyediaan bahan tanam unggul, rehabilitasi/peremajaan tanaman, serta penetapan lokasi prioritas berbasis data pada wilayah sentra maupun wilayah berpotensi, guna menjaga stabilitas produksi dan meningkatkan capaian produksi kelapa nasional.

c. Produksi Sagu

Sagu merupakan salah satu komoditas pangan lokal asal perkebunan yang memiliki peran penting dalam mendukung diversifikasi sumber karbohidrat dan ketahanan pangan nasional, terutama pada wilayah-wilayah yang secara historis menjadikan sagu sebagai bagian dari pola konsumsi masyarakat. Indonesia dikenal memiliki potensi sumber daya sagu yang besar, baik dari sisi kesesuaian lahan maupun ketersediaan areal, sehingga komoditas sagu memiliki peluang untuk dikembangkan lebih luas sebagai alternatif penguatan pangan lokal. Secara nasional, produksi sagu masih berada pada ratusan ribu ton per tahun dan cenderung terkonsentrasi di beberapa provinsi penghasil, sementara pemanfaatan potensinya secara lebih luas masih memerlukan penguatan pengelolaan dari hulu hingga hilir, termasuk dukungan pengolahan dan akses pasar. Sejalan dengan hal tersebut, pada Tabel 22 disajikan data produksi sagu tahun 2025.

Tabel 22. Capaian Produksi Sagu

IK 1-3		Produksi Sagu		
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
401.991 Ton	402.887 Ton	100,22	478.451 Ton	84,21

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, indikator produksi sagu menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2025, target produksi sagu ditetapkan sebesar 401.991 ton dan realisasi mencapai 402.887 ton, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100,22%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produksi sagu secara nasional mampu memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan dengan kategori **berhasil**. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 478.451 ton, maka capaian produksi sagu tahun 2025 mencapai 84,21%. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun target tahunan telah tercapai, upaya penguatan produksi sagu masih perlu terus didorong agar peningkatan produksi pada tahun berikutnya dapat lebih cepat mendekati sasaran yang ditetapkan.

Tabel 23. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Sagu

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	68.884	121.445	10.516	200.845	366.794	3.020
2021	67.897	121.975	11.003	200.875	367.107	3.010
2022	75.264	126.731	10.473	212.468	385.905	3.045
2023	70.433	132.462	11.727	214.623	393.284	2.969
2024	70.031	133.434	11.899	215.364	401.991	3.013
2025*)	70.319	133.026	11.880	215.225	402.887	3.029

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan Tabel 23 Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Sagu tahun 2020–2025, komoditas sagu menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dengan kecenderungan peningkatan dari sisi kapasitas areal produktif (TM) dan produksi. Total luas areal sagu meningkat dari 200.845 ha pada tahun 2020 menjadi 215.225 ha pada tahun 2025. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh bertambahnya TM dari 121.445 ha pada tahun 2020 menjadi 133.026 ha pada tahun 2025, yang menggambarkan menguatnya areal panen potensial. Sementara itu, luas TBM berada pada kisaran 67–75 ribu ha dan pada tahun 2025 sebesar 70.319 ha, yang menunjukkan bahwa ketersediaan tanaman muda sebagai penunjang produksi masih perlu dijaga. Luas TTM/TR meningkat dari 10.516 ha pada tahun 2020 menjadi 11.880 ha pada tahun 2025, sehingga diperlukan perhatian pada penanganan areal yang belum optimal agar tidak berdampak pada kinerja produksi.

Sejalan dengan peningkatan areal produktif, produksi sagu mengalami kenaikan dari 366.794 ton pada tahun 2020 menjadi 402.887 ton pada tahun 2025, dengan tren peningkatan yang relatif konsisten terutama sejak tahun 2022. Produktivitas sagu berada pada rentang 2.000–3.000 kg/ha. Pada tahun 2020 produktivitas sagu sebesar 3.020 kg/ha dan 3.029 kg/ha pada tahun 2025, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan produksi juga didorong oleh bertambahnya luas TM. Dengan demikian,

peningkatan sagu kedepan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui perbaikan pengelolaan budidaya dan optimalisasi areal TTM/TR agar peningkatan produksi dapat berkelanjutan.

Tabel 24. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Sagu Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	1.747	3.153	1.150	6.051	1.595	506
2.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Barat	440	938	23	1.401	660	704
4.	Riau	27.357	46.223	4.892	78.472	294.039	6.361
5.	Kepulauan Riau	2.271	2.183	1.364	5.818	1.511	692
6.	Jambi	-	-	-	-	-	-
7.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
8.	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
9.	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-	-	-	-
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
13.	Banten	-	-	-	-	-	-
14.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
15.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
16.	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
17.	Bali	-	-	-	-	-	-
18.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20.	Kalimantan Barat	1.297	737	-	2.034	728	988
21.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Selatan	1.943	1.725	427	4.094	2.220	1.287
23.	Kalimantan Timur	4	14	13	31	12	850
24.	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
25.	Sulawesi Utara	757	1.237	-	1.994	2.822	2.282
26.	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
27.	Sulawesi Tengah	255	1.121	1.828	3.204	755	674
28.	Sulawesi Selatan	339	3.134	183	3.656	6.236	1.990
29.	Sulawesi Barat	159	823	206	1.188	520	632
30.	Sulawesi Tenggara	1.540	2.368	123	4.031	2.644	1.117
31.	Maluku	12.972	22.340	1.097	36.409	15.778	706
32.	Maluku Utara	1.251	2.999	90	4.339	884	295
33.	Papua	2.147	7.840	340	10.327	11.233	1.433
34.	Papua Barat	257	592	36	885	199	335
35.	Papua Selatan	1.578	4.052	73	5.702	7.128	1.759
36.	Papua Tengah	13.046	29.067	4	42.117	51.164	1.760
37.	Papua Pegunungan	283	256	-	539	293	1.146
38.	Papua Barat Daya	676	2.227	32	2.934	2.467	1.108
	INDONESIA	70.319	133.026	11.880	215.225	402.887	3.029

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Dilihat dari sebaran wilayahnya, produksi sagu nasional pada tahun 2025 masih terkonsentrasi pada wilayah penghasil utama, khususnya wilayah Maluku dan Papua serta wilayah Sumatera. Wilayah Maluku dan Papua menjadi kontributor terbesar dengan total luas areal sekitar 103.252 ha dan produksi mencapai 89.146 ton. Wilayah Sumatera juga menjadi penopang produksi dengan total luas areal sekitar 91.741 ha dan produksi sebesar 297.804 ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Riau yang mencatat produksi sekitar 294.039 ton. Dominasi dari wilayah produksi yang tinggi ini menunjukkan bahwa ketahanan produksi sagu nasional masih sangat bergantung pada provinsi dan

wilayah tertentu, sehingga penguatan pengembangan sagu di daerah potensial lain perlu terus dilakukan untuk menciptakan sebaran produksi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Selain faktor sebaran produksi tersebut, produksi sagu di berbagai wilayah juga menghadapi gangguan OPT yang berpotensi menekan produktivitas dan menimbulkan kehilangan hasil produksi, salah satunya adalah adanya gangguan babi hutan. Babi hutan kerap merusak tanaman sagu melalui aktivitas mencari pakan dan menggali tanah di sekitar kebun, sehingga menyebabkan tanaman muda mengalami kerusakan, pertumbuhan terhambat, bahkan mati. Gangguan Babi Hutan paling banyak terdapat pada Provinsi Riau dengan luas sebesar 55 ha. Dampak kerusakan akibat Babi Hutan adalah dapat menurunkan potensi produksi pada areal terdampak.

Tabel 25. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Sagu di Pasar Domestik Tahun 2020 - 2025

Tahun	Jenis	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	Tepung Kering	11.762
	Tepung Basah	5.885
2021	Tepung Kering	12.564
	Tepung Basah	7.852
2022	Tepung Kering	11.482
	Tepung Basah	8.192
2023	Tepung Kering	15.220

Tahun	Jenis	Harga Rata - rata (Rp/kg)
	Tepung Basah	8.694
2024	Tepung Kering	19.193
	Tepung Basah	8.125
2025	Tepung Kering	19.141
	Tepung Basah	6.970

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Perkembangan harga rata-rata domestik sagu, yang terdiri atas sagu tepung kering dan sagu tepung basah, selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan kecenderungan harga yang cukup signifikan antara kedua jenis produk tersebut. Harga sagu tepung kering menunjukkan tren peningkatan, dari Rp11.762/kg pada tahun 2020 menjadi Rp19.141/kg pada tahun 2025, yang menunjukkan penguatan nilai ekonomi sagu hasil pengolahan dengan daya simpan yang lebih baik, kemudahan distribusi, serta peluang pemasaran yang lebih luas, terutama untuk kebutuhan perdagangan dan industri. Sementara itu, harga sagu tepung basah cenderung berfluktuasi dan berada pada tingkat yang relatif lebih rendah, dari Rp5.885/kg pada tahun 2020, meningkat hingga Rp8.694/kg pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi Rp8.125/kg pada tahun 2024 dan kembali melemah pada tahun 2025 sebesar Rp6.970/kg. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga tepung basah masih dipengaruhi oleh keterbatasan daya simpan,

ketergantungan pada pasar lokal, serta efisiensi distribusi, sedangkan tepung kering memiliki daya saing lebih tinggi karena lebih sesuai untuk kebutuhan perdagangan dan industri. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengolahan dan peningkatan mutu produk menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai tambah sagu serta mendorong stabilitas harga di tingkat pelaku usaha.

Tabel 26. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Sagu

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	13.175	2.861	127	266
2021	13.191	2.467	266	498
2022	16.123	4.114	356	687
2023	14.701	13.786	352	621
2024	13.627	4.096	379	645
2025*)	14.499	5.237	268	499

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor–impor sagu periode 2020–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada nilai ekspor. Volume ekspor sagu relatif kecil dan cenderung berfluktuasi pada kisaran 13–16 ribu ton, dengan puncak pada 2022 sebesar 16.123 ton, kemudian menurun pada 2023–2024 dan kembali meningkat pada 2025 (s.d.

November) menjadi 14.499 ton. Nilai ekspor mengalami lonjakan sangat tajam pada 2023 hingga mencapai USD 13,79 juta, meskipun volume ekspor justru menurun, yang mengindikasikan kenaikan harga atau perubahan komposisi produk bernilai tambah, sebelum kembali turun pada 2024 dan meningkat lagi pada 2025 menjadi USD 5,24 juta. Di sisi lain, volume dan nilai impor sagu relatif rendah namun cenderung meningkat secara bertahap hingga 2024, lalu menurun pada 2025. Secara keseluruhan, perdagangan sagu masih didominasi oleh ekspor dengan surplus yang terjaga, meskipun dipengaruhi oleh volatilitas nilai ekspor dari tahun ke tahun.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Sagu

Keberhasilan capaian indikator Produksi Sagu tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- 1) Peningkatan produksi didukung oleh bertambahnya kapasitas areal produktif (TM), dimana luas TM meningkat dari 121.445 ha (2020) menjadi 133.026 ha (2025). Kondisi ini memperbesar luasan potensial panen dan menjadi penopang utama naiknya produksi dari 366.794 ton (2020) menjadi 402.887 ton (2025).
- 2) Sentra produksi utama mampu menjaga kontribusi besar terhadap total produksi nasional, terutama wilayah Sumatera yang mencatat produksi 297.804 ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Riau sebesar 294.039 ton. Konsistensi kinerja sentra

utama ini menjadi faktor penguat dalam menjaga capaian produksi nasional.

- 3) Nilai ekonomi sagu menguat sehingga mendukung keberlanjutan produksi dan minat usaha, tercermin dari kenaikan harga rata-rata tepung sagu kering dari Rp11.762/kg (2020) menjadi Rp19.193/kg (2024). Peningkatan harga ini menjadi dasar penguatan nilai tambah dan peluang pasar sagu.
- 4) Kinerja perdagangan luar negeri relatif stabil sehingga memperkuat daya serap pasar, menunjukkan produk sagu masih memiliki peluang pasar meskipun fluktuasi nilai tetap terjadi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Produksi Sagu

Pencapaian indikator produksi sagu masih menghadapi sejumlah kendala diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Produksi sagu pada tahun 2020 sebesar 366.794 ton meningkat menjadi 402.887 ton pada tahun 2025, namun kenaikan tersebut tidak diikuti peningkatan produktivitas yang cenderung stagnan sehingga menunjukkan efisiensi produksi masih perlu diperkuat.
- 2) Kenaikan produksi masih dipengaruhi oleh penambahan luas areal, bukan intensifikasi yang optimal. Luas areal sagu pada tahun 2020 sebesar 200.845 ha dan meningkat menjadi 215.225 ha pada tahun 2025, sehingga peningkatan produksi lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan luas areal

dibandingkan dengan peningkatan hasil per satuan luas.

- 3) Luas TBM masih besar dan berfluktuasi sehingga menghambat percepatan peningkatan produksi.
- 4) Luas TTM/TR cenderung meningkat dan menurunkan efektivitas pemanfaatan areal.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator Produksi Sagu

Untuk mengatasi permasalahan diatas, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan produktivitas TM melalui penerapan GAP secara konsisten, meliputi pemeliharaan kebun, pengendalian OPT, dan penguatan panen dan pascapanen.
- 2) Mempercepat TBM menjadi menghasilkan melalui pembinaan teknis dan pendampingan intensif agar kontribusi produksi meningkat.
- 3) Mengurangi luas TTM/TR melalui rehabilitasi dan peremajaan areal tidak produktif secara terarah.
- 4) Mengoptimalkan produksi pada areal eksisting melalui intensifikasi sehingga peningkatan produksi tidak bergantung pada perluasan areal.

d. Produksi Lada

Lada merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Sebagai komoditas rempah unggulan, lada memiliki

prospek yang baik karena digunakan secara luas baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun sebagai bahan baku berbagai industri, seperti pangan, minuman, farmasi, dan produk olahan berbasis rempah. Pengembangan lada juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong aktivitas ekonomi wilayah pedesaan, memperkuat sumber pendapatan petani, serta menjaga keberlanjutan usaha perkebunan rakyat.

Produksi lada nasional menjadi indikator yang digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja subsektor perkebunan dalam menjaga kesinambungan pasokan komoditas rempah dari tahun ke tahun. Capaian produksi ini mencerminkan hasil dari berbagai wilayah sentra produksi di Indonesia, sehingga dapat digunakan untuk melihat perkembangan produksi secara menyeluruh pada tingkat nasional. Data produksi lada nasional tahun 2025 disajikan pada tabel 27.

Tabel 27. Capaian Produksi Lada

IK 1-4			Produksi Lada	
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
64.408 Ton	52.943 Ton*)	82,20	64.666 Ton	81,87

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan tabel 27, produksi lada nasional tahun 2025 adalah sebesar 52.943 ton dari target sebesar 64.408 ton, sehingga capaian kinerja produksi mencapai 82,20% atau berada dalam kategori **Berhasil**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi produksi lada pada tahun berjalan belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan dilakukan upaya percepatan dan perbaikan. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 64.666 ton, maka capaian produksi lada nasional tahun 2025 telah mencapai 81,87%, yang menggambarkan bahwa pemenuhan target produksi pada akhir tahun 2025 masih memerlukan peningkatan capaian pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 28. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Lada

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	59.664	114.315	17.587	191.566	86.083	753
2021	53.457	115.548	19.859	188.864	83.316	721
2022	45.789	109.531	19.014	174.334	75.205	687
2023	38.928	104.208	22.765	165.900	64.279	617
2024	33.219	95.585	23.337	152.141	58.897	616
2025*)	31.475	88.714	21.641	141.830	52.943	597

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan Tabel 28 Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Lada, kinerja komoditas lada nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun

2025 menunjukkan kecenderungan penurunan. Luas areal lada menurun dari 191.566 ha pada tahun 2020 menjadi 141.830 ha pada tahun 2025, yang diikuti oleh penurunan luas TM dari 114.315 ha pada tahun 2020 menjadi 88.714 ha pada tahun 2025. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap produksi lada nasional yang menurun dari 86.083 ton pada tahun 2020 menjadi 52.943 ton pada tahun 2025. Produktivitas lada juga mengalami penurunan dari 753 kg/ha pada tahun 2020 menjadi 597 kg/ha pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa penurunan produksi tidak hanya dipengaruhi oleh berkurangnya luas areal, namun juga oleh belum optimalnya hasil per satuan luas. Selain itu, peningkatan luas TTM/TR dari 17.587 ha pada tahun 2020 menjadi 21.641 ha pada tahun 2025 menunjukkan masih adanya areal yang tidak produktif dan memerlukan penanganan melalui rehabilitasi serta peremajaan untuk mendukung pemulihan kinerja produksi lada nasional.

Tabel 29. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Lada Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	208	389	255	853	249	640
2.	Sumatera Utara	61	181	21	263	267	1.475
3.	Sumatera Barat	3	14	26	43	7	489
4.	Riau	-	-	-	-	-	-
5.	Kepulauan Riau	65	55	75	194	34	609
6.	Jambi	2	37	4	43	11	297
7.	Sumatera Selatan	1.227	7.933	1.251	10.410	4.696	592
8.	Kep. Bangka Belitung	7.369	14.198	5.526	27.094	12.007	846
9.	Bengkulu	1.112	2.790	161	4.063	1.429	512

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
10.	Lampung	7.229	24.783	4.864	36.876	13.303	537
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	417	1.382	462	2.261	870	630
13.	Banten	244	383	211	838	270	705
14.	Jawa Tengah	681	1.288	218	2.188	591	459
15.	D.I. Yogyakarta	6	8	4	18	6	731
16.	Jawa Timur	106	262	68	436	148	563
17.	Bali	-	-	-	-	-	-
18.	Nusa Tenggara Barat	2	24	8	34	3	139
19.	Nusa Tenggara Timur	254	443	33	729	208	468
20.	Kalimantan Barat	2.149	5.434	2.608	10.192	4.431	815
21.	Kalimantan Tengah	69	189	132	390	168	887
22.	Kalimantan Selatan	52	176	106	333	114	649
23.	Kalimantan Timur	1.297	4.769	345	6.410	1.732	363
24.	Kalimantan Utara	340	396	202	938	206	519
25.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26.	Gorontalo	12	3	11	26	1	200
27.	Sulawesi Tengah	941	1.822	494	3.257	618	339
28.	Sulawesi Selatan	3.627	10.120	3.167	16.914	5.985	591
29.	Sulawesi Barat	431	595	55	1.082	320	538
30.	Sulawesi Tenggara	3.557	11.005	1.294	15.855	5.267	479
31.	Maluku	-	-	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	1	3	2	6	1	350
33.	Papua	-	12	8	20	1	100
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
35.	Papua Selatan	-	19	-	19	2	79
36.	Papua Tengah	-	-	3	3	-	-
37.	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38.	Papua Barat Daya	12	-	28	40	-	-
	INDONESIA	31.475	88.714	21.641	141.830	52.943	597

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Produksi lada nasional masih didominasi oleh beberapa provinsi sentra utama, terutama Provinsi Lampung dengan produksi 13.303 ton dari luas areal 36.876 ha, serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan produksi 12.007 ton dari luas areal 27.094 ha. Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5.985 ton, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4.696 ton, dan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4.431 ton, sehingga lima provinsi tersebut menjadi penopang utama produksi lada nasional. Dari sisi produktivitas, beberapa wilayah menunjukkan capaian tinggi seperti Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.475 kg/ha dan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 887 kg/ha, namun kontribusi produksinya masih terbatas karena luas areal relatif kecil. Sementara itu, produktivitas pada sentra produksi utama masih berada pada tingkat sedang, antara lain Provinsi Lampung sebesar 537 kg/ha dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 591 kg/ha, serta terdapat wilayah dengan produktivitas sangat rendah seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 139 kg/ha.

Produksi lada juga dipengaruhi porsi TBM dan TTM/TR yang cukup besar pada sentra produksi, seperti Provinsi Lampung dengan TBM 7.229 ha dan TTM/TR 4.864 ha, serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan TBM 7.369 ha dan TTM/TR 5.526 ha, yang berpotensi menekan capaian produksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi lada nasional tidak hanya memerlukan penguatan luas areal produktif,

namun juga perlu didukung oleh percepatan TBM menjadi menghasilkan serta rehabilitasi dan peremajaan pada areal tidak produktif.

Selain permasalahan struktur areal, capaian produksi lada nasional juga dihadapkan pada kendala teknis budidaya, khususnya gangguan OPT yang berpotensi menurunkan produktivitas. Berdasarkan hasil pemantauan, total luas areal lada yang teridentifikasi mengalami serangan OPT dan penyakit mencapai 10.504 ha. Jenis penyakit yang paling banyak menyerang tanaman lada yaitu penyakit kuning atau nematoda dengan luas serangan 3.570 ha dan penyakit busuk pangkal batang seluas 2.440 ha. Dari sisi sebaran wilayah, serangan penyakit kuning atau nematoda dan busuk pangkal batang terbanyak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total luasan sebesar 4.574 ha. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengendalian penyakit tanaman lada secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, khususnya pada wilayah dengan intensitas serangan tertinggi, guna menekan perluasan serangan serta menjaga produktivitas dan keberlanjutan produksi lada nasional. Perkembangan harga rata-rata dan kinerja ekspor impor lada adalah sebagai berikut.

Tabel 30. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Lada di Pasar Domestik Tahun 2020 - 2025

Tahun	Jenis	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	Lada Putih	59.473
	Lada Hitam	42.360
2021	Lada Putih	51.198
	Lada Hitam	43.457
2022	Lada Putih	66.299
	Lada Hitam	49.074
2023	Lada Putih	71.526
	Lada Hitam	48.706
2024	Lada Putih	88.458
	Lada Hitam	52.652
2025	Lada Putih	111.034
	Lada Hitam	69.134

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Perkembangan harga rata-rata lada pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada komoditas lada putih. Harga lada putih meningkat dari Rp59.473/kg pada tahun 2020 menjadi Rp88.458/kg pada tahun 2024 dan mengalami lonjakan pada tahun 2025 hingga mencapai Rp111.034/kg, yang mencerminkan penguatan nilai ekonomi lada putih di tingkat perdagangan serta meningkatnya permintaan pasar. Sementara itu, harga lada hitam menunjukkan pola

yang relatif lebih berfluktuasi, dari Rp42.360/kg pada tahun 2020, meningkat hingga Rp49.074/kg pada tahun 2022, kemudian Rp52.652/kg pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi Rp69.134/kg. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa dinamika harga lada, baik lada putih maupun lada hitam, masih dipengaruhi oleh keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar domestik dan global, serta faktor mutu dan kontinuitas produksi. Oleh karena itu, penguatan stabilisasi pasokan, peningkatan produktivitas dan mutu, serta perbaikan tata niaga menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani dan meningkatkan daya saing lada nasional.

Tabel 31. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Lada

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	58.378	160.388	604	1.986
2021	37.738	166.751	319	1.526
2022	29.554	146.662	562	3.177
2023	23.818	114.529	450	2.337
2024	55.475	311.278	1.097	4.539
2025*)	32.160	223.916	219	1.705

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor–impor lada periode 2020–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam baik dari sisi volume maupun nilai. Volume ekspor lada cenderung menurun dari 58.378 ton pada 2020 menjadi 23.818 ton pada 2023, kemudian

melonjak signifikan pada 2024 hingga mencapai 55.475 ton sebelum kembali menurun pada 2025 (s.d. November) menjadi 32.160 ton. Nilai ekspor relatif stabil pada 2020–2022 di kisaran USD 146–167 juta, menurun pada 2023, lalu meningkat sangat tajam pada 2024 hingga mencapai USD 311,28 juta, sebelum kembali menurun pada 2025 menjadi USD 223,92 juta, yang mencerminkan pengaruh kuat dinamika harga internasional. Di sisi lain, volume dan nilai impor lada relatif kecil dibandingkan ekspor, meskipun sempat meningkat pada 2024, dan kembali menurun pada 2025. Secara keseluruhan, neraca perdagangan lada tetap menunjukkan surplus yang kuat, dengan kinerja ekspor yang dominan meskipun berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Lada

Keberhasilan capaian indikator Produksi Lada tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- 1) Capaian produksi lada nasional masih ditopang oleh kontribusi provinsi sentra utama, sehingga realisasi produksi tetap terjaga.
- 2) Keberadaan areal TM yang masih memadai menjadi sumber utama produksi lada nasional.
- 3) Produktivitas pada sejumlah wilayah masih relatif baik, sehingga turut menjaga stabilitas produksi.
- 4) Perkembangan harga, khususnya lada putih, memberikan dorongan ekonomi yang mendukung keberlanjutan usaha tani dan aktivitas panen.

- 5) Kinerja ekspor yang meningkat berkontribusi menjaga permintaan dan memperkuat keberlanjutan rantai pasok komoditas lada.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Produksi Lada

Pencapaian indikator produksi lada menghadapi permasalahan sebagai berikut.

- 1) Siklus produksi lada relatif panjang, dimana tanaman mulai berproduksi setelah berumur sekitar empat tahun, sehingga capaian produksi tahun berjalan sangat dipengaruhi kondisi tanaman dan pengelolaan kebun pada tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Serangan penyakit tanaman seperti penyakit kuning atau nematoda dan busuk pangkal batang menjadi faktor teknis dominan yang menekan produktivitas dan hasil panen di berbagai wilayah penghasil.
- 3) Penyakit kuning atau nematoda banyak ditemukan di beberapa wilayah, menimbulkan gejala mosaik kuning/belang dan pertumbuhan kerdil, dengan tingkat infeksi tinggi terutama pada bahan tanam vegetatif.
- 4) Dampak sosial ekonomi di tingkat petani muncul berupa menurunnya semangat dan minat budidaya lada akibat meningkatnya risiko kerusakan tanaman dan ketidakpastian hasil.
- 5) Penurunan luas areal tanam dan produksi di daerah penghasil utama, berdampak langsung pada kontribusi pasokan lada nasional.

- 6) Terjadi kecenderungan alih komoditas dari lada ke komoditas lain yang dinilai lebih menguntungkan, seperti kelapa sawit, didorong oleh pertimbangan harga lada yang relatif rendah pada periode tertentu dan biaya pemeliharaan kebun yang tinggi.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator Produksi Lada

Untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian indikator produksi lada, diperlukan langkah perbaikan melalui penguatan budidaya, pengendalian OPT, serta penguatan keberlanjutan usaha tani di wilayah penghasil sebagai berikut.

- 1) Penguatan pembinaan budidaya berkelanjutan agar pengelolaan kebun sejak fase TBM lebih optimal, sehingga tanaman memasuki fase produksi dengan kondisi sehat dan produktif.
- 2) Penerapan pengendalian OPT terpadu (PHT) melalui monitoring rutin, sanitasi kebun, pengendalian vektor, serta pengendalian penyakit secara berkelanjutan pada wilayah rawan serangan.
- 3) Penggunaan bahan tanam sehat dan bermutu melalui pengawasan sumber benih, pengendalian peredaran bahan tanam vegetatif terinfeksi, serta mendorong peremajaan kebun dengan benih yang lebih tahan.
- 4) Penanganan penyakit busuk pangkal batang secara ketat melalui tindakan pencegahan, eradikasi tanaman terserang, perbaikan drainase, dan

penerapan biosecurity kebun untuk menekan penyebaran.

- 5) Percepatan pemulihan areal dan produksi di wilayah penghasil utama melalui rehabilitasi dan peremajaan kebun, serta penguatan pendampingan teknis pada provinsi kontributor utama.
- 6) Penguatan insentif dan keberlanjutan usaha tani lada melalui pendampingan kelembagaan petani, peningkatan efisiensi biaya pemeliharaan, dan pengembangan hilirisasi agar daya tarik budidaya lada tetap terjaga.

e. Produksi Pala

Komoditas pala merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis Indonesia yang memiliki nilai historis, ekonomi, dan perdagangan internasional yang sangat tinggi. Indonesia dikenal sebagai produsen pala terbesar di dunia dengan pangsa pasar ekspor yang dominan, khususnya dari wilayah sentra di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Keunggulan komparatif pala Indonesia terletak pada kesesuaian agroklimat, luasnya basis areal tanam rakyat, serta tingginya permintaan pasar global terhadap pala sebagai bahan baku industri pangan, farmasi, kosmetik, dan rempah-rempah. Selain sebagai komoditas ekspor unggulan, pala juga memiliki peran penting dalam penguatan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan pekebun, serta pengembangan kawasan perkebunan

berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya lahan yang masih luas dan tren permintaan pasar yang terus meningkat, komoditas pala memiliki prospek besar untuk terus dikembangkan sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan perkebunan nasional.

Tabel 32. Capaian Produksi Pala

IK 1-5	Produksi Pala			
	Tahun 2025		Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
41.527 ton	39.573 ton*)	95,29	41.693 ton	94,92

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Pada tahun 2025, indikator kinerja produksi pala dalam wujud produksi biji kering sebesar 41.527 ton, dengan realisasi sebesar 39.573 ton atau capaian 95,29%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja produksi pala nasional berada pada kategori **berhasil**. Secara nasional, total luas areal pala tahun 2025 sebesar 291.090 Ha yang terdiri atas 168.691 Ha tanaman belum menghasilkan (TBM), 106.159 Ha tanaman menghasilkan (TM), dan 16.240 Ha tanaman rusak (TR). Dari luas TM tersebut dihasilkan produksi sebesar 39.573 ton dengan rata-rata produktivitas nasional mencapai 373 kg per Ha. Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 39.573 ton atau 94,92% dari target yang direncanakan yaitu 41.693 ton. Hal ini menunjukkan

target akhir renstra belum terpenuhi, namun sudah termasuk dalam kategori berhasil.

Tabel 33. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Pala

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	151.117	85.334	15.871	252.322	38.150	447
2021	155.684	88.815	15.713	260.213	40.639	458
2022	154.952	98.880	16.828	270.660	40.896	414
2023	163.512	102.219	16.408	282.140	41.444	405
2024	162.582	104.967	16.270	283.819	39.558	377
2025*)	168.691	106.159	16.240	291.090	39.573	373

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Dalam tren lima tahun terakhir, perkembangan komoditas pala menunjukkan kecenderungan ekspansif dari sisi luas areal, namun belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kinerja produksi dan produktivitas. Luas areal pala meningkat konsisten dari 252.322 Ha pada tahun 2020 menjadi 291.090 Ha pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar 15,4%. Peningkatan ini terutama didorong oleh bertambahnya luas TBM dari 151.117 Ha menjadi 168.691 Ha serta peningkatan luas TM dari 85.334 Ha menjadi 106.159 Ha. Namun demikian, luas tanaman rusak relatif stagnan pada kisaran 15–16 ribu Ha, yang menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi pala belum mampu secara signifikan menekan tingkat kerusakan.

Dari sisi produksi, capaian nasional dalam lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dan cenderung stagnan. Produksi pala meningkat dari 38.150 ton pada tahun 2020 menjadi puncaknya 41.444 ton pada tahun 2023, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 39.558 ton dan relatif stagnan pada tahun 2025 sebesar 39.573 ton. Pola ini berbanding terbalik dengan perkembangan luas areal yang terus meningkat, sehingga menunjukkan adanya penurunan efisiensi produksi. Hal ini tercermin dari tren produktivitas yang menurun dari 447 kg per Ha pada tahun 2020 menjadi 373 kg per Ha pada tahun 2025, atau turun sekitar 16,6 % dalam lima tahun. Penurunan produktivitas ini menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan mengapa realisasi produksi fluktuatif dan cenderung stagnan.

Tabel 34. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Pala Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	7.562	9.184	5.746	22.492	3.395	370
2.	Sumatera Utara	66	205	31	302	69	337
3.	Sumatera Barat	2.406	2.560	145	5.111	1.302	509
4.	Riau	-	-	-	-	-	-
5.	Kepulauan Riau	250	8	-	258	3	313
6.	Jambi	-	-	-	-	-	-
7.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
8.	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
9.	Bengkulu	1.244	202	70	1.516	52	257
10.	Lampung	650	1.663	76	2.389	750	451
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	5.751	6.323	1.187	13.261	1.557	246

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
13.	Banten	2	6	3	11	0	51
14.	Jawa Tengah	1.808	1.287	31	3.125	239	186
15.	D.I. Yogyakarta	-	21	0	21	2	85
16.	Jawa Timur	30	8	-	38	17	2.088
17.	Bali	214	765	285	1.265	96	126
18.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19.	Nusa Tenggara Timur	3.363	3.626	90	7.079	946	261
20.	Kalimantan Barat	19	57	6	82	20	342
21.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Timur	322	72	-	394	1	20
24.	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25.	Sulawesi Utara	21.373	11.352	2.387	35.112	13.587	1.197
26.	Gorontalo	2.157	388	470	3.015	35	90
27.	Sulawesi Tengah	15.473	6.979	783	23.235	1.331	191
28.	Sulawesi Selatan	10.801	3.180	237	14.217	629	198
29.	Sulawesi Barat	822	462	4	1.288	44	94
30.	Sulawesi Tenggara	4.880	2.074	99	7.053	747	360
31.	Maluku	16.589	18.779	979	36.347	5.696	303
32.	Maluku Utara	56.498	22.225	1.899	80.623	7.497	337
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	16.017	14.710	1.714	32.440	1.555	106
35.	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36.	Papua Tengah	260	-	-	260	-	-
37.	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38.	Papua Barat Daya	134	23	-	157	4	180
	INDONESIA	168.691	106.159	16.240	291.090	39.573	373

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Dari sisi sebaran wilayah tahun 2025, produksi pala nasional masih terkonsentrasi di kawasan timur

Indonesia. Provinsi Sulawesi Utara menjadi kontributor terbesar dengan produksi 13.587 ton atau sekitar 34,3% dari total produksi nasional, didukung oleh luas TM 11.352 Ha dan produktivitas yang relatif tinggi sebesar 1.197 kg per Ha. Selanjutnya, Maluku Utara dengan produksi 7.497 ton dengan luas TM 22.225 Ha dan produktivitas 337 kg per Ha, serta Provinsi Maluku dengan produksi 5.696 ton dari luas TM 18.779 Ha dan produktivitas 303 kg per Ha. Tiga provinsi ini secara kumulatif menyumbang lebih dari 67% produksi pala nasional, sehingga sangat menentukan capaian indikator kinerja produksi pala tahun 2025.

Di wilayah barat Indonesia, kontribusi produksi pala relatif lebih kecil dan tersebar di beberapa provinsi. Aceh dengan produksi 3.395 ton dari luas TM 9.184 Ha dan produktivitas 370 kg per Ha. Sumatera Barat menghasilkan 1.302 ton dari luas TM 2.560 Ha dengan produktivitas 509 kg per Ha, sedangkan Lampung menghasilkan 750 ton dengan luas TM 1.663 Ha dan produktivitas 451 kg per Ha. Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing dengan produksi 1.557 ton dan 946 ton, namun dengan produktivitas yang masih relatif rendah, masing-masing 246 kg per Ha dan 261 kg per Ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara luasan areal cukup besar di beberapa provinsi, tingkat produktivitas belum optimal sehingga kontribusi terhadap total produksi nasional masih terbatas.

Tabel 35. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Pala di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Harga Rata - Rata (Rp/kg)
2020	41.072
2021	47.132
2022	51.291
2023	53.178
2024	58.019
2025	50.852

Sumber: SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Perkembangan harga rata-rata pala di pasar domestik, yang diperdagangkan dalam bentuk biji pala kering, pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun disertai penurunan pada akhir periode. Harga pala nasional meningkat dari Rp41.072/kg pada tahun 2020 menjadi Rp58.019/kg pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 41,6%, yang mencerminkan penguatan nilai ekonomi komoditas pala kering seiring dengan permintaan pasar yang relatif kuat serta membaiknya harga di tingkat perdagangan domestik. Namun demikian, pada tahun 2025 harga pala kering mengalami penurunan menjadi Rp50.852/kg, yang mengindikasikan adanya penyesuaian pasar yang dipengaruhi oleh dinamika pasokan, kualitas produk, serta kondisi perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan standar mutu dan kontinuitas pasokan biji pala kering di pasar domestik.

Tabel 36. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Pala

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	22.821	158.420	241	1.388
2021	26.489	198.114	189	1.031
2022	22.194	185.317	483	3.086
2023	23.725	173.673	339	2.294
2024	23.217	169.300	257	1.532
2025*)	26.385	190.853	279	1.845

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor–impor pala periode 2020–2025 menunjukkan kinerja ekspor yang relatif stabil dengan fluktuasi moderat. Volume ekspor pala meningkat dari 22.821 ton pada 2020 menjadi 26.489 ton pada 2021, kemudian menurun pada 2022 sebelum kembali relatif stabil pada kisaran 23–24 ribu ton selama 2023–2024, dan meningkat kembali pada 2025 (s.d. November) menjadi 26.385 ton. Nilai ekspor menunjukkan pola serupa, dengan puncak pada 2021 sebesar USD 198,11 juta, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga 2024, sebelum kembali meningkat pada 2025 menjadi USD 190,85 juta. Di sisi lain, volume dan nilai impor pala relatif kecil dibandingkan ekspor, meskipun sempat meningkat pada 2022, lalu kembali menurun dan stabil pada periode berikutnya. Secara keseluruhan, neraca perdagangan pala tetap menunjukkan surplus yang kuat, mencerminkan daya saing pala Indonesia di pasar

internasional meskipun dipengaruhi oleh dinamika harga dan permintaan global.

Dari aspek teknis budidaya, serangan OPT menjadi salah satu faktor penting yang menahan peningkatan produksi pala nasional. OPT utama yang banyak dilaporkan menyerang kebun pala meliputi hama penggerek batang, rayap, serta penyakit jamur akar putih dan hitam, kanker batang, antraknosa daun, dan busuk buah. Serangan OPT ini berdampak langsung pada penurunan produktivitas pohon, meningkatnya luas tanaman rusak, serta kehilangan hasil panen yang dalam beberapa kasus dapat mencapai puluhan persen dari potensi produksi. Kondisi sanitasi kebun yang kurang baik, pemangkasan yang tidak teratur, serta lemahnya intensitas pengendalian hama dan penyakit memperbesar risiko penyebaran OPT, terutama di sentra-sentra produksi tradisional.

Dari aspek perbenihan, ketersediaan benih pala berkualitas masih menjadi tantangan struktural. Sebagian besar kebun pala rakyat masih menggunakan benih lokal yang tidak tersertifikasi, dengan mutu genetik dan kesehatan bibit yang bervariasi. Pemerintah telah menginisiasi pembangunan *nursery* modern dan penyediaan benih pala bersertifikat untuk mendukung rehabilitasi tanaman tua, penggantian tanaman rusak, serta perluasan areal TM. Namun demikian, kapasitas produksi benih saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga rehabilitasi pala

berjalan relatif lambat. Keterbatasan mutu benih ini turut berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas jangka panjang serta tingginya kerentanan tanaman terhadap OPT.

Selain itu, faktor umur tanaman dan praktik agronomi juga berperan signifikan. Banyak kebun pala di beberapa provinsi sentra telah berusia tua, sehingga produktivitasnya menurun jika tidak diremajakan secara bertahap. Di sisi lain, praktik pemupukan yang tidak seimbang, minimnya aplikasi bahan organik, serta pengelolaan kebun yang belum mengikuti kaidah budidaya baik (*Good Agricultural Practices*) menyebabkan kondisi fisiologis tanaman tidak optimal. Pengelolaan agroekosistem yang kurang tepat, termasuk sistem tumpang sari yang terlalu rapat dan perubahan mikroklimat kebun, juga meningkatkan kerentanan tanaman terhadap penyakit dan menurunkan potensi hasil.

Faktor lingkungan dan iklim turut memengaruhi kinerja produksi pala tahun 2025. Variabilitas curah hujan, perubahan pola musim berbunga, serta kejadian cuaca ekstrem di beberapa wilayah sentra produksi berdampak pada ketidakstabilan pembungaan dan pembuahan pala. Kondisi ini memperkuat tekanan terhadap produktivitas, terutama pada kebun-kebun yang secara teknis sudah lemah dari sisi pemeliharaan dan kesehatan tanaman.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Pala

Berdasarkan analisis, capaian indikator kinerja produksi pala tahun 2025 termasuk dalam kategori berhasil, didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Peningkatan luas tanaman menghasilkan (TM) dari 104.967 ha (2024) menjadi 106.159 ha (2025).
- 2) Kontribusi kuat provinsi sentra utama yaitu Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku menyumbang lebih dari 67% produksi nasional. Sulawesi Utara memiliki produktivitas sangat tinggi (1.197 kg/ha), menjadi penopang utama capaian nasional.
- 3) Stabilitasnya permintaan dan pasar ekspor, dengan volume ekspor relatif stabil di kisaran lebih dari 23 ribu ton per tahun.
- 4) Nilai ekspor tetap tinggi (USD 170–185 juta pada 2022–2024) menjamin keberlanjutan serapan produksi nasional.
- 5) Kenaikan harga domestik pala dari Rp41.072/kg (2020) menjadi Rp58.019/kg (2024), memberi insentif ekonomi bagi petani untuk tetap memanen dan memelihara kebun.
- 6) Dukungan program pemerintah dalam bentuk perluasan pala, rehabilitasi rehabilitasi pala, pembangunan *nursery* modern. Penyediaan benih bersertifikat untuk peremajaan dan penggantian tanaman rusak.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Produksi Pala

Meskipun capaian produksi tergolong baik, masih terdapat sejumlah permasalahan, diantaranya:

- 1) Proporsi tanaman belum menghasilkan (TBM) masih sangat besar, sekitar 58% dari total areal nasional (168.691 ha dari 291.090 ha). Perluasan areal belum langsung berdampak pada peningkatan produksi.
- 2) Penurunan produktivitas nasional dari 447 kg/ha (2020) menjadi 373 kg/ha (2025), dipengaruhi oleh tanaman yang sudah tua, mutu benih rendah, dan budidaya kurang optimal.
- 3) Serangan OPT seperti hama penggerek batang, rayap dan penyakit jamur akar putih/hitam, kanker batang, antraknosa daun, busuk buah. Meningkatkan luas tanaman rusak (sekitar 16 ribu ha) dan kehilangan hasil panen.
- 4) Keterbatasan benih pala berkualitas dan bersertifikat, ketergantungan pada benih lokal dengan mutu genetik tidak seragam. Kapasitas *nursery* modern belum mencukupi kebutuhan nasional.
- 5) Disparitas produktivitas antardaerah sekitar lebih dari 200 kg/ha di beberapa provinsi, dan lebih dari 1.000 kg/ha di Sulawesi Utara, menunjukkan belum meratanya adopsi teknologi budidaya dan pendampingan teknis.
- 6) Variabilitas curah hujan dan perubahan pola musim berbunga mempengaruhi stabilitas pembungaan dan pembuahan pala.

Upaya Perbaikan untuk Mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Produksi Pala

Untuk meningkatkan kinerja produksi pala nasional, diperlukan serangkaian upaya perbaikan, diantaranya:

- 1) Intensifikasi kebun pala (pemupukan berimbang, pengelolaan naungan, air), untuk mempercepat fase produktif tanaman.
- 2) Rehabilitasi pala pada tanaman rusak dan tanaman tua berproduktivitas rendah menggunakan benih bersertifikat.
- 3) Penguatan pengendalian OPT terpadu (PHT) melalui pelatihan lapangan dan pendampingan petani, pembentukan/penguatan brigade OPT di sentra produksi, penyediaan sarana pengendalian hayati dan monitoring dini.
- 4) Peningkatan kapasitas perbenihan pala melalui pengembangan nursery modern dan penangkar benih lokal, standardisasi mutu dan percepatan sertifikasi benih, dan penguatan distribusi benih ke sentra produksi.
- 5) Penguatan pendampingan teknis budidaya dengan penyuluhan intensif di provinsi berproduktivitas rendah, demplot budidaya baik (GAP): pemupukan, pemangkasan, sanitasi kebun, edukasi pertanian berkelanjutan dan agroekosistem sehat.
- 6) Integrasi kebijakan produksi dengan pasar dan hilirisasi dengan menjaga stabilisasi harga di tingkat petani, penguatan akses pasar dan kemitraan industri,

mendorong petani berinvestasi dalam pemeliharaan dan peremajaan kebun.

Melalui implementasi upaya-upaya perbaikan tersebut, diharapkan kinerja produksi pala nasional dapat meningkat secara berkelanjutan, dan pencapaian indikator produksi pala pada tahun-tahun berikutnya dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

f. Produksi Cengkeh

Cengkeh dikenal sebagai komoditas rempah yang memiliki nilai tambah tinggi dan memiliki keterkaitan erat dengan dinamika rantai pasok domestik. Cengkeh merupakan tanaman tahunan yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh faktor umur tanaman, kondisi agroklimat, serta kualitas pemeliharaan kebun. Stabilitas produksi cengkeh ditentukan oleh keberhasilan fase pembungaan dan pembentukan buah yang sensitif terhadap perubahan cuaca, ketersediaan unsur hara, serta pengelolaan kebun yang konsisten. Selain itu, mutu hasil juga menjadi faktor yang penting karena dipengaruhi oleh ketepatan waktu panen, penanganan pascapanen, serta proses pengeringan yang menentukan kualitas akhir produk. Dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut, pembahasan mengenai produksi cengkeh menjadi relevan untuk memberikan gambaran terkait kondisi aktual dan kecenderungan produksi dari tahun ke tahun. Analisis produksi diperlukan untuk memahami capaian kinerja, potensi penguatan produktivitas, serta faktor-faktor penentu yang berpengaruh terhadap hasil

panen nasional. Selanjutnya, data produksi cengkeh nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 37. Capaian Produksi Cengkeh

IK 1-6	Produksi Cengkeh			
	Tahun 2025			Renstra
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
157.321 Ton	144.704 Ton*)	91,98	134.105 Ton	107,9

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan data capaian indikator Produksi Cengkeh tahun 2025, target produksi yang ditetapkan sebesar 157.321 ton, dengan realisasi produksi mencapai 144.704 ton. Dengan demikian, capaian produksi cengkeh tahun 2025 tercatat sebesar 91,98% terhadap target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja produksi cengkeh nasional pada tahun berjalan telah berada pada kategori **Berhasil**, namun masih terdapat selisih realisasi yang perlu dioptimalkan pada periode pelaksanaan berikutnya agar produksi dapat terpenuhi secara optimal. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra, realisasi produksi cengkeh tahun 2025 telah melampaui target akhir renstra, dengan tingkat capaian sebesar 107,9%.

Secara nasional, total luas areal cengkeh sebesar 573.245 ha, yang terdiri atas areal TBM sebesar 149.857 ha, TM sebesar 343.549 ha, serta TTM/TR sebesar

79.839 ha. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar areal cengkeh nasional telah berada pada fase menghasilkan (TM), sehingga ketersediaan areal produktif secara umum masih menjadi penopang utama capaian produksi nasional. Namun demikian, proporsi TBM yang masih cukup besar juga mencerminkan adanya potensi penguatan produksi pada tahun-tahun mendatang seiring dengan bertambahnya areal yang akan memasuki fase menghasilkan.

Tabel 38. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Cengkeh

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	163.325	340.830	71.658	575.813	145.984	428
2021	161.219	348.584	68.935	578.738	135.753	389
2022	180.722	323.877	69.940	574.539	137.124	423
2023	154.738	348.097	72.382	575.217	133.408	383
2024	149.951	348.294	74.165	572.410	157.321	452
2025*)	149.857	343.549	79.839	573.245	144.704	421

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Selama periode 2020-2025 total luas areal cengkeh cenderung tidak mengalami perubahan signifikan, yaitu dari 575.813 ha menjadi 573.245 ha. Luas TM relatif tetap tinggi karena menentukan produksi nasional, yaitu berkisar 334 ribu–348 ribu ha, sementara TBM mengalami tren penurunan dari 163.325 ha menjadi 149.857 ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian areal TBM telah berubah menjadi TM atau terjadi perubahan pengelolaan areal yang memengaruhi potensi

produksi pada tahun berjalan. Selain itu, luas TTM/TR menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 71.658 ha menjadi 79.839 ha. Kenaikan areal TTM/TR ini perlu dicermati karena berpotensi menurunkan efektivitas pemanfaatan lahan produktif serta mengurangi kontribusi produksi apabila tidak segera ditangani melalui rehabilitasi, peremajaan, maupun penguatan pengendalian faktor penyebab kerusakan tanaman.

Selanjutnya, capaian produksi selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi, dengan produksi 145.984 ton menurun pada 2021 (135.753 ton), kemudian meningkat pada 2022 menjadi sebesar 137.124 ton, namun kembali menurun pada 2023 menjadi 133.408 ton. Pada 2024, produksi meningkat cukup signifikan menjadi 157.321 ton, yang merupakan capaian tertinggi dalam rentang data tersebut. Sementara itu, pada 2025, produksi sebesar 144.704 ton, lebih rendah dibandingkan capaian 2024.

Tabel 39. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Cengkeh Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	5.689	8.757	10.572	25.018	8.945	1.021
2.	Sumatera Utara	573	2.666	617	3.856	2.100	788
3.	Sumatera Barat	3.637	4.781	1.393	9.810	3.044	637
4.	Riau	-	-	-	-	-	-
5.	Kepulauan Riau	1.991	8.542	4.840	15.373	2.327	272
6.	Jambi	42	73	75	190	27	370
7.	Sumatera Selatan	80	265	26	371	94	354

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
8.	Kep. Bangka Belitung	5	7	-	12	4	529
9.	Bengkulu	624	581	143	1.348	161	277
10.	Lampung	2.083	4.688	1.408	8.179	2.122	453
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	7.853	15.480	10.466	33.799	6.972	450
13.	Banten	2.433	6.344	4.187	12.964	2.633	415
14.	Jawa Tengah	8.113	19.724	5.259	33.097	5.295	268
15.	D.I. Yogyakarta	718	1.995	395	3.108	860	431
16.	Jawa Timur	7.199	21.533	8.524	37.256	8.093	376
17.	Bali	261	14.217	942	15.421	2.377	167
18.	Nusa Tenggara Barat	961	1.229	636	2.826	217	177
19.	Nusa Tenggara Timur	8.782	10.056	900	19.738	3.952	393
20.	Kalimantan Barat	75	643	148	866	333	518
21.	Kalimantan Tengah	2	-	6	8	-	-
22.	Kalimantan Selatan	41	194	69	304	37	192
23.	Kalimantan Timur	3	5	-	7	1	160
24.	Kalimantan Utara	126	14	15	156	6	399
25.	Sulawesi Utara	22.059	44.952	5.972	72.983	599	13
26.	Gorontalo	8.391	3.512	1.694	13.597	980	279
27.	Sulawesi Tengah	17.669	55.193	4.531	77.393	26.382	478
28.	Sulawesi Selatan	19.311	43.729	8.970	72.010	22.548	516
29.	Sulawesi Barat	986	2.415	532	3.933	1.261	522
30.	Sulawesi Tenggara	8.967	25.836	417	35.220	16.534	640
31.	Maluku	9.370	33.219	4.738	47.327	21.974	661
32.	Maluku Utara	11.809	12.686	2.167	26.662	4.786	377
33.	Papua	-	79	99	178	20	251
34.	Papua Barat	-	73	4	77	5	64
35.	Papua Selatan	-	30	27	57	5	167
36.	Papua Tengah	-	20	68	88	10	500
37.	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
38.	Papua Barat Daya	3	13	-	16	1	38
	INDONESIA	149.857	343.549	79.839	573.245	144.704	421

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan tabel perkembangan luas areal, produksi, dan produktivitas cengkeh menurut provinsi tahun 2025, produksi cengkeh nasional masih didominasi oleh provinsi-provinsi sentra tertentu, khususnya di kawasan Sulawesi dan Maluku. Produksi terbesar berasal dari Sulawesi Tengah sebesar 26.382 ton dengan total luas areal 77.393 ha dengan produktivitas 478 kg/ha, diikuti Sulawesi Selatan sebesar 22.548 ton pada luas areal 72.010 ha dengan produktivitas 516 kg/ha, serta Maluku sebesar 21.974 ton pada luas areal 47.327 ha dengan produktivitas 661 kg/ha. Selain itu, Sulawesi Tenggara juga menunjukkan peran penting dengan produksi 16.534 ton pada luas areal 35.220 ha dan produktivitas 640 kg/ha, sedangkan Aceh sebesar 8.945 ton pada luas areal 25.018 ha dengan produktivitas 1.021 kg/ha, serta Jawa Timur sebesar 8.093 ton pada luas areal 37.256 ha dan produktivitas 376 kg/ha.

Aspek budidaya cengkeh masih menghadapi hambatan terkait meningkatnya risiko gangguan OPT dan penyakit yang berdampak langsung terhadap hasil produksi. Luas areal terdampak tercatat mencapai 32.174 ha, dengan dominasi gangguan OPT penggerek batang (*Nothopeus sp.* dan *Hexamitodera semivelutina*) dan penggerek

cabang (*Xyleborus sp.*) dengan luasan terbesar berada di Provinsi Sulawesi Utara yaitu 10.702 ha. Selain itu, di Provinsi Jawa Tengah juga terdapat gangguan penyakit cacar daun yang menyerang tanaman cengkeh seluas 1.163 ha. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan upaya pengendalian OPT dan penyakit secara terpadu melalui peningkatan intensitas pemantauan, penerapan teknik budidaya yang lebih baik, serta dukungan pendampingan teknis di wilayah sentra serangan, agar penyebaran dapat ditekan dan produktivitas cengkeh nasional tetap terjaga

Dalam rangka memberikan gambaran yang terhadap capaian indikator komoditas cengkeh tahun 2025, diperlukan informasi pasar melalui data harga rata-rata, yang selanjutnya disajikan pada tabel 40 berikut.

Tabel 40. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Cengkeh di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	58.896
2021	76.366
2022	101.462
2023	115.791
2024	104.290
2025	99.703

Sumber: SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Berdasarkan perkembangan harga rata-rata cengkeh domestik, yang diperdagangkan dalam bentuk bunga cengkeh kering, pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, harga cengkeh menunjukkan kecenderungan meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023,

sebelum mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya. Harga rata-rata cengkeh tercatat sebesar Rp58.896/kg pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi Rp76.366/kg pada tahun 2021 dan kembali naik signifikan pada tahun 2022 sebesar Rp101.462/kg, hingga mencapai level tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp115.791/kg. Namun demikian, pada tahun 2024 harga cengkeh mengalami penurunan menjadi Rp104.290/kg dan kembali melemah pada tahun 2025 sebesar Rp99.703/kg. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun komoditas bunga cengkeh kering masih memiliki nilai ekonomi yang relatif kuat di pasar domestik, dinamika harganya tetap dipengaruhi oleh fluktuasi pasokan dan permintaan serta kondisi pasar. Oleh karena itu, penguatan stabilisasi produksi, peningkatan produktivitas, dan perbaikan tata niaga menjadi aspek penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani serta mendukung kestabilan harga cengkeh nasional.

Tabel 41. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Cengkeh

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	47.765	176.557	2.575	12.343
2021	20.139	96.054	10.017	77.459
2022	9.456	56.623	25.105	182.559
2023	13.935	99.606	23.886	216.604
2024	51.983	324.938	6.478	57.689
2025*)	36.948	205.556	3.177	26.272

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor–impor cengkeh periode 2020–2025 menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam baik dari sisi volume maupun nilai. Volume ekspor cengkeh menurun drastis dari 47.765 ton pada 2020 menjadi 9.456 ton pada 2022, kemudian berangsur meningkat pada 2023 dan melonjak signifikan pada 2024 hingga mencapai 51.983 ton, sebelum kembali menurun pada 2025 (s.d. November) menjadi 36.948 ton. Nilai ekspor mengikuti pola yang sama, turun dari USD 176,56 juta pada 2020 menjadi USD 56,62 juta pada 2022, lalu meningkat tajam hingga mencapai puncak pada 2024 sebesar USD 324,94 juta, sebelum menurun kembali pada 2025 menjadi USD 205,56 juta, mencerminkan pengaruh kuat dinamika harga global. Di sisi lain, volume dan nilai impor cengkeh meningkat tajam pada 2021–2023, dengan puncak impor pada 2023, kemudian menurun signifikan pada 2024–2025 seiring membaiknya kinerja ekspor domestik. Secara keseluruhan, perdagangan cengkeh menunjukkan dinamika yang sangat volatil, namun tetap memperlihatkan peran ekspor yang dominan dalam neraca perdagangan.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Cengkeh

Indikator Produksi Cengkeh dikategorikan berhasil dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- 1) Realisasi produksi cengkeh tahun 2025 tercatat mencapai 91,98% terhadap target tahunan, meskipun

masih diperlukan penguatan untuk mengurangi selisih capaian terhadap target.

- 2) Komposisi luas areal cengkeh nasional didominasi oleh areal TM sebesar 343.549 ha, sehingga kapasitas areal produktif secara umum masih menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas produksi cengkeh nasional.
- 3) Produksi nasional didukung oleh sentra utama, khususnya di kawasan Sulawesi dan Maluku, dengan kontribusi besar dari provinsi berproduksi tinggi seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Sulawesi Tenggara, sehingga menjadi penopang utama dalam menjaga capaian produksi secara nasional.
- 4) Tren kenaikan harga rata-rata cengkeh domestik sampai dengan tahun 2023 menunjukkan komoditas cengkeh masih memiliki nilai ekonomi yang kuat, sehingga mendukung motivasi pemeliharaan kebun dan menjaga keberlanjutan kegiatan produksi di tingkat usaha tani.
- 5) Peningkatan ekspor dan penurunan impor pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan kapasitas pasok domestik serta penguatan daya saing cengkeh Indonesia di pasar global, yang menjadi faktor pendukung keberlanjutan produksi dan stabilitas penyerapan pasar.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Produksi Cengkeh

Pencapaian indikator produksi cengkeh menghadapi permasalahan sebagai berikut.

- 1) Penurunan produktivitas berkontribusi langsung pada penurunan produksi nasional pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun luas areal relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa capaian produksi tidak cukup ditopang oleh luas areal, tetapi sangat ditentukan oleh kinerja hasil per satuan luas.
- 2) Meningkatnya luas areal TTM/TR menjadi kendala karena mengurangi luasan efektif yang dapat menghasilkan, sekaligus menurunkan potensi output produksi nasional. Kondisi ini umumnya terkait dengan tanaman tua, tanaman rusak, serta gangguan teknis di lapangan.
- 3) Luas TBM yang masih cukup besar menunjukkan bahwa sebagian areal belum dapat memberikan kontribusi produksi pada tahun berjalan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan produksi cenderung memerlukan waktu karena menunggu tanaman memasuki fase menghasilkan.
- 4) Banyaknya tanaman tua dan rusak menyebabkan penurunan kemampuan menghasilkan, yang diperburuk dengan gangguan hama dan penyakit.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator Produksi Cengkeh

Untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian indikator produksi cengkeh, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Penguatan peningkatan produktivitas kebun melalui penerapan GAP dengan pembinaan teknis yang lebih intensif, meliputi pemeliharaan rutin, pemupukan sanitasi kebun, serta penguatan manajemen panen dan pascapanen untuk meningkatkan hasil.
- 2) Percepatan rehabilitasi dan peremajaan pada tanaman tua, rusak, dan tidak produktif serta areal TTM/TR melalui penataan tanaman serta dukungan sarana produksi agar areal kembali produktif.
- 3) Memperkuat ketersediaan bahan tanam cengkeh yang bermutu melalui pengembangan sumber benih, fasilitasi bibit unggul, dan peningkatan pengawasan mutu bibit, agar TBM dapat tumbuh optimal dan cepat memasuki fase menghasilkan sehingga mendukung kesinambungan produksi nasional.
- 4) Meningkatkan efektivitas pengendalian hama dan penyakit melalui penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), perbaikan sanitasi kebun, monitoring OPT secara berkala, serta dukungan rekomendasi teknis pengendalian yang tepat agar kehilangan hasil dapat ditekan dan produktivitas tetap terjaga.

g. Produksi Vanili

Vanili merupakan salah satu komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan rempah dunia. Indonesia termasuk produsen vanili terbesar di dunia dengan keunggulan agroklimat yang sangat sesuai untuk pertumbuhan vanili, mulai dari wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Papua. Keanekaragaman hayati, ketersediaan tenaga kerja, serta pengalaman panjang petani dalam budidaya rempah menjadi modal penting dalam pengembangan vanili nasional. Selain memiliki permintaan ekspor yang relatif stabil untuk industri pangan, minuman, kosmetik, dan farmasi, vanili juga berpotensi besar dikembangkan sebagai sumber peningkatan pendapatan petani dan penggerak ekonomi wilayah. Dengan pengelolaan budidaya yang tepat, dukungan perbenihan unggul, serta penguatan tata niaga dan hilirisasi, komoditas vanili memiliki prospek yang menjanjikan untuk terus tumbuh secara berkelanjutan.

Tabel 42. Capaian Produksi Vanili

IK 1-7	Produksi Vanili			
	Tahun 2025			Renstra
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
1.582 ton	1.286 ton*)	81,29	1.588 ton	80,98

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Pada tahun 2025, indikator kinerja produksi vanili (wujud produksi polong kering) sebesar 1.582 ton dengan, realisasi produksi mencapai 1.286 ton, atau 81,29 % dari target sehingga masuk dalam kategori **berhasil**. Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 1.286 ton atau 80,98% dari target yang direncanakan yaitu 1.588 ton. Hal ini menunjukkan target akhir renstra belum terpenuhi, namun sudah termasuk dalam kategori berhasil. Secara nasional, total luas areal vanili pada tahun 2025 tercatat sebesar 9.291 Ha, yang terdiri atas 3.323 Ha tanaman belum menghasilkan (TBM), 4.041 Ha tanaman menghasilkan (TM), dan 1.927 Ha tanaman rusak (TR). Dari luas tanaman menghasilkan tersebut, produksi vanili nasional mencapai sekitar 1.286 ton dengan produktivitas rata-rata 318 kg per Ha. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 35,8% areal masih berupa TBM dan sekitar 20,7% merupakan tanaman rusak. Proporsi tanaman rusak yang relatif tinggi mencerminkan masih lemahnya ketahanan tanaman terhadap serangan OPT serta belum optimalnya praktik pemeliharaan kebun di sebagian wilayah.

Tabel 43. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Vanili

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	3.089	3.929	2.273	9.291	1.412	359
2021	3.462	4.010	2.104	9.576	1.957	488
2022	3.770	4.066	2.132	9.969	1.505	370
2023	3.264	4.274	2.260	9.798	1.579	369
2024	3.389	3.929	1.973	9.290	1.212	308

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2025*)	3.323	4.041	1.927	9.291	1.286	318

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Apabila dilihat dalam tren lima tahun terakhir, keragaan vanili nasional menunjukkan fluktuasi baik dari sisi luas areal maupun produksi. Luas areal vanili relatif stabil pada kisaran 9.290–9.969 Ha, dengan puncaknya pada tahun 2022 sebesar 9.969 Ha, kemudian menurun dan kembali stabil pada 9.291 Ha di tahun 2025. Produksi vanili nasional sempat mencapai titik tertinggi pada tahun 2021 sebesar 1.957 ton dengan produktivitas 488 kg/ha, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2024 menjadi 1.212 ton dengan produktivitas 308 kg/ha. Pada tahun 2025, produksi kembali meningkat menjadi sekitar 1.286 ton dengan produktivitas 318 kg/ha. Dalam periode 2020–2025 terlihat kecenderungan masih tingginya proporsi tanaman belum menghasilkan dan tanaman rusak. Pada tahun 2025, luas TBM tercatat 3.323 Ha dan TR sebesar 1.927 Ha, yang secara bersama-sama mencakup lebih dari separuh total areal. Kinerja produksi nasional masih sangat bergantung pada sebagian areal tanaman menghasilkan yang relatif terbatas, sehingga keberlanjutan produksi ke depan memerlukan akselerasi rehabilitasi kebun dan percepatan masuknya TBM ke fase menghasilkan.

Tabel 44. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Vanili Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	-	-	-	-	-	-
2.	Sumatera Utara	61	171	15	247	202	1.181
3.	Sumatera Barat	8	3	2	13	0	27
4.	Riau	-	-	-	-	-	-
5.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
6.	Jambi	-	-	-	-	-	-
7.	Sumatera Selatan	-	13	5	18	0	17
8.	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
9.	Bengkulu	2	3	-	5	1	167
10.	Lampung	41	65	16	121	31	481
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	123	508	299	930	194	382
13.	Banten	40	46	14	100	3	67
14.	Jawa Tengah	116	121	15	252	25	203
15.	D.I. Yogyakarta	9	8	7	24	3	375
16.	Jawa Timur	101	85	64	249	64	750
17.	Bali	116	133	44	293	6	41
18.	Nusa Tenggara Barat	66	152	80	298	44	287
19.	Nusa Tenggara Timur	1.099	1.156	196	2.451	405	350
20.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Timur	2	4	-	6	3	857
24.	Kalimantan Utara	7	3	3	13	0	9
25.	Sulawesi Utara	712	272	183	1.167	81	297
26.	Gorontalo	-	-	6	6	-	-
27.	Sulawesi Tengah	157	273	216	646	64	234
28.	Sulawesi Selatan	331	388	356	1.075	66	170
29.	Sulawesi Barat	25	158	324	507	22	141

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
30.	Sulawesi Tenggara	105	325	38	468	51	156
31.	Maluku	117	10	13	140	3	300
32.	Maluku Utara	40	-	-	40	-	-
33.	Papua	46	144	31	221	20	136
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
35.	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36.	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37.	Papua Pegunungan	1	-	1	2	-	-
38.	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
	INDONESIA	3.323	4.041	1.927	9.291	1.286	318

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Dari sisi sebaran wilayah, produksi vanili tahun 2025 masih terkonsentrasi di beberapa provinsi utama. Nusa Tenggara Timur menjadi kontributor terbesar dengan luas areal 2.451 Ha, produksi 405 ton, dan produktivitas sekitar 350 kg/ha. Kontribusi signifikan juga berasal dari Sumatera Utara dengan produksi 202 ton dan produktivitas relatif tinggi mencapai 1.181 kg/ha, serta Jawa Barat dengan produksi 194 ton dari luas areal 930 Ha. Wilayah lain yang turut memberikan sumbangan produksi antara lain Sulawesi Utara (81 ton), Sulawesi Selatan (66 ton), Sulawesi Tengah (64 ton), Jawa Timur (64 ton), dan Nusa Tenggara Barat (44 ton). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja produksi vanili nasional masih sangat bergantung pada kinerja sejumlah sentra wilayah utama. Produktivitas vanili antarprovinsi menunjukkan variasi yang cukup besar. Beberapa daerah dengan produktivitas tinggi, seperti Sumatera Utara

(1.181 kg/ha) dan Kalimantan Timur (857 kg/ha), yang mencerminkan praktik budidaya relatif lebih intensif dan kondisi agroklimat yang mendukung. Di sisi lain, terdapat provinsi dengan produktivitas sangat rendah, seperti Kalimantan Utara (9 kg/ha), Sumatera Barat (27 kg/ha), dan Bali (41 kg/ha), yang mengindikasikan masih adanya permasalahan pada aspek teknis budidaya, kesehatan tanaman, maupun keberlanjutan pemeliharaan kebun.

Tabel 45. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Vanili di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	2.038.074
2021	1.673.324
2022	1.444.120
2023	1.336.945
2024	686.257
2025	524.128

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Dinamika harga rata-rata domestik vanili, yang diperdagangkan dalam bentuk polong vanili kering, pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan tren penurunan yang sangat tajam dan berkelanjutan. Harga vanili tercatat sebesar Rp2.038.074/kg pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi Rp1.673.324/kg pada tahun 2021 dan kembali melemah pada tahun 2022 sebesar Rp1.444.120/kg, serta Rp1.336.945/kg pada tahun 2023. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, ketika harga anjlok menjadi Rp686.257/kg atau turun lebih dari 60

persen dibandingkan tahun 2020, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi Rp524.128/kg. Kondisi tersebut mencerminkan melemahnya insentif ekonomi bagi pelaku usaha vanili, khususnya pekebun, sehingga berdampak pada menurunnya intensitas pemeliharaan tanaman, pemupukan, serta peremajaan kebun. Dampak lanjutan dari tren penurunan harga dalam beberapa tahun terakhir masih berpengaruh terhadap kinerja produksi vanili nasional pada tahun 2025, sehingga diperlukan upaya penguatan stabilisasi harga, peningkatan mutu polong vanili kering, serta perbaikan tata niaga untuk menjaga keberlanjutan pengembangan komoditas vanili nasional.

Tabel 46. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Vanili

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	363	60.248	249	21.135
2021	346	39.930	584	31.563
2022	230	22.954	216	9.091
2023	173	15.157	80	4.112
2024	257	13.158	86	2.891
2025*)	235	10.419	51	1.355

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor–impor vanili periode 2020–2025 menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten, terutama dari sisi nilai ekspor. Volume ekspor vanili menurun dari 363 ton

pada 2020 menjadi 173 ton pada 2023, kemudian sedikit meningkat pada 2024 menjadi 257 ton sebelum kembali menurun pada 2025 (s.d. November) menjadi 235 ton. Nilai ekspor mengalami penurunan tajam dari USD 60,25 juta pada 2020 menjadi USD 15,16 juta pada 2023, dan terus menurun hingga mencapai USD 10,42 juta pada 2025, yang mencerminkan penurunan harga internasional vanili maupun melemahnya permintaan global. Di sisi lain, volume dan nilai impor vanili relatif berfluktuasi namun cenderung menurun sejak 2021, dengan penurunan yang cukup signifikan hingga 2025. Secara keseluruhan, meskipun neraca perdagangan vanili masih menunjukkan surplus, kinerja ekspor vanili menghadapi tantangan serius akibat volatilitas harga dan dinamika pasar global.

Dari aspek teknis budidaya, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) masih menjadi faktor pembatas utama produksi vanili nasional. Penyakit yang paling dominan adalah busuk batang vanili yang disebabkan oleh jamur *Fusarium oxysporum f.sp. vanillae*, yang menyerang akar, batang, pucuk, hingga buah, dan sering berkembang pesat pada kondisi kelembapan tinggi. Selain itu, penyakit busuk pangkal batang (*Sclerotium rolfsii*), antraknosa, serta busuk buah dan pucuk juga masih ditemukan di berbagai sentra produksi dan berdampak pada tingginya tingkat kematian tanaman. Di luar penyakit jamur, beberapa hama seperti bekicot, ulat, belalang, dan kutu putih turut berkontribusi

terhadap kerusakan bagian vegetatif tanaman apabila terjadi ledakan populasi. Kondisi ini tercermin pada masih besarnya luas tanaman rusak tahun 2025 yang mencapai 1.927 Ha.

Aspek perbenihan juga menjadi determinan penting dalam kinerja produksi vanili. Tanaman vanili umumnya diperbanyak secara vegetatif melalui sulur (stek), sehingga kualitas bahan tanam sangat menentukan kesehatan dan daya tumbuh tanaman. Keterbatasan ketersediaan benih unggul yang terstandar, masih rendahnya penerapan sertifikasi benih, serta potensi penyebaran penyakit melalui bahan tanam dari kebun terinfeksi menjadi tantangan utama. Variasi mutu bahan tanam ini berimplikasi pada ketidakteraturan pertumbuhan tanaman, perbedaan waktu masuk fase menghasilkan, serta meningkatnya kerentanan terhadap serangan OPT di berbagai wilayah sentra produksi.

Selain OPT dan perbenihan, faktor lain yang turut memengaruhi produksi vanili tahun 2025 antara lain kondisi iklim dan agroklimat, adopsi teknologi budidaya, serta aspek sosial ekonomi petani. Variabilitas curah hujan dan kelembapan udara yang tinggi di beberapa wilayah memperbesar risiko serangan penyakit, sementara periode kering berkepanjangan dapat mengganggu fase berbunga dan pembentukan polong. Di sisi lain, budidaya vanili membutuhkan keterampilan teknis tinggi, terutama dalam penyerbukan manual, sanitasi kebun, pengendalian penyakit, dan penanganan

pascapanen. Keterbatasan adopsi praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*) di tingkat petani masih menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas secara merata.

Dari perspektif ekonomi, fluktuasi harga yang tajam pada tahun-tahun sebelumnya berdampak pada menurunnya intensitas pemeliharaan kebun dan minat investasi petani. Pada saat harga rendah, sebagian petani mengurangi pemupukan, pengendalian OPT, dan kegiatan pemeliharaan lain, yang berkontribusi terhadap meningkatnya tanaman rusak dan rendahnya produktivitas pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, budidaya vanili bersifat padat karya, khususnya pada tahapan penyerbukan dan panen selektif, sehingga ketersediaan tenaga kerja terampil dan biaya produksi juga memengaruhi efisiensi dan skala produksi.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Vanili

- 1) Berdasarkan analisis, capaian indikator kinerja produksi vanili tahun 2025 termasuk dalam kategori berhasil, didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:
- 2) Produksi meningkat dari 1.212 ton (2024) menjadi 1.286 ton (2025), menunjukkan adanya pemulihan meskipun belum cukup kuat.
- 3) Luas TM relatif terjaga pada 4.041 ha, sehingga produksi nasional tidak mengalami penyusutan meskipun ekspansi areal belum optimal.

- 4) Produksi di Nusa Tenggara Timur (405 ton), Sumatera Utara (202 ton), dan Jawa Barat (194 ton) tetap menjadi penopang utama produksi nasional.
- 5) Produktivitas Sumatera Utara (1.181 kg/ha) dan Kalimantan Timur (857 kg/ha) menunjukkan bahwa secara teknis produksi vanili dapat ditingkatkan bila praktik budidaya optimal diterapkan secara luas.
- 6) Perbaikan praktik budidaya melalui adopsi penyerbukan buatan, sanitasi kebun, dan pengelolaan naungan yang lebih baik mulai berdampak positif terhadap hasil panen di beberapa sentra.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Produksi Vanili

Meskipun capaian produksi tergolong baik, masih terdapat sejumlah permasalahan, diantaranya:

- 1) Luas tanaman rusak mencapai 1.927 ha (sekitar 20,7% total areal), yang secara langsung menurunkan potensi produksi nasional.
- 2) Tanaman belum menghasilkan (TBM) mencapai 3.323 ha (sekitar 35,8% total areal), sehingga sebagian besar areal belum memberikan kontribusi produksi.
- 3) Penyakit utama seperti busuk batang (*Fusarium oxysporum* f.sp. *vanillae*), busuk pangkal batang (*Sclerotium rolfsii*), dan antraknosa masih menyebabkan kematian tanaman dan kegagalan pembentukan polong.
- 4) Keterbatasan benih unggul bersertifikat dan maraknya penggunaan stek dari kebun terinfeksi meningkatkan

risiko penyebaran penyakit dan rendahnya keseragaman pertumbuhan.

- 5) Produktivitas nasional masih rendah dengan rata-rata produktivitas hanya 318 kg/ha, jauh di bawah potensi teknis yang dapat mencapai di atas 1 ton/ha.
- 6) Ketimpangan produktivitas antar provinsi berproduktifitas tinggi dan rendah menunjukkan belum meratanya adopsi GAP.
- 7) Penurunan tajam harga hingga Rp686 ribu/kg pada 2024 menurunkan motivasi petani untuk pemeliharaan intensif dan investasi kebun.
- 8) Curah hujan tinggi dan kelembapan ekstrem meningkatkan tekanan penyakit, sementara periode kering mengganggu fase berbunga dan pembentukan polong.
- 9) Budidaya vanili padat karya (penyerbukan manual, panen selektif), namun ketersediaan tenaga kerja terampil masih terbatas.

Upaya Perbaikan untuk Mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Produksi Vanili

- 1) Untuk meningkatkan kinerja produksi vanili nasional, diperlukan serangkaian upaya perbaikan, diantaranya:
- 2) Percepatan rehabilitasi dan peremajaan kebun rusak, introduksi varietas toleran penyakit
- 3) Penguatan pengendalian OPT berbasis PHT dengan sanitasi kebun rutin dan pemusnahan tanaman sakit, penggunaan agen hayati dan fungisida selektif, serta

- pengaturan drainase dan naungan untuk menekan kelembapan berlebih
- 4) Pengembangan kebun induk bersertifikat, sertifikasi dan pengawasan distribusi bahan tanam, dan pemanfaatan teknologi kultur jaringan untuk benih sehat dan seragam
 - 5) Pendampingan intensif Good Agricultural Practices (GAP), pelatihan penyerbukan buatan, pemangkasan, dan pemupukan berimbang, dan pengembangan demplot di sentra produksi
 - 6) Pengembangan kemitraan petani, fasilitasi kontrak harga dan offtaker
 - 7) Peningkatan mutu pascapanen dan standar kualitas, diversifikasi produk olahan vanili, dan promosi ekspor dan pembukaan pasar baru

h. Produksi Kopi

Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, baik sebagai sumber pendapatan petani, penyedia lapangan kerja, maupun penghasil devisa negara. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen dan eksportir kopi terbesar di dunia dengan keunggulan utama berupa keragaman varietas, kekhasan cita rasa berbasis asal geografis (*single origin*), serta dukungan agroklimat yang sesuai di berbagai wilayah dari Sumatera hingga Papua. Potensi pengembangan kopi nasional masih sangat besar,

ditopang oleh luas areal yang mencapai lebih dari 1,27 juta Ha, meningkatnya permintaan global terhadap kopi spesialti, serta berkembangnya industri hilir dan budaya konsumsi kopi di dalam negeri. Dalam konteks tersebut, peningkatan produksi kopi yang berkelanjutan menjadi salah satu prioritas pembangunan subsektor perkebunan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong kesejahteraan petani.

Tabel 47. Capaian Produksi Kopi

IK 1-8	Produksi Kopi			
	Tahun 2025		Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
813.346 ton	832.675 ton*)	102,38	802.210 ton	103,80

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Pada tahun 2025, kinerja indikator produksi kopi (wujud produksi kopi berasan) menunjukkan dari target sebesar 813.346 ton, realisasi produksi kopi mencapai 832.675 ton atau 102,38% dari target dan termasuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 832.675 ton atau 103,80% dari target yang direncanakan yaitu 802.210 ton. Hal ini menunjukkan target akhir renstra telah terpenuhi dan bahkan terlampaui.

Secara historis, produksi kopi nasional bergerak dari 762.380 ton pada 2020, meningkat menjadi 786.192 ton pada 2021, relatif stagnan pada 2022 (774.961 ton), menurun pada 2023, dan kembali menguat pada 2024–2025. Kenaikan produksi 2025 didukung oleh bertambahnya luas tanaman menghasilkan (TM) yang mencapai 984.686 Ha yang naik konsisten dari 940.244 Ha pada 2020 dan 976.435 Ha pada 2024, serta membaiknya produktivitas rata-rata nasional menjadi 846 kg/ha, tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Tabel 48. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kopi

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	189.521	940.244	120.687	1.250.452	762.380	811
2021	196.013	962.799	120.758	1.279.570	786.192	817
2022	191.449	953.563	120.949	1.265.961	774.961	813
2023	185.878	962.213	118.757	1.266.848	758.725	789
2024	186.453	976.435	111.030	1.273.918	813.346	833
2025*)	182.427	984.686	108.796	1.275.908	832.675	846

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Secara nasional, total luas areal kopi pada 2025 mencapai 1.275.908 Ha, yang terdiri atas luas tanaman menghasilkan (TM) sebesar 984.686 Ha, tanaman belum menghasilkan (TBM) sebesar 182.427 Ha, dan tanaman rusak (TR) sebesar 108.796 Ha. Dibandingkan 2020, terjadi penurunan luas tanaman rusak dari 120.687 Ha

menjadi 108.796 Ha, serta penurunan TBM dari 189.521 Ha menjadi 182.427 Ha, yang mengindikasikan perbaikan struktur umur tanaman dan efektivitas program peremajaan kopi. Pada saat yang sama, peningkatan luas TM dan produktivitas menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan produksi nasional melampaui target.

Tabel 49. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kopi Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	11.966	85.908	15.098	112.973	74.252	864
2.	Sumatera Utara	17.789	68.894	10.604	97.288	91.859	1.333
3.	Sumatera Barat	6.141	16.261	1.098	23.500	19.854	1.221
4.	Riau	2.184	1.985	680	4.849	2.488	1.253
5.	Kepulauan Riau	10	3	5	18	1	250
6.	Jambi	4.959	24.896	2.637	32.492	24.082	967
7.	Sumatera Selatan	10.984	239.318	17.341	267.643	227.267	950
8.	Kep. Bangka Belitung	282	116	7	405	108	937
9.	Bengkulu	14.900	72.872	2.595	90.367	55.637	763
10.	Lampung	8.147	137.661	6.800	152.609	120.795	877
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	17.751	36.537	3.232	57.520	26.297	720
13.	Banten	509	4.780	1.133	6.422	2.019	422
14.	Jawa Tengah	10.206	37.052	2.015	49.273	27.184	734
15.	D.I. Yogyakarta	219	1.598	60	1.877	1.886	1.180
16.	Jawa Timur	15.247	75.465	5.050	95.762	53.991	715
17.	Bali	3.509	28.157	1.971	33.637	14.079	500
18.	Nusa Tenggara Barat	3.836	9.471	576	13.884	6.070	641
19.	Nusa Tenggara Timur	16.544	49.190	8.688	74.421	28.763	585
20.	Kalimantan Barat	983	3.804	2.556	7.343	2.973	782

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
21.	Kalimantan Tengah	1.033	455	650	2.138	240	528
22.	Kalimantan Selatan	728	1.376	304	2.408	867	630
23.	Kalimantan Timur	277	471	614	1.361	364	773
24.	Kalimantan Utara	298	252	278	828	105	416
25.	Sulawesi Utara	1.424	5.425	825	7.674	3.723	686
26.	Gorontalo	220	546	619	1.385	124	226
27.	Sulawesi Tengah	4.658	5.253	1.721	11.633	3.178	605
28.	Sulawesi Selatan	15.278	55.847	10.286	81.411	31.486	564
29.	Sulawesi Barat	3.625	7.227	6.210	17.062	5.221	722
30.	Sulawesi Tenggara	2.470	5.841	1.131	9.443	2.612	447
31.	Maluku	286	799	300	1.386	486	608
32.	Maluku Utara	96	62	239	396	16	264
33.	Papua	133	184	66	383	93	504
34.	Papua Barat	105	63	45	213	7	105
35.	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36.	Papua Tengah	2.194	2.646	931	5.770	1.194	451
37.	Papua Pegunungan	3.420	4.240	2.390	10.050	3.352	791
38.	Papua Barat Daya	13	33	41	87	4	118
	INDONESIA	182.427	984.686	108.796	1.275.908	832.675	846

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Kontribusi produksi terbesar berasal dari provinsi-provinsi sentra kopi utama di Sumatera dan Jawa. Sumatera Selatan menjadi penyumbang produksi tertinggi dengan realisasi 227.267 ton dari luas TM 239.318 Ha dan produktivitas 950 kg/ha. Provinsi Lampung menempati posisi berikutnya dengan produksi 120.795 ton dari luas TM 137.661 Ha dan produktivitas 877 kg/ha, diikuti Sumatera Utara dengan produksi 91.859 ton dan produktivitas relatif tinggi sebesar 1.333 kg/ha. Aceh juga

memberikan kontribusi signifikan sebesar 74.252 ton dengan produktivitas 864 kg/ha. Di Pulau Jawa, Jawa Timur menghasilkan 53.991 ton, Jawa Tengah 27.184 ton, dan Jawa Barat 26.297 ton. Di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Selatan menjadi kontributor utama dengan produksi 31.486 ton, diikuti Nusa Tenggara Timur sebesar 28.763 ton dan Bali sebesar 14.079 ton. Dari sisi produktivitas, wilayah dengan capaian tertinggi antara lain Sumatera Utara (1.333 kg/ha), Riau (1.253 kh/ha), Sumatera Barat (1.221 kg/ha), dan D.I. Yogyakarta (1.180 kg/ha), yang mencerminkan praktik budidaya yang relatif lebih baik dan kondisi agroklimat yang mendukung.

Tabel 50. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Kopi di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Jenis Kopi	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	Robusta	29.349
	Arabika	71.873
2021	Robusta	32.606
	Arabika	63.585
2022	Robusta	27.169
	Arabika	62.677
2023	Robusta	33.290
	Arabika	75.942
2024	Robusta	50.806
	Arabika	92.976
2025	Robusta	61.870
	Arabika	102.031

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Selain faktor teknis produksi, perkembangan harga domestik kopi selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 turut berperan sebagai faktor pendorong peningkatan kinerja usaha tani kopi, baik pada kopi robusta maupun kopi arabika. Harga rata-rata kopi robusta meningkat dari Rp29.349/kg pada tahun 2020 menjadi Rp32.606/kg pada tahun 2021, sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp27.169/kg, kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp33.290/kg dan naik secara signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp50.806/kg, serta terus meningkat pada tahun 2025 hingga mencapai Rp61.870/kg. Sementara itu, harga kopi arabika tercatat sebesar Rp71.873/kg pada tahun 2020, menurun pada tahun 2021 menjadi Rp63.585/kg dan relatif stagnan pada tahun 2022 sebesar Rp62.677/kg, sebelum kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp75.942/kg, naik pada tahun 2024 sebesar Rp92.976/kg, dan mencapai Rp102.031/kg pada tahun 2025. Peningkatan harga kopi yang terjadi sejak tahun 2023 tersebut mencerminkan membaiknya kondisi pasar dan memberikan sinyal ekonomi yang positif bagi petani untuk meningkatkan pemeliharaan kebun, menerapkan praktik panen dan pascapanen yang lebih baik, serta mempertahankan keberlanjutan areal tanam, sehingga secara tidak langsung mendukung peningkatan produksi dan produktivitas kopi nasional.

Tabel 51. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Kopi

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	379.354	821.932	16.136	38.280
2021	387.264	858.558	13.568	32.694
2022	437.555	1.148.383	15.961	60.789
2023	279.937	929.009	40.899	116.996
2024	316.721	1.638.116	52.293	186.733
2025*)	473.755	2.337.009	27.969	140.985

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor–impor kopi periode 2020–2025 menunjukkan dinamika yang cukup kuat dengan tren peningkatan nilai perdagangan. Volume ekspor kopi meningkat dari 379.354 ton pada 2020 menjadi 437.555 ton pada 2022, kemudian menurun tajam pada 2023 sebelum kembali meningkat pada 2024 dan melonjak signifikan pada 2025 (s.d. November) menjadi 473.755 ton. Nilai ekspor menunjukkan tren meningkat secara konsisten, dari USD 821,93 juta pada 2020 menjadi USD 1,15 miliar pada 2022, sempat menurun pada 2023, lalu melonjak tajam pada 2024 dan mencapai puncak pada 2025 sebesar USD 2,34 miliar, yang mencerminkan penguatan harga kopi dunia dan peningkatan nilai tambah ekspor. Di sisi lain, volume dan nilai impor kopi cenderung meningkat sejak 2023, dengan puncak impor pada 2024, sebelum kembali menurun pada 2025. Secara keseluruhan, neraca perdagangan kopi tetap menunjukkan surplus

yang kuat, dengan kinerja ekspor yang semakin menguat meskipun dipengaruhi oleh volatilitas produksi dan harga global.

Dari sisi perlindungan perkebunan, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tetap menjadi faktor risiko yang memengaruhi stabilitas produksi kopi. Hama utama seperti penggerek buah kopi, penggerek batang dan cabang, kutu hijau, serta penyakit karat daun (*Hemileia vastatrix*) dan nematoda akar masih dijumpai di berbagai sentra produksi. Tekanan OPT ini berpotensi menurunkan hasil dan mutu biji kopi apabila tidak dikendalikan secara memadai. Pada tahun 2025, upaya pengendalian dilakukan melalui pendekatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), antara lain dengan sanitasi kebun, pemangkasan, penggunaan perangkap feromon, pengendalian hayati, serta aplikasi pestisida secara selektif. Penerapan PHT di sejumlah wilayah sentra kopi terbukti membantu menekan tingkat serangan OPT dan menjaga keberlanjutan produksi, meskipun variasi intensitas serangan antarwilayah masih terjadi.

Dari aspek perbenihan, kualitas dan ketersediaan benih unggul turut berperan dalam mendukung kinerja produksi 2025. Program penyediaan dan distribusi benih kopi bersertifikat, termasuk varietas unggul yang lebih adaptif terhadap kondisi agroklimat setempat dan lebih toleran terhadap OPT, mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas. Di beberapa wilayah, perbaikan praktik perbenihan meliputi pemilihan sumber

benih, pengelolaan media tanam, pengendalian hama dan penyakit pada fase pembenihan, serta peningkatan kapasitas penangkar, turut berkontribusi terhadap tersedianya benih yang lebih sehat dan seragam. Hal ini sejalan dengan tren meningkatnya luas tanaman menghasilkan dan menurunnya luas tanaman rusak secara nasional.

Selain itu, faktor lingkungan dan manajemen budidaya juga berpengaruh signifikan terhadap capaian produksi kopi 2025. Perubahan pola iklim, khususnya ketidakpastian curah hujan dan periode kering yang tidak menentu, memengaruhi fase pembungaan, pembentukan buah, dan mutu panen di sejumlah daerah. Namun demikian, adaptasi petani melalui penyesuaian waktu tanam, pengelolaan naungan, pemupukan berimbang, serta perbaikan teknik panen dan pascapanen membantu meredam dampak negatif iklim terhadap produksi. Struktur umur tanaman yang semakin membaik akibat program peremajaan dan rehabilitasi kebun juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas jangka menengah.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Kopi

Berdasarkan analisis, capaian indikator kinerja produksi kopi tahun 2025 termasuk dalam kategori berhasil, didukung oleh beberapa faktor kunci yang saling terkait, diantaranya:

- 1) Peningkatan luas tanaman menghasilkan (TM), tahun 2025 mencapai 984.686 ha, meningkat dari 976.435 ha (2024) dan 940.244 ha (2020), menunjukkan keberhasilan program peremajaan yang mulai berbuah.
- 2) Produktivitas rata-rata 846 kg/ha, tertinggi dalam enam tahun terakhir, dipengaruhi oleh perbaikan praktik budidaya.
- 3) Insentif ekonomi dari kenaikan harga kopi, harga robusta melonjak menjadi Rp50.806/kg (2024) dan arabika Rp92.976/kg (2024), mendorong petani meningkatkan intensitas pemeliharaan dan kualitas panen pascapanen.
- 4) Kontribusi kuat sentra produksi utama seperti Sumatera Selatan (227.267 ton), Lampung (120.795 ton), Sumatera Utara (91.859 ton), Aceh (74.252 ton), menjadi penopang utama realisasi produksi nasional.
- 5) Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) menekan dampak penggerek buah kopi, karat daun, dan OPT lainnya, sehingga mengurangi kehilangan hasil dan menjaga mutu biji.
- 6) Tersedianya benih bersertifikat dan varietas unggul yang lebih adaptif dan toleran OPT yang mendukung peningkatan produktivitas dan kesehatan tanaman.
- 7) Penguatan kapasitas petani dalam GAP, panen, dan pascapanen, mendorong adopsi teknologi budidaya yang lebih baik.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Produksi Kopi

Pencapaian indikator produksi kopi tahun 2025 masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, diantaranya:

- 1) Disparitas produktivitas antarwilayah, dimana banyak provinsi masih berada di bawah rata-rata nasional (846 kg/ha), disebabkan kesenjangan adopsi teknologi, kualitas benih, dan kapasitas SDM petani.
- 2) Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) penggerek buah kopi, penggerek batang/cabang, kutu hijau, karat daun, nematoda akar menyebabkan penurunan hasil dan mutu serta peningkatan biaya produksi.
- 3) Dominasi tanaman tua di kebun rakyat. Laju peremajaan belum sebanding dengan penurunan produktivitas kebun yang sudah tua.
- 4) Pola hujan tidak menentu dan periode kering lebih panjang mengganggu fase pembungaan, pembentukan buah, dan mutu panen.
- 5) Ketersediaan, mutu, dan distribusi benih belum merata. Harga benih masih menjadi kendala bagi sebagian petani.
- 6) Keterbatasan adopsi teknologi budidaya yang ditandai dengan pemupukan tidak berimbang, pemangkasan belum optimal, dan rendahnya sanitasi kebun.
- 7) Ketidaksesuaian spesifikasi kopi domestik dengan kebutuhan industri dilihat dari meningkatnya impor kopi untuk bahan baku tertentu dan mengindikasikan adanya gap varietas, mutu, serta kontinuitas pasokan.

Upaya Perbaikan untuk Mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Produksi Kopi

Untuk menjaga keberlanjutan kinerja produksi kopi dan meningkatkan kualitas pencapaian indikator pada tahun-tahun berikutnya, diperlukan serangkaian upaya diantaranya:

1. Percepatan peremajaan kebun kopi dengan memprioritaskan wilayah berproduktivitas rendah dan kebun dengan tanaman tua, melalui dukungan benih unggul, pembiayaan, dan pendampingan teknis.
2. Peningkatan kapasitas penangkar dan pengawasan mutu benih, perluasan distribusi benih bersertifikat dan terjangkau, pengembangan varietas adaptif iklim dan toleran OPT.
3. Peningkatan pengendalian OPT berbasis PHT melalui perluasan sekolah lapang PHT, pemanfaatan agen hayati dan perangkap feromon, penguatan sistem peringatan dini (early warning system).
4. Peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan pekebun dengan penyuluhan intensif terkait GAP, pemupukan berimbang, pemangkasan, dan sanitasi kebun, penguatan koperasi/kelembagaan petani untuk efisiensi produksi dan pemasaran.
5. Adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pengelolaan naungan, konservasi tanah dan air, penyesuaian kalender tanam dan panen berbasis iklim, serta pengembangan teknologi budidaya adaptif.

6. Penguatan keterkaitan hulu–hilir melalui pengembangan kemitraan petani–industri, peningkatan standar mutu dan ketertelusuran, serta diversifikasi produk kopi bernilai tambah. Penajaman intervensi wilayah spesifik melalui pendekatan berbasis klaster sentra kopi serta diferensiasi strategi sesuai karakter agroklimat dan sosial-ekonomi daerah.

i. Produksi Tebu

Komoditas tebu merupakan salah satu komoditas strategis nasional karena berperan sebagai bahan baku utama industri gula, yang memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan pangan, stabilitas harga, serta kesejahteraan petani. Indonesia memiliki potensi pengembangan tebu yang besar didukung oleh ketersediaan lahan yang luas, keragaman agroklimat yang sesuai, serta basis petani dan industri pengolahan yang telah terbentuk sejak lama. Selain sebagai sumber gula konsumsi, tebu juga memiliki prospek pengembangan untuk bioenergi, pakan ternak, dan produk turunan lainnya dalam kerangka hilirisasi. Dalam konteks RPJMN 2025–2029, pengembangan tebu diarahkan untuk memperkuat kemandirian gula nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri gula domestik, sehingga capaian produksi tebu menjadi indikator kinerja

yang sangat penting dalam menilai keberhasilan pembangunan subsektor perkebunan.

Tabel 52. Capaian Produksi Tebu

IK 1-9		Produksi Tebu		
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
36.813.539 ton	39.069.968 ton*)	106,13	84.714.460 ton	46,12

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Pada tahun 2025, indikator kinerja produksi tebu dengan target sebesar 36.813.539 ton, dengan realisasi mencapai 39.069.968 ton capaian 106,13% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja produksi tebu nasional berada pada kategori sangat berhasil dan melampaui target yang telah direncanakan. Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 39.069.968 ton atau 46,12% dari target yang direncanakan yaitu 84.714.460 ton. Hal ini menunjukkan target akhir renstra masih belum terpenuhi.

Tabel 53. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Rendemen, Produksi, dan Produktivitas Tebu, dan Produksi, dan Produktivitas GKP

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi GKP (Ton)	Produktivitas GKP (Ton/Ha)	Produksi Tebu (Ton)	Produktivitas Tebu (Kg/Ha)	Rendemen (%)
2020	443.320	420.505	2.130.719	5,07	29.737.781	70,72	7,17

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi GKP (Ton)	Produktivitas GKP (Ton/Ha)	Produksi Tebu (Ton)	Produktivitas Tebu (Kg/Ha)	Rendemen (%)
2021	468.576	447.399	2.350.809	5,25	32.340.604	72,29	7,27
2022	524.804	488.982	2.405.907	4,92	36.436.781	74,52	6,6
2023	511.048	504.776	2.271.009	4,50	31.045.342	61,50	7,32
2024	523.014	520.823	2.465.514	4,73	33.216.613	63,78	7,42
2025	543.926	541.827	2.679.759	4,95	39.069.968	69,35	6,83

Sumber: Data Statistik Ditjen Perkebunan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produksi tebu nasional menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020 produksi tebu sebesar 29,74 juta ton, meningkat menjadi 32,34 juta ton pada tahun 2021 dan kembali naik signifikan menjadi 36,44 juta ton pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi menjadi 31,05 juta ton yang dipengaruhi oleh penurunan produktivitas tebu, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 33,22 juta ton. Pada tahun 2025, produksi tebu melonjak menjadi 39,07 juta ton, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

Dari sisi luas areal, luas tanam dan luas panen tebu juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Luas tanam meningkat dari 443.320 ha pada tahun 2020 menjadi 543.926 ha pada tahun 2025, sementara luas panen naik dari 420.505 ha menjadi 541.827 ha pada periode yang sama. Peningkatan luas panen ini berkontribusi signifikan terhadap kenaikan volume produksi nasional, selain

perbaikan produktivitas tebu yang pada tahun 2025 mencapai 69,35 ton/ha, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing sebesar 61,50 ton/ha dan 63,78 ton/ha.

Produktivitas tebu dalam lima tahun terakhir mengalami dinamika yang cukup signifikan. Produktivitas tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 74,52 ton/ha, kemudian menurun pada tahun 2023, sebelum kembali membaik pada tahun 2024 dan 2025. Dari sisi rendemen, terjadi fluktuasi dari 7,17 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 7,27 persen pada tahun 2021, menurun pada tahun 2022 menjadi 6,60 persen, kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 7,32 persen dan 7,42 persen, sebelum turun kembali pada tahun 2025 menjadi 6,83 persen.

Tabel 54. Perkembangan Harga Rata-rata Gula Pasir Tebu di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	14.863
2021	12.831
2022	14.707
2023	14.840
2024	17.791
2025	18.237

Sumber: SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Dinamika harga domestik gula pasir tebu selama periode 2020–2025 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja

komoditas tebu. Berdasarkan data, harga rata-rata gula pasir pada 2020 tercatat sebesar Rp14.863/kg, kemudian menurun pada 2021 menjadi Rp12.831/kg. Pada 2022 harga mulai meningkat menjadi Rp14.707/kg dan relatif stabil pada 2023 sebesar Rp14.840/kg. Selanjutnya, pada 2024 terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai Rp17.791/kg, dan kembali meningkat pada 2025 menjadi Rp18.237/kg. Tren kenaikan pada periode akhir tersebut menunjukkan adanya perbaikan keseimbangan pasar yang didukung oleh penguatan permintaan dan pengendalian pasokan domestik.

Secara keseluruhan, harga gula pasir pada akhir periode berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan awal periode, sehingga memberikan insentif ekonomi yang lebih baik bagi petani dan pelaku usaha untuk mempertahankan serta meningkatkan produktivitas tebu. Meskipun demikian, fluktuasi harga yang terjadi pada awal hingga pertengahan periode mencerminkan bahwa pasar gula domestik masih rentan terhadap perubahan kondisi pasokan dan permintaan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan stabilisasi harga, peningkatan efisiensi rantai pasok, serta perbaikan tata niaga menjadi langkah strategis guna menciptakan kepastian usaha dan mendukung keberlanjutan produksi gula nasional.

Tabel 55. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor – Impor Tetes Tebu

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2022	605.192	104.549	79.805	24.033
2023	820.635	140.619	57.466	16.684
2024	495.251	95.767	50.489	13.002
2025*)	719.508	92.458	37.477	7.852

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor–impor tetes tebu periode 2022–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Volume ekspor meningkat dari 605.192 ton pada 2022 menjadi 820.635 ton pada 2023, kemudian menurun tajam pada 2024 sebelum kembali meningkat pada 2025 (s.d. November) menjadi 719.508 ton. Nilai ekspor mengikuti pola yang berbeda, meningkat pada 2023 hingga USD 140,62 juta, namun menurun pada 2024 dan kembali melemah pada 2025 menjadi USD 92,46 juta, yang mengindikasikan penurunan harga internasional meskipun volume ekspor kembali meningkat. Di sisi lain, volume dan nilai impor tetes tebu menunjukkan tren menurun secara konsisten dari 2022 hingga 2025, mencerminkan menurunnya ketergantungan terhadap pasokan impor. Secara keseluruhan, perdagangan tetes tebu masih didominasi oleh ekspor dengan surplus yang

terjaga, meskipun dipengaruhi oleh volatilitas volume dan harga pasar global.

Tabel 56. Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tebu, Produksi, dan Produktivitas GKP Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi GKP (Ton)	Produktivitas GKP (kg/ha)
1.	Aceh	-	-	-	-
2.	Sumatera Utara	5.710	5.710	12.769	2.236
3.	Sumatera Barat	-	-	-	-
4.	Riau	-	-	-	-
5.	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6.	Jambi	-	-	-	-
7.	Sumatera Selatan	36.890	35.398	159.546	4.507
8.	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-
9.	Bengkulu	-	-	-	-
10.	Lampung	149.908	149.908	799.713	5.335
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	15.958	15.958	62.815	3.936
13.	Banten	-	-	-	-
14.	Jawa Tengah	50.191	50.191	217.331	4.330
15.	D.I. Yogyakarta	989	989	3.222	3.257
16.	Jawa Timur	252.175	252.175	1.269.587	5.035

No.	Provinsi	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi GKP (Ton)	Produktivitas GKP (kg/ha)
17.	Bali	-	-	-	-
18.	Nusa Tenggara Barat	3.802	3.802	23.340	6.140
19.	Nusa Tenggara Timur	3.066	3.066	16.893	5.511
20.	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23.	Kalimantan Timur	-	-	-	-
24.	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25.	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26.	Gorontalo	10.746	10.746	51.389	4.782
27.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
28.	Sulawesi Selatan	9.276	8.669	34.086	3.932
29.	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30.	Sulawesi Tenggara	5.215	5.215	29.069	5.574
31.	Maluku	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-
35.	Papua Selatan	-	-	-	-

No.	Provinsi	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi GKP (Ton)	Produktivitas GKP (kg/ha)
36.	Papua Tengah	-	-	-	-
37.	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38.	Papua Barat Daya	-	-	-	-
INDONESIA		543.926	541.827	2.679.759	4.946

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Keragaan produksi gula kristal putih (GKP) tahun 2025 menunjukkan bahwa sentra utama produksi masih terkonsentrasi di beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Secara nasional, luas tanam tebu tercatat sebesar 543.926 ha dengan luas panen 541.827 ha, menghasilkan produksi GKP sebesar 2.679.759 ton dengan produktivitas rata-rata 4,95 ton/ha. Provinsi Jawa Timur menjadi kontributor terbesar dengan luas panen 252.175 ha dan produksi GKP sebesar 1.269.587 ton, atau hampir setengah dari total produksi nasional, dengan produktivitas 5,04 ton/ha. Lampung menempati posisi kedua dengan luas panen 149.908 ha dan produksi GKP sebesar 799.713 ton, serta produktivitas 5,34 ton/ha. Jawa Tengah juga menjadi sentra penting dengan produksi 217.331 ton dari luas panen 50.191 ha. Di luar Jawa, kontribusi signifikan berasal dari Sumatera Selatan dengan produksi 159.546 ton serta dari beberapa provinsi di Sulawesi dan Nusa Tenggara, seperti Gorontalo

(51.389 ton), Sulawesi Selatan (34.086 ton), Sulawesi Tenggara (29.069 ton), Nusa Tenggara Barat (23.340 ton), dan Nusa Tenggara Timur (16.893 ton).

Dari aspek organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pada tahun 2025 serangan OPT tebu relatif terkendali namun masih memberikan tekanan terhadap produktivitas di beberapa sentra. Hama utama seperti penggerek batang (*Scirpophaga excerptalis*), wereng daun, dan tikus masih dilaporkan di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung. Selain itu, penyakit layu bakteri, busuk akar, serta serangan jamur pada lahan dengan drainase kurang baik juga ditemukan di beberapa lokasi. Secara umum, dampak OPT pada 2025 lebih tercermin pada variasi produktivitas antarwilayah dibandingkan penurunan luas panen secara signifikan. Upaya pengendalian dilakukan melalui penerapan pengendalian hama terpadu (PHT), penggunaan feromon trap, sanitasi kebun, rotasi tanaman, serta penggunaan pestisida selektif.

Dari sisi perbenihan tebu, ketersediaan dan distribusi benih unggul mengalami perbaikan. Pemerintah bersama BUMN perkebunan dan pelaku usaha swasta mendorong penggunaan varietas unggul yang adaptif terhadap iklim, tahan penyakit, dan memiliki rendemen lebih baik. Pada tahun 2025, penyaluran benih unggul meningkat dibanding tahun sebelumnya, terutama ke sentra utama seperti Jawa Timur, Lampung, dan Jawa Tengah. Selain itu, program peremajaan areal tebu terus dilaksanakan

untuk mengganti tanaman tua dengan bibit berkualitas, dengan cakupan puluhan ribu hektare secara nasional. Tingkat penggunaan benih bersertifikat juga menunjukkan tren meningkat, meskipun masih perlu terus ditingkatkan untuk menjamin produktivitas jangka panjang dan menekan risiko penyebaran penyakit tanaman.

Dari aspek iklim dan cuaca, tahun 2025 ditandai oleh fluktuasi curah hujan dan distribusi hujan yang tidak merata di beberapa wilayah sentra produksi. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan tanam di sebagian lokasi serta meningkatkan risiko genangan dan penyakit pada fase awal pertumbuhan tanaman. Namun, penerapan penjadwalan tanam yang lebih adaptif, perbaikan sistem drainase, dan pengelolaan air yang lebih baik membantu memitigasi dampak negatif iklim terhadap produksi nasional.

Dari sisi teknologi budidaya dan sarana produksi, penerapan mekanisasi pada kegiatan tanam dan panen mulai meningkat di beberapa sentra, sehingga menekan kehilangan hasil dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, penerapan pemupukan berimbang berbasis analisis tanah, penggunaan pupuk hayati, serta pemantauan lapangan berbasis digital turut mendukung peningkatan kinerja budidaya. Program pendampingan teknis kepada petani juga berperan dalam meningkatkan adopsi praktik budidaya yang lebih baik.

Dari aspek kebijakan dan kelembagaan, berbagai program pendukung turut memperkuat kinerja produksi tebu tahun 2025, antara lain insentif harga, jaminan serapan hasil oleh pabrik gula, revitalisasi pabrik gula tua, serta penguatan kemitraan antara petani dan pabrik gula. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN perkebunan, dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan produksi dan meningkatkan efisiensi rantai pasok tebu.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Tebu

- 1) Luas tanam meningkat menjadi 543.926 ha dan luas panen mencapai 541.827 ha, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga berkontribusi langsung terhadap kenaikan volume produksi nasional.
- 2) Produktivitas tebu nasional tahun 2025 mencapai 69,35 ton/ha, meningkat dibandingkan tahun 2023 dan 2024, mencerminkan membaiknya kinerja budidaya dan kondisi tanaman.
- 3) Meningkatnya penggunaan varietas unggul dan benih bersertifikat, terutama di sentra utama seperti Jawa Timur, Lampung, dan Jawa Tengah, turut mendorong peningkatan hasil per hektar.
- 4) Penggantian tanaman tua dengan benih berkualitas melalui program bongkar ratoon tebu meningkatkan potensi produksi dan menekan penurunan hasil.

- 5) Lonjakan harga gula pada 2024 (Rp17.791/kg) memberikan insentif ekonomi yang kuat bagi petani untuk meningkatkan luas tanam dan intensitas budidaya.
- 6) Pengendalian OPT yang relatif terkendali melalui penerapan pengendalian hama terpadu (PHT), penggunaan feromon trap, dan sanitasi kebun membantu menekan kehilangan hasil secara nasional.
- 7) Kondisi iklim yang relatif mendukung di sebagian besar sentra, memungkinkan pertumbuhan tanaman yang baik, terutama pada fase pengisian batang.
- 8) Skema kemitraan petani dengan pabrik gula yang lebih baik meningkatkan kepastian serapan hasil, memperbaiki tata niaga tebu, dan mendorong petani menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan.
- 9) Mulainya adopsi mekanisasi panen, pemupukan berimbang berbasis analisis tanah, serta pemantauan lapangan berbasis digital membantu meningkatkan efisiensi dan menekan kehilangan hasil.
- 10) Insentif harga, revitalisasi pabrik gula, serta pendampingan teknis kepada petani memperkuat ekosistem produksi tebu nasional.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Produksi Tebu

- 1) Masih terdapat kesenjangan produktivitas yang cukup besar antarprovinsi, mencerminkan perbedaan tingkat adopsi teknologi, kualitas benih, dan praktik budidaya.

- 2) Rendemen turun menjadi 6,83 persen pada 2025, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan 2024, yang berdampak pada efisiensi produksi gula meskipun volume tebu meningkat.
- 3) Serangan hama penggerek batang, wereng, tikus, serta penyakit layu bakteri dan busuk akar masih menekan produktivitas di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung.
- 4) Petani yang menggunakan benih bersertifikat masih belum merata, terutama di luar Jawa.
- 5) Distribusi hujan yang tidak merata dan genangan di beberapa lokasi menyebabkan keterlambatan tanam, gangguan pertumbuhan awal, dan meningkatnya risiko penyakit tanaman.
- 6) Akses terhadap alat mesin pertanian (alsintan) dan input produksi modern masih terbatas di beberapa wilayah, terutama sentra non-Jawa.
- 7) Banyak kebun tebu masih didominasi tanaman tua yang menurunkan potensi hasil dan rendemen.
- 8) Sebagian pabrik gula masih berteknologi lama sehingga menyebabkan kehilangan gula dan keterbatasan dalam menyerap tebu saat puncak panen.
- 9) Kelembagaan petani tebu di beberapa daerah masih lemah, mempengaruhi akses pembiayaan, input produksi, dan posisi tawar dalam kemitraan.

Upaya Perbaikan untuk Mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Produksi Tebu

- 1) Memperluas cakupan bongkar ratoon untuk mengganti tanaman tua dengan varietas unggul berproduktivitas tinggi dan rendemen lebih baik.
- 2) Memperkuat sistem perbenihan nasional, memperluas kebun benih sumber, dan memberikan insentif penggunaan benih unggul bagi petani.
- 3) Meningkatkan intensitas monitoring OPT, memperluas penggunaan agen hayati, feromon trap, serta pelatihan petani dalam PHT.
- 4) Mendorong penerapan varietas berrendemen tinggi, perbaikan waktu panen optimal, serta peningkatan efisiensi pengolahan di pabrik gula.
- 5) Memperluas akses alsintan, mendukung mekanisasi tanam dan panen, serta digitalisasi pemantauan kebun.
- 6) Melanjutkan program revitalisasi pabrik gula tua untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi gula dan kapasitas serap tebu.
- 7) Menyempurnakan pola kemitraan berbasis kontrak yang adil dan transparan untuk menjamin harga, kualitas, dan kepastian serapan hasil.
- 8) Mendorong penguatan koperasi/kelembagaan petani tebu, memperluas akses KUR dan skema pembiayaan khusus tebu.

- 9) Mendorong perluasan areal tebu berkelanjutan di Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara untuk mengurangi ketergantungan pada Pulau Jawa.
- 10)Memperkuat pelatihan teknis, pendampingan lapangan, dan diseminasi inovasi teknologi tebu.

j. Produksi Karet

Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, baik sebagai sumber devisa, penyedia lapangan kerja, maupun penggerak ekonomi wilayah perdesaan. Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu produsen dan eksportir karet alam terbesar di dunia, dengan basis produksi yang didominasi oleh perkebunan rakyat. Keunggulan komparatif Indonesia terletak pada luas areal yang besar, ketersediaan sumber daya lahan yang sesuai, serta penguasaan teknologi budidaya dan pemuliaan klon unggul yang terus berkembang. Di tengah dinamika pasar global, tantangan perubahan iklim, dan fluktuasi harga, komoditas karet tetap memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui peremajaan tanaman, peningkatan produktivitas, pengendalian OPT, serta penguatan industri hilir, sehingga mampu berkontribusi lebih optimal terhadap ketahanan ekonomi nasional dan kesejahteraan pekebun.

Tabel 57. Capaian Produksi Karet

IK 1-10		Produksi Karet		
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
2.496.364 ton	2.116.097 ton*)	84,77	3.080.114 ton	68,70

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Pada tahun 2025, indikator kinerja produksi karet (wujud produksi karet kering) dengan target sebesar 2.496.364 ton dengan realisasi sebesar 2.116.097 ton, atau 84,77 % dari target sehingga masuk dalam kategori berhasil. Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 2.116.097 ton atau 68,70% dari target yang direncanakan yaitu 3.080.114 ton. Hal ini menunjukkan target akhir renstra belum terpenuhi, dan masih termasuk dalam kategori cukup berhasil. Secara nasional, total luas areal karet pada tahun 2025 mencapai 3.139.829 Ha, yang terdiri atas 2.227.395 Ha tanaman menghasilkan (TM), 626.581 Ha tanaman belum menghasilkan (TBM), dan 285.853 Ha tanaman rusak (TR). Dengan produksi sebesar 2.116.097 ton, rata-rata produktivitas nasional tercatat sekitar 950 kg per Ha. Hal ini menunjukkan masih besarnya proporsi tanaman belum menghasilkan dan tanaman rusak yang secara langsung menghambat produksi nasional.

Tabel 58. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	491.895	2.983.645	250.633	3.726.173	3.037.348	1.018
2021	548.572	3.001.448	226.466	3.776.485	3.045.314	1.015
2022	575.396	2.696.821	284.875	3.557.092	2.717.081	1.008
2023	590.107	2.279.353	283.284	3.152.745	2.240.826	983
2024	613.533	2.242.887	292.857	3.149.277	2.132.088	951
2025*)	626.581	2.227.395	285.853	3.139.829	2.116.097	950

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Ditinjau dari perkembangan lima tahun terakhir, kinerja komoditas karet menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020, luas tanaman menghasilkan masih mencapai 2.983.645 Ha dengan produksi sebesar 3.037.348 ton dan produktivitas 1.018 kg/ha. Tahun 2021 produksi relatif stagnan di angka 3.045.314 ton dengan produktivitas 1.015 kg/ha. Namun mulai 2022 terjadi penurunan signifikan, dimana produksi menurun menjadi 2.717.081 ton, lalu turun lagi menjadi 2.240.826 ton pada 2023, 2.132.088 ton pada 2024, dan 2.116.097 ton pada 2025. Dalam periode 2020–2025, produksi karet nasional secara kumulatif menurun sekitar 921 ribu ton atau lebih dari 30%, seiring dengan berkurangnya luas tanaman menghasilkan dan menurunnya produktivitas rata-rata nasional. Penurunan kinerja tersebut berkorelasi erat dengan meningkatnya luas tanaman belum menghasilkan dan tanaman rusak. Luas TBM meningkat dari 491.895 Ha pada tahun 2020 menjadi 626.581 Ha pada tahun 2025, sementara luas tanaman rusak relatif tinggi dan

fluktuatif, dari 250.633 Ha (2020) menjadi 285.853 Ha (2025). Proses peremajaan kebun karet belum mampu mengimbangi laju penuaan dan kerusakan tanaman, sehingga tanaman produktif terus menyusut.

Tabel 59. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	9.908	57.475	8.381	75.764	51.802	901
2.	Sumatera Utara	51.387	258.588	26.898	336.872	248.007	959
3.	Sumatera Barat	9.922	104.345	650	114.918	101.149	969
4.	Riau	12.088	193.076	22.536	227.700	182.133	943
5.	Kepulauan Riau	3.130	13.489	5.454	22.073	8.549	634
6.	Jambi	95.701	240.883	39.568	376.152	221.555	920
7.	Sumatera Selatan	118.599	555.251	98.548	772.398	617.002	1.111
8.	Kep. Bangka Belitung	6.486	30.186	412	37.084	26.113	865
9.	Bengkulu	8.937	77.408	1.539	87.884	65.599	847
10.	Lampung	34.615	89.108	12.232	135.955	79.565	893
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	1.899	28.165	6.609	36.673	15.702	557
13.	Banten	2.933	8.667	1.336	12.936	4.444	513
14.	Jawa Tengah	4.653	20.487	2.176	27.317	19.257	940
15.	D.I. Yogyakarta	18	41	2	61	5	132
16.	Jawa Timur	938	16.791	199	17.927	14.231	848
17.	Bali	-	-	-	-	-	-
18.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20.	Kalimantan Barat	101.445	183.956	19.162	304.563	160.400	872
21.	Kalimantan Tengah	121.296	137.054	15.757	274.107	109.572	799
22.	Kalimantan Selatan	29.716	136.990	17.917	184.622	126.966	927
23.	Kalimantan Timur	5.691	58.448	2.583	66.721	53.960	923

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
24.	Kalimantan Utara	1.004	513	775	2.292	190	371
25.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26.	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
27.	Sulawesi Tengah	1.194	2.837	1.414	5.445	1.376	485
28.	Sulawesi Selatan	2.662	5.438	215	8.314	3.174	584
29.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Tenggara	362	432	-	794	219	506
31.	Maluku	248	791	1.490	2.528	304	385
32.	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
35.	Papua Selatan	1.752	6.977	-	8.729	4.824	691
36.	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37.	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38.	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
	INDONESIA	626.581	2.227.395	285.853	3.139.829	2.116.097	950

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Produksi karet nasional masih sangat terkonsentrasi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Provinsi Sumatera Selatan menjadi kontributor terbesar dengan produksi mencapai 617.002 ton dari luas tanaman menghasilkan 555.251 Ha dan produktivitas 1.111 kg/ha. Provinsi Sumatera Utara dan Jambi juga menjadi sentra utama, masing-masing dengan produksi 248.007 ton dan 221.555 ton. Di wilayah Sumatera lainnya, Riau dengan produksi 182.133 ton, Sumatera Barat 101.149 ton, Aceh 51.802 ton, Lampung 79.565 ton, Bengkulu 65.599 ton, serta Kepulauan Bangka Belitung 26.113 ton. Di Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat menghasilkan 160.400 ton,

Kalimantan Tengah 109.572 ton, Kalimantan Selatan 126.966 ton, dan Kalimantan Timur 53.960 ton.

Tabel 60. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Karet di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Wujud	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	<i>Lump</i>	6.088
	<i>Slab</i>	8.117
2021	<i>Lump</i>	8.397
	<i>Slab</i>	9.502
2022	<i>Lump</i>	8.735
	<i>Slab</i>	8.550
2023	<i>Lump</i>	7.469
	<i>Slab</i>	7.479
2024	<i>Lump</i>	9.408
	<i>Slab</i>	10.020
2025	<i>Lump</i>	10.651
	<i>Slab</i>	10.917

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Perkembangan harga rata-rata karet domestik, baik dalam bentuk karet lump maupun slab, pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dan berimplikasi langsung terhadap perilaku produksi di tingkat petani. Pada tahun 2020, harga karet tercatat relatif rendah, yaitu Rp6.088/kg untuk karet lump dan Rp8.117/kg untuk karet slab, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp8.397/kg (lump) dan Rp9.502/kg (slab). Pada tahun 2022, harga cenderung stagnan dengan karet lump sebesar Rp8.735/kg dan slab Rp8.550/kg, sebelum

kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp7.469/kg (lump) dan Rp7.479/kg (slab). Selanjutnya, pada tahun 2024 harga karet kembali meningkat cukup signifikan menjadi Rp9.408/kg untuk karet lump dan Rp10.020/kg untuk karet slab, dan tren penguatan harga tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan harga mencapai Rp10.651/kg (lump) dan Rp10.917/kg (slab). Dinamika harga yang berfluktuasi tersebut mencerminkan ketidakstabilan pasar karet domestik dan global, yang berdampak pada ketidakpastian pendapatan petani serta berpengaruh terhadap rendahnya minat untuk melakukan intensifikasi, pemeliharaan kebun secara optimal, dan percepatan peremajaan tanaman karet tua, sehingga diperlukan upaya penguatan stabilisasi harga dan peningkatan produktivitas untuk mendukung keberlanjutan usaha tani karet nasional.

Tabel 61. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Karet

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	2.279.915	3.010.091	53.225	53.782
2021	2.334.734	4.015.931	54.594	72.657
2022	2.035.902	3.539.986	111.269	144.012
2023	1.753.985	2.477.620	178.605	150.417
2024	1.619.334	2.902.961	138.130	146.550
2025*)	1.578.869	3.035.131	73.098	142.830

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor–import karet periode 2020–2025 menunjukkan

tren penurunan volume ekspor yang cukup konsisten, namun disertai fluktuasi nilai ekspor. Volume ekspor karet menurun dari 2,28 juta ton pada 2020 menjadi 1,75 juta ton pada 2023 dan terus melemah hingga 1,58 juta ton pada 2025 (s.d. November), yang mencerminkan tekanan produksi maupun permintaan global. Sebaliknya, nilai ekspor sempat meningkat tajam pada 2021 hingga USD 4,02 miliar, kemudian menurun pada 2022–2023 sebelum kembali meningkat pada 2024–2025 dan mencapai USD 3,04 miliar pada 2025, seiring perbaikan harga internasional. Di sisi lain, volume impor karet meningkat signifikan hingga 2023, kemudian menurun pada 2024–2025, sementara nilai impor relatif stabil pada kisaran USD 140–150 juta dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, neraca perdagangan karet tetap menunjukkan surplus yang besar, meskipun kinerja ekspor dihadapkan pada tantangan penurunan volume dan volatilitas harga global.

Selain faktor struktural dan ekonomi, serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) turut memberikan tekanan signifikan terhadap produktivitas karet nasional. Penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh jamur seperti *Colletotrichum gloeosporioides*, *Corynespora cassiicola*, *Oidium heveae*, dan *Pestalotiopsis* sp. masih ditemukan di berbagai sentra produksi, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Serangan penyakit gugur daun yang berulang dapat menurunkan produksi lateks secara

nyata karena mengganggu proses fotosintesis, bahkan pada kondisi tertentu dapat menurunkan hasil hingga puluhan % apabila tidak ditangani secara memadai. Selain itu, penyakit akar putih yang disebabkan oleh jamur *Rigidoporus microporus* juga menjadi ancaman serius karena dapat menyebabkan kematian pohon dan memperluas areal tanaman rusak, sehingga berdampak langsung pada penurunan luas tanaman menghasilkan.

Dari aspek perbenihan, penggunaan bahan tanam yang belum seluruhnya bermutu dan bersertifikat turut membatasi potensi peningkatan produktivitas. Sebagian kebun rakyat masih menggunakan klon lama berdaya hasil rendah dan lebih rentan terhadap penyakit. Padahal, berbagai klon unggul hasil pemuliaan nasional, seperti klon-klon seri IRR (Indonesian Rubber Research), memiliki potensi hasil lateks yang jauh lebih tinggi dan tingkat ketahanan yang lebih baik terhadap penyakit gugur daun. Klon-klon tertentu dalam seri IRR 300 bahkan dilaporkan memiliki ketahanan relatif tinggi terhadap penyakit utama karet dan potensi produksi lebih dari 2.000 kg/ha/tahun apabila didukung dengan teknik budidaya dan sadap yang tepat. Namun demikian, adopsi klon unggul tersebut di tingkat petani masih terbatas karena kendala ketersediaan benih bermutu, kapasitas penangkar, serta keterbatasan akses pembiayaan untuk peremajaan kebun.

Selain itu, praktik agronomis di tingkat kebun juga memengaruhi kinerja produksi karet nasional. Variasi

dalam penerapan pemupukan, sanitasi kebun, pengendalian gulma, dan teknik sadap menyebabkan perbedaan produktivitas yang cukup lebar antarwilayah dan antarpetani. Teknik sadap yang tidak sesuai rekomendasi, baik dari sisi frekuensi, sudut sadap, maupun penggunaan stimulan, berpotensi menurunkan umur ekonomis tanaman dan menekan produktivitas jangka panjang. Di beberapa wilayah, pengembangan karet di lahan marginal, seperti lahan gambut dan lahan dengan kesuburan rendah, juga menambah tantangan karena memerlukan pengelolaan tanah dan air yang lebih intensif agar tanaman dapat berproduksi optimal.

Faktor iklim turut berperan dalam menekan produksi karet pada tahun 2025. Pola curah hujan yang tidak menentu, periode hujan berkepanjangan di beberapa sentra produksi, serta kejadian musim kering di wilayah lain memengaruhi intensitas penyadapan dan volume lateks yang dihasilkan. Kondisi cuaca ekstrem juga meningkatkan kerentanan tanaman terhadap serangan penyakit dan mengganggu jadwal pemeliharaan kebun.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Karet

Berdasarkan analisis, capaian indikator kinerja produksi karet tahun 2025 termasuk dalam kategori berhasil, didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Produksi nasional masih tinggi meskipun mengalami tren penurunan.

2. Sentra produksi utama di Sumatera dan Kalimantan tetap berkontribusi signifikan, terutama Sumatera Selatan (617.002 ton), Sumatera Utara (248.007 ton), dan Jambi (221.555 ton), yang menjadi penopang produksi nasional.
3. Produktivitas nasional relatif stabil di 950 kg/ha, meskipun menurun dibandingkan periode sebelumnya.
4. Kenaikan harga domestik karet pada tahun 2024 (lump Rp9.518/kg dan slab Rp9.981/kg) memberikan insentif ekonomi yang relatif lebih baik bagi petani.
5. Penggunaan varietas unggul hasil pemuliaan nasional di sebagian wilayah mulai memberikan dampak positif terhadap produktivitas, terutama pada kebun yang telah diremajakan dalam beberapa tahun terakhir.
6. Permintaan industri hilir dalam negeri yang relatif stabil ikut menopang serapan produksi domestik, meskipun ekspor mengalami penurunan.
7. Upaya pengendalian OPT di beberapa sentra produksi membantu mencegah kerusakan tanaman yang lebih luas, terutama terhadap penyakit gugur daun dan penyakit akar putih.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Produksi Karet

Meskipun capaian produksi tergolong baik, masih terdapat sejumlah permasalahan, diantaranya:

1. Masih tingginya proporsi tanaman tua dan rusak (285.853 ha) yang menurunkan produktivitas dan

mengurangi luas tanaman menghasilkan secara efektif.

2. Luas tanaman belum menghasilkan (626.581 ha) yang terus meningkat, sehingga dalam jangka pendek belum memberikan kontribusi terhadap produksi nasional.
3. Laju peremajaan kebun karet rakyat belum mampu mengimbangi laju penuaan dan kerusakan tanaman akibat keterbatasan modal, akses pembiayaan, dan kapasitas petani.
4. Serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), terutama penyakit gugur daun dan penyakit akar putih, yang masih terjadi di berbagai sentra produksi dan menurunkan hasil lateks secara signifikan.
5. Adopsi varietas unggul tahan penyakit dan berdaya hasil tinggi masih terbatas karena keterbatasan ketersediaan benih bermutu.
6. Variasi praktik budidaya dan teknik sadap yang belum sesuai rekomendasi di tingkat petani, yang berdampak pada rendahnya produktivitas rata-rata dan umur ekonomis tanaman.
7. Fluktuasi dan kecenderungan harga karet yang relatif rendah dalam beberapa tahun sebelumnya, yang menurunkan minat petani untuk berinvestasi dalam pemeliharaan kebun dan peremajaan.
8. Penurunan volume ekspor dan meningkatnya impor, yang mencerminkan tekanan permintaan global sekaligus tantangan daya saing karet nasional.

9. Faktor iklim, seperti curah hujan yang tidak menentu, periode hujan berkepanjangan, dan musim kering di beberapa wilayah, yang mengganggu intensitas penyadapan dan meningkatkan risiko serangan penyakit.
10. Konversi sebagian areal karet ke komoditas lain yang lebih menguntungkan secara ekonomi di beberapa daerah, sehingga mengurangi luas tanaman menghasilkan nasional.

Upaya Perbaikan untuk Mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Produksi Karet

Untuk meningkatkan kinerja produksi karet nasional, diperlukan serangkaian upaya perbaikan, diantaranya:

11. Mempercepat dan memperluas program peremajaan tanaman karet tua dan rusak dengan dukungan pembiayaan yang lebih inklusif (KUR, subsidi bunga, skema pembiayaan khusus perkebunan).
12. Memperkuat sistem perbenihan karet nasional melalui peningkatan kapasitas penangkar, sertifikasi benih, dan distribusi varietas unggul tahan penyakit.
13. Meningkatkan intensitas pendampingan teknis kepada pekebun rakyat terkait praktik budidaya baik (GAP), pemupukan berimbang, sanitasi kebun, dan teknik sadap yang sesuai rekomendasi.
14. Memperkuat sistem pengendalian OPT melalui deteksi dini, peningkatan kapasitas petugas perlindungan tanaman (POPT), penggunaan agen hayati, dan pengendalian terpadu berbasis wilayah.

15. Mendorong adopsi teknologi intensifikasi produksi, termasuk penggunaan stimulan yang tepat, sistem sadap rendah intensitas, dan mekanisasi terbatas untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja.
16. Mengembangkan skema kemitraan usaha antara pekebun, koperasi, dan industri hilir untuk menjamin kepastian pasar, mutu produk, dan stabilitas harga di tingkat petani.
17. Memperkuat hilirisasi industri karet dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan menekan kebutuhan impor.
18. Mengintegrasikan program pengembangan karet dengan kebijakan lintas sektor agar dukungan kebijakan lebih konsisten dan berkelanjutan.

k. Produksi Kakao

Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber pendapatan petani, penyedia bahan baku industri pengolahan, maupun penyumbang devisa negara. Indonesia termasuk dalam jajaran produsen kakao utama dunia dengan basis produksi yang tersebar luas, terutama di kawasan Sulawesi, Sumatera, dan sebagian wilayah Indonesia Timur. Keunggulan kakao Indonesia terletak pada ketersediaan lahan yang masih luas, keragaman agroekosistem yang sesuai untuk budidaya kakao, serta

potensi pengembangan hilirisasi yang terus meningkat seiring tumbuhnya industri pengolahan dalam negeri. Di sisi lain, meningkatnya permintaan global terhadap produk coklat dan melonjaknya harga kakao dalam beberapa tahun terakhir menjadi peluang strategis untuk mendorong kebangkitan produksi kakao nasional melalui peremajaan tanaman, peningkatan produktivitas, serta penguatan tata kelola budidaya dan pascapanen yang berkelanjutan.

Tabel 62. Capaian Produksi Kakao

IK 1-11		Produksi Kakao		
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
632.787 ton	616.103 ton*)	97,36	634.796 ton	97,06

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Pada tahun 2025, indikator kinerja produksi kakao dalam wujud produksi biji kakao kering dengan target sebesar 632.787 ton terealisasi sebesar 616.103 ton atau 97,36% dari target. Secara nasional, luas areal kakao Indonesia pada tahun 2025 sebesar 1.359.567 Ha, yang terdiri atas tanaman belum menghasilkan seluas 205.028 Ha, tanaman menghasilkan seluas 862.612 Ha, dan tanaman rusak seluas 291.927 Ha. Dengan total produksi sebesar 616.103 ton, produktivitas rata-rata nasional berada pada

kisaran 714 kg per Ha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun porsi tanaman menghasilkan masih dominan, besarnya luasan tanaman rusak dan tanaman tua yang tidak produktif tetap menjadi faktor penghambat utama dalam peningkatan produksi nasional. Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 616.103 ton atau 97,06% dari target yang direncanakan yaitu 634.796 ton. Hal ini menunjukkan target akhir renstra belum terpenuhi, namun sudah termasuk dalam kategori berhasil.

Tabel 63. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	254.907	996.761	257.287	1.508.955	720.661	723
2021	232.430	952.237	275.730	1.460.396	688.210	723
2022	220.358	910.274	290.383	1.421.014	650.612	715
2023	212.276	890.339	290.775	1.393.390	632.117	710
2024	205.968	863.095	298.364	1.367.426	617.112	715
2025*)	205.028	862.612	291.927	1.359.567	616.103	714

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Apabila dilihat dalam tren lima tahun terakhir, kinerja kakao nasional menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten baik dari sisi luas areal maupun produksi. Luas areal kakao menurun dari 1.508.955 Ha pada tahun 2020 menjadi 1.359.567 Ha pada tahun 2025, atau berkurang sekitar 149.388 Ha. Penurunan ini sejalan dengan menyusutnya luas tanaman menghasilkan dari 996.761 Ha pada tahun 2020 menjadi 862.612 Ha pada tahun

2025. Pada periode yang sama, produksi kakao nasional juga menurun dari 720.661 ton pada tahun 2020 menjadi 616.103 ton pada tahun 2025, atau turun sekitar 104.558 ton. Sementara itu, produktivitas nasional relatif stagnan pada kisaran 710–723 kg per Ha, yang mengindikasikan bahwa penurunan produksi lebih banyak dipengaruhi oleh berkurangnya areal dan meningkatnya proporsi tanaman rusak.

Tabel 64. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	22.405	47.529	18.239	88.173	34.195	719
2.	Sumatera Utara	12.669	36.262	4.573	53.504	38.716	1.068
3.	Sumatera Barat	7.349	44.826	7.929	60.104	38.507	859
4.	Riau	680	1.825	814	3.319	824	452
5.	Kepulauan Riau	13	7	7	26	1	162
6.	Jambi	276	1.175	382	1.833	649	552
7.	Sumatera Selatan	992	6.058	1.196	8.246	4.383	723
8.	Kep. Bangka Belitung	69	423	7	498	307	726
9.	Bengkulu	253	3.700	307	4.260	2.358	637
10.	Lampung	7.005	59.779	9.506	76.290	44.285	741
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	1.142	1.861	1.885	4.888	649	349
13.	Banten	2.286	4.001	1.310	7.597	2.075	519
14.	Jawa Tengah	951	2.941	361	4.253	1.306	444
15.	D.I. Yogyakarta	834	3.390	674	4.898	2.028	598
16.	Jawa Timur	5.231	13.544	13.134	31.909	9.701	716
17.	Bali	997	10.535	1.834	13.365	4.800	456
18.	Nusa Tenggara Barat	1.764	4.470	1.107	7.341	2.430	544
19.	Nusa Tenggara Timur	19.609	34.629	5.394	59.632	22.275	643

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
20.	Kalimantan Barat	275	1.711	2.022	4.008	615	359
21.	Kalimantan Tengah	1.179	1.835	212	3.226	1.628	887
22.	Kalimantan Selatan	61	124	124	309	52	421
23.	Kalimantan Timur	2.863	2.448	2.347	7.658	1.607	657
24.	Kalimantan Utara	938	1.610	264	2.812	897	557
25.	Sulawesi Utara	4.658	8.430	3.524	16.613	5.559	660
26.	Gorontalo	2.954	2.777	7.051	12.782	1.446	521
27.	Sulawesi Tengah	31.720	179.083	57.205	268.008	125.492	701
28.	Sulawesi Selatan	28.311	112.605	38.182	179.098	79.746	708
29.	Sulawesi Barat	8.444	84.501	47.996	140.942	66.128	783
30.	Sulawesi Tenggara	24.087	146.910	34.120	205.117	98.020	667
31.	Maluku	5.674	15.125	3.190	23.989	8.589	568
32.	Maluku Utara	4.663	10.878	6.639	22.180	7.382	679
33.	Papua	3.468	12.105	14.074	29.647	7.644	631
34.	Papua Barat	771	1.742	2.881	5.394	221	127
35.	Papua Selatan	11	50	27	87	11	219
36.	Papua Tengah	347	1.662	1.173	3.181	822	495
37.	Papua Pegunungan	5	20	1	25	1	61
38.	Papua Barat Daya	76	2.044	2.236	4.356	758	371
	INDONESIA	205.028	862.612	291.927	1.359.567	616.103	714

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Dari sisi sebaran wilayah pada tahun 2025, produksi kakao nasional masih terkonsentrasi di kawasan Sulawesi sebagai sentra utama. Provinsi Sulawesi Tengah dengan produksi tertinggi sebesar 125.492 ton dengan luas tanaman menghasilkan 179.083 Ha dan produktivitas 701 kg per Ha. Selanjutnya Sulawesi Tenggara menghasilkan 98.020 ton, Sulawesi Selatan 79.746 ton, dan Sulawesi Barat 66.128 ton. Keempat

provinsi ini secara kumulatif menyumbang lebih dari separuh total produksi kakao nasional, menegaskan peran strategis Sulawesi sebagai lumbung kakao Indonesia. Di luar Sulawesi, kontribusi signifikan juga berasal dari Lampung (44.285 ton), Sumatera Utara (38.716 ton), Sumatera Barat (38.507 ton), serta Nusa Tenggara Timur (22.275 ton).

Dari aspek produktivitas, terdapat variasi kinerja antardaerah yang cukup lebar. Provinsi Sumatera Utara dengan produktivitas tertinggi sebesar 1.068 kg per Ha, diikuti Kalimantan Tengah sebesar 887 kg per Ha, Sumatera Barat 859 kg per Ha, dan Sulawesi Barat 783 kg per Ha. Sebaliknya, sejumlah provinsi menunjukkan produktivitas yang masih rendah, antara lain Jawa Barat (349 kg per Ha), Kalimantan Barat (359 kg per Ha), Papua Barat (127 kg per Ha), dan Papua Pegunungan (61 kg per Ha). Hal ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh faktor umur tanaman, tingkat serangan OPT, keterbatasan input produksi, serta praktik budidaya yang belum optimal di berbagai wilayah.

Tabel 65. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Kakao di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Wujud	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	<i>Unfermented Cocoa</i>	21.216
	<i>Fermented Cocoa</i>	25.958
2021	<i>Unfermented Cocoa</i>	22.875
	<i>Fermented Cocoa</i>	25.691
2022	<i>Unfermented Cocoa</i>	22.989
	<i>Fermented Cocoa</i>	25.342

Tahun	Wujud	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2023	<i>Unfermented Cocoa</i>	28.477
	<i>Fermented Cocoa</i>	36.693
2024	<i>Unfermented Cocoa</i>	72.330
	<i>Fermented Cocoa</i>	82.415
2025	<i>Unfermented Cocoa</i>	77.595
	<i>Fermented Cocoa</i>	100.829

Sumber: SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Selain faktor produksi dan areal, dinamika harga domestik kakao, baik dalam bentuk kakao nonfermentasi maupun kakao fermentasi, selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 berperan penting dalam memengaruhi kinerja komoditas kakao nasional. Pada periode 2020–2022, harga kakao relatif stabil, dengan harga kakao nonfermentasi berada pada kisaran Rp21.216–Rp22.989/kg dan kakao fermentasi pada kisaran Rp25.342–Rp25.958/kg. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan, dimana harga kakao nonfermentasi meningkat menjadi Rp28.477/kg dan kakao fermentasi mencapai Rp36.693/kg. Lonjakan harga terjadi pada tahun 2024, dengan harga kakao nonfermentasi melonjak menjadi Rp72.330/kg dan kakao fermentasi mencapai Rp82.415/kg, yang mencerminkan tekanan pasokan di pasar global dan domestik serta meningkatnya permintaan. Tren kenaikan harga tersebut berlanjut pada tahun 2025, dimana harga kakao nonfermentasi

meningkat menjadi Rp77.595/kg dan kakao fermentasi mencapai Rp100.829/kg.

Tabel 66. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Kakao

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	377.849	1.244.184	243.221	650.415
2021	382.712	1.206.775	304.359	804.299
2022	385.421	1.259.655	313.493	822.900
2023	339.989	1.197.695	340.451	979.638
2024	348.092	2.646.153	236.142	1.457.779
2025*)	316.661	3.365.429	242.010	2.037.938

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor–impor kakao periode 2020–2025 menunjukkan dinamika yang cukup kontras antara volume dan nilai perdagangan. Volume ekspor kakao relatif stabil pada kisaran 377–385 ribu ton selama 2020–2022, kemudian menurun pada 2023 dan sedikit meningkat pada 2024 sebelum kembali menurun pada 2025 (s.d. November) menjadi 316.661 ton. Sebaliknya, nilai ekspor menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan, terutama pada 2024–2025, dari sekitar USD 1,20–1,26 miliar pada 2020–2023 menjadi USD 2,65 miliar pada 2024 dan mencapai USD 3,37 miliar pada 2025, yang mencerminkan kenaikan tajam harga kakao dunia dan/atau peningkatan nilai tambah produk olahan. Di sisi lain, volume impor kakao cenderung meningkat hingga 2023, kemudian menurun pada 2024 dan relatif stabil

pada 2025, sementara nilai impor meningkat tajam pada 2024–2025 hingga mencapai USD 2,04 miliar pada 2025. Secara keseluruhan, perdagangan kakao menunjukkan intensitas yang semakin tinggi dengan nilai transaksi yang melonjak, meskipun selisih antara ekspor dan impor cenderung menyempit seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.

Kecenderungan penurunan produksi dalam lima tahun terakhir, meskipun diiringi oleh lonjakan harga domestik dan nilai ekspor, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis di tingkat hulu. Salah satu faktor utama adalah tingginya tekanan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Hama utama seperti penggerek buah kakao (*Cocoa Pod Borer/CPB*) serta penyakit busuk buah (*Phytophthora palmivora*) dan *Vascular Streak Dieback* (VSD) masih menjadi penghambat serius produksi di berbagai sentra. Pada kondisi serangan berat, OPT tersebut dapat menurunkan hasil panen hingga puluhan persen dan secara langsung menurunkan kualitas biji kakao. Perubahan iklim yang ditandai oleh curah hujan tidak teratur dan kelembapan tinggi turut mempercepat penyebaran hama dan penyakit, sehingga meningkatkan kerentanan tanaman sepanjang musim tanam.

Selain OPT, aspek perbenihan dan umur tanaman juga menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kinerja produksi kakao nasional. Sebagian besar tanaman kakao rakyat saat ini telah berumur tua dan melewati fase produktif optimal, sementara laju peremajaan masih relatif lambat.

Di sisi lain, kualitas benih yang digunakan petani masih bervariasi dan belum seluruhnya berasal dari klon unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit serta berpotensi hasil tinggi. Keterbatasan akses terhadap benih bersertifikat, kapasitas nursery, dan dukungan pembiayaan peremajaan menyebabkan produktivitas kebun sulit ditingkatkan secara cepat, meskipun insentif harga di tingkat petani meningkat tajam.

Faktor teknis lain yang turut mempengaruhi produksi kakao pada tahun 2025 adalah praktik budidaya dan pemeliharaan tanaman yang belum optimal. Pemangkasan yang tidak teratur, sanitasi kebun yang kurang baik, pemupukan yang belum berimbang, serta penerapan pengendalian hama terpadu yang masih terbatas menyebabkan potensi hasil belum termanfaatkan secara maksimal. Di samping itu, konversi lahan kakao ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan juga berkontribusi terhadap penurunan luas tanaman menghasilkan. Keterbatasan akses petani terhadap penyuluhan, teknologi produksi, serta penguatan kelembagaan turut memperlambat adopsi praktik budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Kakao

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja produksi kakao tahun 2025 termasuk dalam kategori berhasil, faktor-faktor pendukung diantaranya:

- 1) Produksi nasional masih ditopang oleh sentra utama di Sulawesi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat) yang menyumbang lebih dari 50% produksi nasional.
- 2) Luas tanaman menghasilkan (TM) yang masih dominan sebesar 862.612 ha memberikan basis produksi yang relatif stabil meskipun tren areal menurun.
- 3) Lonjakan harga kakao domestik 2024 (hingga lebih dari Rp70.000/kg untuk nonfermentasi) memberikan insentif ekonomi yang kuat bagi petani untuk mempertahankan kebun kakao, meningkatkan intensitas panen, dan melakukan perawatan kebun secara lebih intensif.
- 4) Adanya provinsi dengan produktivitas tinggi (misalnya Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat) turut mengangkat agregat produktivitas nasional.
- 5) Intervensi pemerintah dalam bentuk pembinaan teknis, fasilitasi sarana produksi, dan penguatan pengendalian OPT di beberapa sentra membantu menahan laju penurunan produksi.
- 6) Permintaan pasar yang tetap kuat, tercermin dari stabilnya volume ekspor dan melonjaknya nilai ekspor pada 2024, menopang semangat produksi di tingkat petani.
- 7) Produktivitas nasional relatif stabil di kisaran 710–723 kg/ha, sehingga penurunan produksi lebih banyak

disebabkan oleh penurunan areal, bukan penurunan hasil per hektar.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Produksi Kakao

Permasalahan utama dalam pencapaian indikator produksi kakao tahun 2025, diantaranya:

- 1) Penurunan luas areal kakao nasional dalam lima tahun terakhir, termasuk menyusutnya luas tanaman menghasilkan.
- 2) Tingginya luas tanaman rusak (291.927 ha pada 2025) yang langsung menekan kapasitas produksi nasional.
- 3) Umur tanaman yang sudah tua dan melewati fase produktif optimal, dengan laju peremajaan yang masih lambat.
- 4) Keterbatasan akses benih unggul bersertifikat dan kapasitas nursery, sehingga kualitas bibit yang digunakan petani masih bervariasi.
- 5) Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang masih tinggi, terutama Penggerek buah kakao (CPB), Busuk buah (*Phytophthora palmivora*), *Vascular Streak Dieback* (VSD).
- 6) Dampak perubahan iklim, seperti curah hujan tidak teratur dan kelembapan tinggi, yang memperparah serangan OPT dan ketidakstabilan produksi.
- 7) Praktik budidaya yang belum optimal, meliputi pemangkasan tidak teratur, sanitasi kebun kurang

baik, pemupukan belum berimbang, pengendalian hama terpadu belum luas diterapkan.

- 8) Disparitas produktivitas antardaerah yang lebar, mencerminkan rendahnya adopsi teknologi di sebagian wilayah.
- 9) Konversi lahan kakao ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan.
- 10) Keterbatasan penyuluhan dan kelembagaan petani, yang memperlambat adopsi praktik budidaya modern.
- 11) Meningkatnya ketergantungan industri hilir pada impor bahan baku saat produksi domestik menurun

Upaya Perbaikan untuk Mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Produksi Kakao

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kinerja produksi kakao ke depan, diperlukan upaya-upaya diantaranya:

- 1) Percepatan peremajaan tanaman kakao tua dan rusak, melalui penyediaan benih unggul bersertifikat yang tahan OPT, penguatan kapasitas nursery, skema pembiayaan dan insentif peremajaan bagi petani.
- 2) Penguatan pengendalian OPT secara terpadu (PHT), meliputi distribusi agens hayati, penggunaan varietas toleran, peningkatan kapasitas petani dalam PHT, pengembangan sistem peringatan dini serangan OPT.
- 3) Peningkatan adopsi *Good Agricultural Practices* (GAP), termasuk pemangkasan rutin, sanitasi kebun, pemupukan berimbang berbasis rekomendasi spesifik

lokasi, pengelolaan naungan dan air yang adaptif terhadap iklim.

- 4) Penguatan peran penyuluh dan pendampingan intensif di sentra-sentra produksi utama.
- 5) Pengembangan dan pemerataan akses benih unggul, melalui penguatan penangkar lokal dan sertifikasi benih.
- 6) Penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan posisi tawar, mempermudah akses pembiayaan dan sarana produksi, mendorong reinvestasi ke kebun.
- 7) Pengembangan pascapanen dan fermentasi untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah kakao petani.
- 8) Perlindungan lahan kakao dari konversi melalui kebijakan tata ruang dan insentif ekonomi berbasis kinerja produksi.
- 9) Integrasi pengembangan kakao dengan hilirisasi dan industri pengolahan dalam negeri untuk menciptakan kepastian pasar dan keberlanjutan produksi.

I. Produksi Teh

Komoditas teh merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis Indonesia yang memiliki nilai historis, ekonomi, dan sosial yang tinggi. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen teh dunia dengan keunggulan agroklimat tropis pegunungan yang sangat sesuai untuk pertumbuhan tanaman teh, ketersediaan tenaga kerja, serta keberagaman jenis teh yang dihasilkan, mulai dari teh hitam, teh hijau, hingga teh

spesialti. Selain berperan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi domestik, teh juga menjadi komoditas ekspor penting yang berkontribusi terhadap perolehan devisa negara dan penghidupan ratusan ribu rumah tangga petani, terutama di sentra-sentra produksi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Dengan potensi lahan yang luas, peluang pengembangan produk bernilai tambah, serta meningkatnya tren konsumsi minuman sehat, komoditas teh memiliki prospek strategis untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan daya saing produk perkebunan nasional.

Tabel 67. Capaian Produksi Teh

IK 1-12		Produksi Teh		
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
116.555 ton	116.418 ton*)	99,88	116.648 ton	99,80

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Indikator kinerja produksi teh (dalam wujud produksi daun kering) dengan target sebesar 116.555 ton terealisasi mencapai 116.418 ton, atau 99,88% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja komoditas teh yang berada pada kategori berhasil. Secara nasional, produksi teh tahun

2025 didukung oleh luas areal 105.273 Ha, yang terdiri atas 78.640 Ha tanaman menghasilkan (TM), 2.495 Ha tanaman belum menghasilkan (TBM), dan 24.138 Ha tanaman rusak (TR). Dengan total produksi 116.418 ton dan produktivitas rata-rata 1.480 kg/ha. Namun demikian, proporsi tanaman rusak yang relatif besar (sekitar 22,9% dari total areal) berpotensi menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan produksi apabila tidak segera diikuti dengan rehabilitasi kebun. Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 116.418 ton atau 99,80% dari target yang direncanakan yaitu 116.648 ton. Hal ini menunjukkan target akhir renstra belum terpenuhi, namun sudah termasuk dalam kategori berhasil.

Tabel 68. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Teh

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	3.883	84.776	23.650	112.308	144.063	1.699
2021	2.762	81.674	17.642	102.078	137.837	1.688
2022	3.705	76.477	21.078	101.259	124.659	1.630
2023	2.826	75.429	19.306	97.561	116.506	1.545
2024	2.740	75.447	19.363	97.551	116.030	1.538
2025*)	2.495	78.640	24.138	105.273	116.418	1.480

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Ditinjau dari tren lima tahun terakhir, produksi teh nasional menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, produksi masih mencapai 144.063 ton, kemudian menurun bertahap menjadi 137.837 ton (2021), 124.659 ton (2022), 116.506 ton (2023), 116.030 ton (2024), dan relatif stagnan pada tahun 2025 di level

116.418 ton. Penurunan ini sejalan dengan penyusutan luas tanaman menghasilkan dari 84.776 Ha pada 2020 menjadi 78.640 Ha pada 2025, serta meningkatnya luas tanaman rusak dari 23.650 Ha menjadi 24.138 Ha pada periode yang sama. Di sisi lain, produktivitas nasional juga mengalami penurunan dari 1.699 kg/ha (2020) menjadi 1.480 kg/ha (2025).

Tabel 69. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Teh Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	-	-	-	-	-	-
2.	Sumatera Utara	-	3.512	1.293	4.806	10.126	2.883
3.	Sumatera Barat	8	2.120	-	2.129	4.550	2.146
4.	Riau	-	-	-	-	-	-
5.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
6.	Jambi	-	1.869	-	1.869	5.735	3.069
7.	Sumatera Selatan	-	1.518	-	1.518	2.465	1.624
8.	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
9.	Bengkulu	25	869	17	911	2.052	2.360
10.	Lampung	-	-	-	-	-	-
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	2.261	57.508	16.539	76.308	78.525	1.365
13.	Banten	2	35	3	40	10	272
14.	Jawa Tengah	227	7.437	436	8.100	12.702	1.708
15.	D.I. Yogyakarta	32	98	6	136	233	2.367
16.	Jawa Timur	19	1.421	5	1.445	2.137	1.504
17.	Bali	-	-	-	-	-	-
18.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
21.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24.	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26.	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
27.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
28.	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
29.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
31.	Maluku	-	-	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
35.	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36.	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37.	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38.	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
	INDONESIA	2.574	76.389	18.300	97.262	118.535	1.552

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Produksi teh nasional tahun 2025 masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa dan sebagian wilayah Sumatera. Provinsi Jawa Barat menjadi kontributor terbesar dengan produksi 78.525 ton dari luas tanaman menghasilkan 57.508 Ha, atau sekitar dua pertiga total produksi nasional. Meskipun demikian, produktivitas Jawa Barat sebesar 1.365 kg/ha, masih berada di bawah rata-rata nasional, yang menunjukkan perlunya peningkatan intensifikasi budidaya, perbaikan manajemen kebun, dan percepatan rehabilitasi tanaman

tua. Kontributor besar lainnya adalah Jawa Tengah dengan produksi 12.702 ton dari luas TM 7.437 Ha, serta Sumatera Utara dengan produksi 10.126 ton dari luas TM 3.512 Ha dan produktivitas relatif tinggi mencapai 2.883 kg/ha.

Tabel 70. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Teh di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	17.135
2021	15.098
2022	53.430
2023	16.644
2024	18.096
2025	17.109

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Dinamika harga rata-rata teh di pasar domestik, yang diperdagangkan dalam bentuk teh hijau kering, selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam. Pada tahun 2020, harga rata-rata teh nasional tercatat sebesar Rp17.135/kg, kemudian menurun menjadi Rp15.098/kg pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan harga yang sangat signifikan hingga mencapai Rp53.430/kg, sebelum kembali menurun tajam pada tahun 2023 menjadi Rp16.644/kg, dan selanjutnya meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp18.096/kg. Pada tahun 2025, harga rata-rata teh kembali berada pada kisaran normal, yaitu sebesar Rp17.109/kg. Pola fluktuasi harga yang ekstrem tersebut mengindikasikan adanya

ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, serta dipengaruhi oleh dinamika pasar global, perubahan pola konsumsi, dan gangguan rantai pasok. Kondisi harga yang tidak stabil tersebut berimplikasi terhadap menurunnya kepastian usaha di tingkat petani, sehingga berpotensi menekan margin usaha, khususnya pada wilayah dengan produktivitas rendah dan biaya produksi yang relatif tinggi, serta mengurangi minat investasi untuk rehabilitasi kebun dan peningkatan praktik budidaya teh nasional.

Tabel 71. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Teh

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	45.265	96.324	14.909	25.857
2021	42.654	89.158	10.609	23.019
2022	44.919	89.902	10.883	29.761
2023	30.325	65.002	8.624	24.198
2024	34.024	52.857	13.043	31.164
2025*)	27.537	44.131	9.286	36.984

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor–import teh periode 2020–2025 menunjukkan tren penurunan kinerja ekspor yang cukup konsisten. Volume ekspor teh menurun dari 45.265 ton pada 2020 menjadi 30.325 ton pada 2023, sempat meningkat pada 2024, namun kembali turun pada 2025 (s.d. November) menjadi 27.537 ton. Nilai ekspor juga mengalami penurunan bertahap dari USD 96,32 juta pada 2020 menjadi USD

44,13 juta pada 2025, yang mencerminkan tekanan pada harga dan daya saing teh di pasar global. Di sisi lain, volume impor teh relatif berfluktuasi namun cenderung lebih stabil, sementara nilai impor justru menunjukkan tren meningkat pada beberapa tahun terakhir dan mencapai USD 36,98 juta pada 2025. Secara keseluruhan, perdagangan teh menunjukkan melemahnya kinerja ekspor dengan kecenderungan meningkatnya ketergantungan terhadap impor, yang menjadi tantangan bagi penguatan industri teh nasional.

Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) juga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi produktivitas teh nasional tahun 2025. Beberapa hama dan penyakit utama yang banyak dilaporkan di sentra produksi meliputi penggerek daun (*Ectropis* spp.), ulat daun (*Euproctis* spp.), serta penyakit busuk akar (*Armillaria mellea* dan *Phellinus noxius*). Serangan OPT ini berdampak langsung pada penurunan jumlah dan kualitas daun petik, serta meningkatkan angka kematian tanaman, terutama pada kebun-kebun tua. Di beberapa lokasi, gangguan OPT diperkirakan menyebabkan penurunan produktivitas sekitar 5–15%, sekaligus meningkatkan biaya produksi akibat kebutuhan pengendalian hama dan penyakit.

Dari sisi perbenihan dan peremajaan, ketersediaan benih unggul pada tahun 2025 masih relatif terbatas, baik dari sisi jumlah maupun sebaran wilayah sumber benih. Sebagian besar fasilitas pembenihan masih

terkonsentrasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sehingga distribusi ke daerah sentra lain menjadi kurang optimal. Di sisi lain, sebagian besar kebun teh nasional telah berumur di atas 30–40 tahun, yang secara alami mengalami penurunan produktivitas. Rehabilitasi kebun masih belum sebanding dengan laju pertumbuhan tanaman rusak akibat keterbatasan pendanaan, tenaga teknis, dan insentif bagi petani.

Faktor agroklimat dan perubahan iklim juga turut memengaruhi capaian produksi teh tahun 2025. Variasi curah hujan yang tidak menentu di beberapa sentra produksi menyebabkan gangguan pada siklus pertumbuhan tunas dan kualitas daun petik. Musim hujan yang lebih panjang meningkatkan risiko serangan penyakit jamur, sementara periode kering yang ekstrem di beberapa wilayah memicu stres air pada tanaman. Kondisi ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan vegetatif dan menurunnya frekuensi serta volume pemetikan.

Dari aspek teknologi budidaya, adopsi inovasi seperti pemangkasan modern, pemupukan berbasis analisis tanah dan daun, serta penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sudah mulai diperkenalkan di beberapa kebun. Namun demikian, tingkat adopsinya masih belum merata dan cenderung terkonsentrasi pada kebun besar dan sebagian kecil kebun rakyat, sehingga dampaknya terhadap peningkatan produktivitas nasional masih terbatas.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Teh

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja produksi teh tahun 2025 termasuk dalam kategori berhasil. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

- 1) Stabilitas luas tanaman menghasilkan (TM) sekitar 78.640 ha membantu menjaga basis produksi tetap memadai.
- 2) Kontribusi dominan sentra produksi utama (Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara) yang menyumbang lebih dari 85% produksi nasional.
- 3) Produktivitas tinggi di luar Jawa (Jambi, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat) menjadi penyangga penurunan produktivitas di wilayah Jawa.
- 4) Praktik budidaya relatif lebih baik di kebun besar (BUMN dan swasta) melalui pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian OPT yang lebih teratur.
- 5) Permintaan domestik yang masih stabil mendorong petani tetap melakukan pemetikan rutin.
- 6) Harga domestik pasca 2023 yang mulai membaik memberikan insentif minimal bagi keberlanjutan usaha tani.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Produksi Teh

Dalam proses pencapaian indikator produksi teh tahun 2025, terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi kinerja, antara lain:

- 1) Meningkatnya luas tanaman rusak (TR) menjadi 24.138 ha pada tahun 2025.
- 2) Penurunan produktivitas nasional dari 1.699 kg/ha (2020) menjadi sekitar 1.480 kg/ha (2025).
- 3) Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (ulat daun, penggerek daun, busuk akar) yang menurunkan hasil dan mutu daun petik.
- 4) Keterbatasan perbenihan teh unggul dan lambatnya laju peremajaan tanaman tua dan rusak.
- 5) Variabilitas iklim dan cuaca ekstrem (curah hujan tidak menentu, periode kering panjang) yang mengganggu siklus pertumbuhan tunas.
- 6) Fluktuasi harga domestik menurunkan kepastian usaha dan minat investasi petani.
- 7) Adopsi teknologi budidaya belum merata, terutama di kebun rakyat.
- 8) Melemahnya kinerja ekspor dan meningkatnya impor yang menekan daya saing dan harga di tingkat petani.
- 9) Keterbatasan akses pembiayaan untuk rehabilitasi dan intensifikasi kebun teh rakyat.
- 10) Kelembagaan petani yang masih lemah dalam tata niaga dan posisi tawar terhadap industri pengolahan.

Upaya Perbaikan untuk Mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Produksi Teh

- 1) Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dan meningkatkan keberlanjutan capaian indikator produksi teh ke depan, diperlukan langkah-langkah perbaikan, antara lain:
- 2) Percepatan rehabilitasi tanaman tua dan rusak secara bertahap dengan memetakan kebun prioritas untuk diberikan bantuan benih dan sarana produksi.
- 3) Penguatan sistem perbenihan nasional dengan menambah unit pembenihan teh unggul di luar Jawa, diseminasi varietas adaptif iklim dan tahan OPT, dan kemitraan antara balai penelitian, BUMN, swasta, dan petani.
- 4) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi: pemupukan berbasis analisis tanah dan daun, penerapan pemangkasan modern dan manajemen kanopi, serta penguatan penyuluhan dan pendampingan teknis.
- 5) Pengendalian OPT berbasis PHT melalui sistem peringatan dini serangan OPT, Pemanfaatan agen hayati dan pengendalian ramah lingkungan, pelatihan petani identifikasi dini OPT.
- 6) Adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan melalui penerapan kalender tanam dan panen yang adaptif iklim, konservasi tanah dan air (terasering, mulsa, dan penutup tanah), serta penggunaan varietas teh yang toleran terhadap kekeringan dan penyakit.

- 7) Stabilisasi harga dan penguatan tata niaga dengan penguatan koperasi/korporasi petani teh. Kemitraan kontrak jangka menengah dengan industri, skema penyangga harga saat harga jatuh.
- 8) Peningkatan mutu dan daya saing produk melalui sertifikasi mutu dan keberlanjutan, diversifikasi produk (teh premium, herbal, RTD), dan penguatan branding teh Indonesia.
- 9) Penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan integrasi program rehabilitasi, perbenihan, OPT, dan pemasaran.
- 10) Perbaikan basis data kebun, produksi, dan perdagangan.

m. Produksi Jambu Mete

Jambu mete merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi wilayah lahan kering, khususnya di kawasan Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara dan Sulawesi. Komoditas ini dikenal memiliki daya adaptasi tinggi terhadap kondisi agroklimat kering, kebutuhan input budidaya yang relatif rendah, serta berfungsi sebagai tanaman konservasi yang mampu menekan erosi dan degradasi lahan. Dari sisi ekonomi, jambu mete memiliki nilai tambah dan potensi ekspor yang besar, baik dalam bentuk gelondong kering maupun produk olahan kacang mete, dengan permintaan pasar global yang cenderung meningkat. Selain itu, jambu mete

berperan penting sebagai sumber pendapatan utama dan penopang ketahanan ekonomi rumah tangga petani di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Dengan basis areal yang luas, ketersediaan lahan pengembangan, serta peluang hilirisasi yang masih terbuka lebar, jambu mete memiliki prospek yang kuat untuk terus dikembangkan sebagai salah satu komoditas perkebunan strategis nasional.

Tabel 72. Capaian Produksi Jambu Mete

IK 1-13		Produksi Jambu Mete		
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
136.642 ton	135.764 ton*)	99,36	138.013 ton	98,37

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Pada tahun 2025, target indikator kinerja produksi jambu mete (wujud produksi gelondong kering) sebesar 136.642 ton dengan realisasi mencapai 135.764 ton atau 99,36% dari target, sehingga termasuk dalam kategori berhasil. Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 135.764 ton atau 98,37% dari target yang direncanakan yaitu 138.013 ton. Luas areal jambu mete Indonesia pada tahun 2025 sebesar 421.644 Ha, yang terdiri atas 81.549 Ha tanaman belum menghasilkan, 267.445 Ha tanaman menghasilkan, dan

72.650 Ha tanaman rusak. Dari luas areal tersebut, total produksi nasional mencapai sekitar 135.764 ton dengan produktivitas rata-rata 508 kg per Ha.

Tabel 73. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Jambu Mete

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	102.617	301.867	75.243	479.726	165.868	549
2021	95.026	294.012	75.493	464.531	166.339	566
2022	92.696	284.632	75.052	452.380	146.417	514
2023	89.022	277.360	74.543	440.925	140.632	507
2024	79.974	268.829	72.163	420.966	136.505	508
2025*)	81.549	267.445	72.650	421.644	135.764	508

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Ditinjau dari tren lima tahun terakhir, keragaan jambu mete nasional menunjukkan kecenderungan penurunan luas areal dan produksi, meskipun produktivitas relatif stabil. Luas areal jambu mete menurun dari 479.726 Ha pada 2020 menjadi 421.644 Ha pada 2025, sementara luas tanaman menghasilkan turun dari 301.867 Ha menjadi 267.445 Ha. Sejalan dengan itu, produksi nasional juga mengalami penurunan dari 165.868 ton (2020) menjadi 135.764 ton (2025). Produktivitas rata-rata nasional relatif stagnan di kisaran 507–566 kg per Ha, dengan produktivitas 508 kg per Ha pada tahun 2025. Tren ini menunjukkan bahwa penurunan produksi dipengaruhi oleh penyusutan luas areal dan berkurangnya populasi tanaman produktif.

Tabel 74. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Jambu Mete Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	-	-	-	-	-	-
2.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4.	Riau	-	-	-	-	-	-
5.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
6.	Jambi	-	-	-	-	-	-
7.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
8.	Kep. Bangka Belitung	52	14	8	74	0	7
9.	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
10.	Lampung	5	36	19	60	18	503
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	2	8	6	16	3	368
13.	Banten	-	-	-	-	-	-
14.	Jawa Tengah	2.909	16.392	5.165	24.466	11.835	722
15.	D.I. Yogyakarta	110	1.950	3.795	5.855	498	255
16.	Jawa Timur	2.850	17.084	4.887	24.820	12.655	741
17.	Bali	542	6.822	720	8.084	2.233	327
18.	Nusa Tenggara Barat	5.923	25.150	4.707	35.781	8.822	351
19.	Nusa Tenggara Timur	53.871	86.537	15.927	156.336	52.834	611
20.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Tengah	6	10	35	50	4	437
22.	Kalimantan Selatan	-	22	-	22	9	398
23.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24.	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25.	Sulawesi Utara	300	-	-	300	-	-
26.	Gorontalo	180	1.320	1.022	2.523	197	149
27.	Sulawesi Tengah	2.061	7.407	3.179	12.647	1.905	257
28.	Sulawesi Selatan	1.509	21.370	11.262	34.140	7.551	353
29.	Sulawesi Barat	8	317	319	644	76	238

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
30.	Sulawesi Tenggara	8.522	77.691	17.863	104.076	33.996	438
31.	Maluku	605	1.874	500	2.980	1.106	590
32.	Maluku Utara	2.095	1.736	2.978	6.809	1.104	636
33.	Papua	-	60	80	140	11	183
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
35.	Papua Selatan	-	1.635	141	1.776	900	550
36.	Papua Tengah	-	10	37	47	8	795
37.	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38.	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
	INDONESIA	81.549	267.445	72.650	421.644	135.764	508

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan keragaan produksi di tingkat provinsi, sentra produksi utama masih terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur dan sebagian Sulawesi, dengan kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menghasilkan 52.834 ton dari luas tanaman menghasilkan 86.537 Ha dan produktivitas 611 kg per Ha. Kontributor utama lainnya adalah Sulawesi Tenggara (33.996 ton), Jawa Timur (12.655 ton), Jawa Tengah (11.835 ton), Nusa Tenggara Barat (8.822 ton), dan Sulawesi Selatan (7.551 ton). Dari sisi produktivitas, terdapat variasi yang cukup besar antarwilayah. Papua Tengah dengan produktivitas tertinggi sebesar 795 kg per Ha, meskipun dengan luasan dan volume produksi yang relatif kecil. Jawa Timur dan Jawa Tengah juga menunjukkan produktivitas yang relatif tinggi, masing-masing 741 kg per Ha dan 722 kg per Ha. Sebaliknya, beberapa wilayah dengan produktivitas rendah, seperti

Gorontalo (149 kg per Ha), Papua (183 kg per Ha), dan Sulawesi Barat (238 kg per Ha), masih perlu intervensi peningkatan kualitas tanaman, peremajaan kebun, serta penguatan pendampingan teknis kepada petani.

Tabel 75. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Jambu Mete di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	16.995
2021	14.790
2022	14.092
2023	14.228
2024	14.411
2025	15.483

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Dinamika harga rata-rata jambu mete di pasar domestik, yang diperdagangkan dalam bentuk gelondong jambu mete kering, pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun dibandingkan kondisi awal periode. Harga rata-rata jambu mete nasional tercatat sebesar Rp16.995/kg pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi Rp14.790/kg pada tahun 2021 dan kembali melemah pada tahun 2022 sebesar Rp14.092/kg. Pada periode tahun 2023–2024, harga mulai menunjukkan pemulihan menjadi Rp14.228/kg dan

Rp14.411/kg, meskipun belum kembali mencapai level tahun 2020, dan pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi Rp15.483/kg. Perkembangan tersebut menunjukkan masih adanya tekanan pasar, baik dari sisi permintaan global, mutu produk, maupun struktur tata niaga domestik, yang berdampak pada terbatasnya insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan petani jambu mete, sehingga penguatan mutu pascapanen, efisiensi tata niaga, dan peningkatan daya saing menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pengembangan komoditas jambu mete nasional.

Tabel 76. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Jambu Mete

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	85.584	149.748	10.441	21.325
2021	61.672	114.910	11.447	25.630
2022	34.177	275.031	16.800	37.608
2023	38.287	62.260	11.552	29.087
2024	83.103	151.157	13.947	34.096
2025*)	70.127	129.274	9.682	28.421

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor–impor jambu mete periode 2020–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, terutama pada nilai ekspor. Volume ekspor jambu mete menurun dari 85.584 ton pada 2020 menjadi 34.177 ton pada 2022, kemudian berangsur meningkat kembali pada 2023–2024 hingga mencapai 83.103 ton, sebelum menurun pada

2025 (s.d. November) menjadi 70.127 ton. Nilai ekspor berfluktuasi sangat signifikan, dengan lonjakan tajam pada 2022 hingga mencapai USD 275,03 juta meskipun volume ekspor rendah, yang mengindikasikan kenaikan harga internasional, kemudian turun drastis pada 2023 sebelum kembali meningkat pada 2024 dan sedikit menurun pada 2025. Di sisi lain, volume dan nilai impor jambu mete relatif lebih kecil dibandingkan ekspor dan cenderung meningkat hingga 2022, kemudian berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, neraca perdagangan jambu mete tetap menunjukkan surplus, namun kinerja ekspor sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga global dan dinamika pasokan.

Dari aspek teknis budidaya, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) masih menjadi faktor pembatas utama produksi. Beberapa hama dan penyakit yang dilaporkan memberikan tekanan terhadap tanaman jambu mete antara lain kumbang pangkal batang mete (*Bolbocerosoma* spp.), penggerek buah (*Conogethes punctiferalis*), serta penyakit busuk akar dan batang yang disebabkan oleh *Fusarium* spp. dan *Phytophthora* spp.. Serangan OPT ini berkontribusi terhadap meningkatnya kehilangan hasil dan kematian tanaman produktif, serta menjadi salah satu penyebab masih luasnya areal tanaman rusak. Keterbatasan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), rendahnya akses terhadap sarana pengendalian yang ramah lingkungan, dan kurangnya

pemantauan intensif di tingkat kebun turut memperberat dampak OPT terhadap produksi.

Dari sisi perbenihan, tantangan utama masih terletak pada keterbatasan ketersediaan benih unggul bersertifikat dan belum optimalnya kapasitas produksi benih di tingkat nasional dan daerah. Banyak petani masih menggunakan benih asal semaian lokal dari kebun tua yang heterogen secara genetis, sehingga berdampak pada rendahnya keseragaman tanaman, ketahanan terhadap OPT, dan potensi hasil. Upaya penyediaan benih unggul telah dilakukan melalui balai perbenihan dan kolaborasi dengan sektor swasta, namun belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan rehabilitasi tanaman di seluruh sentra produksi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menjelaskan stagnasi produktivitas nasional dan penurunan luas tanaman menghasilkan dalam beberapa tahun terakhir.

Faktor lain yang turut memengaruhi produksi jambu mete adalah usia tanaman yang relatif tua di banyak sentra produksi utama, khususnya di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara, sehingga produktivitas cenderung menurun apabila tidak diikuti dengan peremajaan. Selain itu, variasi teknik budidaya antarwilayah, keterbatasan pemupukan, rendahnya intensitas pemangkasan, serta ketergantungan pada curah hujan di wilayah lahan kering turut memengaruhi stabilitas hasil. Di wilayah dengan praktik budidaya yang lebih baik, seperti Jawa dan

sebagian Papua, produktivitas relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.

Dari aspek non-teknis, keterbatasan infrastruktur transportasi dari sentra produksi ke fasilitas pengolahan dan pasar, khususnya di wilayah kepulauan dan pedalaman, berdampak pada efisiensi distribusi dan mutu gelondong kering. Selain itu, masih terbatasnya fasilitas pascapanen (pengeringan, sortasi, dan penyimpanan) menyebabkan penurunan kualitas produk, yang pada akhirnya memengaruhi harga jual dan daya saing ekspor.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai intervensi kebijakan untuk memperkuat subsektor jambu mete, antara lain melalui program intensifikasi dan rehabilitasi kebun, bantuan bibit unggul, pupuk dan sarana produksi, serta bimbingan teknis terpadu kepada petani. Selain itu, pelatihan PHT, fasilitasi akses pasar ekspor, dan pengembangan industri hilir juga terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Jambu mete

Berdasarkan analisis, capaian indikator kinerja produksi jambu mete tahun 2025 termasuk dalam kategori berhasil, didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Kontribusi sentra produksi utama yang stabil, khususnya Nusa Tenggara Timur (52.834 ton) dan Sulawesi Tenggara (33.996 ton), yang secara agregat menyumbang lebih dari separuh produksi nasional.

- 2) Produktivitas relatif konsisten pada 508 kg/ha secara nasional, dengan beberapa provinsi menunjukkan kinerja di atas rata-rata nasional seperti Papua Tengah (795 kg/ha), Jawa Timur (741 kg/ha), dan Jawa Tengah (722 kg/ha).
- 3) Kondisi agroklimat yang relatif kondusif di sebagian besar wilayah sentra produksi selama musim pembungaan dan pembuahan, sehingga mendukung pembentukan buah dan menekan risiko gagal panen.
- 4) Implementasi program peremajaan kebun yang mulai menunjukkan dampak, khususnya melalui bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, dan perbaikan praktik budidaya di beberapa daerah.
- 5) Dukungan kebijakan dan kelembagaan melalui pelatihan petani, bimbingan teknis Pengendalian Hama Terpadu (PHT), serta fasilitasi akses pasar yang memperkuat motivasi petani untuk tetap memelihara kebun secara optimal.
- 6) Permintaan pasar dan kinerja ekspor yang kembali menguat pada 2024, yang ikut menjaga insentif harga di tingkat petani dan mendorong peningkatan intensitas panen pada 2025.
- 7) Pemanfaatan tanaman menghasilkan yang masih luas (267.445 ha) meskipun tren jangka panjang menurun, sehingga produksi nasional tetap cukup kuat untuk menopang capaian target.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Produksi Jambu mete

Meskipun capaian produksi tergolong baik, masih terdapat sejumlah permasalahan, diantaranya:

- 1) Tingginya luas tanaman rusak yang masih mencapai 72.650 ha, sehingga mengurangi potensi produksi nasional dan meningkatkan biaya pemeliharaan kebun.
- 2) Penurunan luas areal dan tanaman menghasilkan dalam lima tahun terakhir, yang berdampak pada tren penurunan produksi jangka menengah meskipun produktivitas relatif stagnan.
- 3) Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) seperti kumbang pangkal batang, penggerek buah, dan penyakit busuk akar/batang yang menurunkan produktivitas serta kualitas hasil.
- 4) Keterbatasan ketersediaan benih unggul bersertifikat, sehingga banyak petani masih menggunakan benih lokal yang heterogen dan kurang tahan terhadap OPT.
- 5) Dominasi tanaman tua di banyak sentra produksi utama, khususnya di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara, yang secara alamiah mengalami penurunan produktivitas.
- 6) Rendahnya penerapan teknik budidaya intensif (pemupukan berimbang, pemangkasan, pengelolaan air, dan sanitasi kebun) di sebagian wilayah.
- 7) Keterbatasan infrastruktur pascapanen dan transportasi, terutama di wilayah kepulauan dan

pedalaman, yang berdampak pada mutu gelondong kering dan efisiensi distribusi.

- 8) Fluktuasi harga domestik dan dinamika ekspor–impor, yang menurunkan kepastian pendapatan petani dan memengaruhi minat untuk melakukan peremajaan kebun.
- 9) Keterbatasan modal dan akses pembiayaan petani untuk melakukan rehabilitasi kebun dan adopsi teknologi budidaya yang lebih baik.

Upaya Perbaikan untuk Mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Produksi Jambu mete

Untuk meningkatkan kinerja produksi jambu mete nasional, diperlukan serangkaian upaya perbaikan, diantaranya:

- 1) Percepatan program peremajaan tanaman tua dan rusak, dengan prioritas pada sentra produksi utama dan wilayah berproduktivitas rendah.
- 2) Penguatan sistem perbenihan nasional, melalui peningkatan kapasitas produksi benih unggul bersertifikat, pengembangan kebun sumber benih, dan kemitraan dengan sektor swasta.
- 3) Perluasan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), termasuk pelatihan intensif petani, penguatan sistem peringatan dini OPT, dan penyediaan sarana pengendalian yang ramah lingkungan.
- 4) Peningkatan intensifikasi budidaya, mencakup pemupukan berimbang, pemangkasan rutin,

pengelolaan air dan tanah, serta penggunaan varietas unggul adaptif iklim.

- 5) Penguatan pendampingan teknis dan penyuluhan, khususnya di wilayah dengan produktivitas rendah dan proporsi tanaman rusak tinggi.
- 6) Pengembangan dan perbaikan infrastruktur pascapanen, seperti fasilitas pengeringan, sortasi, dan penyimpanan, untuk meningkatkan mutu produk dan nilai jual.
- 7) Stabilisasi harga dan penguatan tata niaga, melalui fasilitasi kemitraan dengan industri pengolahan, pengembangan koperasi petani, dan perluasan akses pasar ekspor.
- 8) Peningkatan akses pembiayaan dan insentif usaha tani, termasuk skema kredit lunak, subsidi sarana produksi, dan dukungan investasi rehabilitasi kebun.
- 9) Integrasi kebijakan hulu–hilir, dengan mendorong pengembangan industri hilir mete di dalam negeri guna menyerap produksi domestik dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku.
- 10) Penguatan sistem data dan monitoring produksi, untuk mendukung perencanaan berbasis bukti serta respons kebijakan yang lebih cepat terhadap dinamika produksi dan pasar.

n. Produksi Tanaman Palma Lainnya

Selain komoditas kelapa sawit dan kelapa yang menjadi komoditas utama subsektor perkebunan, terdapat

indikator komoditas palma yang juga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Komoditas palma ini umumnya dikelola dalam skala usaha kecil oleh perkebunan rakyat, dengan karakteristik produksi yang tersebar, berbasis budaya lokal, dan belum seluruhnya terintegrasi dalam rantai industri modern. Dalam konteks tersebut, produksi tanaman palma lainnya menjadi salah satu indikator yang menggambarkan dinamika komoditas palma non-utama, baik dari sisi kontribusi produksi nasional, sebaran sentra, hingga potensi pengembangannya ke depan. Adapun capaian produksi tanaman palma lainnya sampai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 77. Capaian Produksi Tanaman Palma Lainnya

IK 1-14		Produksi Tanaman Palma Lainnya		
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
188.236 Ton	190.646 Ton*)	101,28	195.953 Ton	97,29

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Capaian produksi tanaman palma lainnya, berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 adalah sebesar 190.646 ton atau mencapai 101,28% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa

kinerja produksi palma lainnya berada pada kategori sangat berhasil, meskipun pengembangan komoditasnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan skala usaha, minimnya program peremajaan, serta belum optimalnya sistem pascapanen. Indikator Produksi Tanaman Palma Lainnya diukur menggunakan produksi komoditas aren dan pinang karena kedua komoditas tersebut merupakan komoditas palma non utama yang secara historis berkembang luas di masyarakat dan memiliki basis produksi yang relatif konsisten setiap tahun. Pada tahun 2025, aren dan pinang tidak memperoleh intervensi APBN, sehingga pengembangannya lebih banyak dilakukan melalui swadaya masyarakat serta dukungan APBD di beberapa daerah. Produksi aren selama ini dimanfaatkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui produk olahan tradisional seperti gula merah, namun pemerintah saat ini mulai mengarahkan pengembangan aren sebagai salah satu bahan baku bioetanol yang berpotensi memperkuat peran komoditas aren dalam mendukung penyediaan energi terbarukan.

Tabel 78. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Palma Lainnya

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	51.767	140.491	24.698	216.956	168.726	1.201
2021	53.091	142.964	24.627	220.681	191.326	1.338
2022	54.341	147.416	24.369	226.125	195.149	1.324
2023	54.859	146.840	24.342	226.042	177.556	1.209
2024	51.561	146.994	24.189	222.744	186.765	1.271

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2025*)	51.064	147.357	24.192	222.613	190.646	1.294

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Sentra produksi aren terbesar nasional berada di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Bengkulu, yang secara agregat menyumbang sekitar 75% dari total produksi aren nasional. Sementara itu, komoditas pinang menunjukkan tren produktivitas yang relatif stabil dan tetap memiliki posisi strategis sebagai komoditas ekspor, terutama ke Iran, Bangladesh, Vietnam, Pakistan, dan India. Produksi pinang secara nasional juga sangat didominasi oleh wilayah Pulau Sumatera, khususnya di Jambi, Aceh, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan kontribusi sekitar 90% dari total produksi pinang nasional.

Tabel 79. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Aren di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	35.513
2021	47.553
2022	40.273
2023	39.863
2024	24.737
2025	26.736

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Perkembangan harga rata-rata aren (produk gula merah) di pasar domestik selama periode 2020–2025 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada pertengahan

hingga akhir periode. Harga meningkat signifikan dari Rp35.513/kg pada 2020 menjadi Rp47.553/kg pada 2021, yang mencerminkan kuatnya permintaan serta keterbatasan pasokan. Selanjutnya, harga mengalami koreksi pada 2022 menjadi Rp40.273/kg dan relatif stabil pada 2023 sebesar Rp39.863/kg seiring dengan mulai normalnya kondisi pasar. Pada 2024 harga turun cukup tajam menjadi Rp24.737/kg, sebelum meningkat terbatas pada 2025 menjadi Rp26.736/kg, namun masih berada jauh di bawah level harga awal periode. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya tekanan pasar yang berpotensi dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan, keterbatasan kualitas produk, serta belum optimalnya tata niaga dan penyerapan pasar. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya pendapatan pekebun dan melemahnya insentif untuk mempertahankan intensitas budidaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standarisasi mutu gula merah, peningkatan efisiensi rantai pasok, serta pengembangan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

Tabel 80. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Pinang di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Harga Rata - rata (Rp/kg)
2020	14.788
2021	19.537
2022	13.254
2023	9.580
2024	10.425
2025	14.906

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Perkembangan harga rata-rata pinang (produk biji kering) di pasar domestik selama periode 2020–2025 menunjukkan pola

fluktuatif dengan kecenderungan melemah dibandingkan awal periode, meskipun terdapat pemulihan pada tahun terakhir. Pada 2020 harga pinang sebesar Rp14.788/kg dan meningkat cukup signifikan pada 2021 menjadi Rp19.537/kg, yang mencerminkan kuatnya permintaan serta kondisi pasokan yang relatif terbatas. Namun demikian, pada periode 2022–2023 harga mengalami penurunan hingga mencapai Rp9.580/kg, yang mengindikasikan adanya tekanan pasar, baik akibat melemahnya serapan, fluktuasi permintaan, maupun belum optimalnya tata niaga dan kualitas biji kering yang dihasilkan.

Pada 2024, harga pinang mulai menunjukkan pemulihan menjadi Rp10.425/kg, meskipun masih berada jauh di bawah level harga awal periode. Selanjutnya, pada 2025 harga kembali menguat menjadi Rp14.906/kg, mendekati capaian tahun 2020, yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi pasar dan peningkatan permintaan. Meskipun demikian, fluktuasi harga yang cukup tajam selama periode 2020-2025 menunjukkan bahwa stabilitas harga pinang masih rentan terhadap perubahan pasokan, kualitas produk, dan dinamika rantai pasok. Oleh karena itu, keberlanjutan usaha tani pinang memerlukan penguatan mutu dan standarisasi biji kering, peningkatan efisiensi tata niaga, serta pengembangan akses pasar dan nilai tambah agar pemulihan harga dapat berlangsung lebih stabil dan berkelanjutan di tingkat produsen.

Tabel 81. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Pinang

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	205.199	256.566	442	511

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2021	215.260	357.304	207	239
2022	190.229	246.590	35	60
2023	172.133	127.366	991	1.276
2024	182.115	119.690	1.370	1.332
2025*)	217.002	264.759	4.391	3.954

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor impor pinang periode 2020–2025 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan ekspor yang tetap dominan. Volume ekspor pinang meningkat dari 205.199 ton pada 2020 menjadi 215.260 ton pada 2021, kemudian menurun pada 2022–2023 sebelum kembali meningkat pada 2024 dan melonjak pada 2025 (s.d. November) menjadi 217.002 ton. Nilai ekspor mencapai puncak pada 2021 sebesar USD 357,30 juta, lalu menurun tajam hingga 2023–2024, sebelum kembali meningkat signifikan pada 2025 menjadi USD 264,76 juta, yang mencerminkan perbaikan harga atau permintaan pasar. Di sisi lain, volume dan nilai impor pinang relatif sangat kecil dibandingkan ekspor, meskipun menunjukkan peningkatan pada 2023–2025. Secara keseluruhan, neraca perdagangan pinang tetap menunjukkan surplus yang kuat, dengan kinerja ekspor yang berfluktuasi namun tetap menjadi penopang utama perdagangan komoditas ini.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Tanaman Palma Lainnya

Capaian indikator produksi tanaman palma lainnya tahun 2025 yang terdiri dari aren dan pinang dipegaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Produktivitas tahun 2025 meningkat menjadi 1.294 kilogram per hektare dibanding tahun 2024 sebesar 1.271 kilogram per hektare, sehingga penguatan produksi tidak hanya bergantung pada perluasan areal, tetapi juga ditopang oleh peningkatan hasil per satuan luas.
- 2) Luas Tanaman Menghasilkan pada 2025 sebesar 147.357 hektare dan relatif terjaga dibanding tahun sebelumnya, sehingga kontinuitas pasokan nasional tetap ditopang oleh areal produktif yang konsisten.
- 3) Komoditas aren dan pinang memiliki basis produksi yang tetap dan berkelanjutan. Indikator produksi palma lainnya diukur dari aren dan pinang karena keduanya berkembang luas secara historis di masyarakat dan memiliki basis produksi yang relatif konsisten setiap tahun.
- 4) Sentra aren terbesar berada di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Bengkulu yang secara agregat menyumbang sekitar 75 persen produksi aren nasional, sementara pinang didominasi Pulau Sumatera dengan kontribusi sekitar 90 persen produksi nasional. Kondisi ini menunjukkan sentra

produksi berperan sebagai penggerak utama capaian produksi.

- 5) Aren selama ini dimanfaatkan untuk produk olahan tradisional seperti gula merah, dan mulai diarahkan sebagai bahan baku bioetanol. Arah pemanfaatan ini memperkuat prospek hilirisasi dan menjadi faktor penguat keberlanjutan produksi di tingkat pekebun
- 6) Pinang merupakan komoditas ekspor yang memiliki pasar utama di Iran, Bangladesh, Vietnam, Pakistan, dan India. Dukungan pasar ekspor menjadi faktor penting yang menjaga serapan dan keberlanjutan produksi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Produksi Tanaman Palma Lainnya

Permasalahan dalam pencapaian indikator Produksi Tanaman Palma Lainnya perlu menjadi perhatian karena berdampak pada produktivitas, kualitas hasil, dan keberlanjutan produksi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam capaian tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- 1) Penerapan praktik budidaya yang baik belum optimal sehingga produktivitas dan kualitas hasil belum meningkat secara konsisten.
- 2) Pengelolaan kebun masih terbatas, terutama pada aspek pemeliharaan tanaman, peremajaan, dan penanganan kebun secara berkelanjutan.
- 3) Pengolahan hasil masih didominasi pola tradisional dan diversifikasi produk belum berkembang, sehingga

peningkatan nilai tambah belum optimal dan belum merata.

- 4) Sentra produksi masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap daerah penghasil utama.
- 5) Konsentrasi produksi tersebut meningkatkan kerentanan terhadap gangguan iklim, perubahan pola cuaca, serta hambatan distribusi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas pasokan dan capaian produksi nasional.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator Produksi Tanaman Palma Lainnya

Upaya perbaikan perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan untuk mengatasi kendala pencapaian indikator Produksi Tanaman Palma Lainnya. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Penguatan aspek hulu dan hilir dilakukan secara terarah melalui pembinaan berkelanjutan pada wilayah sentra produksi.
- 2) Peningkatan penerapan Good Agricultural Practices melalui pendampingan teknis kepada pekebun untuk memperbaiki pemeliharaan kebun dan meningkatkan produktivitas.
- 3) Penguatan kapasitas petani dan kelembagaan pekebun agar penerapan budidaya lebih intensif dan konsisten dalam mendukung keberlanjutan produksi.

- 4) Percepatan program peremajaan pada areal yang didominasi tanaman tua dan kurang produktif untuk menjaga kesinambungan produksi jangka panjang.
- 5) Penguatan rantai pasok dan peningkatan kualitas pascapanen untuk menjaga mutu hasil, memperkuat posisi tawar, serta menekan kehilangan hasil.
- 6) Pengembangan hilirisasi dan diversifikasi produk secara bertahap agar nilai tambah meningkat dan pemanfaatan komoditas tidak terbatas pada produk tradisional.
- 7) Peningkatan pendataan dan pemetaan wilayah sentra produksi sebagai dasar perencanaan intervensi dan penguatan stabilitas pasokan nasional.

o. Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya

Komoditas tanaman semusim dan tahunan lainnya secara umum memiliki peran strategis dalam sistem perkebunan nasional karena mencakup beragam komoditas bernilai ekonomi tinggi yang mendukung industri hulu–hilir, ekspor, serta penghidupan jutaan petani di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan manual IKU, indikator produksi tanaman semusim dan tahunan lainnya yang akan dianalisis kinerjanya meliputi kapas, tembakau, nilam, sereh wangi, dan kayu manis, yang masing-masing memiliki keunggulan komparatif dan potensi pengembangan yang besar seiring dengan meningkatnya permintaan pasar domestik dan global. Kapas berfungsi sebagai bahan baku penting industri

tekstil, tembakau sebagai komoditas utama industri hasil tembakau dan cerutu, nilam dan sereh wangi sebagai komoditas atsiri unggulan Indonesia dengan daya saing kuat di pasar internasional, serta kayu manis sebagai salah satu rempah andalan ekspor nasional. Didukung oleh keragaman agroklimat, ketersediaan sumber daya lahan, serta peluang penguatan hilirisasi dan peningkatan mutu produk, komoditas tanaman semusim dan tahunan lainnya memiliki prospek yang signifikan untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan petani.

Tabel 82. Capaian Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya

IK 1-15		Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya		
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
414.496 ton	397.782 ton*)	95,97%	435.065 ton	91,43%

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Pada tahun 2025, indikator kinerja produksi tanaman semusim dan tahunan lainnya sebesar 414.496 ton dengan realisasi sebesar 397.782 ton, atau sekitar 95,97% dari target, sehingga termasuk dalam kategori berhasil. Realisasi merupakan jumlah produksi tahun

2025 untuk komoditas kapas sebesar 73 ton, tembakau sebesar 331.951 ton, nilam 3.128 ton, sereh wangi 4.088 ton, dan kayu manis 58.542 ton. Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 397.782 ton atau 91,43% dari target yang direncanakan yaitu 435.065 ton. Hal ini menunjukkan target akhir renstra belum terpenuhi, namun sudah termasuk dalam kategori berhasil.

Tabel 83. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kapas

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	685	636	145	227
2021	478	459	102	223
2022	454	405	109	271
2023	578	521	167	320
2024	274	274	80	293
2025*)	273	273	73	267

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Tabel 84. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Tembakau

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	219.773	218.475	261.017	1.195
2021	219.082	213.696	245.338	1.148
2022	189.610	182.018	221.925	1.219
2023	229.805	227.977	286.510	1.257
2024	267.803	267.039	351.551	1.316
2025*)	249.078	247.023	331.951	1.344

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Tabel 85. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Nilam

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	18.273	13.098	2.459	188
2021	20.061	15.606	2.939	188
2022	16.685	12.766	2.069	162
2023	16.895	12.106	2.376	196
2024	18.127	12.839	2.505	195
2025*)	23.747	15.921	3.128	196

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Tabel 86. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sereh Wangi

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	25.786	23.611	4.922	208
2021	26.690	24.191	4.742	196
2022	27.265	24.239	4.793	198
2023	27.862	23.161	4.439	219
2024	26.753	22.020	3.975	181
2025*)	26.523	22.434	4.088	182

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Tabel 87. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kayu Manis

Tahun	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2020	49.604	34.748	4.096	88.448	48.836	1.405
2021	49.337	35.290	3.561	88.188	52.260	1.481
2022	48.624	36.442	3.281	88.347	54.748	1.502
2023	47.882	37.846	2.633	88.362	54.658	1.444
2024	47.267	38.768	2.797	88.832	56.385	1.454
2025	45.438	36.883	2.898	85.220	58.542	1.587

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Dalam periode 2020–2025, kinerja lima komoditas menunjukkan dinamika yang beragam: kapas mengalami penyusutan skala usaha dengan luas tanam turun dari 685 ha menjadi 273 ha dan produksi dari 145 ton menjadi

73 ton, meskipun produktivitas meningkat dari 227 kg/ha menjadi 267 kg/ha; produksi tembakau cenderung meningkat meskipun terdapat fluktuasi, dengan produksi naik dari 261.017 ton pada tahun 2020 menjadi 331.951 ton pada tahun 2025 serta produktivitas membaik dari 1.195 kg/ha menjadi 1.344 kg/ha, sementara penurunan 2025 lebih disebabkan berkurangnya luas panen; nilam menunjukkan pertumbuhan positif dengan produksi meningkat dari 2.459 ton menjadi 3.128 ton terutama didorong ekspansi areal, sedangkan produktivitas relatif stabil di kisaran 188–196 kg/ha; sereh wangi cenderung stagnan dan sedikit menurun dengan produksi dari 4.922 ton menjadi 4.088 ton dan produktivitas turun dari 208 kg/ha menjadi 182 kg/ha; dan kayu manis memperlihatkan tren pertumbuhan konsisten dengan produksi naik dari 48.836 ton menjadi 58.542 ton serta produktivitas dari 1.405 kg/ha menjadi 1.587 kg/ha, meskipun luas areal total sedikit menurun, sehingga peningkatan kinerja lebih ditopang oleh bertambahnya proporsi tanaman menghasilkan dan efisiensi panen.

Tabel 88. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kapas Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	-	-	-	-
2.	Sumatera Utara	-	-	-	-
3.	Sumatera Barat	-	-	-	-
4.	Riau	-	-	-	-
5.	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6.	Jambi	-	-	-	-

No.	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
7.	Sumatera Selatan	-	-	-	-
8.	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-
9.	Bengkulu	-	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-	-
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	-	-	-	-
13.	Banten	-	-	-	-
14.	Jawa Tengah	35	35	11	312
15.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16.	Jawa Timur	18	18	4	225
17.	Bali	40	40	15	375
18.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19.	Nusa Tenggara Timur	25	25	11	452
20.	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23.	Kalimantan Timur	-	-	-	-
24.	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25.	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26.	Gorontalo	-	-	-	-
27.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
28.	Sulawesi Selatan	155	155	32	204
29.	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
31.	Maluku	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-
35.	Papua Selatan	-	-	-	-
36.	Papua Tengah	-	-	-	-

No.	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
37.	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38.	Papua Barat Daya	-	-	-	-
	INDONESIA	273	273	73	267

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Tabel 89. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tembakau Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	2.948	2.740	2.694	983
2.	Sumatera Utara	1.930	1.925	1.977	1.027
3.	Sumatera Barat	180	103	211	2.062
4.	Riau	-	-	-	-
5.	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6.	Jambi	383	305	196	643
7.	Sumatera Selatan	60	60	-	-
8.	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-
9.	Bengkulu	-	-	-	-
10.	Lampung	656	655	556	848
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	9.244	9.206	8.793	955
13.	Banten	-	-	-	-
14.	Jawa Tengah	52.244	52.244	61.149	1.170
15.	D.I. Yogyakarta	492	492	605	1.231
16.	Jawa Timur	123.553	122.415	161.147	1.316
17.	Bali	238	238	217	911
18.	Nusa Tenggara Barat	53.047	52.589	91.440	1.739
19.	Nusa Tenggara Timur	1.290	1.290	632	490
20.	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-

No.	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
23.	Kalimantan Timur	-	-	-	-
24.	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25.	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26.	Gorontalo	-	-	-	-
27.	Sulawesi Tengah	96	96	60	626
28.	Sulawesi Selatan	2.717	2.664	2.276	854
29.	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
31.	Maluku	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-
35.	Papua Selatan	-	-	-	-
36.	Papua Tengah	-	-	-	-
37.	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38.	Papua Barat Daya	-	-	-	-
	INDONESIA	249.078	247.023	331.951	1.344

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Tabel 90. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Nilam Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	1.446	1.110	229	206
2.	Sumatera Utara	936	934	342	366
3.	Sumatera Barat	4.513	2.487	709	285
4.	Riau	-	-	-	-
5.	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6.	Jambi	1.148	743	109	147
7.	Sumatera Selatan	33	33	10	292
8.	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-

No.	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
9.	Bengkulu	-	-	-	-
10.	Lampung	20	20	2	80
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	46	44	10	225
13.	Banten	-	-	-	-
14.	Jawa Tengah	57	57	1	25
15.	D.I. Yogyakarta	31	31	5	156
16.	Jawa Timur	359	348	119	342
17.	Bali	-	-	-	-
18.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20.	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23.	Kalimantan Timur	-	-	-	-
24.	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25.	Sulawesi Utara	5.572	3.003	236	78
26.	Gorontalo	6	6	2	334
27.	Sulawesi Tengah	996	996	57	57
28.	Sulawesi Selatan	444	362	4	12
29.	Sulawesi Barat	1.861	1.494	313	209
30.	Sulawesi Tenggara	6.160	4.139	981	237
31.	Maluku	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-
35.	Papua Selatan	-	-	-	-
36.	Papua Tengah	-	-	-	-
37.	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38.	Papua Barat Daya	120	114	2	13

No.	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
	INDONESIA	23.747	15.921	3.128	196

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Tabel 91. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sereh Wangi Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	20.708	17.247	2.908	169
2.	Sumatera Utara	678	676	201	297
3.	Sumatera Barat	2.253	1.996	521	261
4.	Riau	-	-	-	-
5.	Kepulauan Riau	-	-	-	-
6.	Jambi	-	-	-	-
7.	Sumatera Selatan	8	8	3	320
8.	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-
9.	Bengkulu	-	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-	-
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	2.700	2.377	445	187
13.	Banten	-	-	-	-
14.	Jawa Tengah	74	63	2	35
15.	D.I. Yogyakarta	1	1	0	200
16.	Jawa Timur	71	37	3	93
17.	Bali	25	25	5	216
18.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20.	Kalimantan Barat	5	5	0	40
21.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23.	Kalimantan Timur	-	-	-	-
24.	Kalimantan Utara	-	-	-	-

No.	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
25.	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26.	Gorontalo	-	-	-	-
27.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
28.	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
29.	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
31.	Maluku	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-
35.	Papua Selatan	-	-	-	-
36.	Papua Tengah	-	-	-	-
37.	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38.	Papua Barat Daya	-	-	-	-
	INDONESIA	26.523	22.434	4.088	182

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Tabel 92. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kayu Manis Berdasarkan Provinsi Tahun 2025*)

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Aceh	23	64	50	137	28	437
2.	Sumatera Utara	876	4.397	907	6.180	5.964	1.356
3.	Sumatera Barat	16.143	11.875	1.394	29.412	17.383	1.464
4.	Riau	-	-	-	-	-	-
5.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
6.	Jambi	27.582	18.771	200	46.553	33.916	1.807
7.	Sumatera Selatan	166	376	193	735	406	1.080
8.	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
9.	Bengkulu	289	369	17	674	26	69

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
10.	Lampung	179	499	75	753	656	1.316
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	7	41	11	58	4	91
13.	Banten	-	-	-	-	-	-
14.	Jawa Tengah	76	179	25	280	77	428
15.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
16.	Jawa Timur	29	25	11	65	19	760
17.	Bali	-	-	-	-	-	-
18.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19.	Nusa Tenggara Timur	6	14	-	20	5	399
20.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Selatan	864	1.951	26	2.841	2.842	1.456
23.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24.	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25.	Sulawesi Utara	15	35	-	50	22	629
26.	Gorontalo	31	85	1	117	16	188
27.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
28.	Sulawesi Selatan	3	147	13	163	20	134
29.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
31.	Maluku	-	-	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	15	6	2	23	0	23
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
35.	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36.	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37.	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38.	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-

No.	Provinsi	Luas TBM (Ha)	Luas TM (Ha)	Luas TTM/TR (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
	INDONESIA	45.438	36.883	2.898	85.220	58.542	1.587

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Pada tahun 2025, produksi kapas terealisasi 73 ton dari luas panen 273 ha dengan produktivitas 267 kg/ha dan masih terkonsentrasi di beberapa provinsi (Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, dan Sulawesi Selatan), mencerminkan pengembangan yang masih berskala percontohan dengan kendala benih, minat petani, dan daya saing; tembakau sebagai kontributor terbesar mencapai 331.951 ton dari 247.023 ha dengan produktivitas 1.344 kg/ha, didominasi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NTB, serta ditopang pasar domestik dan pengalaman teknis petani; nilam menghasilkan 3.128 ton dari 15.921 ha dengan produktivitas 196 kg/ha, berpusat di Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara, namun masih dipengaruhi fluktuasi harga dan keterbatasan teknologi penyulingan; sereh wangi mencapai 4.088 ton dari 22.434 ha dengan produktivitas 182 kg/ha, didominasi Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa Barat, dengan tantangan pada teknologi distilasi dan praktik budidaya; sedangkan kayu manis terealisasi 58.542 ton dari 36.883 ha dengan produktivitas 1.587 kg/ha, berpusat di Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan, meskipun masih menghadapi tanaman rusak dan fluktuasi produksi akibat umur tanaman serta praktik panen yang belum seragam.

Tabel 93. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Tembakau di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Harga Rata - Rata (Rp/kg)
2020	72.672
2021	78.209
2022	70.812
2023	39.016
2024	63.319
2025	54.083

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Tabel 94. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Nilam di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Harga Rata - Rata (Rp/kg)
2020	493.868
2021	539.306
2022	455.169
2023	477.241
2024	931.308
2025	853.472

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Tabel 95. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Sereh Wangi di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Harga Rata - Rata (Rp/kg)
2020	164.005
2021	149.511
2022	151.433
2023	140.098
2024	139.447
2025	214.294

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Tabel 96. Perkembangan Harga Rata-rata Komoditas Kayu Manis di Pasar Domestik Tahun 2020-2025

Tahun	Harga Rata - Rata (Rp/kg)
2020	44.999
2021	51.687
2022	50.841
2023	46.839
2024	50.387
2025	50.836

Sumber : SIPASBUN - Ditjen. Perkebunan

Selama periode 2020–2025, perkembangan harga tembakau (daun kering), nilam (minyak nilam), sereh wangi (minyak sereh wangi), dan kayu manis (kulit kering) menunjukkan dinamika yang beragam dan memberikan dampak langsung terhadap keberlanjutan usahatani. Harga tembakau mengalami fluktuasi yang sangat signifikan, dari Rp72.672/kg pada 2020 meningkat menjadi Rp78.209/kg pada 2021, kemudian menurun menjadi Rp70.812/kg pada 2022 dan turun signifikan pada 2023 hingga Rp39.016/kg. Pada 2024 harga kembali meningkat menjadi Rp63.319/kg, namun pada 2025 mengalami penurunan menjadi Rp54.083/kg. Pola tersebut mencerminkan tingginya volatilitas pasar tembakau yang dipengaruhi oleh perubahan permintaan industri, kualitas produk, serta faktor kebijakan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi petani.

Sebaliknya, harga nilam menunjukkan kecenderungan meningkat, dari Rp493.868/kg pada 2020 menjadi Rp539.306/kg pada 2021, mengalami penurunan pada 2022 menjadi Rp455.169/kg, kemudian kembali meningkat pada 2023 sebesar Rp477.241/kg dan melonjak signifikan pada 2024 hingga Rp931.308/kg, serta pada 2025 sebesar

Rp853.472/kg. Kondisi tersebut menjadi insentif ekonomi yang kuat bagi pengembangan usaha nilam. Sementara itu, harga serah wangi cenderung melemah dan relatif stagnan dari Rp164.005/kg pada 2020 menjadi Rp139.447/kg pada 2024, sebelum meningkat signifikan pada 2025 mencapai Rp214.294/kg. Harga kayu manis relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, dari Rp44.999/kg pada 2020 menjadi Rp50.387/kg pada 2024 dan Rp50.836/kg pada 2025, yang memberikan tingkat kepastian usaha yang relatif lebih baik dibandingkan komoditas lainnya.

Tabel 97. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Kapas

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	29.925	33.770	493.451	785.492
2021	27.395	33.867	574.404	1.125.480
2022	25.474	40.525	501.257	1.353.048
2023	22.647	33.775	373.613	828.314
2024	31.401	38.664	414.182	826.915
2025*)	30.323	35.829	384.934	667.782

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 98. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Tembakau

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	31.132	195.919	110.275	550.412
2021	27.411	213.408	116.931	586.682
2022	41.188	266.026	140.920	617.124
2023	27.805	218.793	129.141	633.126
2024	23.599	227.479	167.760	911.250
2025*)	19.164	178.980	191.900	1.042.285

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 99. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Nilam

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2022	1.432	59.055	368	8.272
2023	1.945	88.363	491	9.457
2024	1.504	141.463	721	11.899
2025*)	1.663	164.858	863	12.726

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 100. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor - Impor Kayu Manis

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 USD)	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (000 USD)
2020	37.028	151.292	4.306	15.199
2021	32.562	160.497	6.297	21.188
2022	26.036	130.799	2.311	2.311
2023	23.527	99.704	3.364	9.664
2024	28.842	112.245	4.832	10.684
2025*)	23.543	88.766	3.915	9.919

*) s.d November 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perdagangan kapas, tembakau, nilam, dan kayu manis menunjukkan karakteristik yang berbeda sepanjang periode 2020–2025. Kapas memperlihatkan ketergantungan impor yang sangat tinggi, dengan volume dan nilai impor jauh melampaui ekspor yang relatif kecil dan berfluktuasi, mencerminkan kebutuhan bahan baku industri yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Tembakau juga menunjukkan kecenderungan meningkatnya impor, baik dari sisi volume maupun nilai, meskipun ekspor masih berlangsung dengan fluktuasi dan nilai yang relatif stabil, sehingga neraca perdagangannya semakin tertekan oleh

tingginya kebutuhan industri domestik. Sebaliknya, nilam menampilkan kinerja ekspor yang sangat kuat dengan lonjakan nilai ekspor yang signifikan meskipun volumenya relatif kecil, mencerminkan tingginya nilai tambah dan daya saing produk di pasar global, sementara impor tetap terbatas. Adapun kayu manis masih menunjukkan surplus perdagangan dengan dominasi ekspor, meskipun volume dan nilai ekspornya cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir dan impor relatif kecil serta stabil. Secara keseluruhan, keempat komoditas tersebut menggambarkan variasi struktur perdagangan, mulai dari ketergantungan impor yang tinggi hingga komoditas bernilai ekspor unggulan berbasis nilai tambah.

Secara umum, seluruh komoditas menghadapi tantangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang berdampak pada penurunan pertumbuhan, hasil, dan mutu produksi: kapas rentan terhadap ulat kapas, kutu daun, dan kutu kebul yang merusak daun, buah, dan serat sehingga memerlukan pengendalian terpadu; tembakau menghadapi hama (ulat grayak, kutu daun) dan penyakit serius seperti lanas, bercak daun, busuk akar, dan mosaik yang menurunkan kuantitas serta kualitas daun; nilam terserang kutu daun, ulat penggulung, layu bakteri, dan virus mosaik yang diperparah oleh budidaya tradisional dan benih non-sertifikat; sereh wangi relatif lebih tahan namun masih terkendala penyakit bercak daun dan persaingan gulma; sementara kayu manis diserang ulat kipat yang berpotensi menurunkan produktivitas signifikan, sehingga seluruh komoditas memerlukan penguatan pengamatan lapang, sanitasi, dan penerapan manajemen hama terpadu serta praktik budidaya yang lebih baik.

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan benih/bibit bermutu, praktik budidaya yang tepat, serta faktor iklim dan pasar: penyediaan benih nilam, tembakau, dan sereh wangi telah mendekati atau melampaui target Renstra dan berdampak pada vigor serta ketahanan tanaman; praktik budidaya terpadu dan IPM memperkuat pertumbuhan sekaligus menekan OPT; namun anomali iklim seperti El Niño meningkatkan risiko stres tanaman dan serangan OPT sehingga menuntut adaptasi teknik budidaya; di sisi lain, keterbatasan akses benih bersertifikat, sumber daya, dan penyuluhan masih membatasi produksi; serta fluktuasi harga domestik dan ekspor memengaruhi minat tanam dan investasi petani, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas jangka panjang.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja produksi tanaman semusim dan tahunan lainnya tahun 2025 termasuk dalam kategori berhasil. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

- 1) Nilam dan kayu manis menunjukkan tren produksi meningkat, didorong oleh perluasan areal tanam, produktivitas yang relatif stabil, serta insentif harga yang kuat, khususnya pada nilam. Pertumbuhan produksi kayu manis masih cukup baik didukung oleh stabilitas harga domestik dan posisi ekspor yang masih kompetitif.
- 2) Produktivitas tembakau dan kayu manis menunjukkan tren meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Produktivitas nilam relatif stabil pada

kisaran kurang lebih 196 kg/ha, menunjukkan keberhasilan praktik budidaya yang mulai lebih baik di sentra produksi.

- 3) Lonjakan harga nilam tahun 2024 menjadi sinyal pasar yang kuat sehingga mendorong perluasan areal tanam dan peningkatan produksi pada 2025. Stabilitas harga kayu manis memberikan kepastian usaha bagi petani untuk mempertahankan dan meningkatkan intensitas budidaya. Pemulihan harga tembakau pada 2024 turut membantu menjaga minat tanam petani meskipun masih berfluktuasi.
- 4) Meskipun skalanya masih terbatas, distribusi benih unggul berkontribusi terhadap peningkatan hasil.
- 5) Kinerja ekspor nilam dan kayu manis yang relatif kuat meningkatkan minat pelaku usaha untuk mempertahankan dan memperluas budidaya. Prospek pasar ekspor turut menjaga keberlanjutan usaha tani, khususnya pada komoditas atsiri.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya

Dalam proses pencapaian indikator produksi tanaman semusim dan tahunan lainnya tahun 2025, terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi kinerja, antara lain:

- 1) Produksi kapas nasional masih sangat rendah akibat penyusutan luas tanam, rendahnya minat petani, serta lemahnya daya saing harga kapas domestik dibandingkan komoditas alternatif. Ketergantungan industri tekstil terhadap kapas impor semakin menekan insentif pengembangan kapas nasional.

- 2) Fluktuasi harga tembakau yang tajam, khususnya penurunan drastis pada 2023, berdampak pada penurunan minat tanam petani pada musim berikutnya.
- 3) Harga sereh wangi yang cenderung menurun dan stagnan menurunkan daya tarik ekonomi komoditas ini, sehingga mempengaruhi luas panen dan produksi.
- 4) Kapas rentan terhadap serangan ulat kapas, kutu daun, dan kutu kebul. Tembakau menghadapi tekanan dari ulat grayak, lanas (*Phytophthora nicotianae*), dan penyakit virus. Nilam mengalami gangguan layu bakteri dan virus mosaik di beberapa sentra. Sereh wangi terdampak bercak daun dan kompetisi gulma. Kayu manis mengalami serangan ulat kipat yang menurunkan vigor tanaman. Tekanan OPT ini menurunkan produktivitas aktual dan meningkatkan risiko gagal panen parsial.
- 5) Akses petani terhadap benih unggul kapas, nilam, dan sereh wangi masih terbatas.
- 6) Penggunaan benih asal kebun sendiri yang tidak tersertifikasi berdampak pada ketidakterseragaman pertumbuhan, serta meningkatnya kerentanan terhadap OPT.
- 7) Perubahan pola musim hujan dan kemarau, meningkatkan risiko kekeringan atau kelebihan air, serta memicu peningkatan intensitas serangan hama dan penyakit. Di beberapa wilayah, stres air

berdampak langsung pada penurunan produksi tembakau, sereh wangi, dan nilam.

- 8) Praktik budidaya di sebagian sentra masih bersifat tradisional, dengan pemupukan yang tidak berimbang.
- 9) Keterbatasan sarana pasca panen dan pengolahan (khususnya nilam dan sereh wangi) menurunkan rendemen dan kualitas produk, sehingga berdampak pada nilai ekonomi hasil.
- 10) Upaya Perbaikan untuk Mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya
- 11) Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dan meningkatkan keberlanjutan capaian indikator produksi tanaman semusim dan tahunan lainnya ke depan, diperlukan langkah-langkah perbaikan, antara lain:
 - 12) Memperluas produksi dan distribusi benih/bibit unggul dan bersertifikat untuk kapas, tembakau, nilam, sereh wangi, dan kayu manis. Mendorong pengembangan kebun sumber benih dan unit pembibitan rakyat di sentra produksi.
 - 13) Mendorong penerapan Good Agricultural Practices (GAP) melalui pemupukan berimbang, jarak tanam optimal, dan pengelolaan air yang lebih efisien.
 - 14) Memperkuat pendampingan teknis oleh penyuluh dan petugas OPT untuk menekan kehilangan hasil di tingkat petani.

- 15) Meningkatkan kapasitas petani dalam pengamatan dini OPT, penggunaan musuh alami, dan pestisida nabati.
- 16) Mendorong stabilisasi harga melalui kemitraan petani–industri dan penguatan kelembagaan ekonomi petani.
- 17) Mengembangkan hilirisasi produk (minyak nilam, minyak sereh wangi, kayu manis olahan) untuk meningkatkan nilai tambah dan daya tarik usaha tani.
- 18) Memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) untuk OPT dan iklim ekstrem.

2. Tersedianya Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi

Sasaran Tersedianya Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi merupakan sasaran baru dan sebelumnya belum tercantum di Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan. Sasaran ini disusun untuk menggambarkan kontribusi subsektor perkebunan dalam mendukung program pengembangan energi terbarukan, khususnya melalui penyediaan bahan baku untuk bioenergi berbasis komoditas pertanian. Ruang lingkup sasaran ini lebih difokuskan pada Biodiesel, mengingat sumber bahan baku utama yang digunakan berasal dari minyak kelapa sawit yang pada hulu produksinya ditopang oleh ketersediaan TBS. Meskipun sasaran ini baru ditetapkan dalam renstra, pada kenyataannya pemenuhan bahan baku biodiesel dari kelapa sawit telah berlangsung dan berkembang dalam beberapa

tahun terakhir sebagai bagian dari kebijakan nasional penguatan energi berbasis nabati.

Kebijakan mandatori biodiesel, khususnya penerapan B40 pada tahun 2025, semakin memperkuat permintaan domestik terhadap bahan baku nabati dan menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan impor solar, mendorong hilirisasi industri, serta menciptakan kepastian pasar bagi pelaku usaha hulu dan hilir kelapa sawit. Seiring dengan arah penguatan kebijakan menuju B50, kebutuhan biodiesel diproyeksikan meningkat sehingga menuntut kesiapan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, baik melalui peningkatan produktivitas kebun, efisiensi pengolahan, maupun optimalisasi sumber bahan baku. Capaian sasaran tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi adalah sebagai berikut.

Tabel 101. Capaian Sasaran Tersedianya Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi

Tersedianya Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2-1	Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi	66,37 Juta Ton	70,43 Juta Ton	106,12

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

a. Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi

Tabel 102. Capaian Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi

IK 2-1		Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi		
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
66,37 Juta Ton	70,43 Juta Ton	106,12	98,78 Juta ton	71,30

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan Tabel Capaian Indikator Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi, kinerja produksi komoditas pertanian perkebunan khususnya kelapa sawit sebagai bahan baku bioenergi tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik sehingga dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Target produksi yang ditetapkan sebesar 66,37 juta ton mampu direalisasikan hingga 70,43 juta ton, sehingga tingkat capaian sebesar 106,12%. Capaian ini menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku berbasis kelapa sawit berada pada kondisi yang relatif kuat dan mencukupi, serta mencerminkan adanya peningkatan kapasitas pasokan yang dapat menopang kebutuhan bioenergi dalam negeri secara lebih stabil.

Pencapaian tersebut juga memiliki pengaruh strategis karena secara langsung memperkuat dukungan terhadap kebijakan mandatori biodiesel, khususnya penerapan B40 dan arah peningkatan menuju B50. Dengan ketersediaan bahan baku yang melampaui target, risiko keterbatasan pasokan bahan baku untuk produksi biodiesel dapat ditekan, sehingga kesinambungan program substitusi energi fosil dan upaya penguatan ketahanan energi nasional dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, capaian produksi yang tinggi turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya dorong hilirisasi sawit, mengingat bioenergi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas pemanfaatan domestik dan memperkuat nilai tambah komoditas perkebunan.

Apabila dikaitkan dengan target akhir renstra sebesar 98,78 juta ton, realisasi tahun 2025 baru mencapai 71,30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 meskipun sangat tinggi terhadap target tahunan, belum sepenuhnya memastikan tercapainya target renstra secara otomatis, karena pemenuhan target akhir tetap memerlukan konsistensi peningkatan produksi pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, diperlukan langkah penguatan yang lebih terarah, terutama melalui peningkatan produktivitas kebun, perbaikan praktik budidaya, penguatan pembinaan pada perkebunan rakyat, serta percepatan peremajaan pada areal yang sudah menua atau kurang produktif guna menjaga keberlanjutan pasokan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi

Dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi secara berkelanjutan, terdapat potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian indikator Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi. Risiko tersebut terutama berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Peningkatan permintaan bahan baku biodiesel menuntut ketersediaan TBS atau CPO yang stabil dan berkelanjutan.
- 2) Penguatan program biodiesel juga menuntut pengelolaan pemanfaatan minyak sawit secara lebih terencana agar kebutuhan bahan baku bagi industri minyak goreng dan produk turunan pangan tetap terjaga, bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan nonpangan untuk biodiesel, sehingga stabilitas pasokan domestik dapat tercapai.
- 3) Adanya tantangan pada aspek keberlanjutan sektor hulu yang mencakup isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penyediaan bahan baku bioenergi tidak hanya memerlukan peningkatan produksi, tetapi juga membutuhkan penguatan tata kelola dan konsistensi kebijakan yang selaras agar dukungan lintas sektor berjalan efektif, sehingga program pemenuhan bahan baku biodiesel dapat dilaksanakan secara

berkelanjutan dan mendukung target bauran energi nasional.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator Tersedianya Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi

- 1) Penguatan sisi hulu kelapa sawit secara berkelanjutan, terutama melalui peningkatan produktivitas dan pasokan bahan baku. Langkah yang dapat dilakukan antara lain mempercepat peremajaan tanaman kelapa sawit pada areal yang tidak produktif, disertai penguatan pembinaan teknis budidaya agar produktivitas dapat meningkat dan pasokan TBS atau CPO lebih stabil.
- 2) Pengaturan pemanfaatan sawit secara lebih terencana agar pemenuhan bahan baku industri minyak goreng dan produk turunan pangan tetap terjaga seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku biodiesel, sehingga stabilitas pasokan domestik dapat dipertahankan.

3. Sasaran Meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Pekebun

Capaian sasaran meningkatnya indeks harga yang diterima pekebun dapat dilihat pada Tabel 103 berikut.

Tabel 103. Capaian Sasaran Meningkatnya Indeks Harga Yang Diterima Pekebun

Meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Pekebun				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3-1	Indeks Harga yang Diterima Pekebun	Nilai 154,80	Nilai 198,71	128,37%

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

a. Indeks Harga yang Diterima Pekebun

Indeks harga yang diterima Pekebun merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan pekebun. Upaya peningkatan indeks harga yang diterima pekebun dilaksanakan melalui efisiensi tata niaga hasil perkebunan, peningkatan mutu dan nilai tambah produk, perluasan akses pasar, serta penguatan kelembagaan pekebun dan fasilitasi kemitraan pekebun dengan pelaku usaha maupun industri pengolahan.

Indeks harga yang diterima Pekebun merupakan Indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan dan kemampuan ekonomi pekebun, yang mencerminkan perubahan harga hasil perkebunan yang diterima pekebun dalam suatu periode tertentu. Data indeks harga diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia sebagai barometer perkembangan harga hasil pertanian dibandingkan harga kebutuhan hidup dan produksi pertanian.

Tabel 104. Capaian Indeks Harga yang Diterima Pekebun

IK 3-1	Indeks Harga yang Diterima Pekebun			
	Tahun 2025		Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
Nilai 154,80	Nilai 198,71	128,37	Nilai 177,3	112,08

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Indeks Harga yang diterima Pekebun pada Tahun 2025 mencapai nilai indeks 198,71. Jika dibandingkan dengan target 154,80 maka capaian peningkatan target indeks harga yang diterima pekebun Tahun 2025 telah tercapai (128,37%) dari target yang ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan target akhir renstra sebesar nilai indeks 177,3, realisasi tahun 2025 telah mencapai 112,08%. Nilai Indeks harga 198,71 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun dasar yang diacu oleh BPS, secara nominal menunjukkan peningkatan penerimaan harga yang diterima pekebun.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Indeks Harga yang Diterima Pekebun

- 1) Membaiknya harga sejumlah komoditas perkebunan utama di pasar domestik dan ekspor yang berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pekebun.
- 2) Upaya efisiensi tata niaga hasil perkebunan melalui pemangkasan rantai distribusi dan peningkatan peran kelembagaan ekonomi pekebun.

- 3) Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan melalui fasilitasi pascapanen, pengolahan, dan sertifikasi mutu.
- 4) Perluasan akses pasar, termasuk dukungan promosi, kemitraan usaha, serta pemanfaatan platform pemasaran digital.
- 5) Penguatan kelembagaan pekebun (koperasi/kelembagaan ekonomi) yang meningkatkan posisi tawar pekebun terhadap pelaku usaha dan industri pengolahan.
- 6) Fasilitasi kemitraan pekebun dengan industri pengolahan dan offtaker yang memberikan kepastian pasar dan harga.
- 7) Kondisi permintaan global yang relatif stabil untuk beberapa komoditas unggulan perkebunan sehingga menopang tren harga.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Indeks Harga yang Diterima Pekebun

- 1) Fluktuasi harga komoditas tertentu yang masih tinggi akibat ketergantungan pada pasar global dan faktor musiman.
- 2) Kesenjangan harga antarwilayah akibat keterbatasan infrastruktur distribusi dan biaya logistik yang masih tinggi.
- 3) Kualitas produk pekebun yang belum seragam sehingga sebagian belum memperoleh harga premium di pasar.

- 4) Keterbatasan akses pembiayaan dan modal kerja pekebun untuk meningkatkan skala usaha dan kualitas produksi.
- 5) Lemahnya posisi tawar pekebun kecil yang belum tergabung dalam kelembagaan ekonomi yang kuat.
- 6) Ketergantungan pada tengkulak atau perantara pada beberapa sentra perkebunan yang menekan harga di tingkat pekebun.
- 7) Masih terbatasnya pemanfaatan data dan informasi pasar oleh pekebun dalam pengambilan keputusan usaha.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Indeks Harga yang Diterima Pekebun

- 1) Melanjutkan dan memperluas program efisiensi tata niaga melalui penguatan koperasi, BUMDes, dan offtaker lokal.
- 2) Mendorong diversifikasi produk dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat pekebun.
- 3) Memperkuat sistem informasi harga dan pasar yang mudah diakses oleh pekebun secara real time.
- 4) Meningkatkan kualitas produk melalui pendampingan teknis, standardisasi mutu, dan sertifikasi.
- 5) Memperluas fasilitasi kemitraan usaha yang berkeadilan antara pekebun dan industri pengolahan.

- 6) Memperkuat akses pembiayaan pekebun melalui KUR, pembiayaan syariah, dan skema pembiayaan berbasis klaster.
- 7) Mendorong pemerataan infrastruktur logistik dan pascapanen di sentra-sentra produksi.
- 8) Mengembangkan mekanisme stabilisasi harga dan perlindungan pekebun dari gejolak harga ekstrem.

4. Sasaran Terjaminnya Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan

Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan merupakan salah satu sasaran program dalam pembangunan sektor perkebunan nasional. Jaminan mutu dan keamanan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan daya saing produk perkebunan, baik di pasar domestik maupun internasional, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi konsumen dan menjaga kesehatan masyarakat. Salah satu tujuan dalam mendukung daya saing produk perkebunan adalah melalui pasar ekspor. Namun, dalam realitanya terdapat beberapa kendala seperti penolakan ekspor akibat ketidaksesuaian dengan standar mutu dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pada pelaku usaha (kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat, eksportir). Capaian sasaran terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 105. Capaian Sasaran Terjaminnya Mutu Dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan

Terjaminnya Mutu Dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4-1	Indeks Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan	Nilai 0,65	Nilai 0,65	100%

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

a. Indeks Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan

Indeks mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan menjadi salah satu indikator capaian kinerja dan sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan. Indeks mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan dihitung berdasarkan data dari jumlah sampel komoditas pertanian tanaman perkebunan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh laboratorium yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dibandingkan dengan total seluruh sampel yang diuji. Sampel komoditas pertanian tanaman perkebunan yang diuji diambil oleh Petugas Pengambil Contoh lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dari kelompok-kelompok binaan maupun kelompok masyarakat (bukan binaan). Pada tahun 2025 dilakukan pengujian terhadap 37 sampel Komoditas pertanian tanaman perkebunan yang menjadi fokus kegiatan strategis diantaranya kopi, kakao,

pala, kelapa, tebu, lada, dan teh. Perhitungan indikator kinerja ini sebagai berikut:

$$\text{Indeks Mutu dan Keamanan} = \frac{\text{Jumlah sampel yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan berdasarkan pengujian}}{\text{Total Jumlah Sampel}}$$

Tabel 106. Capaian Indeks Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan

IK 4-1		Indeks Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan		
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
Nilai 0,65	Nilai 0,65	100	Nilai 0,85	76,47

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Realisasi kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap indikator kinerja indeks mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan pada Tahun 2025 sebesar 0,65. Capaian kinerja sebesar 100% termasuk dalam kategori Berhasil. Tahun 2025 dilakukan pengambilan sampel dan pengujian 37 sampel komoditas pertanian tanaman perkebunan, 24 sampel telah sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan pada Standar Nasional Indonesia dan 13 sampel belum memenuhi. Apabila dikaitkan dengan target akhir renstra sebesar nilai indeks 0,85, realisasi tahun 2025 baru mencapai 76,47%.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Indeks Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan

Berdasarkan analisis capaian kinerja Direktur Jenderal Perkebunan terhadap indeks mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan termasuk dalam kategori Berhasil. Pengujian dilakukan pada produk komoditas pertanian tanaman perkebunan strategis diantaranya kopi, kakao, pala, kelapa, tebu, lada, teh dan Gula Kristal Putih yang diambil dari kelompok binaan dan kelompok masyarakat. Produk yang diambil dari kelompok masyarakat yang bukan binaan Ditjen Perkebunan lebih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan standar diantaranya pada komoditas biji kakao yang, biji pala yang Kadar Air melebihi ambang batas, Gula Kristal Putih yang tidak sesuai dengan persyaratan Standar Gula Kristal Putih serta produk kopi bubuk yang memiliki kafein melebihi ambang batas. Oleh karena itu, pendampingan kepada pelaku usaha diperlukan dalam kaitannya memenuhi mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan sasaran program Direktur Jenderal Perkebunan yaitu Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Indeks Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan

- 1) Masih terdapat sampel komoditas (13 dari 37 sampel) yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 2) Tingginya ketidaksesuaian mutu pada produk yang berasal dari kelompok masyarakat non-binaan Ditjen Perkebunan.
- 3) Ditemukannya parameter mutu yang melebihi ambang batas, antara lain:
 - a) Kadar air biji kakao dan biji pala yang terlalu tinggi.
 - b) Gula Kristal Putih yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu.
 - c) Kopi bubuk dengan kadar kafein melebihi ambang batas.
- 4) Masih terbatasnya pemahaman dan penerapan praktik pascapanen yang baik (Good Handling Practices) di tingkat pelaku usaha.
- 5) Belum meratanya pendampingan teknis dan pembinaan sistem jaminan mutu dan keamanan pada seluruh kelompok tani dan pelaku usaha.
- 6) Potensi penolakan ekspor akibat ketidaksesuaian standar mutu dan keamanan, yang berdampak pada daya saing produk perkebunan.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Indeks Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan

- 1) Meningkatkan intensitas pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya kelompok masyarakat non-binaan, terkait penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan.
- 2) Memperkuat sosialisasi dan pelatihan mengenai standar mutu dan keamanan (SNI), termasuk praktik pascapanen, pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan yang sesuai standar.
- 3) Mendorong *penerapan Good Agricultural Practices (GAP)* dan *Good Handling Practices (GHP)* secara konsisten pada seluruh komoditas strategis.
- 4) Memperluas cakupan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terakreditasi KAN untuk meningkatkan representativitas dan akurasi indeks.
- 5) Memperkuat peran Petugas Pengambil Contoh (PPC) dalam memastikan kualitas sampel serta ketertelusuran asal produk.
- 6) Mengintegrasikan hasil pengujian mutu dan keamanan sebagai dasar penentuan lokasi dan kelompok sasaran pembinaan berikutnya.
- 7) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengawasan dan fasilitasi penerapan standar mutu.

- 8) Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan sistem sertifikasi mutu dan keamanan pangan sebagai bagian dari peningkatan daya saing ekspor.

5. Sasaran Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Perkebunan

Peningkatan volume ekspor merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam memperkuat daya saing produk perkebunan nasional di pasar internasional. Rata-rata volume ekspor komoditas perkebunan menunjukkan kemampuan sektor perkebunan dalam memenuhi permintaan dunia secara berkelanjutan, sekaligus mencerminkan efektifitas kebijakan pengembangan produksi, peningkatan mutu, dan perluasan akses pasar ekspor. Meningkatnya rata-rata volume ekspor komoditas perkebunan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa negara, memperluas peluang pasar, serta mendorong peningkatan pendapatan pekebun dan pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan. Capaian sasaran meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 107. Capaian Sasaran Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Perkebunan

Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Perkebunan				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5-1	Volume ekspor komoditas perkebunan	38.224 ribu ton	37.610 ribu ton	98,39%

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

a. Volume Ekspor Komoditas Perkebunan

Indikator kinerja volume ekspor komoditas perkebunan dihitung berdasarkan volume ekspor komoditas perkebunan dengan menggunakan data volume ekspor yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan diolah oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin). Komoditas yang dijadikan target adalah kelapa, karet, kelapa sawit, kopi, teh, lada, tembakau, kakao, cengkeh, vanili, kapas, pala, kayu manis, tebu, pinang, jambu mete, sagu, dan nilam. Volume ekspor perkebunan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Volume Ekspor} = \frac{\text{Jumlah Total Volume ekspor komoditas kelapa, sagu, kopi, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, vanili, teh, kelapa sawit, tebu, jambu mete, tembakau, kapas, nilam, pinang, kayu manis}}{\text{Target}}$$

Tabel 108. Capaian Volume Ekspor Komoditas Perkebunan

IK 5-1		Volume Ekspor Komoditas Perkebunan		
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
38.224 ribu ton	37.610 ribu ton	98,39	38.994 ribu ton	96,45

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Indikator kinerja volume ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 38.224 ribu ton. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengumpulan data, realisasi volume ekspor komoditas perkebunan tercatat sebesar 37.610 ribu ton, sehingga

mencapai 98,39% atau termasuk dalam kategori berhasil. Apabila dikaitkan dengan target akhir renstra sebesar 38.994 ribu ton, realisasi tahun 2025 telah mencapai 96,45%.

Data yang digunakan dalam perhitungan adalah volume ekspor periode Januari sampai dengan November 2025, dikarenakan sampai dengan LAKIN ini disusun, belum terdapat data volume ekspor untuk bulan Desember, sehingga capaian akan meningkat apabila ditambah volume ekspor Desember 2025. Data volume ekspor untuk masing-masing komoditas sebagai berikut:

Tabel 109. Volume Ekspor Komoditas Perkebunan Tahun 2025

NO	Komoditas	Total Volume Ekspor (ribu ton)
1	Kelapa	2.281
2	Karet	1.579
3	Kelapa Sawit	32.450
4	Kopi	474
5	T e h	28
6	Lada	32
7	Tembakau	19
8	Kakao	317
9	Cengkeh	37
10	Panili	0
11	Kapas	30
12	Pala	26
13	Kayu Manis	24
14	Tebu	0
15	Pinang	217
16	Jambu Mete	70
17	Sagu	14
18	Nilam	12
TOTAL		37.610

Sumber : Badan Pusat Statistik

Capaian indikator ini didukung oleh ketersediaan bahan baku yang memadai, perbaikan tata kelola penanganan pascapanen dan pengolahan, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar mutu dan persyaratan perdagangan internasional. Selain itu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha serta dukungan kebijakan perdagangan turut mendorong kelancaran ekspor komoditas perkebunan unggulan.

Realisasi volume ekspor dipengaruhi fluktuasi harga komoditas global yang mempengaruhi permintaan, standar keberlanjutan di negara tujuan ekspor. Selain itu penurunan produksi beberapa komoditas perkebunan akibat faktor iklim juga membatasi volume ekspor yang dapat dicapai. Beberapa komoditas unggulan perkebunan sampai Bulan November 2025 juga tercatat mengalami penurunan volume ekspor pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan volume ekspor terlihat pada hampir semua komoditas seperti kelapa, karet, kelapa sawit, Teh, Lada, Tembakau, Kakao, Cengkeh, Panili, Kapas, kayu manis, kacang mete, dan nilam.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Volume Ekspor Komoditas Perkebunan

- 1) Ketersediaan bahan baku komoditas perkebunan yang relatif memadai di sebagian besar sentra produksi.
- 2) Perbaikan tata kelola penanganan pascapanen dan pengolahan yang meningkatkan kesiapan produk untuk pasar ekspor.

- 3) Peningkatan kepatuhan terhadap standar mutu, sanitari-fitosanitari, dan persyaratan perdagangan internasional.
- 4) Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam fasilitasi produksi, sertifikasi, dan promosi ekspor.
- 5) Dukungan kebijakan perdagangan dan diplomasi ekonomi yang membuka serta menjaga akses pasar ekspor.
- 6) Peran aktif pelaku usaha dalam menjaga kontinuitas pasokan dan memperluas jejaring pasar luar negeri.
- 7) Sistem data ekspor yang lebih tertata melalui pemanfaatan data BPS yang diolah Pusdatin untuk pemantauan kinerja.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Volume Ekspor Komoditas Perkebunan

- 1) Fluktuasi harga komoditas global yang menurunkan daya tarik ekspor dan memengaruhi permintaan dari negara tujuan.
- 2) Penerapan standar keberlanjutan yang semakin ketat di negara tujuan ekspor sehingga membatasi volume ekspor tertentu.
- 3) Penurunan produksi beberapa komoditas akibat faktor iklim (cuaca ekstrem, kekeringan, dan gangguan musim).
- 4) Penurunan volume ekspor sejumlah komoditas unggulan hingga November 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, antara lain: kelapa, karet, kelapa sawit, teh, lada, tembakau, kakao,

cengkeh, vanili, kapas, kayu manis, jambu mete, dan nilam.

- 5) Ketergantungan pada periode Januari–November 2025 dalam perhitungan realisasi, sehingga capaian belum mencerminkan kinerja penuh satu tahun.
- 6) Keterbatasan diversifikasi pasar tujuan ekspor yang membuat ekspor rentan terhadap gejolak permintaan di pasar utama.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Volume Ekspor Komoditas Perkebunan

- 1) Penguatan program peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan melalui peremajaan, intensifikasi, dan adaptasi iklim.
- 2) Peningkatan kapasitas pekebun dan pelaku usaha dalam penerapan standar mutu dan sertifikasi keberlanjutan.
- 3) Perluasan dan diversifikasi pasar ekspor ke negara non-tradisional untuk mengurangi ketergantungan pada pasar utama.
- 4) Penguatan promosi dagang dan diplomasi ekonomi untuk menjaga serta membuka akses pasar baru.
- 5) Peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok ekspor guna menekan biaya dan meningkatkan daya saing harga.
- 6) Optimalisasi pemanfaatan data ekspor yang lebih real time untuk pengambilan kebijakan yang responsif.

- 7) Penguatan kolaborasi pusat, daerah dan pelaku usaha dalam menjaga kontinuitas pasokan dan kualitas produk ekspor.

6. Sasaran Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Perkebunan Unggulan yang Telah Menerapkan Hilirisasi

Sasaran Program Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi, merupakan sasaran program yang diarahkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan unggulan melalui pengembangan kegiatan hilirisasi.

Pencapaian Sasaran Program tersebut diukur menggunakan Indikator Kinerja Program Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan. Indikator ini dirancang untuk mengukur tingkat penerapan hilirisasi komoditas perkebunan unggulan berdasarkan peningkatan jumlah jenis produk olahan yang dihasilkan dibandingkan dengan kondisi sebelum dilakukan hilirisasi. Capaian sasaran meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi dapat dilihat pada Tabel 110.

Tabel 110. Capaian Sasaran Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Perkebunan Unggulan yang Telah Menerapkan Hilirisasi

Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Perkebunan Unggulan yang Telah Menerapkan Hilirisasi				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6-1	Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan	Nilai 1,3	Nilai 1,43	110,00%

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

a. Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan

Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan mencerminkan sejauh mana komoditas perkebunan telah mengalami proses pengolahan yang menghasilkan produk bernilai tambah, baik pada skala usaha tani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pelaku usaha, maupun kelembagaan ekonomi petani lainnya. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menilai dari aspek kuantitas produk olahannya, tetapi juga melihat kualitasnya. Komoditas perkebunan yang menjadi ruang lingkup pengukuran Indeks Hilirisasi meliputi kelapa, sagu, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh, tebu, dan jambu mete.

Pengukuran Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan data dan bukti pendukung yang diperoleh dari pelaku usaha dan kelembagaan ekonomi petani di tingkat lapangan. Bukti realisasi atau pemenuhan Indikator Kinerja Aktivitas (IKA) dalam pengukuran Indeks Hilirisasi antara lain berupa Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), izin edar MD terkait produk hasil hilirisasi, sertifikat HACCP, SPPT-SNI, bukti penerapan sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan lainnya, serta dokumen pendukung berupa invoice penjualan produk hasil hilirisasi.

Perhitungan Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah jenis produk komoditas perkebunan pada kondisi sebelum penerapan hilirisasi
2. Menghitung jumlah jenis produk olahan komoditas perkebunan yang dihasilkan setelah penerapan hilirisasi
3. Menghitung nilai Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan dengan membandingkan jumlah jenis produk olahan komoditas perkebunan yang telah dihilirisasi dengan jumlah jenis produk komoditas perkebunan sebelum di hilirisasi

$$\text{Indeks Hilirisasi} = \frac{\text{Jumlah jenis produk olahan perkebunan yang telah di hilirisasi}}{\text{Jumlah jenis produk perkebunan sebelum di hilirisasi}}$$

Nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan meningkatnya tingkat penerapan hilirisasi, diversifikasi produk dan nilai tambah produk perkebunan unggulan.

Tabel 111. Capaian Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan

IK 6-1		Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan		
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
Nilai 1,3	Nilai 1,43	110,00	Nilai 2,2	65,00

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan pada Tahun 2025 mencapai 1,43. Dengan demikian, tingkat capaian

kinerja mencapai 110% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan hilirisasi komoditas perkebunan unggulan pada Tahun 2025 sangat berhasil. Hal tersebut bermakna bahwa terjadi peningkatan diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah, serta perpanjangan rantai nilai. Apabila dikaitkan dengan target akhir renstra sebesar nilai indeks 2,2, realisasi tahun 2025 baru mencapai 65%.

Pada tahun 2025, perhitungan Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan dilakukan pada tujuh komoditas perkebunan unggulan, yaitu kopi, sagu, kakao, lada, tebu, cengkeh, dan kelapa. Pada kondisi sebelum penerapan hilirisasi, jumlah jenis produk komoditas perkebunan yang menjadi dasar penghitungan tercatat sebanyak 7 jenis produk. Setelah penerapan hilirisasi, jumlah jenis produk olahan yang dihasilkan meningkat menjadi 10 jenis produk olahan. Berdasarkan perbandingan tersebut, nilai Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan pada Tahun 2025 mencapai 1,43, yang diperoleh dari rasio antara jumlah produk olahan sesudah hilirisasi terhadap jumlah produk sebelum hilirisasi.

Secara komoditas, penerapan hilirisasi menunjukkan variasi tingkat pengolahan. Komoditas kopi mengalami peningkatan paling signifikan, dari satu jenis produk awal berupa cherry menjadi tiga jenis produk olahan, yaitu green bean, roasted bean, dan kopi bubuk, sehingga menghasilkan nilai indeks sebesar 3,00. Komoditas kelapa juga menunjukkan peningkatan nilai tambah

melalui pengolahan buah kelapa menjadi kopra dan gula semut kelapa dengan nilai indeks 2,00. Selain itu, pada komoditas sagu, kakao, lada, tebu, dan cengkeh masing-masing mengalami peningkatan dari awal produk mentah menjadi satu jenis produk olahan, sehingga menghasilkan nilai indeks 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan hilirisasi yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan unggulan, meskipun masih banyak yang perlu dibenahi untuk mengoptimalkan kegiatan hilirisasi.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan

Keberhasilan pencapaian Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain perkembangan teknologi pengolahan komoditas perkebunan unggulan, semakin optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan, serta penguatan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha pengolahan hasil perkebunan.

Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan kebijakan hilirisasi komoditas perkebunan, turut mendorong peningkatan kinerja hilirisasi secara lebih terukur dan terintegrasi.

Sebagai langkah penguatan ke depan, dilakukan penyempurnaan metodologi pengukuran Indeks Hilirisasi, peningkatan kualitas data dan pelaporan, serta penguatan pendampingan kepada pelaku usaha dan

petani agar hasil pengolahan komoditas perkebunan terus meningkat secara berkelanjutan.

Capaian Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan Tahun 2025 didukung oleh berbagai program dan kegiatan, antara lain fasilitasi pengolahan hasil perkebunan, peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan, penguatan kelembagaan usaha, serta dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan unggulan.

Sinergi antar program dan kegiatan tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan hasil pengolahan komoditas perkebunan dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan hilirisasi di tingkat pusat dan daerah.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan

- 1) Cakupan komoditas yang diukur masih terbatas (7 dari 9 komoditas ruang lingkup), sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan potensi hilirisasi seluruh komoditas perkebunan unggulan.
- 2) Variasi tingkat hilirisasi antar komoditas masih timpang; peningkatan signifikan hanya terjadi pada komoditas tertentu (misalnya kopi dan kelapa), sementara komoditas lain baru menghasilkan satu jenis produk olahan.

- 3) Penerapan hilirisasi pada sebagian pelaku usaha dan kelembagaan ekonomi petani masih bersifat dasar, dengan diversifikasi produk yang rendah.
- 4) Keterbatasan kapasitas teknologi pengolahan, sarana-prasarana, dan permodalan di tingkat usaha tani dan UMKM perkebunan.
- 5) Proses perizinan dan sertifikasi mutu/keamanan pangan (SPP-IRT, MD, HACCP, SNI) masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha.
- 6) Sistem pengumpulan data dan bukti pendukung hilirisasi di lapangan belum sepenuhnya terstandar dan terdigitalisasi.
- 7) Keterbatasan akses pasar dan jejaring kemitraan yang berdampak pada keberlanjutan produksi dan penjualan produk olahan.
- 8) Rendahnya pemanfaatan inovasi produk dan pengemasan yang bernilai tambah tinggi.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan

- 1) Memperluas cakupan pengukuran Indeks Hilirisasi ke seluruh komoditas unggulan (termasuk pala dan jambu mete) secara bertahap.
- 2) Mendorong diversifikasi produk olahan pada komoditas yang masih bernilai indeks rendah melalui pendampingan teknis dan inovasi produk.
- 3) Penguatan kapasitas pelaku usaha dan kelembagaan ekonomi petani melalui pelatihan teknologi pengolahan, manajemen usaha, dan pemasaran.

- 4) Fasilitasi akses permodalan dan peralatan pengolahan skala UMKM untuk mempercepat proses hilirisasi.
- 5) Penyederhanaan dan percepatan layanan perizinan serta sertifikasi mutu dan keamanan pangan melalui integrasi lintas sektor.
- 6) Pengembangan sistem pendataan dan pelaporan hilirisasi berbasis digital untuk meningkatkan akurasi, keterlacakan, dan efisiensi monitoring.
- 7) Penguatan kemitraan dengan industri, off-taker, dan platform pemasaran untuk memperluas akses pasar produk olahan.
- 8) Peningkatan promosi dan branding produk hilirisasi perkebunan unggulan di pasar domestik dan ekspor.
- 9) Replikasi praktik baik (best practices) dari komoditas dengan indeks tinggi (misalnya kopi dan kelapa) ke komoditas lainnya.
- 10) Penajaman indikator agar tidak hanya berbasis jumlah jenis produk, tetapi juga memasukkan bobot kualitas, volume produksi, dan nilai ekonomi produk olahan.

7. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang Baik, Transparan dan Akuntabel

Capaian sasaran meningkatnya indeks harga yang diterima pekebun dapat dilihat pada Tabel 112.

Tabel 112. . Capaian Sasaran Meningkatnya Indeks Harga Yang Diterima Pekebun

Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang Baik, Transparan dan Akuntabel				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7-1	Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Perkebunan	Indeks 0,83	Indeks 0,89	107,23%

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

a. Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Perkebunan

Indeks tata kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan merepresentasikan tata kelola birokrasi di lingkup Ditjen Perkebunan sebagai bagian yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Indeks tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Perkebunan diukur berdasarkan 5 parameter meliputi :

- 1) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan
- 2) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan

- 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perkebunan
- 4) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Perkebunan
- 5) Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan

Formulasi Perhitungan:

$$(WTL\ 1\ x\ (TL\ 1/100)) + (WTL\ 2\ x\ (TL\ 2/100)) + (WIKPA\ x\ (IKPA/100)) + (WIKM\ x\ (IKM/4)) + (WLINT\ x\ (LINT/4))$$

Keterangan:

- WTL 1= Bobot pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan (20%)
- TL 1 = Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan
- WTL 2= Bobot pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan (20%)
- TL 2 = Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan
- WIKPA= Bobot Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perkebunan (20%)
- IKPA= Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perkebunan
- WIKM= Bobot Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Perkebunan (20%)

- IKM= Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Perkebunan
- WLINT= Bobot kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan (20%)
- LINT= Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan.

Tabel 113. Capaian Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Perkebunan

IK 7-1 Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Perkebunan				
Tahun 2025			Renstra	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
Indeks 0,83	Indeks 0,89	107,23	Indeks 0,85	104,71

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Perkebunan dengan target Indeks 0,83, pada Tahun 2025 terealisasi Indeks 0,89 atau capaian 107,23%. Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai Indeks 0,89 atau 104,71% dari target yang direncanakan yaitu indeks 0,85. Hal ini menunjukkan target akhir renstra telah terpenuhi dan bahkan terlampaui. Indeks tersebut diperoleh dari:

Tabel 114. Perhitungan Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Perkebunan

No	Parameter	Target	Realisasi	Bobot Capaian
1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	85	90,72	0,18
2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	90	100	0,20
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan	88	84,56	0,17
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan	3,1	3,63	0,18
5	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	3	3,25	0,16
Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Perkebunan				0,89

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Semakin tinggi indeks tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Perkebunan, maka semakin baik tata kelola birokrasinya serta semakin tinggi dukungan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Tujuan reformasi birokrasi adalah membentuk organisasi yang

agile, efektif dan efisien serta peningkatan kualitas dan perbaikan citra pelayanan publik. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan fondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal. Dari waktu ke waktu, pemerintah dituntut untuk senantiasa berinovasi meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, penguatan pendampingan

program dan anggaran secara berkala di lingkup Ditjen Perkebunan, dan koordinasi lintas program yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Perkebunan

Sekretariat Ditjen Perkebunan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pemenuhan indeks tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Perkebunan, antara lain dengan tercapainya:

- 1) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan dengan capaian 106,62% (realisasi sebesar 90,63% dari target 85%). Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan perbaikan dari rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan organisasi. Temuan-temuan laporan hasil audit oleh Inspektorat Jenderal dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan hasil audit yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan internal organisasi
- 2) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan

fungsi Ditjen Perkebunan dengan capaian 111,11% (realisasi sebesar 100% dari target 90%). Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas terciptanya tujuan instansi, aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Pengendalian kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari penyelesaian rekomendasi LHP BPK.

- 3) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Perkebunan dengan capaian 121,00% (realisasi sebesar 3,63 dari target 3). Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik perlu

disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat mutu pelayanan.

- 4) Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan capaian 108,33% (realisasi sebesar 3,25 dari target 3). Survei ini dilakukan untuk memperoleh *feedback* dari pegawai atas layanan yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan pegawai atas layanan yang diberikan pada suatu tahun dan dapat digunakan untuk perbaikan layanan berikutnya. Dalam rangka mencapai pelayanan publik yang dapat memuaskan para pengguna layanan dan sebagai bentuk *continuous improvement*.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Indikator Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Perkebunan

- 1) Perubahan kebijakan anggaran, mempengaruhi proses penyusunan kegiatan dan penganggaran TA 2025, dan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan sehingga banyak terjadi penyesuaian perencanaan dan revisi DIPA atau Petunjuk Operasional Kegiatan. Revisi DIPA yang berulang kali karena refocusing anggaran yang mengakibatkan perencanaan penarikan dana tidak sejalan dengan realisasi anggaran. Selain itu juga revisi DIPA tidak selalu diikuti dengan revisi halaman III DIPA.

- 2) Ketidakakuratan Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga terjadi selisih (deviasi) yang signifikan antara rencana penarikan bulanan di Halaman III DIPA dengan realisasi aktual di lapangan. Hal ini biasanya disebabkan oleh persiapan administrasi kegiatan yang belum matang.
- 3) Frekuensi revisi anggaran yang tinggi seperti kebijakan Anggaran Biaya Tambahan (ABT), refocusing, dan pergeseran anggaran yang dilakukan di semester II tahun berjalan mengganggu stabilitas perencanaan yang telah disusun.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Perkebunan

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu identifikasi sejak awal terkait kelengkapan informasi kinerja agar permasalahan dapat segera diatasi.
- 2) Melakukan penyusunan RPD secara presisi dan segera melakukan revisi RPD pada halaman III DIPA jika diperlukan.
- 3) Monitoring ketercapaian capaian pada masing-masing unit kerja sepanjang tahun dengan cara berkoordinasi, asistensi/melakukan pendampingan, dan berkoordinasi dengan petugas yang mengisi capaian output pada aplikasi SAKTI (modul komitmen).

- 4) Melakukan pemantauan pencapaian output kegiatan secara berkala.
- 5) Melakukan akselerasi penyerapan anggaran mulai sejak awal tahun anggaran.
- 6) Melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang sulit direalisasikan.
- 7) Peningkatan akurasi data capaian yang dilaporkan agar pelaporan semakin akurat dan informasi dapat diandalkan.

B. Akuntabilitas Kinerja Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan perkebunan, alokasi anggaran untuk Ditjen Perkebunan TA 2025 sebesar Rp 331.777.059.000. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, terjadi berbagai dinamika yang menyebabkan perubahan pagu Ditjen Perkebunan TA 2025. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu penambahan anggaran melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan untuk peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas pertanian, penambahan pagu yang bersumber dari Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN), serta berbagai kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan.

1. Pagu Ditjen Perkebunan TA 2025 pada DIPA awal yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 adalah sebesar Rp 331.777.059.000 dengan blokir sebesar Rp 252.746.385.000 pada belanja operasional dan non operasional karena belum mendapat persetujuan DPR, tidak sesuai standar biaya, kegiatan belum relevan dengan output,

serta belum dilengkapi dasar hukum, dokumen pendukung, perencanaan kebutuhan barang, dan referensi harga.

2. Pada tanggal 21 Februari 2025 dilakukan revisi anggaran berupa pergeseran anggaran yang mengakibatkan penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO PN, pergeseran anggaran antar RO KRO, dan pergeseran anggaran terkait belanja bantuan pemerintah (akun 526). Ditjen Perkebunan juga melakukan pembukaan blokir, sehingga blokir berkurang dari Rp 252.746.385.000 menjadi Rp 41.518.894.000, dimana blokir sebesar Rp 31.731.424.000 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sedangkan blokir sebesar Rp 9.787.470.000 dikarenakan tidak sesuai standar biaya, belum relevan dengan output, serta belum dilengkapi dasar hukum dan dokumen pendukung. Pagu Direktorat Jenderal Perkebunan tetap sebesar Rp 331.777.059.000.
3. Pada tanggal 19 Maret 2025 dilakukan revisi anggaran berupa pergeseran anggaran yang mengakibatkan penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO PN, pergeseran anggaran antar RO KRO, dan pergeseran anggaran terkait belanja bantuan pemerintah (akun 526). Ditjen Perkebunan juga melakukan pembukaan blokir, sehingga blokir berkurang dari Rp 41.518.894.000 menjadi Rp 32.319.224.000. Pagu Direktorat Jenderal Perkebunan tetap sebesar Rp 331.777.059.000.

4. Pada tanggal 30 April 2025 dilakukan revisi anggaran berupa pergeseran anggaran yang mengakibatkan penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO PN, pergeseran anggaran antar RO KRO, dan pergeseran anggaran terkait belanja bantuan pemerintah (akun 526). Ditjen Perkebunan juga melakukan pembukaan blokir, sehingga blokir berkurang dari Rp 32.319.224.000 menjadi Rp 19.848.974.000. Pagu Direktorat Jenderal Perkebunan tetap sebesar Rp 331.777.059.000.
5. Pada tanggal 2 Juni 2025 terdapat penambahan Hibah Langsung Luar Negeri dari FAO dan UNDP untuk proyek Food Systems, Land Use and Restoration (FOLUR) sebesar Rp 15.256.405.000. Blokir tetap sebesar Rp 19.848.974.000 Pagu Direktorat Jenderal Perkebunan bertambah menjadi sebesar Rp 347.033.464.000.
6. Pada tanggal 3 Juli 2025 Ditjen Perkebunan juga melakukan pembukaan blokir, sehingga blokir berkurang dari Rp19.848.974.000 menjadi Rp7.612.024.000. Pagu Direktorat Jenderal Perkebunan tetap sebesar Rp 347.033.464.000.
7. Pada tanggal 27 Agustus 2025, dalam rangka peningkatan produksi gula melalui pengembangan kawasan tebu dilakukan refocusing/realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2025, pagu Ditjen Perkebunan bertambah sebesar Rp 200.000.000.000 sehingga total Pagu Ditjen Perkebunan menjadi sebesar Rp 547.033.464.000 dan perubahan blokir dari semula sebesar Rp 7.612.024.000 menjadi Rp 5.826.633.000.

8. Pada tanggal 18 September 2025, dalam rangka Pemenuhan Belanja Pegawai pengadaan CPNS dan PPPK tahap I lingkup Kementan TA 2025, dilakukan refocusing/realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2025, sehingga pagu Ditjen Perkebunan bertambah dari Rp547.033.464.000 menjadi Rp548.805.502.000 dan perubahan blokir dari semula sebesar Rp5.826.633.000 menjadi Rp785.700.000.
9. Pada tanggal 21 September 2025, dalam rangka Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Komoditas Pertanian telah disetujui usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Pertanian melalui surat a.n Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor: S-251/MK/AG/2025 tanggal 19 September 2025, sehingga pagu DIPA Ditjen Perkebunan meningkat dari Rp548.805.502.000 menjadi Rp3.009.271.983.000.
10. Pada tanggal 8 Oktober 2025, dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas pertanian Kementerian Pertanian TA 2025, dilakukan pemanfaatan anggaran internal Kementan yang dalam hal ini Sekretariat Jenderal sebesar Rp 65.671.088.000, sehingga pagu DIPA Ditjen Perkebunan meningkat dari Rp 3.009.271.983.000 menjadi Rp 3.074.943.071.000, namun blokir bertambah dari sebesar Rp 785.700.000 menjadi Rp66.456.788.000 dikarenakan tidak sesuai Renja dan belum dilengkapi dasar hukum serta dokumen pendukung.
11. Pada tanggal 21 Oktober 2025, Ditjen Perkebunan melakukan pembukaan blokir, sehingga blokir berkurang

Rp66.456.788.000 menjadi Rp785.700.000. Pagu Direktorat Jenderal Perkebunan tetap sebesar Rp 3.074.943.071.000.

12. Pada tanggal 5 November 2025, dilakukan revisi administrasi berupa ralat volume output RO Kawasan Pala dari 8.000 ha menjadi 3.700 ha. Pagu Direktorat Jenderal Perkebunan tetap sebesar Rp 3.074.943.071.000.

13. Pada tanggal 13 November 2025, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi pagu Hibah Langsung Luar Negeri kegiatan FOLUR dari semula Rp15.256.405.000 menjadi Rp4.626.329.000. Pengurangan anggaran dilakukan akibat dari kegagalan proses pengadaan dan keterbatasan waktu pelaksanaan, sehingga pagu Direktorat Jenderal Perkebunan berkurang menjadi sebesar Rp 3.064.312.995.000.

14. Pada tanggal 18 Desember 2025, dilakukan revisi anggaran berupa perubahan antar-lokasi kegiatan RO Prioritas Nasional (Kawasan Tebu), dan pergeseran anggaran terkait belanja bantuan pemerintah (akun 526), dikarenakan kendala gagal lelang benih, curah hujan tinggi, mundurnya CPCL, dan berhentinya giling pabrik gula. Lokasi baru dipilih dari CPCL yang telah bermitra dengan pabrik gula atau petani yang beralih ke tebu. Pagu Direktorat Jenderal Perkebunan tetap sebesar Rp 3.064.312.995.000.

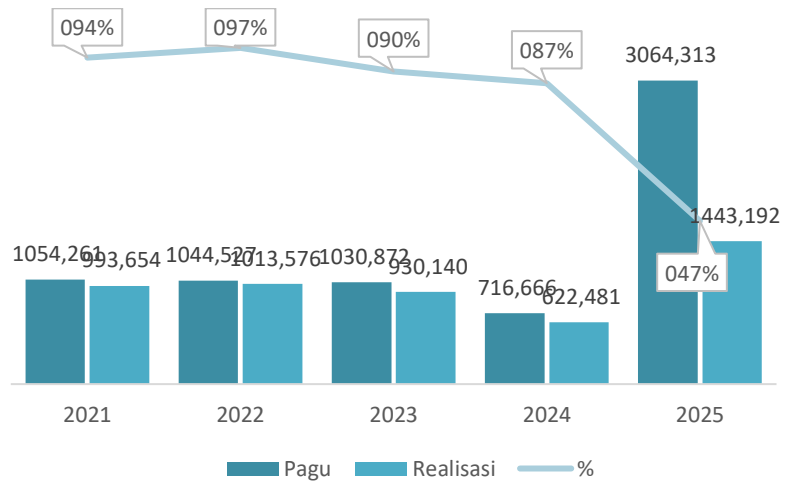
Dengan berbagai perubahan tersebut, pada akhir tahun anggaran 2025, pagu Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi sebesar Rp 3.064.312.995.000 atau meningkat lebih dari 800% dari pagu awal. Anggaran Ditjen Perkebunan pada tahun 2025

mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan anggaran di tahun 2025 dikarenakan adanya kebijakan peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas pertanian sebagai tindak lanjut arahan dari Bapak Presiden RI.

Pagu anggaran Ditjen Perkebunan tahun 2025 dialokasikan di 5 Satuan Kerja, yang terdiri atas 1 Satker Pusat, dan 4 Satker Unit Pelaksana Teknis untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Ditjen Perkebunan. Namun dari anggaran tersebut, terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp 785.700.000 sehingga anggaran yang dapat dipergunakan adalah sebesar Rp 3.063.527.295.000. Anggaran tersebut 95,38% digunakan untuk belanja PN (Prioritas Nasional) dan 4,62% untuk belanja non PN.

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Ditjen Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatannya sehingga dari alokasi sebesar Rp 3.064.312.995.000 telah direalisasikan sebesar Rp 1.443.192.464.153 (47,10%). Sisa anggaran yang tidak dapat diserap adalah sebesar Rp 1.621.120.530.847 dimana sebesar Rp 785.700.000 merupakan blokir, dan sebesar Rp 1.620.334.830.847 merupakan sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan.

Pagu dan Realisasi Ditjen Perkebunan (dalam miliar rupiah) selama 5 Tahun terakhir dari Tahun 2021 hingga Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada gambar 6.



Gambar 6. Realisasi Anggaran Ditjen Perkebunan Tahun 2021-2025

Perkembangan pagu anggaran pada periode 2021–2024 cenderung menurun, kemudian mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2025. Persentase realisasi anggaran pada tahun 2021–2024 cukup tinggi dan konsisten, meskipun menunjukkan tren penurunan secara bertahap, namun pada tahun 2025 terjadi penurunan yang sangat tajam. Persentase realisasi anggaran Ditjen Perkebunan tahun anggaran 2025 menurun sebesar 39,76% dari tahun sebelumnya (YoY) sebesar 86,86%.

Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan rekening untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember pada Tahun Anggaran dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Total RPATA Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp944.470.941.407 yang terdapat pada satuan kerja pusat serta UPT di daerah sebagaimana tertuang pada tabel 115.

Tabel 115. Rekapitulasi RPATA Ditjen Perkebunan

NO	KEGIATAN RPATA	ALOKASI RPATA (RP)	PEMBAYARAN (RP)	%	SISA	KETERANGAN
1	Kawasan Kelapa	29.871.789.188	15.133.380.538	50,66	14.738.408.650	
2	Kawasan Sagu	4.234.931.134	3.910.367.134	92,34	324.564.000	
3	Layanan Perkantoran	171.782.326	171.782.326	100,00	-	Sudah selesai dilaksanakan
4	Kawasan Lada	6.125.516.262	5.329.516.263	87,01	795.999.999	
5	Kawasan Pala	10.685.328.791	7.932.634.071	74,24	2.752.694.720	
6	Kawasan Tebu	304.962.195.642	192.603.280.901	63,16	110.714.387.838	terdapat SP2D penihilan sebesar Rp 1.644.526.903
7	Kawasan Kopi	68.864.944.921	31.913.195.501	46,34	36.951.749.420	
8	Kawasan Kakao	56.227.716.145	29.476.735.145	52,42	26.740.436.000	terdapat SP2D penihilan sebesar Rp 10.545.000
9	Kawasan Jambu Mete	5.038.122.000	2.762.940.001	54,84	2.275.181.999	
10	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan - Sagu	427.749.998	427.749.998	100,00	-	Sudah selesai dilaksanakan
11	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	53.813.865.000	8.250.000.000	15,33	45.563.865.000	
12	Produksi Benih Perkebunan	404.047.000.000	115.763.900.000	28,65	288.283.100.000	
JUMLAH		944.470.941.40	413.675.481.878		529.140.387.626	

Sumber : OM SPAN, 2025

Sampai dengan 27 Januari 2026 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp413.675.481.878 atau 43,8% dari total anggaran RPATA. Sisa saldo RPATA Direktorat Jenderal Perkebunan

yang belum dibayarkan akan diselesaikan melalui percepatan pemenuhan persyaratan administratif dan teknis, khususnya penyelesaian dokumen serah terima dan verifikasi pekerjaan. Langkah ini dilakukan secara terkoordinasi antara satuan kerja pusat dan UPT di daerah untuk memastikan pembayaran dapat dilaksanakan tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Kinerja realisasi Ditjen Perkebunan tahun 2025 secara umum menurun daripada realisasi pada tahun 2024 dikarenakan adanya *refocusing* serta Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Komoditas Pertanian yang baru diterima pada triwulan III, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi sangat terbatas. Keterbatasan waktu tersebut berdampak pada banyak kontrak yang menimbulkan sisa dan tidak sempat dimanfaatkan kembali, serta tidak terlaksananya kegiatan pada beberapa lokus sehingga harus berulang kali dilakukan perubahan lokasi kegiatan. Terdapat juga berbagai kendala teknis dan administratif dalam pengadaan barang/jasa, seperti kegagalan minikompetisi, keterbatasan penyedia dan ketersediaan benih, serta tertundanya pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan akibat adanya transisi regulasi melalui Permentan Nomor 2 Tahun 2025. Penyaluran bantuan pemerintah (banpem) juga tertunda hingga tahun 2026 karena waktu pengadaan yang sudah sangat terbatas dengan akhir tahun anggaran serta adanya bencana alam di wilayah Sumatera.

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran program yang ditetapkan, Ditjen Perkebunan melaksanakan Program Nilai

Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Dari alokasi anggaran Ditjen Perkebunan sebesar Rp 3.064.312.995.000 telah direalisasikan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp 1.338.125.633.456 (45,28%) dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp 105.066.830.697 (96,39%). Secara rinci, realisasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 116 sebagai berikut.

Tabel 116. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

Program	Pagu	Realisasi	%	Blokir	Sisa
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2.955.313.598.000	1.338.125.633.456	45,28	0	1.617.187.964.544
Program Dukungan Manajemen	108.999.397.000	105.066.830.697	96,39	785.700.000	3.146.866.303
DITJEN PERKEBU N-AN	3.064.312.995.000	1.443.192.464.153	47,10	785.700.000	1.620.334.830.847

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

Realisasi program Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sangat rendah dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan akibat kebijakan *refocusing* dan penerimaan ABT pada triwulan III berdampak signifikan pada tidak optimalnya pemanfaatan sisa kontrak serta terjadinya perubahan lokus kegiatan yang berulang. Kondisi ini diperparah oleh hambatan teknis pengadaan seperti kegagalan minikompetisi serta kelangkaan penyedia dan benih, masa transisi tata kelola akibat regulasi Permentan Nomor 2 Tahun 2025, dan kendala bencana alam di wilayah Sumatera.

Realisasi pada program Dukungan Manajemen digunakan untuk pelaksanaan 1 kegiatan sedangkan program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan secara teknis sebanyak 5 kegiatan. Secara rinci realisasi anggaran kegiatan pada kedua program tersebut dapat dilihat pada Tabel 117 sebagai berikut.

Tabel 117. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Blokir	Sisa
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2.955.313.598.000	1.338.125.633.456	45,28	-	1.617.187.964.544
Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	90.509.020.000	82.231.715.699	90,85	-	8.277.304.301
Penguatan Perlindungan Perkebunan	10.541.168.000	10.243.654.357	97,18	-	297.513.643
Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	1.811.291.962.000	678.192.224.371	37,44	-	1.133.099.737.629
Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	16.431.616.000	12.903.314.220	78,53	-	3.528.301.780
Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1.026.539.832.000	554.554.724.809	54,02	-	471.985.107.191
Program Dukungan Manajemen	108.999.397.000	105.066.830.697	96,39	785.700.000	3.146.866.303
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	108.999.397.000	105.066.830.697	96,39	785.700.000	3.146.866.303
DITJEN PERKEBUNAN	3.064.312.995.000	1.443.192.464.153	47,10	785.700.000	1.620.334.830.847

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi paling tinggi pada program Nilai Tambah dan Daya Saing

Industri adalah kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan (97,18%) dan realisasi terendah terdapat pada kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan (37,44%) diikuti oleh kegiatan Penguatan Perbenihan Perkebunan (54,02%). Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan terdapat kendala pada rendahnya minat petani karena sudah melakukan bongkar ratoon mandiri sejak Mei 2025, keterbatasan SDM dinas sehingga pengumpulan dan verifikasi CPCL menjadi lambat, kendala kelembagaan kelompok tani, kesiapan UPTD Sertifikasi serta keterbatasan pemulia dalam uji kelayakan benih tebu, dan keterlambatan penyaluran benih akibat kesiapan lahan yang belum optimal. Kegiatan Penguatan Perbenihan Perkebunan terdapat kendala keterbatasan waktu dan kegagalan proses pengadaan, keterbatasan bahan baku dan penyedia yang memenuhi syarat, serta kegagalan minikompetisi akibat dokumen penyedia tidak sesuai KAK. Selain itu terjadi efisiensi harga satuan kontrak di bawah pagu/HPS dan penyesuaian volume di lapangan yang memunculkan sisa, serta keterbatasan waktu persiapan yang menghambat pemindahan lokus dan revisi teknis kegiatan. Sementara itu, untuk penyerapan pada program Dukungan Manajemen telah direalisasikan dengan optimal dengan realisasi 96,39%. Berikut rincian realisasi anggaran Ditjen Perkebunan Tahun 2025 berdasarkan sumber dana.

Tabel 118. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%	Blokir	Sisa
RUPIAH MURNI	3.058.404.428.000	1.437.776.795.108	47,01	785.700.000	1.619.841.932.892

Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%	Blokir	Sisa
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1.282.238.000	1.084.741.164	84,60	-	197.496.836
HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	4.626.329.000	4.330.927.881	93,61	-	295.401.119

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

Realisasi anggaran berdasarkan sumber dana yang terbagi dalam 3 sumber dana yaitu Rupiah Murni dengan realisasi sebesar Rp 1.437.776.795.108 atau sebesar 47,01% dari pagu sebesar Rp 3.058.404.428.000, PNBP dengan realisasi sebesar Rp 1.084.741.164 atau sebesar 84,60% dari pagu sebesar Rp 1.282.238.000, anggaran yang bersumber dari Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp 4.626.329.000 digunakan untuk kegiatan Proyek FOLUR terkait penguatan petani swadaya melalui implementasi sistem pertanian dan produksi yang tangguh dan berkelanjutan, sekaligus peningkatan nilai tambah produk petani melalui penerapan sistem ketertelusuran dan grading, terealisasi sebesar Rp 4.330.927.881 (93,61%). Kegiatan yang bersumber dana HLLN pada tahun 2025 dilaksanakan oleh Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan. Berikut rincian realisasi anggaran Ditjen Perkebunan Tahun 2025 per jenis belanja.

Tabel 119. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Blokir	Sisa
BELANJA PEGAWAI	60.116.639.000	59.411.904.464	98,83	-	704.734.536
BELANJA BARANG	3.003.072.092.000	1.382.939.247.127	46,05	785.700.000	1.619.347.144.873

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Blokir	Sisa
BELANJA MODAL	1.124.264.000	841.312.562	74,83	-	282.951.438
DITJEN PERKEBUN-AN	3.064.312.995.000	1.443.192.464.153	47,10	785.700.000	1.620.334.830.847

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

Capaian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yang terbagi dalam tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp 54.411.904.464 atau sebesar 98,83% dari pagu sebesar Rp 60.116.639.000, belanja barang dengan realisasi sebesar Rp 1.382.939.247.127 atau sebesar 46,05% dari pagu sebesar Rp 3.003.072.092.000 dan belanja modal dengan realisasi sebesar Rp 841.312.562 atau sebesar 74,83% dari pagu sebesar Rp 1.124.264.000. Rendahnya realisasi untuk belanja barang disebabkan rendahnya realisasi bantuan pemerintah yang hanya terealisasi sebesar Rp 717.705.294.326 atau 38,90% dari alokasi sebesar Rp 1.845.067.263.000. Hal ini dikarenakan ABT yang baru diterima pada triwulan III membuat waktu pelaksanaan sangat terbatas, berdampak pada sisa kontrak, dan perubahan lokus. Selain itu juga terdapat masalah pengadaan (gagal minikompetisi, keterbatasan penyedia dan benih), transisi regulasi Permentan No 2 Tahun 2025 yang menunda pengadaan sarana prasarana pascapanen. Berdasarkan kewenangannya, secara rinci realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 120 berikut.

Tabel 120. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan

Jenis Kewenangan	Pagu	Realisasi	%	Blokir	Sisa
Kantor Pusat	2.846.363.587.000	1.266.147.156.692	44,48	785.700.000	1.579.430.730.308
Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	84.936.140.000	77.357.669.925	91,08	-	7.578.470.075
Direktorat Pelindungan Perkebunan	5.420.736.000	5.384.069.862	99,32	-	36.666.138
Sekretariat Ditjen Perkebunan	63.947.982.000	61.449.029.630	96,09	785.700.000	1.713.252.370
Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan	1.661.496.442.000	565.653.771.174	34,04	-	1.095.842.670.826
Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan	16.431.616.000	12.903.314.220	78,53	-	3.528.301.780
Direktorat Perbenihan Perkebunan	1.014.130.671.000	543.399.301.881	53,58	-	470.731.369.119
Kantor Daerah	217.949.408.000	177.045.307.461	81,23	-	40.904.100.539
BBP2TP SURABAYA	65.638.104.000	62.151.642.908	94,69	-	3.486.461.092
BBP2TP MEDAN	83.871.416.000	48.733.978.411	58,11	-	35.137.437.589
BPTP PONTIANAK	9.891.354.000	9.638.336.599	97,44	-	253.017.401
BBP2TP AMBON	58.548.534.000	56.521.349.543	96,54	-	2.027.184.457
DITJEN PERKEBUNAN	3.064.312.995.000	1.443.192.464.153	47,10	785.700.000	1.620.334.830.847

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

Pada periode tahun 2025 realisasi terendah berada pada kewenangan Kantor Pusat. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan akibat kebijakan *refocusing* serta penerimaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada Triwulan

III, yang berimplikasi pada tidak optimalnya pemanfaatan sisa kontrak dan terjadinya perubahan lokus kegiatan secara berulang. Pelaksanaan kegiatan turut terhambat oleh kendala administratif dalam proses pengadaan, keterbatasan benih, serta masa transisi tata kelola pasca-berlakunya Permentan Nomor 2 Tahun 2025, diperparah oleh faktor *force majeure* berupa bencana alam di wilayah Sumatera, mengakibatkan penundaan penyaluran fisik dan bantuan pemerintah ke tahun anggaran 2026.

Realisasi anggaran berdasarkan kewenangan yang terbagi dalam 2 kewenangan yaitu Kantor Pusat dengan realisasi sebesar Rp 1.266.147.156.692 (44,48%) dari pagu sebesar Rp 2.846.363.587.000, dengan realisasi terbesar terdapat pada Direktorat Pelindungan Perkebunan sebesar 99,32% dan terendah pada Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan sebesar 34,04%. Realisasi anggaran pada Kantor Daerah sebesar Rp 177.045.307.461 (81,23%) dari pagu sebesar Rp 217.949.408.000, dengan realisasi terbesar pada Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak sebesar 97,44% dan terendah pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan sebesar 58,11%. Realisasi BBPPTP Medan cukup rendah dikarenakan bencana alam yang menghambat akses dan penyaluran benih, keterbatasan serta ketiadaan benih (gagal terlaksananya kegiatan ABT kopi di kabupaten Gayo Luwes), kendala transportasi dan logistik seperti kelangkaan BBM. Selain itu terdapat kendala administratif dan keuangan, revisi dan pemindahan kegiatan antar wilayah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, antara lain:

1. Kendala Perencanaan, Waktu, dan Penganggaran
 - a. Masuknya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada triwulan III yang membuat waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas, serta keterbatasan sisa waktu tahun anggaran yang tidak memungkinkan optimalisasi sisa kontrak melalui revisi anggaran atau pemindahan lokus.
 - b. Keterbatasan waktu dan kendala regulasi yang menyebabkan realisasi keuangan tidak selaras dengan capaian fisik.
 - c. Tidak optimalnya realisasi honor tim pendataan, pemetaan, dan verifikasi STDB akibat keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
 - d. Efisiensi harga kontrak yang lebih rendah dari pagu/HPS sehingga menimbulkan SILPA.
 - e. Perbedaan alokasi unit cost dengan tahapan pekerjaan (khususnya pada KBD tebu) yang menyebabkan selisih biaya dan pengalihan pemeliharaan ke tahun berikutnya.
2. Kendala Pengadaan dan Penyedia
 - a. Proses pengadaan yang baru dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sehingga mempengaruhi pemenuhan volume dan spesifikasi teknis, serta berimplikasi pada tertundanya penyaluran fisik di beberapa lokasi hingga tahun 2026.
 - b. Keterbatasan jumlah penyedia yang memenuhi kualifikasi atau tidak tersedianya penyedia di wilayah tertentu.

- c. Kegagalan minikompetisi akibat ketidaksesuaian dokumen penyedia.
 - d. Pembatasan opsi penyedia untuk kegiatan di Papua akibat ketentuan Perda Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Orang Asli Papua.
3. Kendala Tata Kelola, Kelembagaan, dan Koordinasi
- a. Perubahan tugas dan fungsi sesuai Permentan Nomor 2 Tahun 2025 yang memerlukan masa transisi tata kelola, koordinasi lintas unit, dan kelembagaan, termasuk pengalihan kewenangan pengadaan sarana pascapanen dan prasarana pengolahan ke Ditjen PSP yang berdampak pada keterlambatan penetapan pejabat pengelola kegiatan.
 - b. Disharmonisasi internal maupun antarinstansi pusat–daerah serta pergantian pejabat yang menghambat koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan di daerah.
4. Kendala Minat Petani, CPCL, dan SDM Daerah
- a. Menurunnya minat petani terhadap kegiatan pengembangan kawasan tebu karena sebagian telah melakukan bongkar ratoon mandiri sejak Mei 2025, diperparah oleh pembatasan luasan maksimal 5 ha per petani dan ketidaksediaan sebagian kelompok tani untuk bergabung.
 - b. Keterbatasan SDM dinas yang menyebabkan proses pengumpulan, verifikasi, dan penerbitan CPCL berjalan lambat sehingga pemenuhan CPCL masih rendah pada saat waktu tanam mendekati akhir musim.

5. Kendala Benih, Sapropi, dan Teknis Lapangan

- a. Keterbatasan ketersediaan benih dan sarana produksi (sapropi), termasuk penurunan produksi benih robusta, berkurangnya volume kegiatan di beberapa lokus akibat dinamika lapangan, serta tidak terlaksananya kegiatan pada sebagian lokus karena kendala penyedia, regulasi, dan keterbatasan waktu.
- b. Keterbatasan jumlah pemulia tebu, tenaga PBT, kesiapan UPTD Sertifikasi, serta terbatasnya jumlah dan permodalan produsen/penangkar benih tebu yang menghambat proses uji kelayakan dan sertifikasi benih.
- c. Sebagian benih tidak lolos uji kelayakan akibat persentase luka api melebihi batas, persebaran benih lintas provinsi yang menyulitkan pengendalian mutu dan pengawasan, serta keterlambatan penyaluran benih dari penyedia akibat kesiapan lahan petani yang belum optimal.

6. Kendala Faktor Eksternal

- a. Bencana alam (khususnya di wilayah Sumatera) yang menghambat penyerahan fisik dan penyaluran bantuan meskipun realisasi keuangan telah dilakukan.

Selama tahun 2025 telah dilakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran, antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola, Kelembagaan, dan Pengendalian Internal
 - a. Penetapan Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara) serta pedoman umum/petunjuk

teknis/petunjuk operasional kegiatan paling lambat satu bulan setelah DIPA diterima.

- b. Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.
- c. Meningkatkan peran APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan pencapaian output dan tidak hanya merealisasikan anggaran.
- e. Melakukan identifikasi kendala/permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan pekerjaan/pembangunan serta melakukan mitigasi dan mencari solusi atas kendala/permasalahan tersebut.
- f. Melakukan identifikasi program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional yang harus diselesaikan.

2. Perencanaan Anggaran dan Manajemen DIPA

- a. Melakukan review DIPA awal untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker.
- b. Melakukan review DIPA secara periodik dan, apabila diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan, segera dilakukan revisi DIPA.
- c. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikannya.
- d. Melakukan update Halaman III DIPA setiap triwulan.

- e. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
 - f. Segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu.
3. Pengadaan dan Manajemen Kontrak
- a. Segera menyusun Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.
 - b. Mempercepat pelaksanaan kontrak pengadaan Produksi Benih Kopi dan Kakao melalui perubahan skema kontrak dari kontrak semai menjadi kontrak pasca semai guna mempercepat tahapan produksi hingga benih siap tanam.
4. Percepatan CPCL dan Kesiapan Lapangan
- a. Menunjuk Penanggung Jawab (PJ) untuk masing-masing lokus yang mencakup seluruh direktorat di lingkup Ditjen Perkebunan.
 - b. Menggerakkan tim secara masif turun ke lokus, baik staf yang ditugaskan maupun Direktur secara langsung, untuk mendorong pemenuhan CPCL dan mempercepat progresnya.
 - c. Melakukan pembersihan (clean and clear) data CPCL sehingga CPCL yang siap dapat segera dibuatkan dan diajukan SK, sementara kelengkapan dokumen persyaratan lain dilengkapi sambil berjalan.

- d. Menerbitkan SK CPCL secara bertahap sebagai strategi percepatan agar potensi CPCL yang sudah siap tidak perlu menunggu seluruh CPCL selesai.
 - e. Mempercepat administrasi penerima HOK agar saat benih turun ke lahan, penerima HOK sudah siap tanam sehingga distribusi benih dan penanaman dapat berjalan serempak.
 - f. Memfokuskan kegiatan ABT Tebu pada penambahan lokus-lokus baru serta memanfaatkan lahan milik TNI dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) agar kegiatan lebih efisien dan tidak terkendala ketersediaan lahan.
5. Penguatan Produksi, Sertifikasi, dan Distribusi Benih
- a. Mengerahkan seluruh tenaga pemulia yang ada di balai dan pusat penelitian serta menambah tenaga pemulia dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
 - b. Melibatkan Pemulia Benih Tanaman (PBT) Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk memperkuat kapasitas pemuliaan.
 - c. Menurunkan persentase luka api yang dipersyaratkan untuk uji kelayakan sebagai bentuk relaksasi persyaratan teknis.
 - d. Melaksanakan uji kelayakan mutu dan proses sertifikasi benih secara simultan di tingkat lokasi untuk mempercepat penetapan kelayakan dan distribusi benih ke petani.
6. Penyesuaian Regulasi
- a. Melakukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Kepmentan No. 315 Tahun 2018, yaitu:

- 1) Kepmentan No. 66 Tahun 2025 (perubahan kedua atas Kepmentan No. 315 Tahun 2018).
- 2) Kepmentan No. 148 Tahun 2025 (perubahan ketiga atas Kepmentan No. 315 Tahun 2018).

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran (output) yang dihasilkan, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu. Pengukuran efisiensi dalam kerangka Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 27 tahun 2025 tentang perubahan KMK nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran pada aspek Perencanaan Anggaran dilakukan pada level Rincian Output (RO) dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait Standar Biaya meliputi :

1. Penggunaan SBK; dan/atau
2. Efisiensi SBK

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% pada seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Tabel 121. Nilai Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK

No	Unit Eselon I	Efisiensi	
		Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	Ditjen Perkebunan	87,23	43,90

Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$NE_{Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

$$NE_{satker} = (40\% \times 87,23) + (60\% \times 43,90)$$

$$NE_{satker} = 62,10\%$$

Perhitungan nilai efisiensi ini telah mengeluarkan anggaran blokir sebesar Rp 785.700.000, sehingga dengan anggaran yang tersedia telah digunakan untuk mencapai target secara efisien.

D. Kinerja Lainnya

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga. Desain rancangan evaluasi AKIP mengalami penyesuaian dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021, yang mulai diimplementasikan pada evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021.

Penguatan SAKIP merupakan strategi dalam mempertajam pemahaman dan persepsi tentang penerapan sistem akuntabilitas kerja guna mendukung terjadinya reformasi birokrasi. Transformasi birokrasi sampai dengan tahun 2025 mencakup:

- a. Birokrasi harus efektif, efisien dan ekonomis;
- b. Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil);
- c. Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik;
- d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi;
- e. Terbangunnya budaya kinerja organisasi dan individu.

SAKIP dalam Reformasi Birokrasi meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia: Setiap individu SDM memiliki ukuran dan target kinerja. Hal tersebut akan dijadikan dasar *reward and punishment*,

- b. Organisasi: Menciptakan organisasi yang mengetahui kinerja yang akan dihasilkan;
- c. Tata laksana: Menciptakan proses bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja karena akan memberikan penjabaran kinerja yang saling berelasi satu sama lain untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari organisasi;
- d. Pengawasan: Memberikan keyakinan bahwa tujuan/sasaran organisasi dapat tercapai;
- e. Budaya kinerja: Setiap individu dan unit kerja sudah secara otomatis bertanggung jawab atas pencapaian target kinerjanya.

Evaluasi AKIP berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PANRB. Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja Eselon I dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan evaluasi terhadap lima komponen utama SAKIP yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Evaluasi AKIP tahun 2025 dilakukan terhadap Unit Organisasi Level 1, dan 2 (dua) Unit Organisasi Level 2 yang diuji petik (sampling), yaitu: Direktorat Perbenihan Perkebunan; dan Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.

Hasil evaluasi atas SAKIP Ditjen Perkebunan tahun 2025 adalah sebesar 90,15 dengan predikat AA dimana hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Memuaskan”, yaitu bahwa seluruh kinerja Ditjen

Perkebunan dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja; telah terbentuk pemerintah yang dinamis adaptif, dan efisien; pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. Rincian hasil evaluasi AKIP Ditjen Perkebunan berdasarkan komponen-komponen penyusun nilai AKIP tahun 2020 - 2025 dapat dilihat pada Tabel 122 berikut ini :

Tabel 122. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 - 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Komponen	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,36	27,38	Perencanaan Kinerja	30%	24,90	25,20	26,18	29,03
2	Pengukuran Kinerja	25%	20,10	21,25	Pengukuran Kinerja	30%	24,60	28,50	28,35	27,90
3	Pelaporan Kinerja	15%	14,16	14,16	Pelaporan Kinerja	15%	13,50	15,00	14,03	14,18
4	Evaluasi Internal	10%	8,17	7,75	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00	16,50	19,15	19,05
5	Capaian Kinerja	20%	16,64	12,25						
Nilai Evaluasi AKIP			85,43	82,79	Nilai Evaluasi AKIP		83,01	85,20	87,70	90,15
			A	A			A	A	A	AA

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja, antara lain:

a. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja Ditjen Perkebunan telah lengkap, selaras dengan kebijakan nasional, menggunakan indikator SMART, cascading logis, serta memperhatikan crosscutting. Setiap unit telah menetapkan perencanaan kinerja, namun belum seluruhnya memiliki rencana aksi, pemantauan capaian, tindak lanjut perbaikan, dan inovasi kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan relevan, berkala (triwulan), berjenjang, berbasis aplikasi, dan disertai umpan balik. Hasilnya digunakan sebagai dasar keputusan pimpinan, penyesuaian tunjangan, jabatan, strategi, kebijakan, dan anggaran. Namun, efisiensi anggaran masih lebih berupa pengurangan biaya non-output dibanding perbaikan aktivitas berdampak rendah terhadap outcome.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja telah rutin, direviu APIP, dipublikasikan, dan sesuai Permen PANRB 53/2014. Laporan memuat analisis realisasi kinerja tahunan, jangka menengah, tren tahun sebelumnya, efisiensi sumber daya, serta dampak terhadap strategi, aktivitas, anggaran, dan perencanaan berikutnya. Namun, belum seluruhnya menyajikan detail keberhasilan/kegagalan pencapaian target.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pedoman evaluasi telah tersedia dan memanfaatkan TI, tetapi pelaksanaannya belum merata di seluruh unit, belum didukung SDM dan pendalaman memadai, serta belum optimal dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. Evaluasi juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan seluruh indikator outcome.

Aspek yang menjadi prioritas pada peningkatan aspek SAKIP di tahun 2025 adalah aspek perencanaan kinerja, dilakukan dengan menyusun pohon kinerja dan crosscutting sesuai PermenPANRB No. 89 tahun 2021 beserta peran masing-masing unit kerja pada crosscutting. Berdasarkan Hasil

Evaluasi Implementasi SAKIP, rekomendasi/saran perbaikan yang disampaikan adalah:

- a. Melakukan pemantauan terhadap kinerja outcome/impact atas efisiensi anggaran yang dilakukan
- b. Melengkapi laporan kinerja dengan informasi detail keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target kinerja secara keseluruhan
- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta memanfaatkan Hasil Evaluasi Kinerja Internal dalam upaya meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Kinerja
- d. Memastikan seluruh rekomendasi atas Hasil Evaluasi Kinerja Internal ditindaklanjuti

Selanjutnya, untuk dapat meningkatkan implementasi SAKIP, perlu upaya dan sinergi semua elemen di lingkup internal Ditjen Perkebunan. Langkah nyata yang ditempuh sepanjang tahun 2025 diantaranya:

- a. Membentuk Tim Evaluator AKIP Internal Ditjen Perkebunan;
- b. Melaksanakan implementasi SAKIP pada aplikasi e-SAKIP Kementan, oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen Perkebunan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian dan rekonsiliasi kinerja, verifikasi pelaporan, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, dan pemantauan bantuan pemerintah.

- d. Penyusunan dokumen kinerja antara lain: perjanjian kinerja, rencana aksi, matriks *cascading*, pohon kinerja, manual IKU, penetapan Indikator Kinerja Utama
- e. Menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi Tahun 2024 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki sejumlah dampak yang signifikan:

- a. Transparansi dan akuntabilitas: SAKIP membantu meningkatkan transparansi dalam kinerja instansi pemerintah dengan menetapkan tujuan yang terukur dan melaporkan pencapaian kinerja secara teratur. Ini memungkinkan publik untuk memahami lebih baik apa yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan bagaimana mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Peningkatan efisiensi: melalui SAKIP, instansi pemerintah dapat memantau kinerja dengan lebih baik. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
- c. Perbaikan layanan publik: SAKIP dapat membantu instansi pemerintah untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan mengevaluasi kinerja, instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat.
- d. Pengambilan keputusan yang lebih baik: data yang dikumpulkan dan analisis kinerja dari SAKIP dapat

menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

- e. Peningkatan tanggung jawab: SAKIP membantu meningkatkan tanggung jawab instansi pemerintah terhadap masyarakat dan pemerintah pusat. Dengan melaporkan kinerja mereka secara teratur, mereka harus bertanggung jawab atas capaian atau ketidakcapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Peningkatan kinerja dan produktivitas: Implementasi SAKIP memberikan insentif bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja mereka. Hal ini dapat mendorong upaya untuk inovasi, perbaikan proses, dan peningkatan produktivitas.
- g. Peningkatan kepercayaan publik: transparansi yang diperoleh dari SAKIP dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat pencapaian yang terukur dan dilaporkan dengan jelas, ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga pemerintah.

Dengan demikian, implementasi SAKIP memiliki potensi untuk memberikan dampak yang positif bagi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas instansi pemerintah. Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi. Implementasi SAKIP merupakan

bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran. Hal ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan RB dan SAKIP ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Ditjen Perkebunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Ditjen Perkebunan menuju good governance dalam tahun anggaran 2025 dan disusun berdasarkan perjanjian kinerja tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Secara umum pencapaian target kinerja Ditjen Perkebunan pada tahun 2025, didasarkan pada pencapaian 7 (tujuh) Sasaran Program (SP) yang diukur dari pencapaian target pada 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Program (IKP). Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang masuk dalam kategori sangat berhasil dan 13 (tiga belas) indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil, oleh karena itu capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan secara keseluruhan termasuk dalam kategori berhasil.

Capaian setiap indikator kinerja program yang masuk dalam kategori sangat berhasil meliputi 1) Tersedianya Komoditas Pertanian Perkebunan Untuk Bahan Baku Bio Energi terealisasi sebesar 85,22 juta ton dari target 66,37 juta ton atau sebesar 128,40%; 2) Indeks Harga yang Diterima Pekebun terealisasi dengan nilai 198,71 dari target 154,8 atau sebesar 128,37%; 3) Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen. Perkebunan mencapai nilai

indeks 0,89 dari target 0,83 atau mencapai 107,23%; 4) Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan terealisasi dengan nilai 1,43 atau mencapai 109,89% dari target nilai sebesar 1,3; 5) Produksi tebu terealisasi sebesar 39.069.968 ton atau 106,13% dari target 36.813.539; 6) Produksi Kopi terealisasi sebesar 832.675 ton atau 102,38% dari target 813.346 ton; 7) Produksi Tanaman Palma Lainnya terealisasi sebesar 190.646 ton atau 188.236 atau sebesar 101,28%; 8) Produksi Sagu terealisasi sebesar 402.887 ton atau 100,22% dari target 401.991 ton.

Capaian yang termasuk dalam kategori berhasil yaitu Produksi kelapa sawit terealisasi 97,13% dari target 239.646.870; Produksi Kelapa terealisasi 96,03%; Produksi Lada terealisasi 82,20%, Produksi Pala terealisasi 95,29%, Produksi Cengkeh terealisasi 91,98%; Produksi Vanili terealisasi 81,29%; Produksi Karet terealisasi 84,77%; Produksi Kakao terealisasi 97,36%; Produksi Teh terealisasi 99,88%, Produksi Jambu Mete terealisasi sebesar 99,36%; Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya terealisasi 95,97%; Indeks Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan terealisasi 100%; serta Volume Ekspor Komoditas Perkebunan terealisasi 90,79%.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2025 tidak bisa terlepas dari kerja keras dan komitmen pimpinan serta segenap jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan dalam peningkatan kinerja baik di masing-masing unit kerja. Secara umum, keberhasilan pencapaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan dipengaruhi oleh keselarasan antara arah kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung sasaran strategis organisasi. Dukungan

kebijakan nasional melalui RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita Presiden, khususnya dalam pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi sumber daya alam, menjadi faktor penting dalam mendorong pencapaian kinerja Ditjen Perkebunan.

Keberhasilan tersebut juga ditopang oleh pelaksanaan program yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, meliputi penyediaan benih bermutu, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), penguatan perlindungan tanaman, serta pengembangan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan. Intervensi teknis yang tepat sasaran pada komoditas strategis mampu menjaga stabilitas dan bahkan meningkatkan produksi, sehingga mendukung ketersediaan bahan baku pangan, industri, dan bioenergi. Selain itu, penguatan akses pasar dan dukungan terhadap hilirisasi berkontribusi pada peningkatan nilai tambah, daya saing, serta perbaikan indikator kesejahteraan pekebun.

Dari sisi tata kelola, keberhasilan pencapaian indikator kinerja juga dipengaruhi oleh penguatan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel, peningkatan fungsi koordinasi lintas unit kerja, serta penerapan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Dukungan sumber daya manusia yang relatif memadai, perbaikan struktur organisasi sesuai Permentan Nomor 02 Tahun 2025, serta peran aktif unit pelaksana teknis di daerah turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program. Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian indikator kinerja Ditjen Perkebunan merupakan hasil dari kombinasi kebijakan yang konsisten, program yang terarah, dukungan tata kelola yang semakin baik, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan

pemangku kepentingan lainnya, yang menjadi modal penting bagi peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

Dalam pencapaian kinerja organisasi tidak lepas dari dukungan sumber daya yang tersedia. Capaian kinerja fisik Ditjen Perkebunan tahun 2025 secara keseluruhan adalah sebesar 99,50%. Pagu Ditjen Perkebunan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.064.312.995.000. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat diblokir sebesar Rp785.700.000 sehingga anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp3.063.527.295.000, dengan alokasi 95,38% untuk Prioritas Nasional (PN) dan 4,62% untuk Non PN. Hingga akhir tahun 2025, realisasi anggaran sebesar Rp 1.443.192.464.153 atau 47,10%, menurun signifikan dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 86,86% yang disebabkan oleh adanya refocusing serta Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada Triwulan III yang membatasi waktu pelaksanaan kegiatan, kendala pengadaan barang dan jasa, perubahan lokasi kegiatan, transisi regulasi Permentan Nomor 2 Tahun 2025, serta faktor eksternal seperti bencana alam.

Direktorat Jenderal Perkebunan secara berkelanjutan terus melakukan perbaikan terhadap berbagai permasalahan yang mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta berupaya meningkatkan kinerja organisasi secara optimal, baik pada kinerja utama maupun kinerja pendukung lainnya, guna memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan subsektor perkebunan.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya terkait hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, program prioritas

Direktorat Jenderal Perkebunan ke depan diarahkan pada penguatan hilirisasi komoditas perkebunan dan pencapaian swasembada energi sebagai strategi utama pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, langkah strategis yang ditempuh meliputi penguatan hilirisasi komoditas perkebunan melalui peningkatan pengolahan hasil di dalam negeri guna mendorong nilai tambah, memperkuat daya saing produk perkebunan Indonesia di pasar global, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta menciptakan peluang kerja baru. Fokus hilirisasi diarahkan pada komoditas-komoditas strategis perkebunan sesuai dengan prioritas nasional untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.

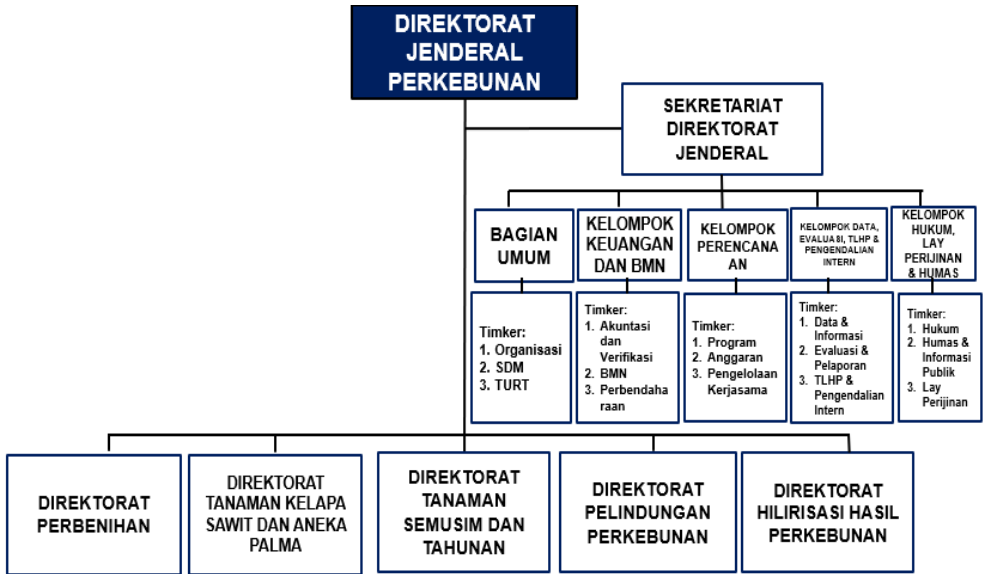
Selain itu, Direktorat Jenderal Perkebunan mendukung kebijakan swasembada energi melalui pengembangan bahan baku bioenergi berbasis komoditas perkebunan, khususnya melalui implementasi program biodiesel B50. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Upaya tersebut juga didukung dengan pengembangan energi terbarukan lainnya, seperti bioavtur berbasis kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta penguatan sinergi dengan pengembangan energi hijau nasional.

Pelaksanaan seluruh program strategis tersebut dilaksanakan melalui penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait, guna memastikan program pembangunan perkebunan berjalan secara terintegrasi, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Dengan strategi tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan

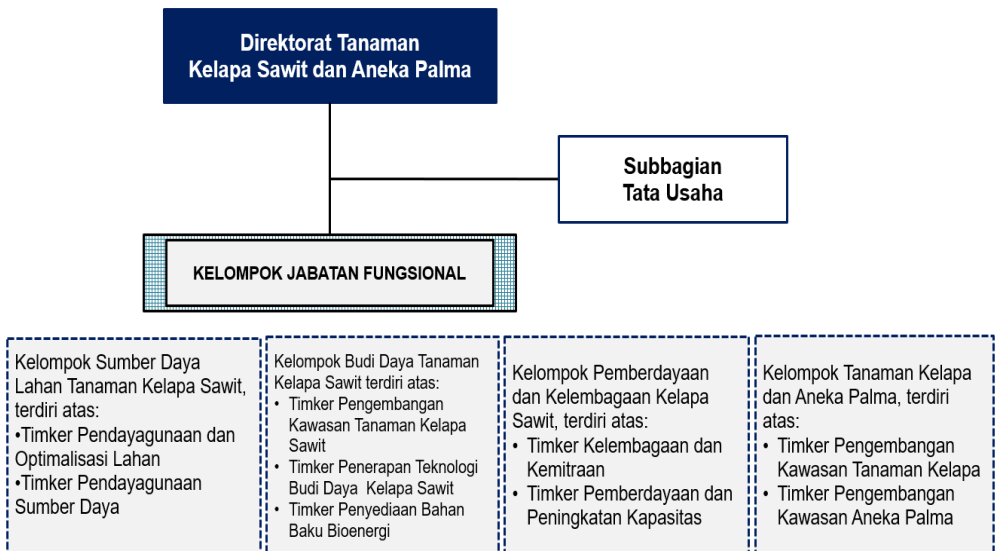
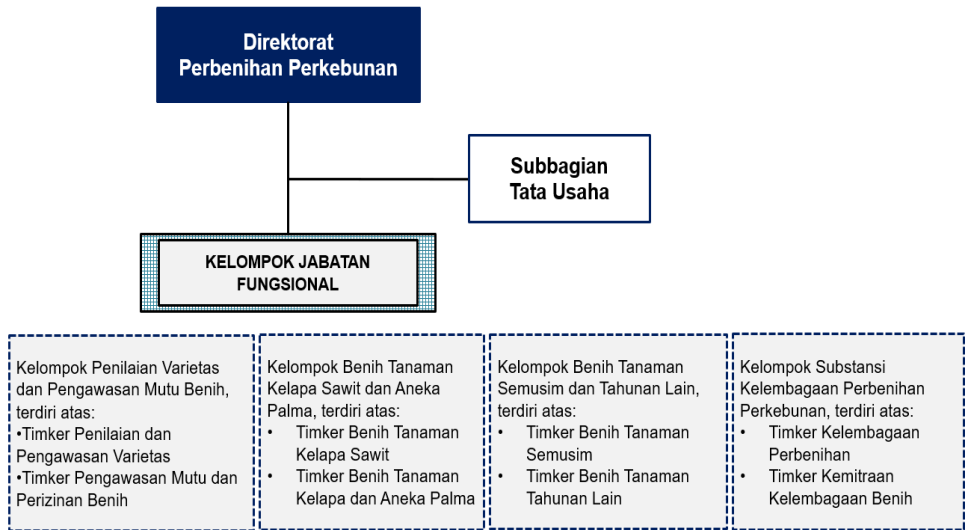
diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, mendukung kemandirian energi nasional, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani.

LAMPIRAN

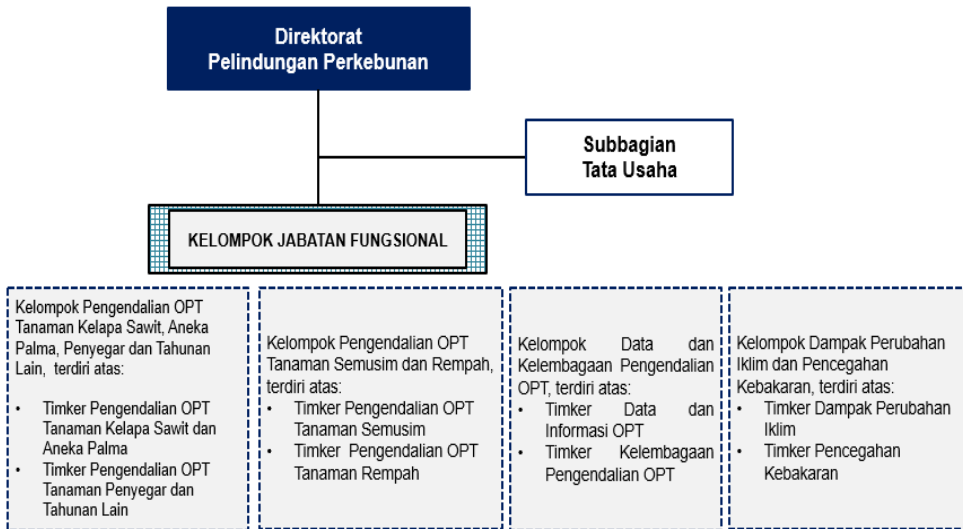
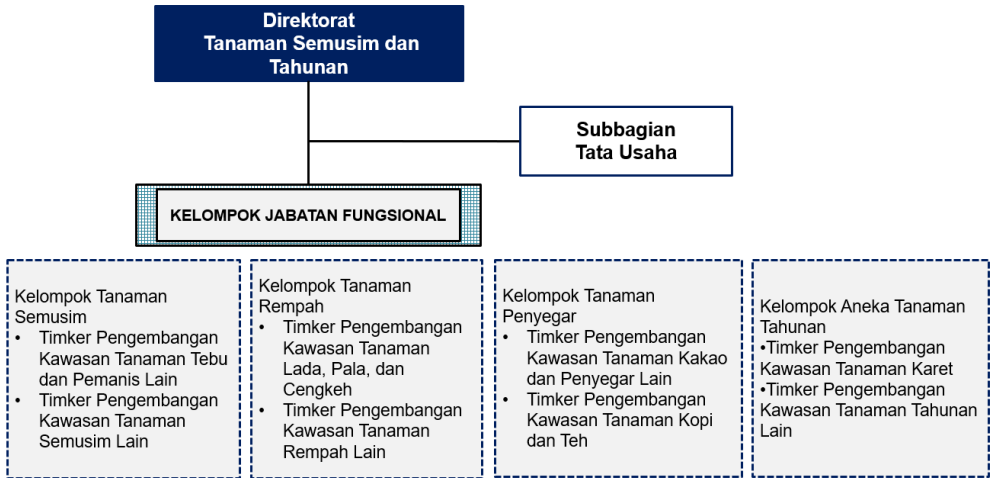
Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan



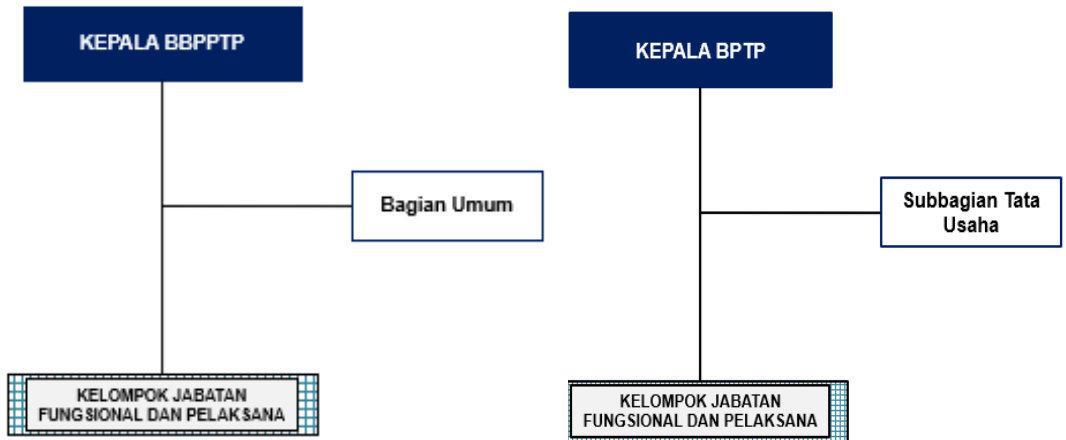
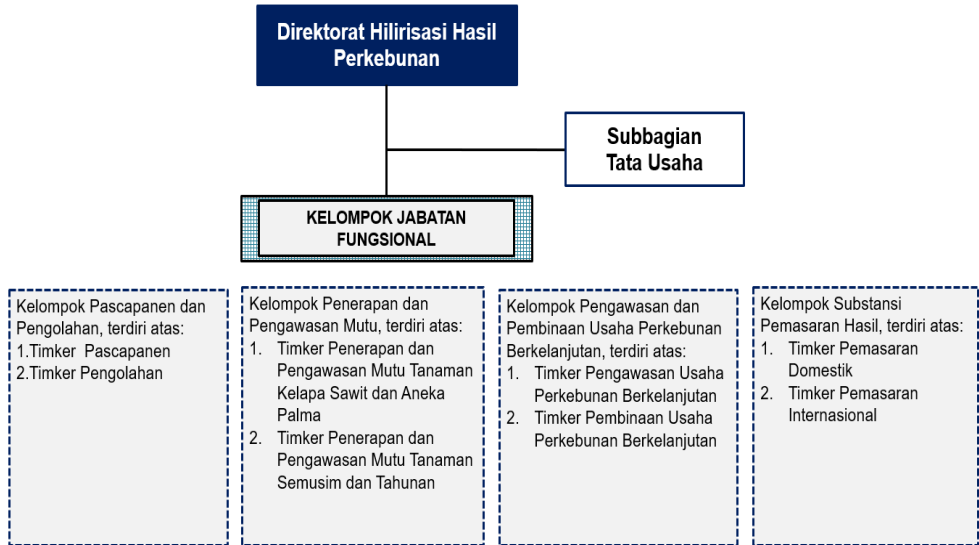
Lanjutan Lampiran 1.



Lanjutan Lampiran 1.



Lanjutan Lampiran 1.



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KAMPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815588
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DITJEN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Heru Tri Widarto
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perkebunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama

Heru Tri Widarto

Lanjutan Lampiran 2.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DITJEN PERKEBUNAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	1-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	82 %
		1-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	47.00 %
		1-3	Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40.00 %
2	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	2-1	Nilai ekspor produk perkebunan	31 Miliar USD
3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	3-1	Persentase capaian nilai reformasi birokrasi yang menjadi tanggungjawab Ditjen Perkebunan	76.91 %
4	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	4-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	85 Nilai

**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Anggaran Rp 225,854,579,000**

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Rp. 51,933,117,000
2 Penguatan Perlindungan Perkebunan	Rp. 13,262,760,000
3 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	Rp. 106,125,044,000
4 Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Rp. 16,373,659,000
5 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Rp. 38,159,999,000

Lanjutan Lampiran 2.

Program Dukungan Manajemen
Anggaran Rp 105,922,480,000

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Rp. 105,922,480,000

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua



Andi Nurhan Sulaiman

Pihak Pertama



Heru Tri Widarto

Lanjutan Lampiran 2.



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DITJEN PERKEBUNAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abdul Roni Angkat
Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Perkebunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2025

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama

Abdul Roni Angkat

Lanjutan Lampiran 2.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DITJEN PERKEBUNAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	1-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	82 %
		1-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	47.00 %
		1-3	Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40.00 %
2	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	2-1	Nilai ekspor produk perkebunan	31 Miliar USD
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	3-1	Persentase capaian nilai reformasi birokrasi yang menjadi tanggungjawab Ditjen Perkebunan	76.91 %
4	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	4-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	85.87 Nilai

**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Anggaran Rp 239,806,105,000**

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Rp. 57,808,415,000
2	Penguatan Perlindungan Perkebunan	Rp. 10,959,668,000
3	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	Rp. 114,541,149,000
4	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Rp. 27,849,598,000
5	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Rp. 28,647,275,000

Program Dukungan Manajemen
Anggaran Rp 107,227,359,000

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Rp. 107,227,359,000

Jakarta, Juli 2025

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama



Abdul Roni Angkat

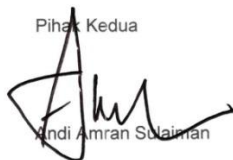
Lanjutan Lampiran 2.

Program Dukungan Manajemen
Anggaran Rp 107,227,359,000

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Rp. 107,227,359,000

Jakarta, Juli 2025

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama



Abdul Roni Angkat

Lanjutan Lampiran 2.



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815488 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DITJEN PERKEBUNAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abdul Roni Angkat
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perkebunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 September 2025

Pihak Kedua


Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama


Abdul Roni Angkat

Lanjutan Lampiran 2.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DITJEN PERKEBUNAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	1-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	82 %
		1-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	47.00 %
		1-3	Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40.00 %
2	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	2-1	Nilai ekspor produk perkebunan	31 Miliar USD
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	3-1	Persentase capaian nilai reformasi birokrasi yang menjadi tanggungjawab Ditjen Perkebunan	76.91 %
4	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	4-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	85.87 Nilai

**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Anggaran Rp 2,900,272,586,000**

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Rp. 89,565,136,000
2 Penguatan Pelindungan Perkebunan	Rp. 10,541,168,000
3 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	Rp. 1,752,036,889,000
4 Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Rp. 27,061,692,000
5 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Rp. 1,021,067,701,000

Lanjutan Lampiran 2.

Program Dukungan Manajemen
Anggaran Rp 108,999,397,000

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Rp. 108,999,397,000

Jakarta, 22 September 2025

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama



Abdul Roni Angkat

Lanjutan Lampiran 2.



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DITJEN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abdul Roni Angkat
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perkebunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama

Abdul Roni Angkat

Lanjutan Lampiran 2.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DITJEN PERKEBUNAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	1-1	Produksi Kelapa Sawit	239,646,870 Ton
		1-2	Produksi Kelapa	2,880,690 Ton
		1-3	Produksi Sagu	401,991 Ton
		1-4	Produksi Lada	64,408 Ton
		1-5	Produksi Pala	41,527 Ton
		1-6	Produksi Cengkeh	157,321 Ton
		1-7	Produksi Vanili	1,582 Ton
		1-8	Produksi Kopi	813,346 Ton
		1-9	Produksi Tebu	36,813,539 Ton
		1-10	Produksi Karet	2,496,364 Ton
		1-11	Produksi Kakao	632,787 Ton
		1-12	Produksi Teh	116,555 Ton
		1-13	Produksi Jambu Mete	136,642 Ton
		1-14	Produksi Tanaman Palma Lainnya	188,236 Ton
		1-15	Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	414,496 Ton
2	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	2-1	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	66,37 Juta Ton
3	Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun	3-1	Indeks harga yang diterima Pekebun	154,8 Nilai

Lanjutan Lampiran 2.

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
4	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	4-1	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	0,7 Nilai
5	Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan	5-1	Volume ekspor komoditas perkebunan	38.415 Ribu Ton
6	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	6-1	Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan	1,5 Nilai
7	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel	7-1	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan	0,83 Indeks

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Anggaran Rp 5,870,456,269,000

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Rp. 474,798,548,000
2	Penguatan Perlindungan Perkebunan	Rp. 5,049,514,000
3	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	Rp. 1,721,379,760,000
4	Hilirisasi Hasil Perkebunan	Rp. 4,956,000,000
5	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Rp. 3,664,272,447,000

Program Dukungan Manajemen
Anggaran Rp 127,716,377,000

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Rp. 127,716,377,000

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua


 Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama


 Abdul Roni Angkat

Lampiran 3. Surat Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <https://ditjenbun.pertanian.go.id>

SURAT TUGAS

NOMOR : 606/OT.050/E.1/01/2025

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025.

Memberi Tugas

Kepada:

No	Nama	Gol	Jabatan	Unit Kerja
1	Adi Cahyono, SE, M.Sc NIP. 197301261994031001	IV	Arsiparis Muda	Sekretariat Ditjenbun
2	Akhid Nur Khoirudin, ST, M.Si NIP. 198501302009121003	III	Analisis Anggaran Muda	Sekretariat Ditjenbun
3	Andi Muhammad Ilham NIP. 197008171992031004	III	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Ditjenbun
4	Mutia Nailil Muna, SP NIP. 199703282020122005	III	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Sekretariat Ditjenbun
5	Ahmad Faiz Farqolith, S.Pt. NIP. 199503142022031001	III	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Ditjenbun
6	Mila Ikasari, S.M NIP. 199105012015032002	III	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat Ditjenbun
7	R. Melly Mulyasari, SE, MM. NIP. 197611072005012003	IV	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	Sekretariat Ditjenbun
8	Yhanuar Ardhi Wiedanto, S.Psi NIP. 198301192015031001	III	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Ditjenbun
9	Dini Ariani Putri, S.Sos NIP. 198604142011012016	III	Pranata Humas Muda	Sekretariat Ditjenbun
10	Dwi Setyawati Putri, SE NIP. 199206262015032001	III	Perencana Pertama	Sekretariat Ditjenbun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lanjutan Lampiran 3.

11	Faisal Anugrah Widiatama, SE NIP. 199501162019021002	III	Perencana Pertama	Sekretariat Ditjenbun
12	Asep Udin, S.Kom NIP. 198201072009121004	III	Pranata Komputer Muda	Sekretariat Ditjenbun
13	Susilo Novianto D, A.Md NIP. 198311142011011007	II	Statistisi Terampil	Sekretariat Ditjenbun
14	Nilam Sari Sardjono, SP, MP NIP. 198203262006042001	IV	POPT Muda	Direktorat Pelindungan Perkebunan
15	Indah Pasimura, S.T, M.Si NIP. 198612142011012007	III	Penata Perizinan Ahli Muda	Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan

- Untuk: Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025. Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025, mempunyai tugas:
1. Bertanggungjawab dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025
 2. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 kepada Direktur Jenderal Perkebunan
 3. Mengkompilasi, mengolah, dan menganalisis data capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025

Surat penugasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat penugasan ini dibuat, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 6 Januari 2025
 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Ditjen Perkebunan,



Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc.
 NIP 197204121999031004

Tembusan :

1. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran 4. Surat Permintaan Data Realisasi Biodiesel Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KAMPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <https://ditjenbun.pertanian.go.id>

Nomor : B-36/PP.030/E.4/01/2026 13 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permintaan Data Realisasi Biodiesel Tahun 2025

Yth.
Direktur Bioenergi
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
di
Tempat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, khususnya terkait penyediaan bahan baku bioenergi berbasis kelapa sawit, bersama ini kami mohon dukungan data dari Direktorat Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon data **realisasi pemanfaatan biodiesel tahun 2025** secara nasional, yang meliputi antara lain volume realisasi biodiesel serta informasi lain yang relevan sesuai kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data dimaksud akan digunakan sebagai bahan analisis, sinkronisasi kebijakan, serta penyusunan laporan dan rekomendasi kebijakan di bidang perkebunan dan bioenergi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka
Palma Perkebunan,



Ir. Baginda Siagian, M.Si
NIP 196810092001121001

- Tembusan:
1. Plt. Direktur Jenderal Perkebunan;
 2. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5. Surat Penyampaian Data Produksi dan Realisasi Sementara Penyaluran Biodiesel Tahun 2025 dari Direktur Bioenergi Kementerian ESDM



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901097

WEBSITE: www.ebtke.esdm.go.id

e-mail: info@ebtke.esdm.go.id

Nomor : T-171/EK.05/DEB/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Hal : Penyampaian Data

21 Januari 2026

Yang terhormat,

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma

Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian

di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Nomor B-36/PP.030/E.4/01/2026 tentang Permintaan Data Realisasi Biodiesel Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan data produksi dan realisasi sementara penyaluran biodiesel domestik dalam rangka mandatori B40 tahun 2025 berturut-turut sebesar **15.494.077 kL** dan **14.919.991 kL** dengan rincian pada lampiran 1. Adapun data tersebut masih dapat berubah sampai dengan pelaksanaan rekonsiliasi data yang diperkirakan dilaksanakan pada awal Februari 2026.

Dapat kami sampaikan bahwa dengan semangat Transisi Energi, Direktorat Bioenergi berkomitmen menerapkan *core value* Ber-AKHLAK untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas, dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Bioenergi,



Edi Wibowo

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
2. Direktur Jenderal Perkebunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Lanjutan Lampiran 5.

LAMPIRAN I

Nomor : T-171/EK.05/DEB/2026

Tanggal : 21 Januari 2026

Data Sementara Produksi, Realisasi Penyaluran Domestik, dan Ekspor Biodiesel Tahun 2025

No	Bulan	Volume (kL)		
		Produksi	Domestik	Ekspor
1	Januari	1.200.825	1.053.134	-
2	Februari	1.084.308	1.152.535	-
3	Maret	1.303.827	1.260.461	-
4	April	1.235.455	1.204.803	-
5	Mei	1.281.746	1.191.905	-
6	Juni	1.290.559	1.240.886	-
7	Juli	1.311.864	1.208.549	-
8	Agustus	1.295.945	1.292.535	-
9	September	1.295.365	1.282.944	-
10	Oktober	1.437.563	1.309.991	-
11	November	1.325.365	1.327.646	-
12	Desember	1.431.255	1.394.601	-
Total		15.494.077	14.919.991	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E

Lampiran 6. Realisasi Berdasarkan Rincian Output Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	BLOKIR	Realisasi	%	Realisasi	%
018.05	Ditjen. Perkebunan	-	-	3.064.312.995.000	785.700.000	1.443.293.228.152	47,10		65,22
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			2.955.313.598.000	-	1.338.129.528.386	45,28		63,94
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	-	-	90.509.020.000	-	82.232.706.899	90,86		99,93
1777.AEA	Koordinasi			2.107.938.000	-	2.000.531.982	94,90		100,00
1777.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman kelapa Sawit dan Aneka Palma	8	Kegiatan	2.107.938.000	-	2.000.531.982	94,90	8	100,00
1777.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			318.032.000	-	174.775.960	54,96		80,00
1777.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	5	NSPK	318.032.000	-	174.775.960	54,96	4	80,00
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			88.083.050.000	-	80.057.398.957	90,89		100,00
1777.RAI.001	Kawasan Kelapa	11.515	Ha	82.136.748.000	-	74.825.995.099	91,10	11.515	100,00

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	BLOKIR	Realisasi	%	Realisasi	%
1777.RAI.002	Kawasan Sagu	1.700	Ha	5.946.302.000		5.231.403.858	87,98	1.700	100,00
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	-	-	10.541.168.000	-	10.243.792.373	97,18		100,00
1779.AEA	Koordinasi			2.636.605.000	-	2.611.619.375	99,05		100,00
1779.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan	5	Kegiatan	2.636.605.000		2.611.619.375	99,05	5	100,00
1779.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			449.825.000	-	441.180.044	98,08		100,00
1779.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	7	NSPK	449.825.000		441.180.044	98,08	7	100,00
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			5.120.432.000	-	4.859.584.495	94,91		100,00
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	62	Unit	4.310.432.000		4.061.498.160	94,22	62	100,00
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	6	Paket Teknologi	810.000.000		798.086.335	98,53	6	100,00
1779.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			2.334.306.000	-	2.331.408.459	99,88		100,00

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	BLOKIR	Realisasi	%	Realisasi	%
1779.QDD.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	23	Kelompok Masyarakat	2.334.306.000		2.331.408.459	99,88	23	100,00
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	-	-	1.811.291.962.000	-	678.193.970.085	37,44		43,92
5888.AEA	Koordinasi			3.198.610.000	-	2.895.318.675	90,52		100,00
5888.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Tahunan	33	Kegiatan	3.198.610.000		2.895.318.675	90,52	33	100,00
5888.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			678.330.000	-	591.535.626	87,20		100,00
5888.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan	16	NSPK	678.330.000		591.535.626	87,20	16	100,00
5888.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			1.807.415.022.000	-	674.707.115.784	37,33		43,80
5888.RAI.001	Kawasan Lada	1.200	Ha	15.630.211.000	-	13.813.035.179	88,37	1.175	97,92
5888.RAI.002	Kawasan Pala	8.000	Ha	41.394.600.000		36.723.308.297	88,72	8.000	100,00

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	BLOKIR	Realisasi	%	Realisasi	%
5888.RAI.004	Kawasan Tebu	100.453	Ha	1.446.411.651.000		383.068.449.097	26,48	32.120	31,98
5888.RAI.006	Kawasan Kopi	17.900	Ha	181.696.490.000		134.067.512.921	73,79	17.350	96,93
5888.RAI.007	Kawasan Kakao	8.716	Ha	113.310.510.000		101.492.125.847	89,57	6.716	77,05
5888.RAI.009	Kawasan Jambu Mete	1.800	Ha	8.971.560.000		5.542.684.443	61,78	1.800	100,00
5889	Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	-	-	16.431.616.000	-	12.903.314.220	78,53		86,41
5889.AEA	Koordinasi			8.370.968.000	-	7.804.809.993	93,24		94,12
5889.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	17	Kegiatan	8.370.968.000		7.804.809.993	93,24	16	94,12
5889.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			996.375.000	-	862.060.920	86,52		100,00
5889.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi), dan Pemasaran Hasil Perkebunan	14	NSPK	996.375.000		862.060.920	86,52	14	100,00

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	BLOKIR	Realisasi	%	Realisasi	%
5889.PDA	Standarisasi Produk			3.046.723.000	-	2.539.212.662	83,34		87,40
5889.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	13.000	Standar	3.046.723.000		2.539.212.662	83,34	11.362	87,40
5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			2.660.500.000	-	1.697.230.645	63,79		100,00
5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	41	Unit	1.455.400.000		832.580.645	57,21	41	100,00
5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	15	Unit	1.205.100.000	-	864.650.000	71,75	15	100,00
5889.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			1.357.050.000	-	-	-		-
5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	5	Unit	1.357.050.000		-	-	-	-
5890	Penguatan Perbenihan Perkebunan			1.026.539.832.000	-	554.555.744.809	54,02		95,37
5890.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			783.880.000	-	748.150.283	95,44		100,00
5890.ABR.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	17	Rekomendasi	783.880.000		748.150.283	95,44	17	100,00
5889.AEA	Koordinasi			2.780.053.000	-	2.637.076.848	94,86		100,00

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	BLOKIR	Realisasi	%	Realisasi	%
5890.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan	7	Kegiatan	2.780.053.000		2.637.076.848	94,86	7	100,00
5890.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			306.450.000	-	188.134.660	61,39		100,00
5890.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	6	NSPK	306.450.000		188.134.660	61,39	6	100,00
5890.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk			4.905.120.000	-	4.150.053.351	84,61		100,00
5890.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	61.409.600	Batang	3.192.978.000		2.796.880.412	87,59	61.409.600	100,00
5890.BJA.002	Pengujian Mutu Benih	12.589.740	Batang	1.712.142.000		1.353.172.939	79,03	12.589.740	100,00
5890.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			74.695.694.000	-	54.862.362.790	73,45		100,00
5890.RBK.002	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam komoditi Perkebunan	1.580	Unit (Ha)	74.695.694.000		54.862.362.790	73,45	1.580	100,00
5890.RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			943.068.635.000	-	491.969.966.877	52,17		94,96

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	BLOKIR	Realisasi	%	Realisasi	%
5890.RDK.001	Operasional Nursery	78	Unit	927.165.071.000		480.277.001.318	51,80	74	94,87
5890.RDK.002	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Tanam komoditi Perkebunan	635	Unit (Ha)	15.903.564.000		11.692.965.559	73,52	635	100,00
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen			108.999.397.000	785.700.000	105.163.699.766	96,48		100,00
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan			108.999.397.000	785.700.000	105.163.699.766	96,48		100,00
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			102.433.352.000	785.700.000	98.721.139.412	96,38		100,00
1780.EBA.956	Layanan BMN	5	Layanan	338.790.000		337.998.340	99,77	5	100,00
1780.EBA.957	Layanan Hukum	2	Layanan	1.015.520.000		1.004.002.031	98,87	2	100,00
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	357.230.000		354.262.773	99,17	1	100,00
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	423.604.000		419.715.342	99,08	1	100,00
1780.EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan	16.589.178.000	785.700.000	15.148.301.781	91,31	5	100,00
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.281.100.000		1.277.854.130	99,75	1	100,00

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran	BLOKIR	Realisasi	%	Realisasi	%
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	5	Layanan	82.427.930.000		80.179.005.015	97,27	5	100,00
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			350.000.000	-	349.316.892	99,80		100,00
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit	350.000.000		349.316.892	99,80	1	100,00
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			810.230.000	-	715.726.967	88,34		100,00
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	759	Orang	810.230.000		715.726.967	88,34	759	100,00
1789.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			5.405.815.000	-	5.377.516.495	99,48		100,00
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11	Dokumen	2.035.000.000		2.024.627.776	99,49	11	100,00
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	12	Dokumen	1.379.380.000		1.376.063.517	99,76	12	100,00
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	13	Dokumen	1.832.235.000		1.819.836.272	99,32	13	100,00
1780.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen	159.200.000		156.988.930	98,61	1	100,00

Lampiran 7. Data Volume Ekspor Komoditas Perkebunan sampai dengan November Tahun 2025

NO	KOMODITAS	VOLUME EKSPOR (RIBU TON)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	TOTAL
1	Kelapa	215	203	180	190	256	153	254	191	228	233	176	2.281
2	Karet	150	149	146	149	152	130	139	144	157	138	124	1.579
3	Kelapa Sawit	2.214	3.143	3.077	1.897	2.831	3.741	3.742	3.800	2.509	3.058	2.438	32.450
4	Kopi	31	34	36	27	38	43	44	61	62	54	45	474
5	T e h	2	3	2	2	3	3	3	2	2	3	2	28
6	Lada	5	4	4	3	3	2	2	2	2	3	3	32
7	Tembakau	0	1	1	3	3	2	3	3	2	1	1	19
8	Kakao	31	31	31	23	28	25	32	30	28	31	27	317
9	Cengkeh	5	5	4	3	5	2	1	2	2	3	3	37
10	Panili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kapas	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
12	Pala	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	26
13	Kayu Manis	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	24
14	Tebu	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0
15	Pinang	12	13	22	18	26	20	27	21	23	20	16	217
16	Jambu Mete	8	6	4	1	3	4	3	6	10	12	12	70
17	Sagu	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	14
18	Nilam	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
TOTAL		2.683	3.601	3.516	2.328	3.357	4.136	4.259	4.272	3.035	3.565	2.857	37.610

Lampiran 8. Monitoring Efisiensi SBK

No	Satker	RO	Jenis SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1777.AFA.001 Peraturan/Norma/ Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma (NSPK)	SBKK	95.000.000	174.775.960	5	5	34.955.192	60.044.808	63,21	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
2	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1779.AFA.001 Peraturan/Norma/ Pedoman Perlindungan Perkebunan (NSPK)	SBKK	95.000.000	441.180.044	7	7	63.025.720	31.974.280	33,66	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
3	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.AFA.001 Peraturan/Norma/ Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan (NSPK)	SBKK	95.000.000	591.535.626	16	16	36.970.976	58.029.024	61,08	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
4	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.RAI.001 Kawasan Lada (Hektar)	SBKK	11.610.000	13.813.035.179	1200	1175	11.755.774	-145.774	-1,26	0	RO SBK mendapat izin pelampauan dari Menteri Keuangan.

No	Satker	RO	Jenis SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
5	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.RAI.006 Kawasan Kopi (Hektar)	SBKK	16.120.000	81.573.302.831	9295	8745	9.327.993	6.792.007	42,13	0	Tidak diperhitungkan (0%). RO tidak mencapai target yang ditetapkan (RVRO < TVRO).
6	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.RAI.007 Kawasan Kakao (Hektar)	SBKK	20.000.000	62.593.717.557	5316	5316	11.774.589	8.225.411	41,13	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
7	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5889.AFA.001 Peraturan/Norma/ Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi), dan Pemasaran Hasil Perkebunan (NSPK)	SBKK	95.000.000	787.291.429	14	14	56.235.102	38.764.898	40,81	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
8	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5889.RAG.001 Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan (Unit)	SBKK	43.000.000	832.580.645	41	41	20.306.845	22.693.155	52,77	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.

No	Satker	RO	Jenis SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
9	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5889.RAG.002 Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (Unit)	SBKK	91.350.000	864.650.000	15	15	57.643.333	33.706.667	36,9	0	RO SBK mendapat izin pelampauan dari Menteri Keuangan.
10	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5890.ABR.001 Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan (Rekomendasi Kebijakan)	SBKK	95.536.000	748.150.283	17	17	44.008.840	51.527.160	53,93	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
11	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5890.AFA.001 Peraturan/Norma/ Pedoman Perbenihan Perkebunan (NSPK)	SBKK	95.000.000	188.134.660	6	6	31.355.776	63.644.224	66,99	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
12	BBP2TP SURABAYA	1779.CAG.001 Perangkat Perlindungan Perkebunan (Unit)	SBKK	84.412.000	1.133.591.595	17	17	66.681.858	17.730.142	21	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
13	BBP2TP SURABAYA	5888.RAI.006 Kawasan Kopi (Hektar)	SBKK	16.120.000	26.520.154.501	2605	2605	10.180.481	5.939.519	36,85	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di

No	Satker	RO	Jenis SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
												bawah indeks SBKK.
14	BBP2TP SURABAYA	5888.RAI.007 Kawasan Kakao (Hektar)	SBKK	20.000.000	11.920.006.100	1000	1000	11.920.006	8.079.994	40,4	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
15	BBP2TP MEDAN	1779.CAG.001 Perangkat Perlindungan Perkebunan (Unit)	SBKK	84.412.000	1.130.466.134	19	19	59.498.217	24.913.783	29,51	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
16	BBP2TP MEDAN	5888.RAI.006 Kawasan Kopi (Hektar)	SBKK	16.120.000	25.974.055.589	6000	6000	4.329.009	11.790.991	73,15	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
17	BBP2TP MEDAN	5888.RAI.007 Kawasan Kakao (Hektar)	SBKK	20.000.000	4.150.972.189	400	400	10.377.430	9.622.570	48,11	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di

No	Satker	RO	Jenis SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
												bawah indeks SBKK.
18	BPTP PONTIANAK	1779.CAG.001 Perangkat Perlindungan Perkebunan (Unit)	SBKK	84.412.000	451.806.666	7	7	64.543.809	19.868.191	23,54	0	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
19	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.RAI.004 Kawasan Tebu (Hektar)	SBKK	37.880.000	382.058.873.547	100453	32119	6.604.758	31.275.242	82,56	0	Tidak diperhitungkan (0%). RO tidak mencapai target yang ditetapkan (RVRO < TVRO).
20	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.RAI.002 Kawasan Pala (Hektar)	SBKK	2.580.000	15.577.473.480	3700	3700	4.210.127	-1.630.127	-63,18	0	RO SBK mendapat izin pelampauan dari Menteri Keuangan.
21	BBP2TP AMBON	5888.RAI.002 Kawasan Pala (Hektar)	SBKK	2.580.000	21.145.834.817	4300	4300	4.917.636	-2.337.636	-90,61	0	RO SBK mendapat izin pelampauan dari Menteri Keuangan.
22	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.RAI.009 Kawasan Jambu Mete (Hektar)	SBKK	3.470.000	5.542.684.443	1800	1800	3.079.269	390.731	11,26	0	RO SBK mendapat izin pelampauan dari Menteri Keuangan.

No	Satker	RO	Jenis SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
23	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1780.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	480.000.000	300.121.470	1	1	300.121.470	179.878.530	37,47	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
24	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1780.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	458.000.000	354.262.773	1	1	354.262.773	103.737.227	22,65	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
25	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1780.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	SBKU	5.700.000	397.981.805	370	370	1.075.626	4.624.374	81,13	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
26	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1780.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	SBKU	552.500.000	2.024.627.776	11	11	184.057.070	368.442.930	66,69	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

No	Satker	RO	Jenis SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
27	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1780.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	240.000.000	1.228.708.032	8	8	153.588.504	86.411.496	36	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
28	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1780.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	SBKU	508.000.000	1.761.809.320	9	9	195.756.591	312.243.409	61,47	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
29	BBP2TP SURABAYA	1780.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	480.000.000	9.800.000	1	1	9.800.000	470.200.000	97,96	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
30	BBP2TP SURABAYA	1780.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	SBKU	5.700.000	63.978.740	115	108	592.395	5.107.605	89,61	0	Tidak diperhitungkan (0%). RO tidak mencapai target yang ditetapkan (RVRO < TVRO).

No	Satker	RO	Jenis SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
31	BBP2TP SURABAYA	1780.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	240.000.000	28.491.058	1	1	28.491.058	211.508.942	88,13	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
32	BBP2TP SURABAYA	1780.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	SBKU	508.000.000	9.868.600	1	1	9.868.600	498.131.400	98,06	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
33	BBP2TP MEDAN	1780.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	480.000.000	7.440.000	1	1	7.440.000	472.560.000	98,45	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
34	BBP2TP MEDAN	1780.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	SBKU	5.700.000	29.556.085	141	141	209.617	5.490.383	96,32	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

No	Satker	RO	Jenis SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
35	BBP2TP MEDAN	1780.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	240.000.000	44.643.493	1	1	44.643.493	195.356.507	81,4	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
36	BBP2TP MEDAN	1780.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	SBKU	508.000.000	10.565.160	1	1	10.565.160	497.434.840	97,92	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
37	BPTP PONTIANAK	1780.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	480.000.000	9.580.310	1	1	9.580.310	470.419.690	98	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
38	BPTP PONTIANAK	1780.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	SBKU	5.700.000	148.210.337	59	59	2.512.039	3.187.961	55,93	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

No	Satker	RO	Jenis SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
39	BPTP PONTIANAK	1780.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	240.000.000	33.895.934	1	1	33.895.934	206.104.066	85,88	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
40	BPTP PONTIANAK	1780.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	SBKU	508.000.000	18.797.107	1	1	18.797.107	489.202.893	96,3	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
41	BBP2TP AMBON	1780.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	480.000.000	9.900.000	1	1	9.900.000	470.100.000	97,94	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Lampiran 9. Monitoring Penggunaan SBK

SATKER	RO	JENIS RO	INDEKS SBK	RVRO	REALISASI ANGGARAN	INDEKS REALISASI ANGGARAN	MENGGUNAKAN SBK
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1777.AFA.001 Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma (NSPK)	SBKK	95.000.000	5	174.775.960	34.955.192	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1779.AFA.001 Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan (NSPK)	SBKK	95.000.000	7	441.180.044	63.025.720	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.AFA.001 Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan (NSPK)	SBKK	95.000.000	16	591.535.626	36.970.976	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.RAI.001 Kawasan Lada (Hektar)	SBKK	11.610.000	1.175,00	13.813.035.179	11.755.774	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.RAI.006 Kawasan Kopi (Hektar)	SBKK	16.120.000	8.745,00	81.573.302.831	9.327.993	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.RAI.007 Kawasan Kakao (Hektar)	SBKK	20.000.000	5.316,00	62.593.717.557	11.774.589	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5889.AFA.001 Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi), dan Pemasaran Hasil Perkebunan (NSPK)	SBKK	95.000.000	14	787.291.429	56.235.102	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5889.RAG.001 Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan (Unit)	SBKK	43.000.000	41	832.580.645	20.306.845	Ya

SATKER	RO	JENIS RO	INDEKS SBK	RVRO	REALISASI ANGGARAN	INDEKS REALISASI ANGGARAN	MENGGUNAKAN SBK
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5889.RAG.002 Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (Unit)	SBKK	91.350.000	15	864.650.000	57.643.333	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5890.ABR.001 Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan (Rekomendasi Kebijakan)	SBKK	95.536.000	17	748.150.283	44.008.840	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5890.AFA.001 Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan (NSPK)	SBKK	95.000.000	6	188.134.660	31.355.776	Ya
BBP2TP SURABAYA	1779.CAG.001 Perangkat Perlindungan Perkebunan (Unit)	SBKK	84.412.000	17	1.133.591.595	66.681.858	Ya
BBP2TP SURABAYA	5888.RAI.006 Kawasan Kopi (Hektar)	SBKK	16.120.000	2.605,00	26.520.154.501	10.180.481	Ya
BBP2TP SURABAYA	5888.RAI.007 Kawasan Kakao (Hektar)	SBKK	20.000.000	1.000,00	11.920.006.100	11.920.006	Ya
BBP2TP MEDAN	1779.CAG.001 Perangkat Perlindungan Perkebunan (Unit)	SBKK	84.412.000	19	1.130.466.134	59.498.217	Ya
BBP2TP MEDAN	5888.RAI.006 Kawasan Kopi (Hektar)	SBKK	16.120.000	6.000,00	25.974.055.589	4.329.009	Ya
BBP2TP MEDAN	5888.RAI.007 Kawasan Kakao (Hektar)	SBKK	20.000.000	400	4.150.972.189	10.377.430	Ya
BPTP PONTIANAK	1779.CAG.001 Perangkat Perlindungan Perkebunan (Unit)	SBKK	84.412.000	7	451.806.666	64.543.809	Ya
BBP2TP AMBON	1779.CAG.001 Perangkat Perlindungan Perkebunan (Unit)	SBKK	84.412.000	9	1.345.633.765	149.514.862	Tidak

SATKER	RO	JENIS RO	INDEKS SBK	RVRO	REALISASI ANGGARAN	INDEKS REALISASI ANGGARAN	MENGGUNAKAN SBK
BBP2TP AMBON	5888.RAI.007 Kawasan Kakao (Hektar)	SBKK	20.000.000	0	22.827.430.001	0	Tidak
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5889.RBK.002 Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (unit)	SBKK	289.000.000	3	0	0	Tidak
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.RAI.004 Kawasan Tebu (Hektar)	SBKK	37.880.000	32.119,95	382.058.873.547	6.604.758	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.RAI.002 Kawasan Pala (Hektar)	SBKK	2.580.000	3.700,00	15.577.473.480	4.210.127	Ya
BBP2TP AMBON	5888.RAI.002 Kawasan Pala (Hektar)	SBKK	2.580.000	4.300,00	21.145.834.817	4.917.636	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5888.RAI.009 Kawasan Jambu Mete (Hektar)	SBKK	3.470.000	1.800,00	5.542.684.443	3.079.269	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1780.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	480.000.000	1	300.121.470	300.121.470	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1780.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	458.000.000	1	354.262.773	354.262.773	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1780.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	SBKU	5.700.000	370	397.981.805	1.075.626	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1780.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	SBKU	552.500.000	11	2.024.627.776	184.057.070	Ya
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1780.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	240.000.000	8	1.228.708.032	153.588.504	Ya

SATKER	RO	JENIS RO	INDEKS SBK	RVRO	REALISASI ANGGARAN	INDEKS REALISASI ANGGARAN	MENGGUNAKAN SBK
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1780.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	SBKU	508.000.000	9	1.761.809.320	195.756.591	Ya
BBP2TP SURABAYA	1780.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	480.000.000	1	9.800.000	9.800.000	Ya
BBP2TP SURABAYA	1780.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	SBKU	5.700.000	108	63.978.740	592.395	Ya
BBP2TP SURABAYA	1780.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	240.000.000	1	28.491.058	28.491.058	Ya
BBP2TP SURABAYA	1780.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	SBKU	508.000.000	1	9.868.600	9.868.600	Ya
BBP2TP MEDAN	1780.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	480.000.000	1	7.440.000	7.440.000	Ya
BBP2TP MEDAN	1780.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	SBKU	5.700.000	141	29.556.085	209.617	Ya
BBP2TP MEDAN	1780.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	240.000.000	1	44.643.493	44.643.493	Ya
BBP2TP MEDAN	1780.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	SBKU	508.000.000	1	10.565.160	10.565.160	Ya
BPTP PONTIANAK	1780.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	480.000.000	1	9.580.310	9.580.310	Ya
BPTP PONTIANAK	1780.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	SBKU	5.700.000	59	148.210.337	2.512.039	Ya
BPTP PONTIANAK	1780.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	240.000.000	1	33.895.934	33.895.934	Ya

SATKER	RO	JENIS RO	INDEKS SBK	RVRO	REALISASI ANGGARAN	INDEKS REALISASI ANGGARAN	MENGGUNAKAN SBK
BPTP PONTIANAK	1780.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	SBKU	508.000.000	1	18.797.107	18.797.107	Ya
BBP2TP AMBON	1780.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	480.000.000	1	9.900.000	9.900.000	Ya
BBP2TP AMBON	1780.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	SBKU	5.700.000	11	75.123.400	6.829.400	Tidak
BBP2TP AMBON	1780.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	240.000.000	0	39.295.900	0	Tidak
BBP2TP AMBON	1780.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	SBKU	508.000.000	0	18.326.085	0	Tidak

Lampiran 10. Indeks Mutu Dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan

		Sampel	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Indeks Mutu dan Keamanan	Indeks Mutu dan Keamanan
1	Kopi	Sangrai Robusta, Banten		1	=24/37	0.649
2		Greenbean Robusta, Banten	1			
3		Greenbean Arabika, Banten	1			
4		Sangrai Arabika, Banten		1		
5		Bubuk Arabika, Banten		1		
6		Bubuk Robusta, Banten		1		
7		Greenbean Arabika, Banten	1			
8		Roastbean Arabika, Jawa Barat	1			
9		Greenbean Arabika, Jawa Barat	1			
10		Greenbean Robusta, Yogyakarta	1			
11	Teh	Teh Hijau, Jawa Barat		1		
12		Teh Hijau, Jawa Barat		1		
13		Teh Hitam, Jawa Barat	1			
14		Teh Putih, Jawa Barat	1			
15		Greentea Powder, Jawa Barat	1			
16	Kakao	Biji Kakao, Yogyakarta		1		
17		Kakao, Yogyakarta		1		
18		Kakao, Yogyakarta	1			
19	Pala	Biji Pala, Sulawesi Utara		1		
20		Biji Pala, Sulawesi Utara	1			
21		Biji Pala, Sulawesi Utara	1			
22	Kelapa	Gula Semut, Yogyakarta		1		
23		Gula Batok, Yogyakarta		1		
24		Gula Semut, Jawa Tengah	1			
25	GKP	Gula Kristal Putih (MG Familiku)	1			
26		Gula Kristal Putih (LA-KU)	1			
27		Gula Kristal Putih (Segi Tiga Emas)	1			
28		Gula Kristal Putih (GULARE)		1		
29		GulaVit	1			
30		Gula Pasir "NONA Manis Alami"		1		
31		Gula Tebu (MAIKU Sugar)	1			
32		Gula Kristal Putih (LAFESTA)	1			
33		Gula Kristal Putih (BHAkti KARYA)	1			
34		Gula Pasir Putih (Day 2 Day)	1			
35		Angel Product	1			
36	Lada	Lada, Kepulauan Bangka Belitung	1			
37		Lada, Kepulauan Bangka Belitung	1			

Total Sampel Memenuhi 24
Total Sampel 37

Lampiran 11. Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan

No	Komoditas	Sebelum	Jumlah produk	Sesudah	Jumlah produk olahan	Nilai Indeks Hilirisasi Bun (Dirjen)	Target Renstra
2025			7		10	1.43	1.30
1	Kopi	Cherry	1	Green bean, roast beans, kopi bubuk	3		
2	Sagu	Sagu Basah	1	Sagu kering	1		
3	Kakao	Buah kakao	1	Biji kakao kering	1		
4	Lada	Biji lada	1	Lada bubuk	1		
5	Pala	Buah pala			0		
6	Tebu	Tebu	1	Gula kristal putih	1		
7	Mete	Buah mete			0		
8	Cengkeh	Cengkeh basah	1	Cengkeh kering	1		
9	Kelapa	Buah kelapa	1	Kopra, Gula semut kelapa	2		

Lampiran 12. Indeks harga yang diterima Pekebun

No	Bulan	Indeks Harga Yang Diterima Pekebun
1	Januari	199,31
2	Februari	201,06
3	Maret	203,92
4	April	197,53
5	Mei	198,82
6	Juni	195,89
7	Juli	193,69
8	Agustus	196,78
9	September	200,08
10	Oktober	200,4
11	November	198,69
12	Desember	198,41
Rata-rata Tahun 2025		198,71

Lampiran 13. Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perkebunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
UNIT ESELON I
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Nama Organisasi:
Direktorat Jenderal Perkebunan
2. Indikator Kinerja Utama
 - a. **Sasaran Program:**
Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SP.1	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan
IKSP.1	Produksi kelapa sawit (TBS)
	Deskripsi: Tonase TBS nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan
	Sumber Data: Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS)
	Cara Menghitung: Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode
	Satuan Pengukuran: Ton
	Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize
	Periode Data IKU: Tahunan
	Unit yang Terlibat: Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma
IKSP.2	Produksi Kelapa
	Deskripsi: Tonase kelapa nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan
	Sumber Data: Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS)
	Cara Menghitung: Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode
	Satuan Pengukuran: Ton
	Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize
	Periode Data IKU: Tahunan
	Unit yang Terlibat: Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma
IKSP.3	Produksi Sagu
	Deskripsi:

Lanjutan Lampiran 13.

	<p>Tonase sagu nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan</p> <p>Sumber Data: Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS)</p> <p>Cara Menghitung: Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode</p> <p>Satuan Pengukuran: Ton</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU: Tahunan</p> <p>Unit yang Terlibat: Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma</p>
IKSP.4	Produksi Lada
	<p>Deskripsi: Tonase lada nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan</p> <p>Sumber Data: Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS)</p> <p>Cara Menghitung: Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode</p> <p>Satuan Pengukuran: Ton</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU: Tahunan</p> <p>Unit yang Terlibat: Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan</p>
IKSP.5	Produksi Pala
	<p>Deskripsi: Tonase pala nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan</p> <p>Sumber Data: Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS)</p> <p>Cara Menghitung: Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode</p> <p>Satuan Pengukuran: Ton</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU: Tahunan</p> <p>Unit yang Terlibat: Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan</p>
IKSP.6	Produksi Cengkeh
	<p>Deskripsi: Tonase cengkeh nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan</p> <p>Sumber Data: Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS)</p> <p>Cara Menghitung: Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode</p>

Lanjutan Lampiran 13.

	<p>Satuan Pengukuran: Ton</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit yang Terlibat:</p> <p>Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan</p>
IKSP.7	Produksi Vanili
	<p>Deskripsi:</p> <p>Tonase vanili nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan</p> <p>Sumber Data:</p> <p>Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS)</p> <p>Cara Menghitung:</p> <p>Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode</p> <p>Satuan Pengukuran: Ton</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU: Tahunan</p> <p>Unit yang Terlibat:</p> <p>Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan</p>
IKSP.8	Produksi Kopi
	<p>Deskripsi:</p> <p>Tonase kopi nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan</p> <p>Sumber Data:</p> <p>Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS)</p> <p>Cara Menghitung:</p> <p>Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode</p> <p>Satuan Pengukuran: Ton</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU: Tahunan</p> <p>Unit yang Terlibat:</p> <p>Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan</p>
IKSP.9	Produksi Tebu
	<p>Deskripsi:</p> <p>Tonase tebu nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan</p> <p>Sumber Data:</p> <p>Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS)</p> <p>Cara Menghitung:</p> <p>Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode</p> <p>Satuan Pengukuran: Ton</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU: Tahunan</p>

Lanjutan Lampiran 13.

	Unit yang Terlibat: Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan
IKSP.10	Produksi Karet
	Deskripsi: Tonase karet nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan Sumber Data: Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Cara Menghitung: Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode Satuan Pengukuran: Ton Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan Unit yang Terlibat: Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan
IKSP.11	Produksi Kakao
	Deskripsi: Tonase kakao nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan Sumber Data: Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Cara Menghitung: Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode Satuan Pengukuran: Ton Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan Unit yang Terlibat: Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan
IKSP.12	Produksi Teh
	Deskripsi : tonase teh nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan Sumber Data : Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Cara Menghitung : Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode Satuan Pengukuran: Ton Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan Unit yang Terlibat: Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan

Lanjutan Lampiran 13.

IKSP.13	Produksi Jambu Mete
	Deskripsi: Tonase Jambu Mete nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan. Sumber Data: Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Cara Menghitung: Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode Satuan Pengukuran: Ton Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan Unit yang Terlibat: Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan
IKSP.14	Produksi Tanaman Palma Lainnya
	Deskripsi: Produksi yang dihitung yakni produksi aren dan produksi pinang. Tonase aren dan pinang nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan. Sumber Data: Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Cara Menghitung: Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode Satuan Pengukuran: Ton Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan Unit yang Terlibat: Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma
IKSP.15	Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya
	Deskripsi: Produksi yang dihitung yakni kapas, tembakau, nilam, sereh wangi dan kayu manis. Tonase kapas, tembakau, nilam, sereh wangi dan kayu manis nasional yang dihasilkan pada tahun berjalan. Sumber Data: Ditjen Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Cara Menghitung: Jumlahkan hasil produksi komoditas di suatu wilayah dalam satu periode Satuan Pengukuran: Ton Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan Unit yang Terlibat:

Lanjutan Lampiran 13.

Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan
--

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SP.2	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi
IKSP.2.1	Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi
	Deskripsi: Menghitung data produksi kelapa sawit dalam bentuk TBS (ton) yang digunakan untuk produksi Biodiesel
	Sumber Data: Data produksi kelapa sawit (TBS) dari Statistik Perkebunan Ditjen Perkebunan dan realisasi produksi Biodiesel bersumber dari kelapa sawit yang diperoleh dari Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM
	Cara Menghitung: 1. Hitung realiasi pemanfaatan minyak sawit (CPO) yang digunakan untuk produksi Biodiesel (ton CPO) 2. Konversi data minyak sawit untuk produksi biodiesel dalam bentuk CPO menjadi bentuk TBS dengan rasio konversi 1 ton cpo = 5 ton TBS
	Unit yang Terlibat: Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM

SP.3	Meningkatnya indeks harga yang diterima pekebun
IKSP.3.1	Indeks harga yang diterima Pekebun
	Definisi: Menunjukkan perkembangan harga komoditas pertanian yang diterima petani saat dijual di pasar (<i>farm gate</i>). Indeks dihitung berdasarkan survey harga di tingkat produsen setiap bulan. Indeks digunakan sebagai komponen dalam perhitungan NTP (Nilai Tukar Petani)
	Bukti Realisasi/Pemenuhan IKA: Badan Pusat Statistik (BPS)
	Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS)
	Cara Menghitung: Hitung indeks harga yang diterima pekebun tahun sebelumnya (t-1) $\text{Target Indeks Harga Pekebun } (t) = \{(\text{Indeks Harga Pekebun } (t-1) \times 0,5\%) + \text{Indeks Harga Pekebun } (t-1)\}$
	Catatan Khusus: Data indeks diambil dari BPS dengan asumsi pertumbuhan 0,5%
	Unit yang Terlibat: Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan

Lanjutan Lampiran 13.

SP.4	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan
IKSP.4.1	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan
	<p>Definisi: Nilai yang menunjukkan kesesuaian mutu dan keamanan produk komoditas perkebunan terhadap standar atau kriteria tertentu yang ditetapkan</p>
	<p>Bukti Realisasi/Pemenuhan IKA: Data hasil pengujian sampel komoditas perkebunan sesuai persyaratan mutu dan keamanan</p>
	<p>Sumber Data: - Data komoditas binaan Ditjen Perkebunan mengacu RPJMN 2025-2029 - Data hasil pengujian sampel dari laboratorium</p>
	<p>Cara Menghitung: 1. Bandingkan hasil pengujian sampel dengan standar persyaratan mutu dan keamanan yang berlaku di perdagangan; 2. Hitung jumlah sampel yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan; 3. Hitung total jumlah sampel yang akan diuji di laboratorium.</p> <p style="text-align: center;"><i>Indeks Mutu dan Keamanan = ((Jumlah sampel yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan berdasarkan pengujian) / (Total Jumlah Sampel))</i></p>
	<p>Catatan Khusus: - Pengujian dilakukan di Laboratorium terakreditasi; - Pengambilan sampel dilakukan oleh PPC bersertifikat. - Pengambilan sampel dilakukan pada UPH yang memperoleh fasilitas dari Direktorat HHP - Jumlah pengambilan sampel ditentukan</p>
	<p>Unit yang Terlibat: Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan</p>

SP.5	Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan yang siap digunakan
IKSP.5.1	Volume ekspor komoditas perkebunan (Ribu Ton)
	<p>Definisi: Volume 18 komoditas perkebunan yang diekspor</p>
	<p>Bukti Realisasi/Pemenuhan IKA: Badan Pusat Statistik (BPS)</p>
	<p>Sumber Data: Data Ekspor Impor / Badan Pusat Statistik (BPS)</p>
	<p>Cara Menghitung: Hitung volume ekspor komoditas perkebunan</p> <p style="text-align: center;"><i>Volume Ekspor = Jumlah Total Volume ekspor komoditas kelapa, sagu, kopi, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, vanili, teh, kelapa sawit, tebu, jambu mete, tembakau, kapas, nilam, pinang, kayu manis</i></p>
	<p>Catatan Khusus: -</p>

Lanjutan Lampiran 13.

Unit yang Terlibat: Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan	
SP.6	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi komoditas perkebunan unggulan
IKSP.6.1	Indeks Hilirisasi komoditas perkebunan unggulan
Definisi: Indeks Hilirisasi Perkebunan mengukur tingkat pengolahan dan nilai tambah produk perkebunan unggulan	
Bukti Realisasi/Pemenuhan IKA: Sertifikat produk pangan industri rumah tangga (SPP-IRT), ijin edar MD terkait produk hasil hilirisasi, HACCP, SPPT-SNI, bukti penerapan penjaminan mutu dan keamanan pangan lainnya, atau invoice penjualan.	
Sumber Data: Kementerian Pertanian	
Cara Menghitung: 1. Hitung jumlah jenis produk komoditas perkebunan sebelum di hilirisasi 2. Hitung jumlah jenis produk olahan komoditas perkebunan yang telah di hilirisasi <i>Indeks Hilirisasi = (Jumlah jenis produk olahan perkebunan yang telah di hilirisasi) / (Jumlah jenis produk perkebunan sebelum di hilirisasi)</i>	
Catatan Khusus: - Komoditas perkebunan yaitu, kelapa, sagu, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh, tebu, jambu mete - Pengambilan sampel di tingkat poktan/gapoktan/pelaku usaha/kelembagaan ekonomi petani lainnya	
Unit yang Terlibat: Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan	

b. Sasaran Program:

1) Program : Dukungan Manajemen

SASARAN PROGRAM(SP) SP 8: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel	
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) IKP 8.1: Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Perkebunan	
	TARGET (t-1/baseline)
PENANGGUNG JAWAB IKP: Ditjen Perkebunan	Indikator baru
SATUAN IKP: Indeks	

Target				
2025	2026	2027	2028	2029
0.83	0.83	0.84	0.84	0.85

Lanjutan Lampiran 13.

DEFINISI
<ul style="list-style-type: none"> • Indeks tata kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan merepresentasikan tata kelola birokrasi di lingkup Ditjen Perkebunan sebagai bagian yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. • Indeks tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Perkebunan diukur berdasarkan 5 parameter meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan 2. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perkebunan 4. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Perkebunan 5. Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan • Semakin tinggi indeks tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Perkebunan, maka semakin baik tata kelola birokrasinya serta semakin tinggi dukungan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

BUKTI REALISASI	SUMBER DATA
Laporan hasil pengukuran indeks tata kelola birokrasi Ditjen Perkebunan	Set Ditjen Perkebunan

LEVEL KINERJA: Kinerja Strategis subsektor
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU: <i>Exact</i>
JENIS/KUALITAS IKU: Intermediate Outcome Lv 2 (Skor: 0,3)
KLASIFIKASI/POLARISASI IKU: <i>Maximize</i>
FORMULA/CARA MENGHITUNG: $Itakel = (WTL\ 1 \times (TL\ 1/100)) + (WTL\ 2 \times (TL\ 2/100)) + (WIKPA \times (IKPA/100)) + (WIKM \times (IKM/4)) + (WLINT \times (LINT/4))$ Dimana : -Itakel = Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Perkebunan -WTL 1= Bobot pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan (20%) -TL 1 = Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan (20%) -WTL 2= Bobot pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan (20%) -TL 2 = Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan (20%) -WIKPA= Bobot Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perkebunan (20%) -IKPA= Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perkebunan -WIKM= Bobot Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Perkebunan (20%) -IKM= Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Perkebunan -WLINT= Bobot kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan -LINT= Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN: 1. Ambil data Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan

Lanjutan Lampiran 13.

2. Ambil data pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan
3. Ambil data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perkebunan
4. Ambil data Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Perkebunan
5. Ambil data kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan
6. Hitung indeks tata kelola birokrasi Ditjen Perkebunan dengan formula diatas
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Set Ditjen Perkebunan
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Set Ditjen Perkebunan
UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA
Sekretariat Ditjen Perkebunan
CATATAN KHUSUS

Lampiran 14. Matrik Kinerja Dan Pendanaan Ditjen. Perkebunan 2025-2029

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Jenderal Perkebunan									3.074.943,07	5.998.172,65	3.397.782,31	2.288.833,05	2.311.395,47
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									108.999,40	127.716,38	128.216,38	128.216,38	128.216,38
SP.5	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel												
IKP 5.1	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan	Indeks	Indikator baru	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85	108.999,40	127.716,38	128.216,38	128.216,38	128.216,38
018.WA - Program Dukungan Manajemen													
1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan									108.999,40	127.716,38	128.216,38	128.216,38	128.216,38
SK 1	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal												

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	%	-	85	85	88	88	90					
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	%	-	90	90	90	90	90					
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												
1780.EBD.Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	2	7	22	22	22	22					
1780.EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat	Dokumen	4	5	26	26	26	26					
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1780.EBA.Z06	- Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	1					
1780.EBA.Z07	- Layanan BMN UPT Pusat	Layanan	4	4	4	4	4	4					
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan												
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan	Nilai	89,70	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00					
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	89,00	11,00	-	-	-	-					
1780.EBD.Z26	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	9	1	1	1	1					
1780.EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan UPT Pusat	Dokumen	4	4	4	4	4	4					
SK 3	Meningkatnya kepuasan												

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan												
IKK 3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Skala Likert (1-4)	Indikator Baru	3	3	3	3	3					
IKK 3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3					
IKK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3					
IKK 3.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan												
IKK 3.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3					
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
1780.EBA.Z01	Layanan Hukum	Layanan	2	2	3	3	3	3					
1780.EBA.Z02	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1					
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1					
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen												

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Sekretariat Ditjen Perkebunan												
IKK 4.1	Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3					
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
1780.EBA.Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1					
1780.EBA.994	Layanan perkantoran	Layanan	5	5	5	5	5	5					
1780.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	5	5	5	5	5	5					
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1780.EBD.Z33	- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	1	1	1	1	1	1					
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal												
1780.EBC.Z13	Layanan Manajemen SDM	Orang	840	759	991	991	991	991					
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	3	1	2	2	2	2					
1780.EBB.952	Layanan Prasarana Internal	Unit	2	-	-	1	1	1					
Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri									2.965.943,67	5.870.456,27	3.269.565,94	2.160.616,68	2.183.179,09
SP.9	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan												
IKP 9.1	Produksi Kelapa Sawit	Ton	235.421.494	239.646.870	243.241.575	245.432.325	253.040.740	257.074.690					
IKP 9.2	Produksi Kelapa	Ton	2.792.228	2.880.690	2.890.917	2.901.144	2.911.371	2.936.021					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKP 9.3	Produksi Sagu	Ton	393.284	393.62 3	413.304	433.96 9	455.66 7	478.45 1					
IKP 9.4	Produksi Lada	Ton	58.897	64.408	64.408	64.537	64.601	64.666					
IKP 9.5	Produksi Pala	Ton	39.558	41.527	41.568	41.610	41.652	41.693					
IKP 9.6	Produksi Cengkeh	Ton	133.408	133.57 0	133.703	133.83 7	133.97 1	134.10 5					
IKP 9.7	Produksi Vanili	Ton	1.212	1.582	1.585	1.585	1.587	1.588					
IKP 9.8	Produksi Kopi	Ton	758.725	780.95 7	786.119	791.43 4	796.77 6	802.21 0					
IKP 9.9	Produksi Tebu	Ton	33.216.612	36.813. 539	39.555.9 79	42.478. 762	60.450. 243	84.714. 460					
IKP 9.10	Produksi Karet	Ton	2.132.088	2.496.3 64	2.470.67 6	2.756.8 65	2.917.0 26	3.080.1 14					
IKP 9.11	Produksi Kakao	Ton	617.112	632.78 7	633.290	633.79 2	634.29 4	634.79 6					
IKP 9.12	Produksi Teh	Ton	116.418	116.55 5	116.579	116.60 2	116.62 4	116.64 8					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKP 9.13	Produksi Jambu Mete	Ton	136.505	136.64 2	136.915	137.25 7	137.60 0	138.01 3					
IKP 9.14	Produksi Tanaman Palma Lainnya	Ton	186.765	188.23 6	189.899	192.27 0	194.17 3	195.95 3					
IKP 9.15	Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	Ton	283.070	317.79 0	383.719	400.83 1	417.94 6	435.06 5					
SP.10	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi												
IKP.10.1	Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	Juta Ton	Indikator Baru	66,37	87,35	89,97	93,67	98,78					
SP 11	Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun												
IKP 11.1	Indeks harga yang diterima Pekebun	Nilai	Indikator Baru	154,80	160,10	165,70	171,40	177,30					
SP 12	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan												

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKP 12.1	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Nilai	Indikator Baru	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85					
SP 13	Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan												
IKP 13.1	Volume ekspor komoditas perkebunan	ribu ton	38.034,00	38.224,00	38.415,00	38.607,00	38.800,00	38.994,00					
SP.14	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi												
IKP 14.1	Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan	Nilai	Indikator Baru	1,30	1,50	1,80	2,00	2,20					
1777 Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit Dan Aneka Palma									90.509,02	474.798,55	224.045,79	120.674,00	121.757,80
SK.1	Terpenuhinya produktivitas komoditas tanaman kelapa sawit dan aneka palma												

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK1.1	Produktivitas Kelapa Sawit	Ton/Ha	17,20	18,45	18,45	18,45	18,45	18,50					
IKK1.2	Produktivitas Kelapa	Ton/Ha	1,12	1,13	1,14	1,16	1,18	1,21					
IKK1.3	Produktivitas Sagu	Ton/Ha	3,01	3,12	3,14	3,16	3,18	3,19					
IKK1.4	Produktivitas Tanaman Palma Lainnya	Ton/Ha	3,50	3,53	3,54	3,55	3,56	3,58					
1777.AEA	Koordinasi												
1777.AEA.001	Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Monev, dan Pelaporan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Kegiatan	7	8	-	20	20	20					
1777.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
1777.AFA.001	Peraturan/Norma/Peraturan edoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	NSPK	6	5	-	13	13	13					
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan												

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1777.RAI.001	Kawasan Kelapa	Ha	11.260	11.515	154.000	64.275	15.000	15.000					
1777.RAI.002	Kawasan Sagu	Ha	551	1.700	3.350	3.350	3.350	3.350					
1777.RAI.003	Kawasan Pinang	Ha	100	-	-	300	300	300					
1777.CAI.001	Kawasan Tanaman Palma Lainnya	Ha	-	-	-	500	500	500					
	Kawasan Kelapa Sawit	Ha	-	25.500	36.000	46.500	52.000	57.000					
1777.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
1777.QDC.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Orang	-	-	3.800	4.600	5.200	6.000					
SK.2	Tersedianya komoditas perkebunan untuk bahan baku bio energi												
IKK 2.1	%tase ketersediaan komoditas perkebunan untuk bahan baku bio energi	%	Indikator Baru	28	36	37	37	38					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1777.AEA	Koordinasi													
1777.AEA.002	Koordinasi, Bimtek, Pembinaan, Money dan Pelaporan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit untuk mendukung Bio Energi	Kegiatan	-	1	1	1	1	1						
5888 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim Dan Tahunan									1.811.291,96	1.721.379,76	1.970.829,86	1.868.696,68	1.884.908,80	
SK.1	Terpenuhinya produktivitas tanaman semusim dan tahunan													
IKK 1.1	Produktivitas Lada	Ton/Ha	0,62	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68						
IKK 1.2	Produktivitas Pala	Ton/Ha	0,38	0,41	0,42	0,42	0,42	0,43						
IKK 1.3	Produktivitas Cengkeh	Ton/Ha	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40						
IKK 1.4	Produktivitas Vanili	Ton/Ha	0,31	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39						
IKK 1.5	Produktivitas Kopi	Ton/Ha	0,79	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82						
IKK 1.6	Produktivitas Kakao	Ton/Ha	0,71	0,71	0,71	0,72	0,72	0,72						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 1.7	Produktivitas Tebu	Ton/Ha	63,78	69,98	73,42	75,82	83,50	87,40					
IKK 1.8	Produktivitas Karet	Ton/Ha	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,95					
IKK 1.9	Produktivitas Teh	Ton/Ha	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62					
IKK 1.10	Produktivitas Jambu Mete	Ton/Ha	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53					
IKK 1.11	Produktivitas tanaman semusim dan tahunan lainnya	Ton/Ha	3,34	3,34	3,45	3,47	3,50	3,51					
5888.AEA	Koordinasi												
5888.AEA.001	Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Monev, dan Pelaporan budidaya Tanaman Semusim dan Tahunan	Kegiatan	7	6	-	34	34	34					
5888.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
5888.AFA.001	Peraturan/Norma/Peraturan Edoman Tanaman Semusim dan Tahunan	NSPK	11	16	-	15	15	15					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5888.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan													
5888.RAI.001	Kawasan Lada	Ha	200	1.200	3.438	2.362	3.000	3.100						
5888.RAI.002	Kawasan Pala	Ha	1.000	8.000	14.800	22.200	9.000	9.000						
5888.RAI.003	Kawasan Cengkeh	Ha	700	-	-	9.500	9.500	9.500						
5888.RAI.004	Kawasan Tebu	Ha	4.700	100.453	99.547	24.000	24.000	24.000						
5888.RAI.005	Kawasan Vanili	Ha	15	-	-	50	50	50						
5888.RAI.006	Kawasan Kopi	Ha	11.600	17.900	86.000	15.000	15.000	15.000						
5888.RAI.007	Kawasan Kakao	Ha	1.350	8.716	175.500	68.734	15.000	15.000						
5888.RAI.008	Kawasan Karet	Ha	1.200	-	-	15.000	15.000	15.000						
5888.RAI.009	Kawasan Jambu Mete	Ha	3.700	1.800	48.200	6.000	6.000	6.000						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
5888.RAI.010	Kawasan Teh	Ha	-	-	-	4.950	4.950	4.950					
5888.CAI.001	Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	Ha	-	-	-	1.350	1.450	1.550					
5888.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
5888.QDC.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Semusim dan Tahunan	Orang	-	-	32.200	32.200	32.200	32.200					
1779 Pelindungan Perkebunan									10.541,17	5.049,51	92.007,60	106.203,92	109.567,48
SK.1	Terlindungnya komoditas perkebunan dari OPT dan dampak perubahan iklim												
IKSK 1.1	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada	%	71	75	75	76	76	76					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	komoditas Kelapa Sawit													
IKSK 1.2	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kelapa	%	31	35	35	36	36	36						
IKSK 1.3	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Sagu	%	45	45	45	46	46	46						
IKSK 1.4	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Lada	%	25	25	25	26	26	26						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKSK 1.5	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Pala	%	20	20	20	21	21	21					
IKSK 1.6	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Cengkeh	%	40	40	40	41	41	41					
IKSK 1.7	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Vanili	%	48	60	60	61	61	61					
IKSK 1.8	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan	%	77	77	77	78	78	78					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	DPI pada komoditas Kopi												
IKSK 1.9	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Tebu	%	15	35	35	36	36	36					
IKSK 1.10	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Karet	%	33	45	45	46	46	46					
IKSK 1.11	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kakao	%	40	40	40	41	41	41					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKSK 1.12	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Teh	%	70	70	70	71	71	71					
IKSK 1.13	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Jambu Mete	%	35	35	35	35	35	35					
IKSK 1.14	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Tanaman Palma Lainnya	%	19	19	19	20	20	20					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKSK 1.15	- Persentase area/wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	%	19	19	19	20	20	20					
1779.AEA	Koordinasi												
1779.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan	Kegiatan	7	5	-	17	17	17					
1779.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
1779.AFA.001	Peraturan/Norma/Peraturan Pelindungan Perkebunan	NSPK	7	7	-	7	7	7					
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan												
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan	Ha	81	-	22	400	400	400					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kebakaran Lahan dan Kebun													
1779.RAI.002	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Ha	4.045	-	450	5.350	6.275	6.275						
1779.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat													
1779.QDD.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Kelompok Masyarakat	51	23	4	23	23	23						
1779.QDD.002	Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Kelompok Masyarakat	-	-	13	210	260	257						
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	Unit	61	62	-	62	62	62						
SK.2	Terwujudnya layanan													

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pelindungan perkebunan													
IKSK 2.1	Persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.2	Persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.3	Persentase layanan pelindungan komoditas Sagu di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.4	Persentase layanan pelindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.5	Persentase layanan pelindungan komoditas Pala di	%	100	100	100	100	100	100						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	wilayah kerja BBPPTP Medan													
IKSK 2.6	Persentase layanan perlindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.7	Persentase layanan perlindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.8	Persentase layanan perlindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.9	Persentase layanan perlindungan komoditas Tebu di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.10	Persentase layanan perlindungan komoditas Karet di	%	100	100	100	100	100	100						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	wilayah kerja BBPPTP Medan													
IKSK 2.11	Persentase layanan perlindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.12	Persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.13	Persentase layanan perlindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.14	Persentase layanan perlindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.15	Persentase layanan perlindungan komoditas Vanili di	%	100	100	100	100	100	100						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	wilayah kerja BBPPTP Surabaya													
IKSK 2.16	Persentase layanan perlindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.17	Persentase layanan perlindungan komoditas Tebu di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.18	Persentase layanan perlindungan komoditas Karet di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.19	Persentase layanan perlindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.20	Persentase layanan perlindungan komoditas Teh di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKSK 2.21	Persentase layanan perlindungan komoditas Jambu Mete di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100					
IKSK 2.22	Persentase layanan perlindungan komoditas semusim dan tahunan lainnya di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100					
IKSK 2.23	Persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100					
IKSK 2.24	Persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100					
IKSK 2.25	Persentase layanan perlindungan komoditas Sagu di	%	100	100	100	100	100	100					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	wilayah kerja BBPPTP Ambon													
IKSK 2.26	Persentase layanan perlindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.27	Persentase layanan perlindungan komoditas Pala di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.28	Persentase layanan perlindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.29	Persentase layanan perlindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.30	Persentase layanan perlindungan komoditas Kopi di	%	100	100	100	100	100	100						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	wilayah kerja BBPPTP Ambon													
IKSK 2.31	Persentase layanan perlindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.32	Persentase layanan perlindungan komoditas Jambu Mete di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.33	Persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BPTP Pontianak	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.34	Persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BPTP Pontianak	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.35	Persentase layanan perlindungan komoditas Lada di	%	100	100	100	100	100	100						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	wilayah kerja BPTP Pontianak													
IKSK 2.36	Persentase layanan perlindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BPTP Pontianak	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.37	Persentase layanan perlindungan komoditas Karet di wilayah kerja BPTP Pontianak	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.38	Persentase layanan perlindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak	%	100	100	100	100	100	100						
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	Unit	13	6	-	18	21	23						
1779.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat													

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1779.BAA.001	Layanan Proteksi Tanaman Perkebunan	Orang	-	-	26	73	82	92					
5890 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan									1.026.539,83	3.664.272,45	972.806,31	54.305,70	55.448,64
SK.1	Tersedianya benih perkebunan berdasarkan kebutuhan produksi perkebunan												
IKSK 1.1	- Persentase ketersediaan benih kelapa sawit terhadap kebutuhan produksi kelapa sawit	%	Indikator Baru	80	80	85	85	90					
IKSK 1.2	- Persentase ketersediaan benih kelapa terhadap kebutuhan produksi kelapa	%	Indikator Baru	75	75	80	80	80					
IKSK 1.3	- Persentase ketersediaan benih sagu terhadap kebutuhan produksi sagu	%	Indikator Baru	60	60	65	65	70					
IKSK 1.4	- Persentase ketersediaan benih lada terhadap	%	Indikator Baru	60	60	65	65	70					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	kebutuhan produksi lada													
IKSK 1.5	- Persentase ketersediaan benih pala terhadap kebutuhan produksi pala	%	Indikator Baru	70	72	75	78	80						
IKSK 1.6	- Persentase ketersediaan benih cengkeh terhadap kebutuhan produksi cengkeh	%	Indikator Baru	70	72	75	78	80						
IKSK 1.7	- Persentase ketersediaan benih vanili terhadap kebutuhan produksi vanili	%	Indikator Baru	60	60	65	65	70						
IKSK 1.8	- Persentase ketersediaan benih kopi terhadap kebutuhan produksi kopi	%	Indikator Baru	75	75	80	80	80						
IKSK 1.9	- Persentase ketersediaan benih tebu terhadap kebutuhan produksi tebu	%	Indikator Baru	75	75	80	80	80						
IKSK 1.10	- Persentase ketersediaan benih karet terhadap	%	Indikator Baru	60	60	65	65	70						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	kebutuhan produksi karet													
IKSK 1.11	- Persentase ketersediaan benih kakao terhadap kebutuhan produksi kakao	%	Indikator Baru	75	75	80	80	80						
IKSK 1.12	- Persentase ketersediaan benih teh terhadap kebutuhan produksi teh	%	Indikator Baru	60	60	65	65	70						
IKSK 1.13	- Persentase ketersediaan benih jambu mete terhadap kebutuhan produksi jambu mete	%	Indikator Baru	60	60	65	65	70						
IKSK 1.14	- Persentase ketersediaan benih tanaman palma lainnya terhadap kebutuhan produksi tanaman palma lainnya	%	Indikator Baru	60	60	65	65	70						
IKSK 1.15	- Persentase ketersediaan benih semusim dan tahunan lainnya terhadap kebutuhan produksi tanaman	%	Indikator Baru	60	60	65	65	70						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	semusim dan tahunan lainnya													
5890.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
5890.ABR.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	Rekomendasi	70,00	17	2	121	121	121						
5890.AEA	Koordinasi													
5890.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan	Kegiatan	7,00	1	-	30	35	40						
5890.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
5890.AFA.001	Peraturan/Norma/Peredoman Perbenihan Perkebunan	NSPK	6,00	6	-	10	10	10						
5890.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
5890.RBK.001	Kebun Benih Sebar Komoditas Perkebunan	Unit(ha)	12,00	1.580	6.638	21	13	10						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5890.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat													
5890.QDD.001	Desa Mandiri Benih Komoditas Perkebunan	Kelompok Masyarakat	-	-	2	6	6	6						
5890.RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
5890.RDK.001	Layanan Pemeliharaan Kebun Benih Sebar Komoditas Perkebunan	Unit(ha)	841,00	635	203	782	743	683						
5890.RDK.002	Layanan Operasional Nursery	Unit	11,00	78	8	9	9	9						
5890.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
5890.RAG.001	Benih Komoditas Perkebunan Siap Salur	Unit (Batang)	-	-	291.042.800	81.642.250	-	-						
SK.2	Terjaminnya mutu benih Perkebunan yang beredar													

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKSK 2.1	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kelapa sawit yang beredar diwilayah BBPPTP Medan	%	Indikator Baru	80	80	80	80	80					
IKSK 2.2	Persentas Benih Bermutu terhadap total benih aren yang beredar diwilayah BBPPTP Medan	%	Indikator Baru	80	80	80	80	80					
IKSK 2.3	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar diwilayah BBPPTP Medan	%	Indikator Baru	80	80	80	80	80					
IKSK 2.4	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih karet yang beredar diwilayah BBPPTP Medan	%	Indikator Baru	80	80	80	80	80					
IKSK 2.5	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kakao yang beredar diwilayah BBPPTP Medan	%	Indikator Baru	80	80	80	80	80					
IKSK 2.6	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kopi	%	Indikator Baru	80	80	80	80	80					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	yang beredar diwilayah BBPPTP Medan													
IKSK 2.7	- Persentase benih bermutu terhadap total benih pala yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	Indikator Baru	80	80	85	85	90						
IKSK 2.8	- Persentase benih bermutu terhadap total benih cengkeh yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	Indikator Baru	80	80	85	85	90						
IKSK 2.9	- Persentase benih bermutu terhadap total benih kakao yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	Indikator Baru	75	80	80	85	85						
IKSK 2.10	- Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	Indikator Baru	80	80	85	85	85						
IKSK 2.11	- Persentase benih bermutu terhadap total benih sagu yang beredar di	%	Indikator Baru	75	80	80	85	85						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	wilayah kerja BBPPTP Ambon												
IKSK 2.12	- Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa sawit yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85					
IKSK 2.13	- Persentase benih bermutu terhadap total benih tebu yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85					
IKSK 2.14	- Persentase benih bermutu terhadap total benih kopi yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85					
IKSK 2.15	- Persentase benih bermutu terhadap total benih kakao yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85					
IKSK 2.16	- Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar di	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	wilayah kerja BBPPTP Surabaya													
IKSK 2.17	- Persentase benih bermutu terhadap total benih jambu mete yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.18	- Persentase benih bermutu terhadap total benih pala yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.19	- Persentase benih bermutu terhadap total benih lada yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.20	- Persentase benih bermutu terhadap total benih vanili yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.21	- Persentase benih bermutu terhadap total benih teh yang beredar di	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	wilayah kerja BBPPTP Surabaya													
IKSK 2.22	- Persentase benih bermutu terhadap total benih tanaman semusim lainnya yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
5890.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk													
5890.BJA.001	Layanan Pengujian Mutu Benih	Produk (Batang)	12.589.740	12.589.740	5.527.084	12.589.740	12.589.740	12.589.740						
5890.BJA.002	Layanan Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	Produk (Batang)	61.659.600	61.409.600	50.334.580	61.659.600	61.659.600	61.659.600						
5890.RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
5890.RDK.003	Layanan Operasional laboratorium pengujian perbenihan tanaman perkebunan	Unit	-	-	3	4	4	5						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
5889. Hilirisasi Hasil Perkebunan								27.061,69	4.956,00	9.876,38	10.736,38	11.496,38			
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas perkebunan yang dapat dimanfaatkan usaha tani														
IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani perkebunan terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani perkebunan (%)	%	Indikator Baru	82	84	86	88	90							
5889.BMA	Data dan Informasi Publik														
5889.BMA.001	Informasi Pasar Komoditas Perkebunan	Dokumen	-	-	38	38	38	38							
5889.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
5889.QDD.001	Layanan Pengawasan Usaha Perkebunan	Kelompok Masyarakat	15	-	10	16	16	16							
5889.AEA	Koordinasi														

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5889.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Hilirisasi Hasil Perkebunan	Kegiatan	57	17	-	-	-	-					
SK.2	Terwujudnya komoditas perkebunan bermutu bermutu dan aman												
IKK 2.1	Persentase komoditas pertanian perkebunan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian perkebunan	%	Indikator Baru	70	70	75	80	80					
5889.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk												
5889.BIA.001	Pengawasan dan pengendalian Mutu dan keamanan produk perkebunan	Laporan	-	-	-	12	15	17					
5889.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat												
5889.QDD.002													

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan komoditas Perkebunan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	-	-	-	7	7	7					
SK.3	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas perkebunan siap ekspor												
IKK 3.1	Persentase produk komoditas perkebunan siap ekspor terhadap total potensi ekspor perkebunan	%	Indikator Baru	70	73	76	80	83					
5889.AEH	Promosi												
5889.AEH.001	Promosi Produk Hasil Perkebunan	Promosi	15	-	5	5	5	5					
SK.4	Meningkatnya komoditas perkebunan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing												
IKK 4.1	Persentase komoditas perkebunan yang bernilai tambah	%	Indikator Baru	72	74	76	78	80					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan berdaya saing terhadap total komoditas perkebunan unggulan													
5889.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat													
5889.QDD.003	Pembinaan hilirisasi komoditas perkebunan unggulan	Kelompok Masyarakat	-	-	-	5	5	5						
5889.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
5889.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Hilirisasi Hasil Perkebunan	NSPK	8	14	-	14	14	14						
5889.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
5889.ABR.001	Kebijakan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan (Hilirisasi Bidang Perkebunan)	Rekomendasi kebijakan	-	-	12	10	10	10						
5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Kehutanan dan Lingkungan Hidup												
5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	45	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	50	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5889.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		-						-	-	-	-	-
5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5889.PDA	Standarisasi Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5889.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	STDB	42.001	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-